SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020danPasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung (Lebar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor868);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standart Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1687);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11T ahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah KabupatenTulangBawang Barat Tahun 2017 Nomor 11) Sebagaima telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksuddengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan perda.

8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan PlafonAnggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerjadan anggarans atuan kerja Perangkat Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerahuntuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RKPDTahun 2022 merupakanpenjabaran dari RPJMD.
(2) RKPD Tahun 2022sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
    a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
    b. prioritas pembangunan daerah;
    c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
    d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease* 19 di daerah.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada RKP Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusatdan RKPD Provinsi.

(4) Selain memuat RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD tahun 2022 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2022.

Pasal 4

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi danmenjadi dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 5

(1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Kinerja danProgram yang dituangkan dalam RKPD.

(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh RencanaKerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD.

(3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2 )dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dannomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 6

(1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

BAB III: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;

BAB VII : PENUTUP.

(2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala
Bagian Hukum,




Budi Sugiyanto, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19780522 201001 1 009

# DAFTAR ISI


**I. PENDAHULUAN ..... 1**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... 6

1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... 9

1.4. Maksud Dan Tujuan ..... 10

1.5. Sistematika Dokumen ..... 11

**II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... 15**

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ..... 15

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD..... 107

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... 180

**III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH..... 196**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 196

3.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah ..... 208

**IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... 220**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... 222

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan ..... 231

**V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... 241**

**VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... 432**

**VII. PENUTUP ..... 459**

# DAFTAR GAMBAR

**GAMBAR**


1.1. Bagan Alir Penyusunan RKPD Kabupaten / Kota

1.2. Keterkaitan RKPD Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

2.1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.2. Peta Topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.3. Grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi Kab. Tulang Bawang Barat dengan Provinsi Lampung, Tahun 2016–2020

2.4. Perkembangan Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Kab. Tulang Bawang Barat menurut lapangan usaha Tahun 2020

2.5. Perkembangan Indeks Gini (Gini Ratio) Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2016– 2020

2.6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2016 – 2020

2.7. Perkembangan Pengeluaran Per-Kapita Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 – 2020

2.8. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2016 – 2020

3.1. PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016– 2020

# DAFTAR TABEL

**TABEL**


2.1. Pembagian Wilayah AdministrasiKab.Tulang Bawang Barat

2.2. Kawasan Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.3. Kawasan Budidaya Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.4. Peta Wilayah Potensi Bencana ( Rawan Banjir )

2.5. Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin

2.6. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020

2.7. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk
dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020

2.8. Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat
atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha

2.9. Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat
atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha

2.10. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2020

2.11. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020

2.12. Laju Inflasi Provinsi Lampung

2.13. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Tahun 2016 s.d. 2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.14. Capaian Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2016 s.d. 2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.15. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Menurut Kecamatan

2.16. Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.17. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.18. Angka Partisipasi Murni dengan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang BaratTahun 2016 s.d. 2020

2.19. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

2.20. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik
Menurut Kecamatan Tahun 2016 s.d. 2020

2.21. Angka Harapan Hidup Tahun 2016 s.d. 2020

2.22. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Tahun 2016 s.d. 2020

2.23. Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.24. Kasus Kematian BayiTahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.25. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2016s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.26. Kasus Kematian Neonatal Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.27. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2016-2020

2.28. Data Gizi Buruk Tahun 2018 – 2020

2.29. Data Sepuluh Besar Penyakit Tahun 2020

2.30. Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018 – 2020

2.31. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Tahun 2020

2.32. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Tahun 2020

2.33. Capaian Pelaksanaan SPM
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

2.34. Persentase Keadaan Rumah Tempat Tinggal Tahun 2020

2.35. Capaian Pelaksanaan SPM Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2020

2.36. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan
Tingkat Waktu Tanggap Tahun 2016-2020

2.37. Capaian Pelaksanaan SPM
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020

2.38. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016-2020

2.39. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
KabupatenTulang Bawang Barat Tahun 2016-2020

2.40. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2020

2.41. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016 s.d. 2020

2.42. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016 s.d. 2020

2.43. Tingkat Kesempatan KerjaTahun 2016 s.d. 2020

2.44. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016 – 2019

2.45. Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2016 s.d. 2020

2.46. Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2016 s.d. 2020

2.47. Persentase Penduduk Yang Memilik Catatan Sipil
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 – 2020

2.48. Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
Tahun 2016 s.d. 2020 Kab. Tulang Bawang Barat

2.49. Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
Tahun 2016 s.d. 2020 Kab. Tulang Bawang Barat

2.50. Perlengkapan Jalan yang Tersedia Tahun 2015 s.d. 2019

2.51. Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tahun 2016 s.d. 2020 Kab. Tulang Bawang Barat

2.52. Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2016 s.d. 2020 Kab. Tulang Bawang Barat

2.53. Capaian IndikatorPenanaman Modal Tahun 2016 s.d. 2020

2.54. Jumlah Sarana Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020

2.55. Capaian Kinerja UrusanKebudayaan Tahun 2016 s.d. 2020

2.56. Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2016 s.d. 2020

2.57. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016 s.d. 2020

2.58. Potensi Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2019

2.59. Luas Panen Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2019

2.60. Potensi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dan
Tanaman Perkebunan Tahun 2018

2.61. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016 s.d. 2020

2.62. Jumlah Industri Tahun 2020 di Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.63. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016 s.d. 2020

2.64. Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2020

2.65. Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2016 s/d 2020

2.66. Komposisi Realisasi PAD Tahun 2016 – 2020

2.67. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016 s.d. 2020

2.68. Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

2.69. Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.70. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Lampung

2.71. Nilai Tukar Petani Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Lampung

2.72. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Non Pangan per Kapita Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Lampung

2.73. Tingkat Ketergantungan Tahun 2016 s.d. 2020

3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Tahun 2019 - 2020 dan Proyeksi 2021 – 2022

3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020

3.3. Nilai PDRB per Sektor Ekonomi Tahun 2020

3.4. Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan
Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

3.5. Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2019 s.d Tahun 2023

3.6. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2019– 2020 dan Proyeksi 2022 – 2023

4.1. Prioritas Pembangunan Nasional, Pemerintah Propinsi Lampung
dan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

6.1. Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021-2022

6.2. Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Tulang Bawang Barat 2021 - 2022

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAEARAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk disusun setiap tahunnya. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan RKPD dimaksud memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat, merupakan penjabaran tahun ke empat dari RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat periode Tahun 2017-2022, dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 - 2022, maka dalam dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 akan dilakukan penyesuaian dengan perubahan RPJMD tersebut.

Sebagai dokumen perencanaan, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansi, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD;
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

(a) Penyusunan rancangan awal RKPD,
(b) Penyusunan rancangan RKPD,
(c) Pelaksanaan musrenbang RKPD,
(d) Perumusan rancangan akhir RKPD,
(d) Penetapan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD.

Sebelum dirumuskan menjadi rancangan RKPD maka dilakukan langkah evaluasi Rancangan Awal RKPD, dimana tahapan ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan kebijakan provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana, kemudain selanjutnya melakukan Verifikasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja danmemastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.

Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD Kabupaten dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah, yang didalamnya

melakukan pembahasan daftar usulan dari seluruh kecamatan yang masuk, juga merupakan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan dengan SKPD yang bersangkutan khususnya untuk melakukan singkronisasi terhadap usulan-usulan kegiatan setiap kecamatan. Usulan kecamatan akan dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan SKPD yang berwenang untuk mengakomodir usulan tersebut. Pada tahap ini SKPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan SKPD. Program /usulan kegiatan yang telah lolos pada tahap verifikasi akan dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD).

Setelah tahapan Musrenbang sebelum dilakukan perumusan rancangan akhir RKPD maka akan dilakukan proses fasilitasi terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD oleh Gubernur melalui Bapppeda Provinsi. Dari hasil RKPD yang telah dilakukan perbaikan dan singkronisasi dengan hasil fasilitasi maka dirumuskan rancangan akhir RKPD yang akan diajukan ke Kepala Daerah melalui bagian hukum untuk menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Proses perumusan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahap penyusunan Rencana APBD, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi Lampung, RPJMD Tulang Bawang Barat 2017 – 2022, RPJP Kabupaten Tulang Bawang Barat, RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat, RPJMD Provinsi Lampung 2020 – 2025, serta RPJMN 2020 - 2024. Untuk lebih jelas prosesnya dapat dilihat sebagaimana gambar bagan berikut ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota

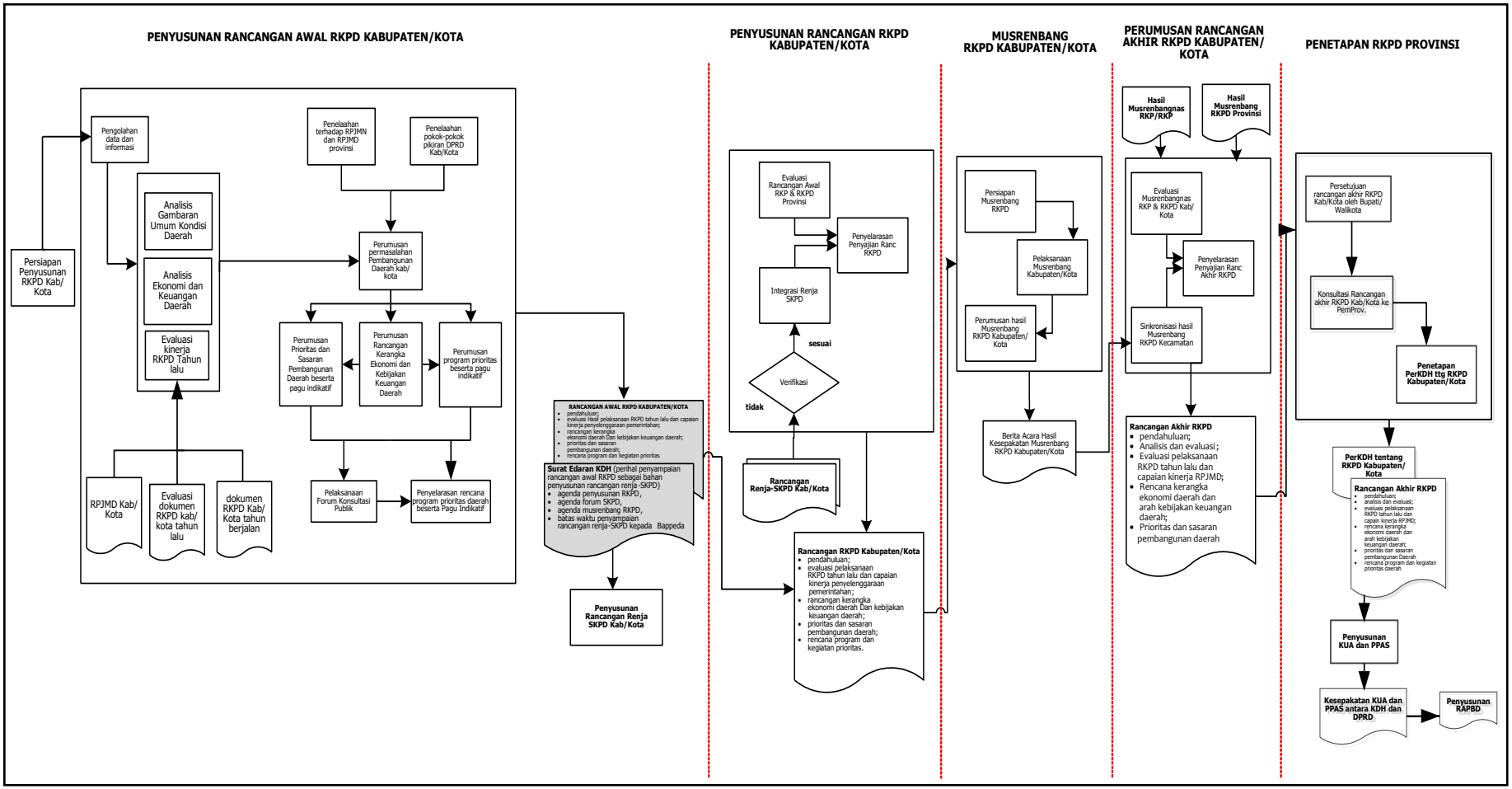

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung ( Lebar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4934 );
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor868);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standart Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1687);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11) Sebagaiman telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 132);

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional danhierarki perencanaan pembangunan daerah dengan kewenangannya, RKPD memiliki hubungan yang saling terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun Provinsi. Di tingkat nasional, dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, dijabarkan menjadi Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan periode 5 (lima) tahun, dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan periode selama 1 (satu) tahun dan dijabarkan kembali menjadi Renja Kementerian/Lembaga.

Pada tingkat Provinsi, dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, dijabarkan menjadi Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun dan dijabarkan kembali menjadi Renja SKPD Provinsi.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota dengan periode 20 (dua puluh) tahun, dijabarkan menjadi Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota dengan periode 5 (lima) tahun dan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten dengan periode 1 (satu) tahun dan dijabarkan kembali menjadi Renja SKPD Kabupaten/Kota.

Hubungan yang saling terikat antar dokumen tersebut dapat dijelaskan seperti gambar di bawah ini:

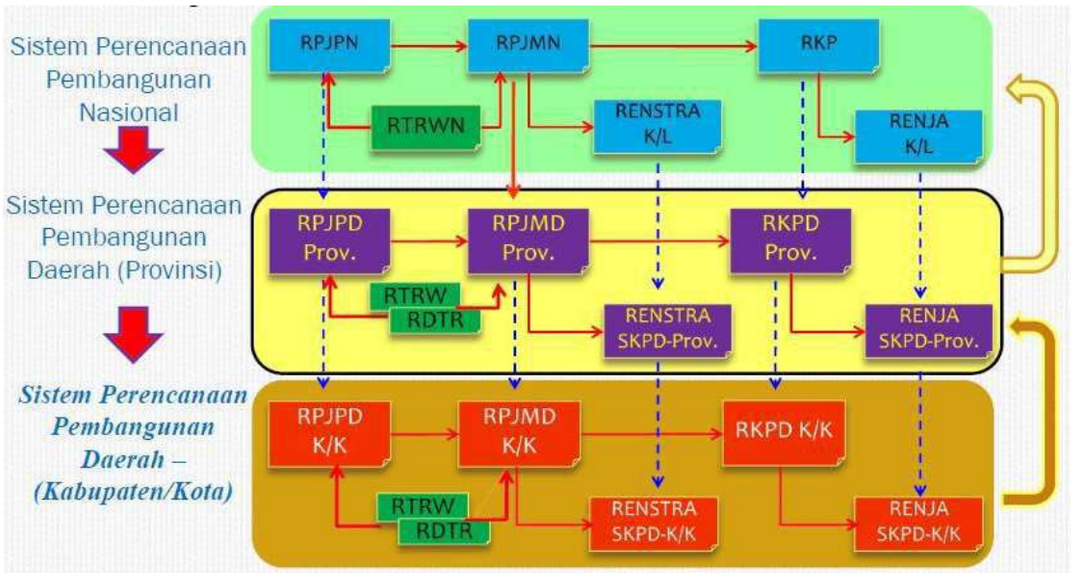


Gambar 1. 2 Keterkaitan RKPD Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.4 Maksud dan Tujuan

### *1.4.1. Maksud*

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk :

a. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah.
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
c. Mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan.
d. Memberikan arah dan menyatukan tujuan kegiatan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan SKPD dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di tahun 2022.

### *1.4.2. Tujuan*

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 disusun dengan tujuan untuk :

a. Sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun KUA dan PPAS, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022.
b. Sebagai pedoman bagi SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyempurnaan Renja-SKPD Tahun 2022.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*), pelaksanaan (*executing*), serta pengendalian dan evaluasi (*monitoring and evaluating*) pembangunan yang terukur.

## 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

***1.1. Latar Belakang***

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahu rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

***1.2. Dasar Hukum Penyusunan***

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang bersekala nasional, maupun lokal.

***1.3. Hubugan Antar Dokumen***

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti : RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten.

### *1.4. Maksud dan Tujuan*

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

### *1.5. Sistematika Dokumen RKPD*

Mengemukakan organisasi penyusun dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### *2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah*

Berisi tentang penjelasan dan penyajian secara logis dasar – dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi :

*2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi*

*2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat*

*2.1.3. Aspek Pelayanan Umum*

*2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah*

### *2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD.*

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu serta realisasi RPJMD.

### *2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah*

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan perioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

*2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah*

2.3.2. *Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.*

**BABIII. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber – sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

**3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan juga kebijakan bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten.

**3.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah**

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

**BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

***4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan***

Menjelaskan tentang hubungan visi / misi dan tujuan / sasaran pembangunan yang diambil dari dokumen RPJPD Kabupaten dan RKPD Provinsi.

***4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan***

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan arah pembangunan pada RPJPD Kabupaten.

**BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPD tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

**BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VII. PENUTUP**

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam pembuatan kebijakan terdapat beberapa tahapan yang menjadi dasar pengambilan keputusan, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya menjadi salah satu poin penting untuk membenahi dan merencanakan kebijakan yang baru. RKPD merupakan kebijakan program kegiatan daerah yang berkelanjutan tiap tahunnya sehingga hasil evaluasi realisasi tahun sebelumnya menjadi landasan yang penting, untuk menyempurnakan kebijakan yang baru.

## 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang digunakan sebagai dasar acuan perencanaan pembangunan daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

***A. Aspek Geografi ( Karakteristik Wilayah )***

***1) Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi***

Secara geografis wilayah Kabupaten Tulang Bawang Baratterletak di antara $104^{0}55^{I}$ - $105^{0}10^{I}$ Bujur Timur dan $04^{0}10^{I}$ - $04^{0}42^{I}$ Lintang Selatan serta di bagian paling utara Provinsi Lampung.

Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 120.175 ha atau 1.201$km^2$ atau sekitar 3,39% dari luas wilayah Provinsi Lampung yang seluas 35.376,50 $km^2$.Secara administratif, Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas 9 (sembilan) wilayah kecamatan dan 100 (Seratus) tiyuh dan 3 (tiga) kelurahan, dengan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Tulang Bawang Tengah (274,93 $Km^2$), sedangkan untuk wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Batu Putih (69,01 $Km^2$).

Kecamatan dengan tiyuh terbanyak adalah Kecamatan adalah Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan berjumlah 19 tiyuh

dan 2 Kelurahan untuk kecamatan paling sedikit jumlah tiyuhnya adalah Kecamatan Pagar Dewa yang memiliki 6 Tiyuh, untuk pembagian wilayah administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat dapatdilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kab.Tulang Bawang Barat

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Tiyuh / Kelurahan | Luas Wilayah Km² |
|---|---|---|---|
| 1. | Tulang Bawang Udik | 13 | 237,50 |
| 2. | Tumijajar | 10 | 133,22 |
| 3. | Tulang Bawang Tengah | 21 | 274,93 |
| 4. | Pagar Dewa | 6 | 99,65 |
| 5. | Lambu Kibang | 10 | 109,82 |
| 6. | Gunung Terang | 10 | 72,9 |
| 7. | Batu Putih | 10 | 69,01 |
| 8. | Gunung Agung | 13 | 127,64 |
| 9. | Way Kenanga | 10 | 76,48 |
| **Jumlah** | | **103** | **1 201,15** |

*Sumber : BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021*

Secara administratif batas daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji dan Provinsi Sumatera Selatan;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara;
c. sebelah timur berbatasan denganKabupaten Tulang Bawang;
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan;

Peta batas administrasi wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat

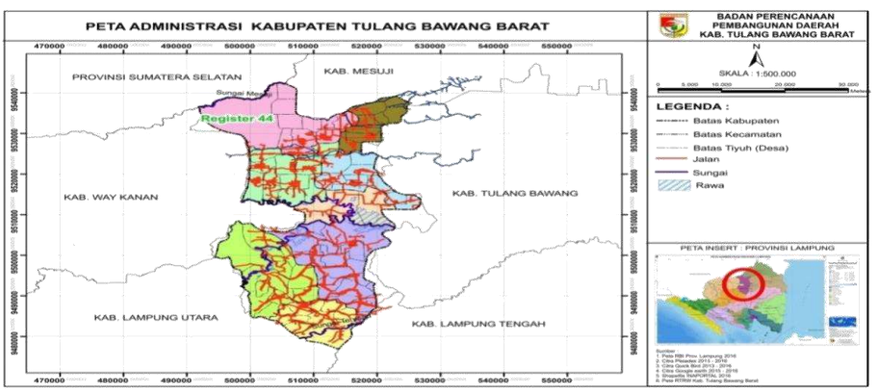

### *2) Topografi*

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah yang datar dengan ketinggian wilayah antara 13 - 56 Mdpl, dan dialiri sebanyak 15 sungai yang panjang keseluruhan mencapai 406,07 Km dengan daerah aliran sepanjang 12,24 $Km^2$. Di bagian Utara Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalir sungai besar yaitu Sungai Muara dua yang merupakan bagian hulu dari Way Mesuji.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat

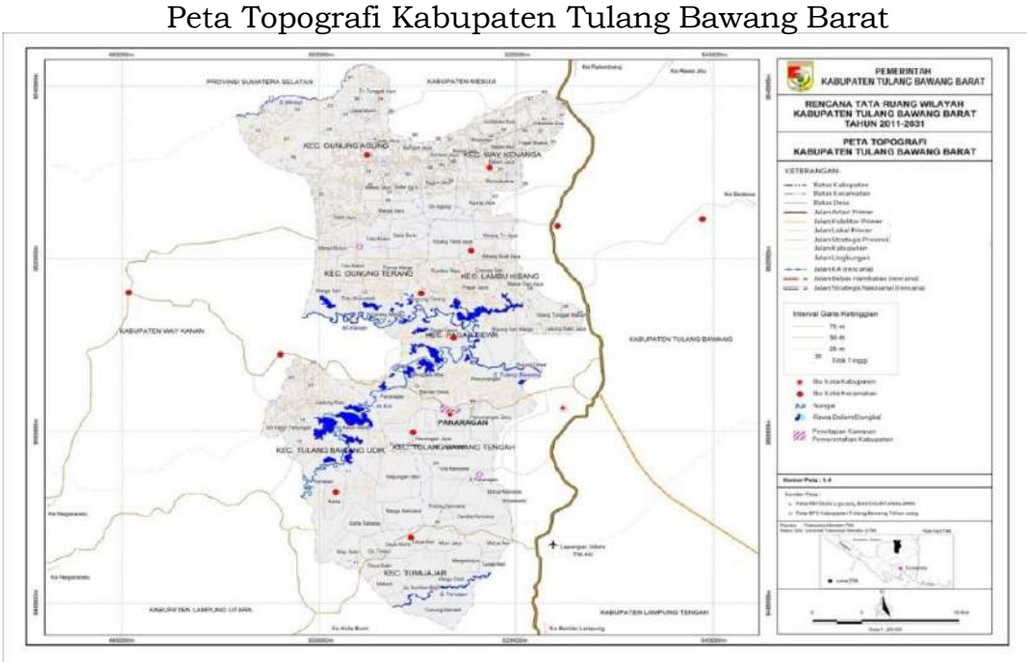


### *3) Geologi*

Keadaan geologi penyusun batuan Kabupaten Tulang Bawang Barat umumnya tersusun atas formasi muara enim yang terdiri dari perselingan batu lempung pasiran dan batu lanau tufaan dengan sisipan batu pasir tufaan dan batu lempung hitam. Selain itu terdapat pula formasi pasir kwarsa yang membentang disepanjang sisi timur dengan bentukan pasir kasar kerikil sampai sedang dan penyusun dominan mineral kwarsa.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Aluvial, Regosol, Podsolik Coklat, Latosol, dan Podsolik Merah Kuning. Dalam sistem klasifikasi Soil Taxonomy, jenis tersebut setara dengan ordo tanah Entisols, Alfisols, Inceptisols, Oxisols, dan Ultisols. Karateristik alluvial memiliki kandungan kerakal, kerikil, lempung dan setempat pecahan

cangkang fosil. Daerah dengan karaketrikstik alluvial umumnya terdapat pada daerah endapan sungai, dengan jenis tanah tropquents, fluvaquents dan tropofluents. Endapan aluvial terdiri atas kerakal, kerikil, batu pasir halus kasar endapan ini umumnya berasal dari endapan Way Tulang Bawang.

***4) Kondisi Hidrologi***

Secara umum, kondisi sistem hidrologi disuatu daerah dapat ditinjau dari kajian Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS merupakan suatubentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi perbukitan/pegunungan dan berfungsi mengumpulkan, menyimpan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur hara ke sungai utama yang akhirnya bermuara pada satu outlet tunggal. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 5 sungai dan 3 (tiga) DAS. Pola aliran drainase menunjukkan arah aliran yang masing-masing menuju ke sungai-sungai utama yang melintasi dan di sekitar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang selanjutnya dapat disebut sebagaisystem hidrologi/drainase wilayah. Sungai utama yang melalui Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Way Kanan, Way Kiri dan Way Tulang Bawang.

Pola aliran sungai di KabupatenTulang Bawang Barat antara lain: (1) Pola aliran dendritik, yaitu pola aliran berbentuk seperti pohon. (2) Pola aliran trellis, yaitu pola aliran pada beberapa sungai yang mendapat tambahan air dari anak sungainya, dimana arah alirannya tegak lurus pada sungai tersebut.

***5) Kondisi Klimatologi***

Berdasarkan klasifikasi iklim Smith dan Ferguson, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat masuk ke dalam tipe iklim B yang dicirikan dengan jumlah bulan basah selama 9 bulan pada bulan September – Mei,curah hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada rata – rata selama 12 bulan (Januari hingga Desember) antara 44 mm (Juli) hingga 549 mm (Maret) dengan suhu rata-rata Kabupaten Tulang Bawang Baratrelatif sama yaitu pada suhu 22,6 –

24,9$^{0}$C dengan kelembaban rata-rata 60 - 82%. (*Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021*)

### *6) Kondisi Penggunaan Lahan*

Penggunaan lahan eksisting di KabupatenTulang Bawang Barat terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

*a) Kawasan Lindung*

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Tabel 2.2. menyajikan informasi kawasan lindung kabupaten tulang bawang barat

Tabel 2.2.
Kawasan Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Jenis Kawasan Lindung | Keterangan |
|---|---|
| Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya | Kawasan sekitar rawa yang terdapat di Kecamatan Tulang bawang Udik dan Kecamatan Pagar Dewa |
| Kawasan perlindungan setempat | Sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di kabupaten, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan |
| Kawasan Cagar Budaya | a. Kawasan Benteng Karang Talang dan Benteng Sabuk yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik<br>b. Kawasan Makam Minak Indah/Tuan Rio Sanak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah<br>c. Kawasan Makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang), Makan Tuan Rio Cikai Dilangek (hulubawang Kerajaan Tulang Bawang), Makam Prajurit Hidayatullah (putra Mahkota), Makam Tubagus Buang, dan Makam Tubagus Minaksaleh di Kecamatan Pagar Dewa |
| Kawasan Rawan Bencana | Kawasan rawan banjir yang terdapat disekitar bantaran sungai Tulang Bawang yang melewati Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang dan Batu Putih, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Gunung Agung |

| Jenis Kawasan Lindung | Lokasi |
|---|---|
| Hutan Produksi | Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang dan Batu Putih |
| Hutan Rakyat | Gunung Agung dan Kecamatan Gunung Terang dan Batu Putih |
| Pertanian | |
| Pertanian pangan | |
| Sawah irigasi | Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| Sawah bukan irigasi | Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| Pertanian Holtikultura | Seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| Perkebunan | Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Way Kenanga, dan Kecamatan Tumijajar |
| Peternakan | Seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| Perikanan | |
| - Perikanan Budidaya | Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang dan Batu Putih, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik |
| - Pengolahan Ikan | Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang dan Batu Putih, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik |
| - Minapolitan | Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang dan Batu Putih, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik |
| Pertambangan | sepanjang Sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri yang tersebar di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Pagar Dewa |
| Perindustrian | |
| Kawasan industri kecil dan rumah tangga | Kecamatan Pagar Dewa dan Tumijajar |
| Kawasan Industri pengolahan hasil tanaman perkebunan | Kawasan perkebunan |
| Pariwisata | |
| Pariwisata alam | Kecamatan Pagar Dewa |
| Pariwisata buatan | Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah |
| Pariwisata budaya | Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, dan Pagar Dewa |
| Permukiman | |
| Permukiman perkotaan | Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah dan Lambu Kibang |
| Permukiman perdesaan | Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Way Kenanga, Gunung Terang dan Batu Putih, Gunung Agung, Pagar Dewa dan Tulang Bawang Udik |
| Kawasan peruntukan lainnya | |

*Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Tulang Bawang Barat 2012-2031*

*b) Kawasan Budi Baya*

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan

dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut menyajikan informasi kawan budidaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 2.3.
Kawasan Budidaya Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Jenis Kawasan Lindung | Lokasi |
|---|---|
| Hutan Produksi | Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang dan Batu Putih |
| Hutan Rakyat | Gunung Agung dan Kecamatan Gunung Terang dan Batu Putih |
| Pertanian | |
| Pertanian pangan | |
| Sawah irigasi | Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| Sawah bukan irigasi | Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| Pertanian Holtikultura | Seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| Perkebunan | Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Way Kenanga, dan Kecamatan Tumijajar |
| Peternakan | Seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| Perikanan | |
| - Perikanan Budidaya | Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang dan Batu Putih, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik |
| - Pengolahan Ikan | Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang dan Batu Putih, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik |
| - Minapolitan | Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang dan Batu Putih, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik |

*Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Tulang Bawang Barat 2012-2031*

*c) Potensi Pengembangan Wilayah*

Berdasarkan data guna lahan yang telah dijelaskan sebelumnya, kawasan budi daya mendominasi lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lahan budidaya yang mendominasi ini menjadi potensi yang luar biasa bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam hal pengelolaan lahan.

Selain dipengaruhi oleh penggunaan lahan, potensi kawasan budidaya juga dipengaruhi oleh topografi dari wilayah itu sendiri. KabupatenTulang Bawang Barat memiliki topografi yang bervariasi yang menyebabkan komoditas unggulan dari masing-masing wilayah juga bervariasi.

Komodita sunggulan yang dimiliki Kabupaten Tulang Bawang Barat terus diupayakan tidak hanya diunggulkan di tingkat kabupaten, tetapi juga menembus tingkat provinsi dan nasional. Komoditas tersebut dapat dikategorikan sebagai

komoditas khas Kabupaten Tulang Bawang Barat, dimana kekhasan tersebut dapat dilihat dari perbedaan karakteristik komoditas yang dimiliki Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan daerah lainnya. Perbedaan karakteristik komoditas ini diantaranya berdasarkan jenis komoditas, besaran produksi serta cita rasa yang dimilikinya.

### *7) Wilayah Rawan Bencana*

Pada beberapa lokasi sering terjadi banjir terutama di sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri, Muara atau pertemuan Sungai Way Kanan dan Way Kiri yang kemudian mengalirke Sungai Way Tulang Bawang berada di Kecamatan Pagar Dewa. Kawasan yang sering mengalami banjir merupakan kawasan lahankering akibat dari meningkatnya volume debit air data dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar. 2.3.
Peta Wilayah Potensi Bencana ( Rawan Banjir )
di KabupatenTulang Bawang Barat

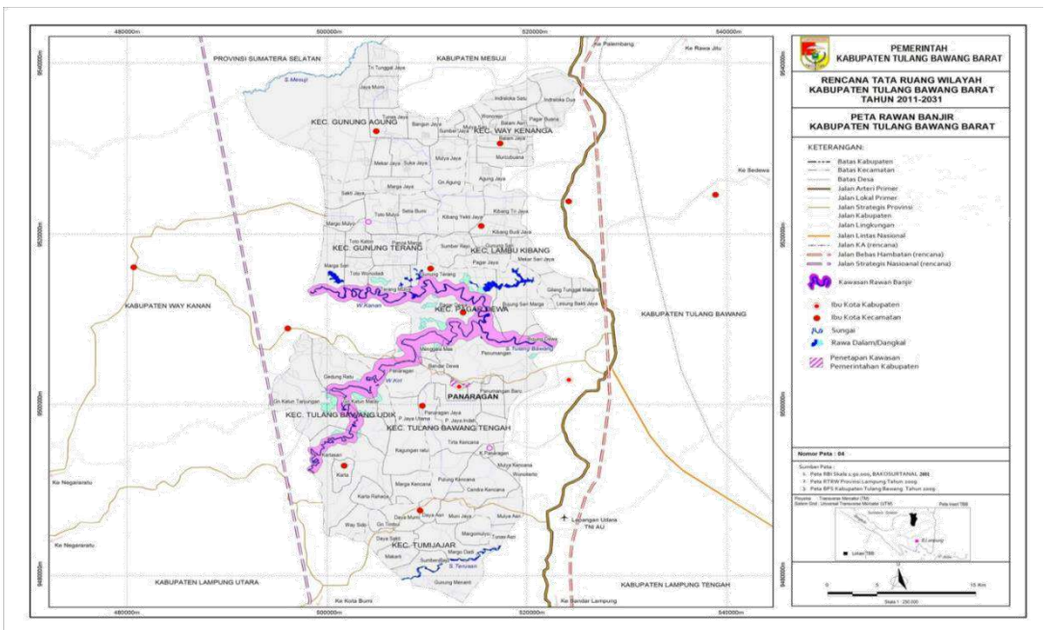


## *B. Aspek Demografi*

### *a) Jumlah Penduduk*

Berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada akhir tahun

2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk dari 266.973 jiwa pada tahun 2016 menjadi 286.162 jiwapada tahun 2020 berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020. Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Tulang Bawang BaratTahun 2016 - 2020, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Tahun | Laki – Laki | | Perempuan | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jiwa | % | Jumlah | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | 2016 | 136.922 | 51,3 | 130.051 | 48,7 | 266.973 |
| 2. | 2017 | 137.998 | 51,3 | 131.164 | 48,7 | 269.162 |
| 3. | 2018 | 138.926 | 51,3 | 132.280 | 48.7 | 271.206 |
| 4. | 2019 | 139.900 | 51,3 | 133.315 | 48,7 | 273.215 |
| 5. | 2020 | 146.355 | 51,1 | 139.807 | 48,8 | 286.162 |

*Sumber :BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2021*

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Baratdari tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung naik. Pertumbuhannya pun relatif signifikan, hal ini disebabkan Sensus Penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat dikarenakan juga adanya fungsi Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai daerah otonomi baru yang sedang berkembang dalam pembangunannya dan sebagai salah satu daerah tujuan ataupun sebagai daerah pengembangan pemukiman/perumahan, sehingga pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih banyak didorong oleh faktor tingkat kelahiran dan perpindahan penduduk.

Tabel 2.5.
Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2016-2020 di Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Jenis Data | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Laju Pertumbuhan Penduduk ( % / Tahun ) | 0,85 | 0,82 | 0,75 | 0,74 | 4,74 |

*Sumber:BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021*

### *b) Distribusi dan Kepadatan Penduduk*

Sedangkan untuk kepadatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan rata – rata jumlah penduduk yang

tinggal pada setiap hektar lahan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kepadatan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2020 sebesar 238 jiwa/Km$^2$.Adapun untuk kepadatan penduduk per-kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2020

| No | Kecamatan | Luas Wilayah | | Jumlah Penduduk | | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Km$^2$ | % | Jumlah | % | Orang/Km$^2$ |
| 1 | Tulang Bawang Udik | 237,50 | 19,77 | 33.231 | 11,61 | 139 |
| 2 | Tumijajar | 133,22 | 11,09 | 44.658 | 16,61 | 335 |
| 3 | Tulang Bawang Tengah | 274,93 | 22,89 | 86.351 | 30,18 | 314 |
| 4 | Pagar Dewa | 99,65 | 8,30 | 6.781 | 2,37 | 68 |
| 5 | Lambu Kibang | 109,82 | 9,14 | 23.278 | 8,13 | 211 |
| 6 | Gunung Terang | 72,9 | 6,07 | 19.472 | 6,80 | 267 |
| 7 | Batu Putih | 69,01 | 5,75 | 16.655 | 5,82 | 241 |
| 8 | Gunung Agung | 127,64 | 10,63 | 33.079 | 11,56 | 259 |
| 9 | Way Kenanga | 76,48 | 6,37 | 22.657 | 7,92 | 296 |
| **Jumlah** | | **1.201,15** | **100** | **286.162** | **100** | **238** |

*Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021*

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat mencakup gambarandan analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum, yang dibagi secaras pesifik kedalam beberapa fokus, yaitu:

A. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.
B. Fokus kesejahteraan sosial.
C. Fokus seni budaya dan olahraga.

**A. Fokus Kesejahteraaan dan Pemerataan Ekonomi**

***1) PertumbuhanEkonomi***

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat selama periode 2016-2019 Mengalami fluktuatif tercatat paling tinggi di tahun 2017 sebesar 55,5. Namun, ditahun 2020 pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang Barat mengalami

penurunan drastis di angka -1,32 sebagai imbas pandemic virus Covid-19, akan tetapi masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan nasional.Grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Provinsi Lampung periode 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini:

Gambar 2.4
Grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi
Kab. Tulang Bawang Barat dengan Provinsi Lampung,
Tahun 2016–2020

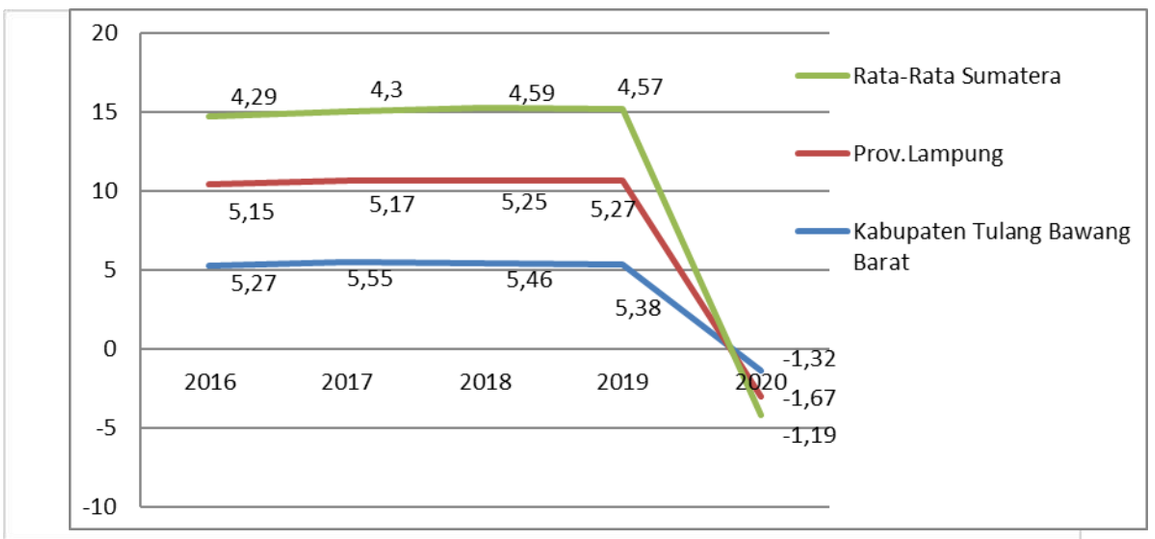


*Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021*

Struktur ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat tercermin dari besarnya kontribusi PDRB masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB. Dengan mengetahui struktur ekonomi wilayah, maka upaya pembangunan ekonomi dapat diarahkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi wilayah. Struktur ekonomi juga dapat dijadikan acuan untuk merencanakan upaya perbaikan struktur, maupun penciptaan struktur ekonomi wilayah yang ideal dalam jangka panjang. Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat atas dasar harga konstan, atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha (Juta Rp), Tahun 2016-2020

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2.438,2 | 2.530,6 | 2.592,1 | 2.624,8 | 2.651,19 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 33,37 | 35,85 | 37,86 | 39,28 | 38,68 |
| 3. Industri Pengolahan | 1.851,34 | 1.987,02 | 2.138,82 | 2.319,93 | 2.168,72 |
| 4. Listrik dan Gas | 2,96 | 3,13 | 3,29 | 3,51 | 3,84 |
| 5. Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 6,37 | 6,61 | 6,80 | 7,14 | 7,51 |
| 6. Konstruksi | 589,34 | 625,86 | 670,13 | 723,0 | 702,01 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran | 782,95 | 820,20 | 861,25 | 912,06 | 905,53 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 55,58 | 59,26 | 62,96 | 67,44 | 65,42 |
| 9. Akomodasi dan Makan Minum | 54,31 | 58,85 | 63,44 | 68,6 | 66,36 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 310,08 | 341,47 | 372,48 | 403,7 | 436,85 |
| 11. Jasa Keuangan | 37,62 | 39,01 | 39,90 | 40,6 | 41,88 |
| 12. Real Estate | 145,70 | 154,20 | 163,56 | 172,99 | 169,99 |
| 13. Jasa Perusahaan | 4,85 | 5,08 | 5,25 | 5,39 | 5,32 |
| 14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jasa Sosial Wajib | 174,60 | 182,14 | 189,93 | 201,2 | 211,14 |
| 15. Jasa Pendidikan | 159,80 | 166,83 | 176,67 | 189,27 | 198,94 |
| 16. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial | 29,40 | 30,79 | 32,86 | 35,21 | 39,06 |
| 17. Jasa Lainnya | 29,20 | 31,12 | 33.77 | 36,48 | 34,81 |
| **PDRB** | **6.705,64** | **7.078,06** | **7451,02** | **7.850,70** | **7.747,24** |

*Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2021*

Tabel 2.8
Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (MiliarRupiah), Tahun 2016-2020

| Lapangan Usaha/Industry | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3.308,2 | 3.540,5 | 3.787,65 | 3.913,84 | 4025,25 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 48,3 | 51,0 | 53,9 | 57,2 | 56,24 |
| 3. Industri Pengolahan | 2.586,5 | 2.854,4 | 3.124,8 | 3.435,01 | 3242,44 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 3,1 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,73 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 10,98 |
| 6. Konstruksi | 759,2 | 836,8 | 911,0 | 1.008,2 | 969,67 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran | 934,9 | 1.018,8 | 1.132,2 | 1.219,1 | 1233,87 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 76,6 | 83,2 | 90,1 | 98,2 | 95,27 |
| 9. Akomodasi dan Makan Minum | 83,1 | 90,1 | 98,9 | 109,0 | 104,95 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 428,6 | 489,2 | 539,8 | 592,4 | 626,53 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 51,4 | 55,6 | 58,8 | 60,6 | 62,36 |
| 12. Real Estate | 168,7 | 193,7 | 209,3 | 232,2 | 224,69 |
| 13. Jasa Perusahaan | 6,5 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 7,74 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 273,7 | 296,8 | 312,2 | 337,9 | 356,47 |
| 15. Jasa Pendidikan | 223,8 | 237,3 | 261,0 | 293,0 | 303,62 |
| 16. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial | 40,3 | 42,5 | 46,7 | 51,1 | 56,89 |
| 17. Jasa Lainnya | 40,0 | 44,5 | 48,5 | 53,8 | 51,17 |
| **PDRB** | **9.042,0** | **9.854,3** | **10.654,95** | **11.455,51** | **11.432,86** |

*Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2021*

Dari Tabel diatas terlihat bahwa selama periode 2016 -2020, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kabupaten Tulang Bawang Barat sangat dominan. Namun demikian, perkembangan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung menurun setiap tahunnya terhadap distribusi PDRB ADHK Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kondisi tersebut dapat disebabkan adanya aktivitas sektoral yang memungkinkan terjadinya pengaruh dan

saling ketergantungan antara satu atau lebih sektor dengan sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan distribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat secara signifikan setiap tahunnya.

Gambar 2.5
Grafik Perkembangan Distribusi Persentase PDRB Seri 2010
Kab. Tulang Bawang Barat menurut lapangan usaha (Juta Rp),
Tahun
2020

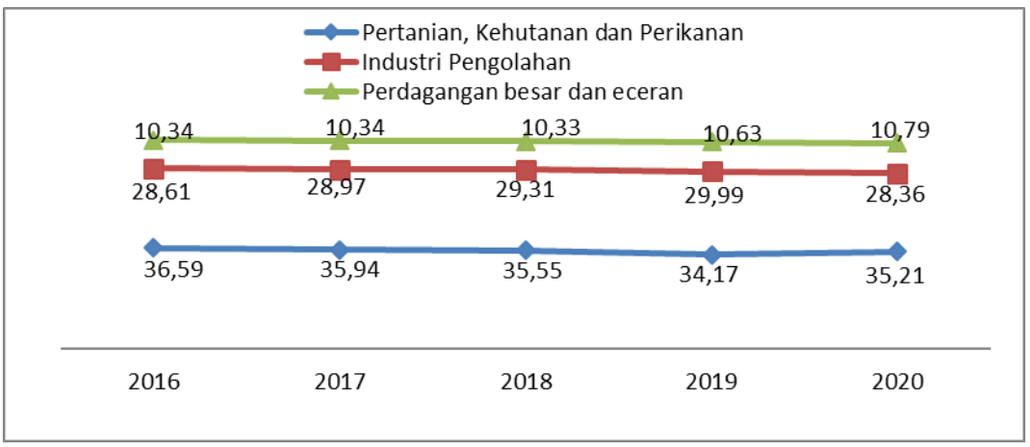


*Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021*

Jika dilihat dari perkembangan distribusi PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha periode tahun 2016-2020 pada grafik di atas, menunjukkan adanya perubahan struktural dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya distribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari 37,38% pada tahun 2016, menurun menjadi 34,20% pada tahun 2020. Di sisi lain, sektor industri pengolahan mengalami peningkatan, dari 28,30% di tahun 2016, meningkat menjadi 29,91% pada tahun 2020.Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perubahan struktural dan sektoral yang tinggi, berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari aktifitas pertanian ke sektor non petanian dan dari sektor industri ke jasa.

Adapun untuk laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan 2010 menurut lapangan usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017 – 2020 disajikan pada tabel dibwah ini :

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kab. Tulang Bawang Barat
Tahun 2017 – 2020

| Lapangan Usaha/Industry | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3,79 | 2,96 | 1,22 | 1,00 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 7,44 | 5,60 | 3,77 | -1,54 |
| 3. Industri Pengolahan | 7,33 | 7,68 | 8,50 | -6,52 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 5,62 | 5,16 | 6,60 | 9,40 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 3,84 | 2,84 | 4,91 | 5,25 |
| 6. Konstruksi | 6,20 | 7,07 | 7,89 | -2,90 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran | 4,76 | 5,00 | 5,91 | -0,72 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 6,64 | 6,24 | 7,11 | -2,99 |
| 9. Akomodasi dan Makan Minum | 8,37 | 7,79 | 8,14 | -3,27 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 10,12 | 9,08 | 8,39 | 8,20 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,71 | 2,26 | 1,89 | 3,04 |
| 12. Real Estate | 5,83 | 6,07 | 6,83 | -1,73 |
| 13. Jasa Perusahaan | 4,80 | 3,21 | 2,77 | -1,43 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 4,32 | 4,28 | 5,95 | 4,94 |
| 15. Jasa Pendidikan | 4,40 | 5,90 | 7,12 | 5,11 |
| 16. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,71 | 6,69 | 7,16 | 10,93 |
| 17. Jasa Lainnya | 6,59 | 8,51 | 8,04 | -4,59 |
| **PDRB** | **5,55** | **5,46** | **5,38** | **-1,32** |

*Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2021*

Selanjutnya untuk perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 – 2020 berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kab. Tulang Bawang Barat
Tahun 2016 – 2020

| PDRB Per Kapita | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| PDRB Per Kapita ADHB *) (dalam Juta Rupiah) | 33,869 | 36,611 | 39,563 | 42,168 | 40,518 |
| PDRB Per Kapita ADHK *) (Dalam Juta Rupiah) | 25,117 | 26,297 | 27,525 | 28,792 | 27 |

*Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021 data diolah *)*

### *2) Laju Inflasi*

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan). Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang.

Laju inflasi Kabupaten Tulang Bawang Barat dikarenakan baru memiliki data dua tahun yaitu tahun 2019-2020 sebagai bahan pertimbangan maka data inflasi untuk tahun tahun sebelumnyamengacu pada nilai inflasi Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung) yang disajikan pada Tabel berikut ini;

Tabel 2.11
Laju Inflasi Provinsi Lampung (Bandar Lampung)
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Inflasi | 2,75* | 3,02* | 2,92* | 2,21** | 2,0* |

*Sumber : Statistik Harga Konsumen Kota Bandar Lampung 2018*

Ket : *) Nilai inflasi Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung)

**) Nilai inflasi Kabupaten Tulang Bawang Barat

### *3) Indeks Gini (Gini Ratio)*

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Perkembangan *Gini Ratio*Kabupaten Tulang Bawang Barat 2016– 2020 disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.6
Garafik Perkembangan Indeks Gini (Gini Ratio)
Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2016– 2020

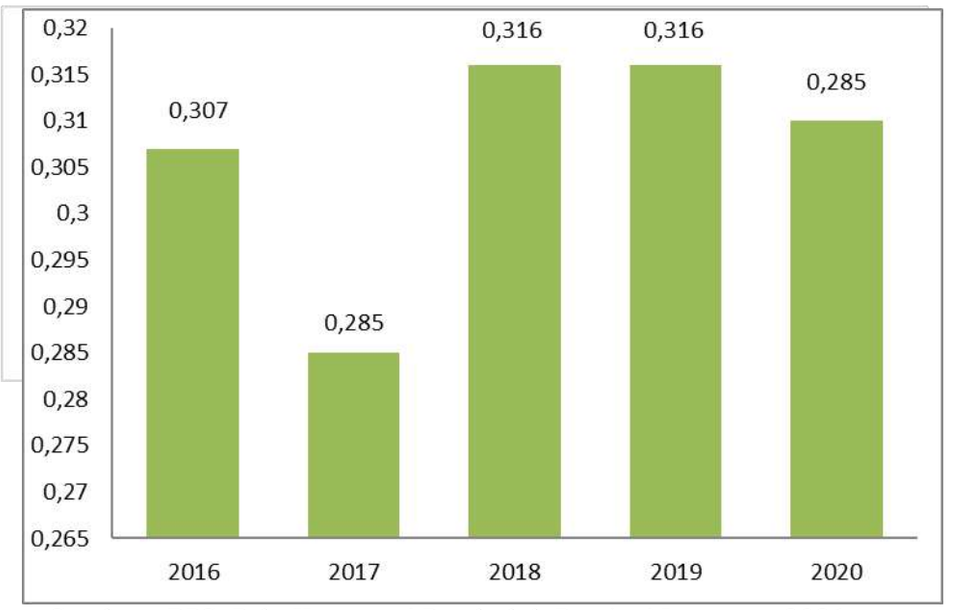


*Sumber : BPS, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2021*
**Tahun 2020 angka gini ratio provinsi lampung*

### *4) Persentase Penduduk diatas Garis kemiskinan*

Jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat diketahui berdasarkan data dari Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota 2016-2020, sehingga dapat dihitung persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tabel 2.12.), yaitu sebesar 92,25% pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 93,56%. Jumlah persentase penduduk diatas garis kemiskinan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 93,56%.

Tabel 2.12
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Tahun 2016 s.d. 2020Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penduduk miskin (%) | 8,23 | 8,40 | 8,11 | 7,75 | 6,44 |
| Penduduk diatas garis kemiskinan (%) | 91,77 | 91,60 | 91,89 | 92,25 | 93,56 |
| Jumlah (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber : BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat 2021*

## B. Fokus Kesejahteraan Sosial

### *1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*

Selain dari perkembangan perekonomian, untuk melihat kondisi pembangunan daerah dapat dianalisis melalui IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/*purchasing power parity*). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia. Dengan demikian untuk menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah haruslah menggunakan indicator yang secara resmi sudah digunakan oleh badan dunia, yaitu *The United Nations Development Programme (UNDP).*

Program pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan danpeningkatan daya beli masyarakat merupakan program utama yang masuk kedalam misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumberdaya manusia merupakan unsur utama dalam perkembangan kemajuan suatu daerah. Untuk memajukan suatu wilayah

memerlukan SDM yang produktif yaitu mampu bekerja dan menghasilkan suatu produk yang unggul. Selain itu mempunyai jiwa keingintahuan yang tinggi dan mampu memecahkan suatu permasalahan dengan baik serta memiliki jiwa inovasi.

Gambar 2.7
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2016 – 2020

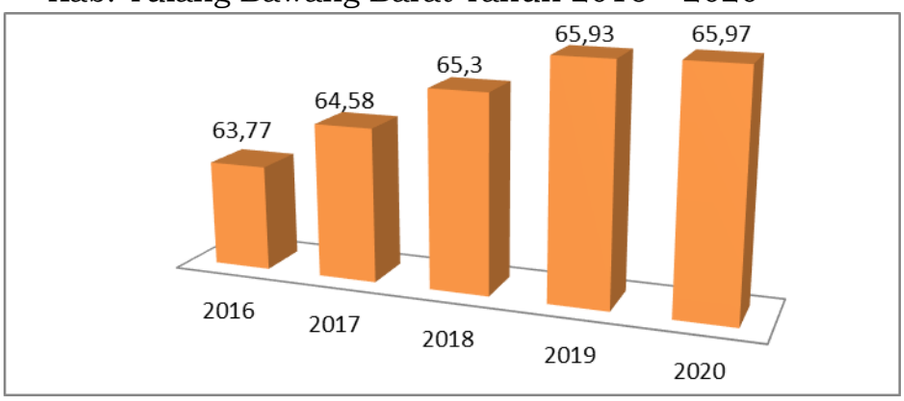


*Sumber : Website BPS Prop. Lampung (data IPM Kabupaten Kota)*

Berdasarkan data IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 – 2020 tersebut diatas yang terus menunjukkan peningkatan sehingga dapat dikatakan untuk pembangunan dari sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan perbaikan.

### *2) Pengeluaran Per-Kapita*

Pengeluaran perkapita merupakan salah satu indikasi dari focus kesejahteraan sosial, dimana jika ada peningkatan pada pengeluaran per-kapita atau belanja rumah tangga maka adaindikasi perekonomian ke arah lebih baik sehingga faktor kesejahteraan juga dapat dikatan meningkat.

Adapun pengeluaran per-kapita Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 – 2020 terus mengalami peningkatan yang signifikan, seperti tergambar pada grafik dibawah ini

Gambar 2.8
Perkembangan Pengeluaran Per-Kapita
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 – 2020

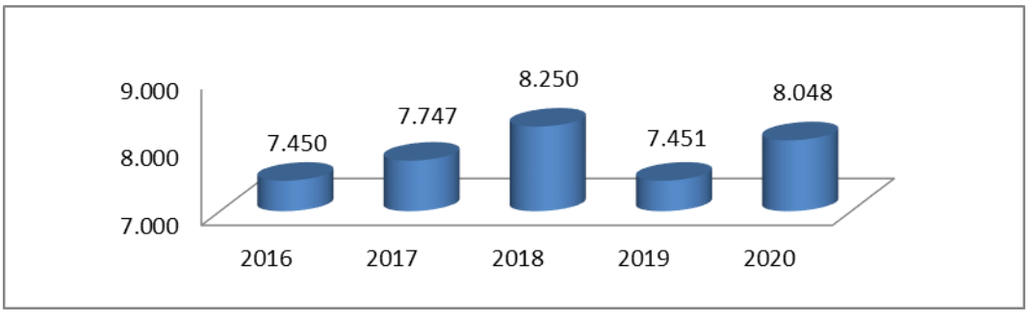


*Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka2021*

### *3) Kemiskinan*

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup Pemerintah menjadi sebuah momok yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap Pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki trend peningkatan pada tahun 2014-2016akan tetapi pada tahun 2017 terjadi tren penurunanangka kemiskinan. Penjabarannya lebih lengkap dengan gambar grafik angka kemiskinan berikut ini :

Gambar 2.9
Perkembangan Angka Kemiskinan
Kabupaten Tulang Bawang Barat 2016 – 2020

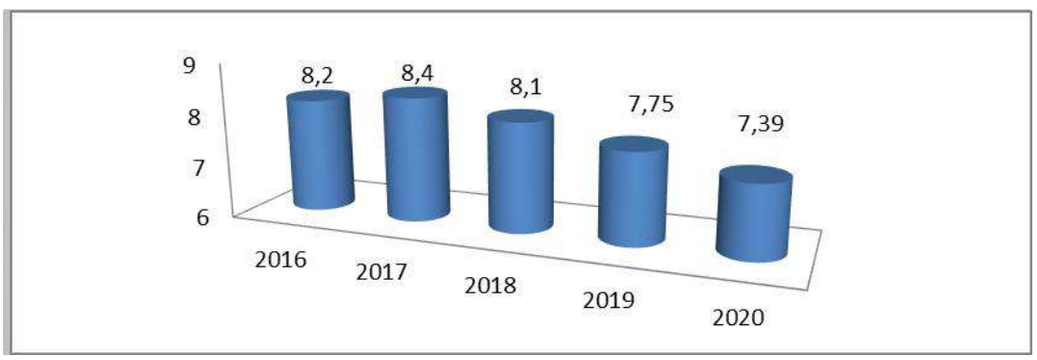


*Sumber : Website BPS Provinsi Lampung 2021 ( Data Per Kabupaten/ Kota)*

## C. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan kebudayaan di KabupatenTulang Bawang Barat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dannilai-nilai

budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arusi nformasi dan pengaruh negatif budayag lobal.

Sementara dewasa ini para pemuda cenderung melupakan nilai-nilai budaya dan falsafah yang menjadi jati diri warga lampung dan khususnya warga Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nilai-nilai budaya dan falsafah lampung ini tidak hanya meliputi pemahaman terhadap nilai budaya dan kesenian lampung serta penggunaan bahasa daerah lampung.

Namun upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong-royong, serta penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian merupakan salah satu nilai yang dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Sementaraitu bidang olahraga dinilai perlu mendapat perhatian khusus juga. Kebiasaan berolahraga akan menghasilkan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, dimana selain menyehatkan tubuh kegiatan berolahraga juga dapat menyegarkan pikiran. Namun kenyataannya, anak muda masa kini cenderung tidak memprioritaskan olahraga.

Halini dapat menimbulkan masalah di masa yang akan datang dimana generasi muda yang akan menjadi ujung tombak pembangunan akan menjadi generasi yang lemah. Oleh karenanya diperlukan upaya lebih dari pemerintah untuk memasyarakatkan kembali kebiasaan olahraga.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Perkembangan seni, budaya dan olahraga Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan pada jumlah grup kesenian menjadi 154 grup kesenian dibandingkan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 142 grup kesenian, namun terjadi penurunan pada jumlah klub olah raga sebanyak 10,89% menjadi 465 klub olah raga tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sejumlah 505 klub

olahraga (Tabel 2.13). Perkembangan seni, budaya dan olahraga menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel berikut;

Tabel 2.13
Capaian Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2016 s.d. 2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Capaian Pembangunan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah grup kesenian | 142 | 150 | 154 | 154 | 154 |
| 2 | Jumlah klub olahraga | 505 | 450 | 465 | 465 | 465 |
| 3 | Jumlah gedung olahraga | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |

*Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga*

Tabel 2.14
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan
Tahun 2017dan 2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Kecamatan | Jumlah grup kesenian | | | | Jumlah klub olahraga | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Tulang Bawang Udik | 6 | 6 | 6 | | 110 | 61 | 61 | 61 |
| 2 | Tumijajar | 17 | 17 | 17 | | 79 | 74 | 74 | 74 |
| 3 | Tulang Bawang Tengah | 55 | 65 | 65 | | TAD | TAD | TAD | TAD |
| 4 | Pagar Dewa | 9 | 9 | 9 | | TAD | TAD | TAD | TAD |
| 5 | Lambu Kibang | 15 | 17 | 17 | | 70 | 69 | 69 | 69 |
| 6 | Gunung Terang | 17 | 17 | 17 | | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 7 | Gunung Agung | 13 | 13 | 13 | | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 8 | Way Kenanga | 10 | 10 | 10 | | 61 | 61 | 61 | 61 |
| | **Jumlah** | **142** | **154** | **154** | | **505** | **450** | **450** | **450** |

*Keterangan : TAD = Tidak Ada Data*
*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga*

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dapat dilihat dari empat fokus layanan yaitu layanan urusan pemerintahan wajib (wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar), urusan pemerintahan pilihan dan layanan urusan pemerintahan penunjang.

## A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan pengertian urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warganegara.

### 1) Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

#### *a. Bidang Pendidikan*

Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya untuk pembangunan daerah. Pelayanan pendidikan pemerintah daerah dinilai melalui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai. Indikator keberhasilan pelayanan pemerintah di bidang pendidikan meliputi

*a) Angka Rata – Rata Lama Sekolah*

Angka rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Angka rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Lamanya sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut.

Angka rata-rata lama sekolah meningkat tiap tahunnya. Bila angka ini dikonversikan kejenjang pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwasannya secara rata–rata penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah lulus sekolah dasar. Data angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.15

Tabel 2.15
Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Kriteria | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rata-Rata Lama Sekolah | 6,83 | 7,09 | 7,10 | 7,8 | 8,05 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2021*

*b) Angka Partisipasi Kasar*

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Pada tahun 2016 APK Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tingkat SD adalah 90,97 dan mengalami angka yang fluktuatif pada tiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 adalah sebesar 109,95. Sedangkan untuk APK tingkat SMP Kabupaten Tulang Bawang Barat, juga mengalami angka yang naik dan turun, akan tetapi untuk angka APK SMA Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu padatahun 2016 sebesar 65,68 mengalami penurunan tahun 2020 menjadi 64,37 atau turun sebesar 1,2%.Untuk data lengkap Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tulang Bawang Barat 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.16

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | 90,97 | 90,62 | 91,33 | 111,93 | 109,95 |
| 2 | SMP | 82,98 | 83,14 | 82,03 | 101,60 | 101,74 |
| 3 | SMA | 65,68 | 71,91 | 74,95 | 63,92 | 64,37 |

*Sumber : Angka APK / APM KEMENDIKBUD Kab. Tulang Bawang Barat 2021*

*c) Angka Partisipasi Murni*

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah

di setiap jenjang pendidikan. Secara lengkap angka APM di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.17

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Murni dengan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang BaratTahun 2016 s.d. 2020

| Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD / MI | 79,47 | 79,68 | 80,96 | 99,37 | 99,02 |
| SMP | 63,07 | 61,98 | 61,82 | 84,84 | 84,71 |
| SMA | 51,29 | 52,94 | 56,36 | 53,40 | 53,86 |
| **APM** | **64,61** | **64,87** | **66,38** | **79,20** | **79,22** |

*Sumber : Angka APK / APM KEMENDIKBUD Kab. Tulang Bawang Barat 2021*

*d) Rasio Guru dan Murid*

Rasio murid terhadap guru adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara jumlah murid dengan jumlah guru. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin kecil rasio guru terhadap murid menunjukkan hasil yang semakin baik. Rincian informasi rasio guru terhadap murid disajikan dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Kecamatan | SD | | | SMP | | | Pendidikan Dasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jmlh Guru | Jmlh Murid | *Rasio | Jmlh Guru | Jmlh Murid | *Rasio | *Rasio |
| Tulang Bawang Udik | 237 | 3290 | 13,88 | 101 | 1234 | 12,22 | 13,38 |
| Tumijajar | 333 | 4751 | 14,27 | 157 | 2226 | 14,18 | 14,23 |
| Tulang Bawang Tengah | 565 | 9434 | 16,70 | 240 | 3691 | 15,38 | 16,19 |
| Pagar Dewa | 50 | 438 | 8,76 | 23 | 139 | 6,04 | 7,9 |
| Lambu Kibang | 151 | 2730 | 18,08 | 66 | 1024 | 15,52 | 17,29 |
| Gunung Terang | 129 | 1975 | 15,31 | 54 | 657 | 12,17 | 14,38 |
| Batu Putih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Agung | 221 | 4047 | 18,31 | 81 | 1414 | 17,46 | 18,08 |
| Way Kenanga | 153 | 2516 | 16,44 | 50 | 711 | 14,22 | 15,89 |
| **Jumlah** | **1678** | **29181** | **17,39** | **665** | **11096** | **16,69** | **17,19** |

*Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021*

** Angka diolah*

### *b. Kesehatan*

Analisis kinerja atas fokus layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidangkesehatan dilakukan terhadap indikator ketersediaan puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu, rasio tenaga medis per satuan penduduk, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian neonatal.

*a) Ketersediaan Puskesmas, Polikilinik dan Puskesmas Pembantu*

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes, 2011).

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.Datayang menunjukkan ketersediaan jumlah puskesmas, pustu, dan poliklinik disajikan dalam Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik
Menurut Kecamatan Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JumlahPuskesmas | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | JumlahPoliklinik | 11 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | JumlahPustu | 42 | 42 | 53 | 55 | 57 |
| | **Jumlah1-3** | **63** | **63** | **78** | **83** | **87** |
| 4 | JumlahPenduduk | 266.973 | 269.162 | 271.205 | 273.215 | 286.162 |
| | **Rasio** | **1:4237** | **1:4140** | **1:3476** | **1:3291** | **1:3289** |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2020*

Data menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang berupa puskesmas dan pustu di Kabupaten Tulang Bawang Barat

sudah memadai dimana disetiap kecamatan telah memiliki ketersediaan pusat kesehatan masyarakat demi melayani kebutuhan masyarakat.

*b) Angka Harapan Hidup*

Angka Harapan Hidup(AHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan polamortalitas menurut umur. AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 sebesar 69,21, mengalami kenaikan menjadi 69,88 tahun pada tahun 2020. Angka tersebut masih dibawah rata-rata provinsi yaitu 70,51 dan nasional 71,20. Tetapi AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat tiap tahunnya, berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan kesehatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin tinggi. Berikut adalah data Angka Harapan Hidupdi Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.20

Tabel 2.20
Angka Harapan Hidup Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Kriteria | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka Harapan Hidup | 69,21 | 69.35 | 69,56 | 69,88 | 70,65 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2020*

*c) Rasio Ketersediaan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk*

Rasio tenaga medis persatuan penduduk adalah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Jumlah tenaga medis pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 1,5% dari tahun 2019. Diharapkan jumlah tenaga medis untuk dapat diperbanyak agar pelayanan terhadap pasien dapat lebih memuaskan.Jumlah tenaga medis di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2016 hingga 2020 disajikan pada Tabel 2.21

Tabel 2.21
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penduduk | 266.973 | 266.973 | 271.205 | 273.215 | 286.162 |
| 2 | Jumlah Tenaga Medis | 338 | 326 | 271 | 420 | 445 |
| | **Rasio** | **1:818** | **1:993** | **1:645** | **1:651** | **1:643** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat2020*

*d) Angka Kematian Ibu*

Angka Kematian Ibu (AKI) menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. AKI merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Penyebab kematian ibu menurut Data Direktorat Kesehatan Ibu yaitu pendarahan, hipertensi, infeksi, partus lama, abortus, dan lain-lain.

Faktor menunjang pencegahan AKI yaitu pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, serta akses terhadap keluarga berencana. Jumlah kasus kematian ibu maternal di Kabupaten Tulang Bawang Barat terbesar pada tahun 2016 dan kembali menurun pada tahun selanjutnya, berikut datanya disajikan dalam Tabel 2.22 sebagai berikut:

Tabel 2.22
Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2016s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kasus | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020*

*e) Angka Kematian Bayi*

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal pada saat bayi yang dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan indikator pembangunan lainnya. AKB tidak hanya menggambarkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, tetapi juga terkait langsung dengan angka rata-rata harapan hidup penduduk di suatu daerah. AKB mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir (disajikan dalam Tabel 2.23, hal ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pembangunan di sektor kesehatan.

Tabel 2.23
Kasus Kematian Bayi Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kasus | 20 | 19 | 15 | 11 | 11 |
| AKB per 1000 KH | 5,3 | 3,7 | 2,9 | 2,2 | 22 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020*

*f) Angka Kelangsungan Hidup Bayi*

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia1tahun per 1000 kelahiran.AKHB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Dilihat dari persentase AKHB dari tahun 2016 meningkat hingga tahun 2020. Peningkatan AKHB mencerminkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin baik. Secara lebih rinci informasi jumlah kelahiran, AKB,dan AKHB disajikan dalam Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2016s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kelahiran Hidup | 5.056 | 5.055 | 5.100 | 4.734 | 4.734 |
| 2 | Jumlah Kelahiran Mati | 20 | 19 | 15 | 11 | 11 |
| 3 | Angka Kematian Bayi (%) | 5,3 | 3,7 | 2,9 | 2,2 | 2,2 |
| 4 | Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%) | 99,60 | 99,62 | 99,70 | 99,76 | 99,76 |

*Sumber : Dinas KesehatanKabupaten Tulang Bawang Barat 2020*

*g) Angka Kematian Neonatal*

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah penduduk yang meninggal satu bulan pertama setelah kelahiran (28 hari) yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Kasus kematian neonatal di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami penurunan dalam waktu lima tahun terakhir (disajikan dalam Tabel 2.25). Jumlah kasus terendah pada tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berhasil dalam menekan Angka Kematian Neonatal.

Tabel 2.25
Kasus Kematian Neonatal Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kasus | 20 | 35 | 13 | 2 | 15 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat 2020*

*h) Rasio Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) Per Satu Balita*

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2016 sebanyak 188 posyandu dan jumlah balita sebanyak 26.682 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1:141. Halini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Tulang Bawang Barat melayani 146 balita. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel berikut;

Tabel 2.26
Jumlah Posyandu dan Balita
KabupatenTulang Bawang BaratTahun2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlahposyandu | 196 | 191 | 201 | 201 | 197 |
| 2 | JumlahBalita | 24.85 | 48.478 | 26.685 | 32.130 | 27.722 |
| 3 | Rasio | 1:126 | 1:153 | 1:32 | 1:160 | 1:140 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat 2020*

*i) Persentase Balita Gizi Buruk*

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Secara sederhana, status gizi balita dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Angka gizi buruk di Kabupaten Tulang Bawang Baratterjadi secara fluktuatif, untuk data gizi buruk Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.27
Data Gizi Buruk Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2018 – 2020

| No | Uraian | Tahun | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Kasus Gizi Buruk | 0 | 3 | 5 | |
| 2 | Jumlah Balita | 26.685 | 32.130 | 27.722 | |
| 3 | Persentase Gizi Buruk | 0 | 0,009 | 0,002 | |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat 2020*

j) *Angka Kesakitan / Morbiditas*

Morbiditas adalah angka kesakitan, dapat berupa insiden maupun angka prevalensi dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap drajat kesehatan. Morbiditas penduduk pada suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya pola penyakit dan penyakit potensial yang berkembang, baik penyakit menular maupun tidak menular.

Sepuluh besar penyakit di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 tersajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.28
Data Sepuluh Besar Penyakit di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

| No | Jenis Penyakit | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Dispepsia | 11.760 | 19,2 |
| 2 | Nasopharyngitis | 9.780 | 15,9 |
| 3 | Hipertensi | 9.036 | 14,7 |
| 4 | Febris | 7.944 | 12,9 |
| 5 | Myalgia | 6.120 | 10,0 |
| 6 | Ispa | 4.092 | 6,7 |
| 7 | Gastritis | 3.876 | 6,3 |
| 8 | Diare | 3.114 | 5,1 |
| 9 | Rhemathoit Atritis | 3.000 | 4,9 |
| 10 | Influenza | 2.664 | 4,3 |
| **JUMLAH** | | **61.386** | **100** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat 2020*

*k) Hasil Capaian SPM Kesehatan*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

➢Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

➢Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

➢Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

➢Pelayanan Kesehatan Balita

➢Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

➢Pelaynan Kesehatan pada Usia Produktif

➢Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

➢Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi

➢Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

➢Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

➢Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB

➢Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Adapun untuk capaian pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.29
Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2020

| No | Jenis Pelayanan | Indikator | Kondisi Capaian SPM (Tahun) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
| | | | Sasaran | Realisasi | % | Sasaran | Realisasi | % | Sasaran | Realisasi | % |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah semua ibu hamil diwilayah kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 5.728 | 5.400 | 94,27 | 5.770 | 5.370 | 93,07 | 5.806 | 4.458 | 77 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah ibu yang bersalin yang ada diwilayah kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun | 5.468 | 5.113 | 93,51 | 5.508 | 5.113 | 93,19 | 5.542 | 4.415 | 80 |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun | 5.207 | 5.087 | 97,70 | 5.246 | 5.113 | 97,85 | 5.542 | 4.398 | 79 |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah balita 0 – 59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 31.894 | 17.203 | 53,98 | 32.130 | 24.559 | 76,44 | 32.329 | 15.266 | 47 |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada diwilayah kerja kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran | 56.911 | 56.911 | 100,00 | 57.413 | NA | NA | 57.769 | 4.826 | 8 |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan scrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 71.273 | 31.867 | 44,71 | 46.447 | 15.327 | 33,00 | 184.820 | 52.204 | 28 |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada diwilayah kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan | 11.611 | NA | NA | 11.699 | 11.037 | 96,65 | 18.513 | 16.052 | 87 |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Estimasi penderita hypertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama | 41.263 | 6.171 | 14,96 | 38.906 | 13.364 | 34,35 | 39.708 | 9.631 | 24 |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM) | Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama | 12.064 | 1.631 | 9,64 | 2.395 | 2.391 | 99.83 | 1.895 | 2.584 | 136 |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada diwilayah kerja kabupaten dalam krun waktu satu tahun yang sama | 274 | 274 | 100,00 | 464 | 28 | 57 ,76 | 467 | 352 | 75 |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) | Jumlah orang dengan TB yang ada diwilayah pada kurun waktu satu tahun yang sama | 1.059 | 465 | 43,91 | 8.520 | 2.029 | 23,81 | 4.606 | 2.347 | 51 |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV | Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada disuatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahu yang sama | 460 | 6 | 1,30 | 1.720 | 909 | 62,85 | 3.860 | 2.429 | 63 |

### *c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Kondirsi Kabupaten Tulang Bawang Baratterkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat di lihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

*a) Jaringan Jalan dan Jembatan*

Data panjang jalan dan jumlah jembatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Barat Nomor :B/176/II.03/HK/Tubaba/2018 untuk panjang jalan adalah sepanjang 1779,861 Km dan jembatan berjumlah 234 unit jembatan, dengan rincian kondisi jalan adalah keadaan baik 732,560 Km, keadaan sedang 364,273 Km, keadaan rusak162,433 Km, dan 520,602 Km rusak berat, sedangkan untuk keadaan jembatan dengan kondisi baik 139 unit, kondisi sedang 49 unit, rusak ringan 24 unit, dan rusak berat 22 unit.

Panjang dan kondisi jalan serta jembatan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan kondisi jalan dan jembatan per-Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.30 dan 2.31.

Tabel 2.30
Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan
Tahun 2020Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Kecamatan | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulang Bawang Udik | 70,597 | 138,124 | 48,91 | 22,614 | 280,246 |
| Tumijajar | 49,897 | 157,919 | 19,28 | 3,4 | 230,497 |
| Tulang Bawang Tengah | 134,765 | 232,928 | 33,01 | 7,78 | 408,486 |
| Pagar Dewa | 14,15 | 40,387 | 15,8 | 14,8 | 85,137 |
| Lambu Kibang | 18,26 | 118,828 | 19,3 | 10,3 | 166,428 |
| Gunung Terang | 20,039 | 73,534 | 7,335 | 12,13 | 113,038 |
| Batu Putih | 3,2 | 87,131 | 20,640 | 6,550 | 117,521 |
| Gunung Agung | 48,195 | 141,372 | 29,89 | 23,3 | 242.757 |
| Way Kenanga | 43,005 | 81,691 | 10,36 | 0,7 | 135,756 |
| **Jumlah** | **732,560** | **364,273** | **162,433** | **520,602** | **1779,861** |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang2020*

Tabel 2.31
Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan
Tahun 2020Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Kecamatan | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulang Bawang Udik | 15 | 4 | 6 | 0 | 25 |
| Tumijajar | 18 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| Tulang Bawang Tengah | 20 | 2 | 6 | 4 | 32 |
| Pagar Dewa | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Lambu Kibang | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 |
| Gunung Terang | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Batu Putih | 15 | 4 | 6 | 0 | 25 |
| Gunung Agung | 34 | 8 | 8 | 17 | 67 |
| Way Kenanga | 16 | 3 | 4 | 3 | 26 |
| **Jumlah** | **138** | **27** | **43** | **31** | **234** |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020*

*b) Ruang Terbuka Hijau*

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempattumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau memiliki peran yang cukup penting bagi ehidupan salah satunya adalah sebagai paru – paru kawasan. Banyak peranan yang dapat diberikan oleh ketersediaan dan keberadaan RTH, di wilayah perkotaan yang memberikan peranan RTH bagi pengembangan kota adalah sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyanggah kehidupan, sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan, sebagai sarana rekreasi, sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, peraiaran maupun udara, sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan, sebagai tempat perlindungan plasma nutfah, sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro, dan sebagai pengatur tata air.

Berdasarkan hasil survei Updating Pendataan RTH Perkotaandi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang pelaksanaannya di laksanakan pada wilayah yang di rencanakanakan menjadi pengembangan perkotaan Kabupaten

Tulang Bawang Barat (KP-4) yaitu kawasan perkotaan yang meliputi seluruh Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tumijajar dan Kecamatan Tulang Bawang Udik (*buku Updating Data Ruang Terbuka Hijau /RTH Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018)*, didapati persentase kebutuhan akan ketersediaan ruang terbuka hijau Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut :

1. Luas Kawasan perkotaan pada KP-4 seluas 64.565 ha
2. Berdasarkan luas kawasan tersebut maka kebutuhan minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni sebesar 19.370 Ha
3. Berdasarkan updating data RTH yang telah dilakukan luasan RTH saat ini adalah 8.969 RTH
4. Dari luas minimal 30% Kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah, saat ini luasan RTH yang tersedia adalah 13,89 %.

Secaraumum berdasarkan data diatas Kabupaten Tulang Bawang Barat masih kekurangan RTH sebesar 86,11%.

*c) Setandar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standart Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka untuk SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi :

a. Sumber Daya Air
b. Jalan
c. Air Minum
d. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
e. Pembangunan Saluran Drianase/Gorong-gorong
f. Pentaan Bangunan dan Lingkungan
g. Jasa Konstruksi
h. Penataan Ruang.

Adapun untuk capaian pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.32
Capaian Pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

| No | Jenis Pelayanan Dasar | | | Standar Pelayan Minimal | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator | | Rencana (%) | Realisasi (%) |
| 1 | Sumber Daya Air | Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat | | 1 | Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari | 80 | 75 |
| | | | | 2 | Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada | 80 | 78 |
| 2 | Jalan | Jaringan | Aksesibilitas | 3 | Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik | 65 | 59 |
| | | Ruas | Kondisi Jalan | 4 | Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi | 60 | 7 |
| 3 | air minum | Cluster Pelayanan | | 5 | Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari | | 2.3 |
| 4 | Pengendalaian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar | | 6 | Rumah tangga pengguna air bersih | 73 | 19,3 |
| | | | | 7 | Rumah tangga bersanitasi | 21 | 7,28 |
| 5 | Pembangunan saluran drainase/gorong -gorong | Drainase | | 8 | Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun | 50 | 50 |
| 6 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Izin mendirikan bangunan | | 9 | Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten/Kota | 100 | 100 |
| | | Harga standar bangunan gedung negara (HSBGN) | | 10 | Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/Kota | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jasa Kontruksi | Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) | 11 | Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap | 100 | 100 |
| | | Sistem Informasi Jasa Kontruksi | 12 | Tersedianya Sistem Informasi jasa kontruksi setiap tahun | 100 | 100 |
| 8 | Pentaan Ruang | Informasi Penataan Ruang | 13 | Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui penta analog dan peta digital | 20 | 0 |
| | | | | | 20 | 0 |
| | | Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR | 14 | Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang | 20 | 0,99 |
| | | Izin Pemanfaatan Ruang | 15 | Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Perturan Daerah tentag RTR wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya | 100 | 100 |
| | | Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang | 16 | Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja | 100 | 100 |
| | | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik | 17 | Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | 25 | 25 |

### *d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan,sertaperanserta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat.

Tingkat hunian di Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini secara umum tingkat kepadatannya masih sangat normal terkecuali di daerah kota-kota kecamatan tertentu yang memang menjadi pusat pertumbuhan dan pelayanan, yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar. Sedangkan kawasan pemukiman pedesaan tersebar di 6 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, terutama wilayah dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, antara lain Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Tulang Bawang Udik.

Secara umum kondisi pengembangan permukiman di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat ini menunjukkan perkembangan secara blok (pola grid). Kawasan perumahan cenderung berkelompok pada kawasan yang mempunyai kemudahan akses dan juga dekat dengan sarana dan prasarana yang ada.

Jika dilihat dari kondisi bangunan rumah di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *Rumah permanen*

Merupakan rumah yang menggunakan batu dan beton sebagai bahan konstruksinya. Bangunan rumah permanen banyaknya terdapat pada wilayah perumahan/pemukiman perkotaan, pusat pendidikan, perkantoran dan perumahan yang berada di sepanjang jalan utama.

2. *Rumah Sederhana*

Rumah yang sebagian menggunakan konstruksi batu, sementara sisanya menggunakan kayu atau bahan sejenisnya serta bangunan yang sifatnya sementara dan bahan bangunannya menggunakan kayu atau bambu.

Data tentang persentase keadaan perumahan (pemukiman) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020 sebagai berikut berikut disajikan dalam Tabel 2.33

Tabel 2.33
Persentase Keadaan Rumah Tempat Tinggal
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

| **No** | **Persentase Keadaan Rumah Tangga** | **Tahun 2020** |
|---|---|---|
| 1. | Setatus kepemilikan bangunan | |
| | a. Milik sendiri | 94,59 |
| | b. Kontrak / sewa | 0,38 |
| | c. Bebas Sewa | 4,70 |
| | d. Dinas / Lainnya | 0,33 |
| | | |
| 2 | Luas lantai tempat tinggal ($M^2$) | |
| | a. < 19 | 0,00 |
| | b. 20-40 | 9,53 |
| | c. 50-99 | 70,81 |
| | d. 100-149 | 16,74 |
| | e. 150+ | 2,92 |
| | | |
| 3 | Bahan bangunan utama atap rumah terluas | |
| | a. Beton | 0,00 |
| | b. Genteng | 94,36 |
| | c. Asbes | 0,25 |
| | d. Seng | 5,39 |
| | e. Bambu, Kayu / Sirap | 0,00 |
| | f. Jerami, Ijuk, Daun, dan Rumbia | 0,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Bahan dinding rumah terluas | |
| | a. Tembok | 83,85 |
| | b. Plesteran anyaman bambu / kawat | 0,00 |
| | c. Kayu / Batang Kayu | 12,97 |
| | d. Bambu / Anyaman Bambu | 3,18 |
| | e. Lainnya | 00,00 |
| | | |
| 5 | Banguan utama lantai rumah terluas | |
| | a. Mamer / Granit | 1,07 |
| | b. Kramik | 27,86 |
| | c. Parket / Vinil / Permadani / Ubin / Tegel / Teraso | 2,35 |
| | d. Kayu / Papan | 1,25 |
| | e. Semen / Bata Merah | 65,73 |
| | f. Bambu | 0,00 |
| | g. Tanah | 1,73 |
| | | |
| 6 | Fasilitas buang air besar | |
| | a. Milik Sediri | 90,52 |
| | b. Bersama | 9,46 |
| | c. Komunal / Umum | 0,02 |
| | d. Ada tidak digunakan | 0,00 |
| | e. Tidak ada / Tidak punya | 0,00 |
| | | |
| 7 | Sumber air utama untuk minum | |
| | a. Air kemasan / Isi ulang | 11,15 |
| | b. Ledeng | 0,00 |
| | c. Sumur bor / pompa | 10,73 |
| | d. Sumur terlindung | 21,71 |
| | e. Sumur tak terlindung | 54,00 |
| | f. Mata air | 2,41 |
| | g. Air permukaan | 0,00 |
| | h. Air hujan | 0,00 |
| | i. Lainnya | 0,00 |

*Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2019*

Tabel 2.34
Capaian Pelaksanaan SPM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target % | Realisasi % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan dan rehabilitsi rumah layak huni bagi masyarakat berpengahasilan rendah | Penyediaan dan rehabilitsi rumah layak huni bagi masyarakat berpengahasilan rendah | 100 | 100 |
| 2 | Penataan dan Pengendalian, kepemilikan, penggunanan dan pemanfaatan tanah | Prosentase Penataan dan Pengendalian, kepemilikan, penggunanan dan pemanfaatan tanah | 100 | 100 |
| 3 | Perencanaan pembebasan, pengadaan tanah lokasi perkantoran dan jalan (PSU) | Prosentase Perencanaan pembebasan, pengadaan tanah lokasi perkantoran dan jalan (PSU) | 100 | 100 |
| 4 | Tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkantoran | Prosentase Tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkantoran | 100 | 100 |
| 5 | Tingkat Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RDTR | Prosentase Tingkat Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RDTR | 100 | 100 |

### *e. Ketentraman, Ketertipan Umum dan Perlindungan Masyarakat*

*a) Cakupan Pelayanan Bencana KebakaranKabupatendan Tingkat Waktu Tanggap (ResponseTime) Penanggulangan Kebakaran.*

Jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak mengalami penambahan armada mobil pemadam yakni berjumlah sebanyak 2 (dua) unit.

Adapun luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah120.175 Ha, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah penduduk sebesar 273.215 jiwa. Jumlah peristiwa kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2015– 2019 sebanyak 30 kali.Dari data ini dapat diketahui rasio mobil pemadam kebakaran terhadap luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat,yaitu1:600,58Ini artinya bahwa satu mobil pemadam kebakaran harus melayani area Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 600,58 Ha.

Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu cakupan pelayanan bencana kebakaran, tingkat waktu tanggap (responsetimerate), persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta jumlah Pos Damkar saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di

Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 60% dengan tingkat waktu tanggap (response time) penanggulangan kebakaran rata-rata di atas 30 menit sedangkan standar yang ditetapkan dalam Permendagri No.69 Tahun 2012 adalah 15 menit. Tingkat cakupan pelayanan kebakaran didefinisikan sebagai presentase kondisi eksisting wilayah manajemen kebakaran (WMK) atau Pos Damkar dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terlayani.

Nilai presentase cakupan pelayanan kebakaran akan tetap/konstan apabila jumlah WMK atau Pos Damkar berjumlah tetap/tidakada penambahan (standar persentase cakupan pelayanan kebakaran yang ditetapkan dalam Permendagri No.69 Tahun 2012 adalah mencapai 75%). Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap diKabupaten Tulang Bawang Barat selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran & Tingkat Waktu Tanggap
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Mobill Pemadam Kebakaran(unit) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | JumlahPenduduk (jiwa) | 264.712 | 269.149 | 273.724 | 273.724 | 286.162 |
| 3. | LuasWilayah Kab. Tubaba (ha) | 1.201,15 $Km^2$ | 1.201,15 $Km^2$ | 1.201,15 $Km^2$ | 1.201,15 $Km^2$ | 1.201,15 $Km^2$ |
| 4. | Jumlah Kejadian Kebakaran(kali) | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5. | RasioMobil Pemadam Kebakaran thd LuasWil Kab Tubaba | 1:1.201,15 $Km^2$ | 1:600,58 $Km^2$ | 1:600,58 $Km^2$ | 1:600,58 $Km^2$ | 1:600,58$Km^2$ |
| 6. | PersentaseTingkat CakupanPelayanan Kebakarandi KabupatenTubaba | 50% | 50% | 60% | 60% | 50% |
| 7. | Jumlah Kasus KebakarandiWMK yangTertanganidalam WaktuTanggap | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 8. | Jumlah Kasus Kebakarandalam JangkaWaktu WMK | 20 – 30 menit | 20 – 30 menit | 20 – 30 menit | 20-30 menit | 20-30 menit |
| 9. | TingkatWaktuTanggap (ResponTimeRate) daerahlayananWMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) | 30 – 60 menit | 30 – 60 menit | 30 – 60 menit | 30-60 menit | 30-60 menit |
| 10. | JumlahLuasWilayah ManajemenKebakaran ($Km^2$) | 20 – 40 $Km^2$ | 20 – 40 $Km^2$ | 20 – 40 $Km^2$ | 20 – 40 $Km^2$ | 20 – 40 $Km^2$ |
| 11. | JumlahLuasPotensi Kebakaran($Km^2$) | 101,97 $Km^2$ | 101,97 $Km^2$ | 101,97 $Km^2$ | 101,97 $Km^2$ | 101,97 $Km^2$ |
| 12. | CakupanPelayanan BencanaKebakaran(%) | 10 – 20 % | 10 – 20 % | 10 – 20 % | 10 – 20 % | 10 – 20 % |

*Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran 2020*

*b) Penaggulangan bencana*

Salah satu peran penting pemerintah daerah adalah tanggap akan terjadinya bencana dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah dalam hal mengatisipasi jika terjadi bencana, tahap pencegahan dan mitigasi-strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan terhadadan korban jiwa dapat diminimalkan, tanggap darurat terhadap bencana dan melakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampunagn, makanan dan tenaga medis bagi korban bencana, melakukan rehabilitasi dan rekontruksi upaya perbaikan fisik dan non fisik mengembalikan harkat hidup korban bencana.

Tabel 2.36
Capaian Pelaksanaan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target % | Capaian % |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana** | | | |
| | a. Penyusunan kajian resiko rawan bencana | Terlaksananya Penyusunan kajian resiko rawan bencana | 100 | 0 |
| | b. Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di daerah rawan bencana banjir dan putting beliung | Terlaksananya sosialisasi tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Tulang Bawang Barat | 100 | 100 |
| | c. Peta Rawan Bencana | Tersedianya Peta Rawan Bencana | 100 | 50 |
| | d. Pemantauan dan penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam | Terlaksananya Pemantauan dan penyebaran Informasi Potensi Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat | 100 | 50 |
| **2** | **Pelayanan Pencegahdan Kesiapsiagaan Terhadap** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Bencana** | | | |
| | a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | Terlaksannya Penyusunn Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) | 100 | 0 |
| | b. Pembatan Recana Kontijensi | Terlaksananya Pembatan Recana Kontijensi | 100 | 0 |
| | c. Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi Bencana | Terlaksananya Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi Bencana | 100 | 0 |
| | d. Gladi Kesiapsiagaan Bencana | Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Bencana | 100 | 0 |
| **3** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | | |
| | a. Responn cepat darurat bencana | Julah dookumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana | 100 | 90 |
| | b. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana | Jumlah pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana | 100 | 80 |
| | c. Respon cepat darurat kejadian luar biasa penyakit/ wabah zoonosis prioritas | Jumlah penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis | 100 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | prioritas) | | |
| | d. Penyediaan Logistik | Jumlah korban bencana yang membutuhkan dan mendapatkan bantuan logistik | 100 | 70 |
| **4** | **Pelayanan PascaBencana** | | | |
| | a. Peningkatan peranan pemuda dalam bidang rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah pasca bencana | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peranan Pemuda dalam rekontruksi dan rehabilitasi di wilayah pasca bencana | 100 | 0 |
| | b. Sosialisasi Konseling Pasca Bencana | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Konseling Pasca Bencana | 100 | 0 |
| | c. Pemantauan dan Monitoring di Wilayah Pasca Bencana | Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Monitoring di wilayah pasca bencana | 100 | 0 |

*c) Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk.*

Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah disajikan dalam Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlahpolisipamongpraja | 200 | 237 | 241 | 241 | 241 |
| Jumlahpenduduk | 262.316 | 264.712 | 269.149 | 273.724 | 286.162 |
| Rasiojumlahpolisipamongpraja per10.000 penduduk | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |

*Sumber:Dinas Satuan Polisi Pamong Praja*

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraanpemerintahan daerah.

*d) Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk.*

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas disajikan dalam Tabel 2.38.

Tabel 2.38
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
KabupatenTulang Bawang Barat Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| JumlahLinmas | 1005 | 1005 | 1500 | 1500 | 1.430 |
| Jumlah Penduduk | 262.316 | 264.712 | 269.149 | 273.724 | 286.162 |
| Rasio Jumlah Linmasper10.000 penduduk | 38 | 38 | 55 | 55 | 50 |

*Sumber :Dinas Satuan Polisi Pamong Praja*

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan stratasosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

***e. Sosial***

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial diamanatkan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.39.

Tabel 2.39
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tahun 2020Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Jenis Masalah | 2020 |
|---|---|---|
| 1 | Anak Balita Terlantar | 10 |
| 2 | Anak Terlantar | 30 |
| 3 | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | - |
| 4 | Anak Jalanan | - |
| 5 | Anak Dengan Kedisabilitas | 5 |
| 6 | Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan | 3 |
| 7 | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 7 |
| 8 | Lanjut Usia Terlantar | 0 |
| 9 | Penyandang Disabilitas | 391 |
| 10 | Tuna Sosial | 1.126 |
| 11 | Gelandangan | - |
| 12 | Pengemis | - |
| 13 | Pemulung | - |
| 14 | Kelompok Minoritas | - |
| 15 | Ex Napi | - |
| 16 | Penyandang HIV | - |
| 17 | Korban NAPZA | - |
| 18 | Korban Traficking | - |
| 19 | Korban Tindak Kekerasan | 27 |
| 20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | - |
| 21 | Korban Bencana Alam | - |
| 22 | Korban Bencana Sosial | - |
| 23 | Wanita Rawan Sosial | 585 |
| 24 | Keluarga Fakir Miskin | 16.313 |
| 25 | Keluarga Masalah Sosial Psikologis | - |
| 26 | Komunitas Adat Terkecil (KAT) | - |

*Sumber : Dinas Sosial Tulang Bawang Barat*

Berbagai PMKS diatas menjadi prioritas yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat karena merupakan urusan wajib layanan dasar. Selama ini program yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah Program Pemberdayaan Sosial, Program Pemeliharaan anak terlantar, Program Pendataan PMKS dan Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial.

**2) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

***a. Tenaga Kerja***

Pembangunan bidang ketenaga kerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya

pencarikerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Pelaksanaan urusan ketenaga kerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan.

Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah.

*a) Tingkat Partisipasi AngkatanKerja.*

Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, dipakai suatu ukuran yang dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK dari tahun 2016 tahun 2020 mengalami nilai yang fluktuatif, hal ini berarti terjadi adanya kenaikan dan penurunan jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja. PerkembanganTPAK tahun2016-2020dapat dilihat dalamTabel 2.40.

Tabel 2.40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 67,95 | 72,71 | 70,21 | 70,60 | 71,58 |

*Sumber: IndikatorTenaga KerjaProvinsiLampung2020*

*b) Pengangguran.*

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan saat ini sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka juga yang pernah bekerja atau sekarang sedang di bebas tugaskan sehingga menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (di sajikan dalam Tabel 2.41.). Tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, tetapi data tahun 2016-2020 menunjukkan tingkat pengangguran yang menurun.

Tabel 2.41
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2,60 | 1,72 | 2,95 | 3,57 | 3,46 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang Barat 2021*

*c) Tingkat Kesempatan Kerja*

Tingkat kesempatan kerja adalah peluang seseorang penduduk usia kerjayang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Tingkat kesempatan kerja dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif (disajikan dalam Tabel 2.42.

Tabel 2.42
Tingkat Kesempatan KerjaTahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bekerja | 126.712 | 126.712 | 139.818 | 135.084 | 143.745 |
| Angkatan Kerja | 130.111 | 130.111 | 142.264 | 139.166 | 148.901 |
| **Tingkat Kesempatan Kerja** | **97,39%** | **97,39%** | **98,28%** | **97,06%** | **96,54%** |

*Sumber : Badan Pusat StatistikKab. Tulang Bawang Barat 2021*

***b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, pemerintah berupaya untuk memberikan hak yang sama dalam pembangunan melalui upaya kesetaraan gender. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Permendagri15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 mengamanatkan pengintegrasian isu gender dalam berbagai bidang pembangunan, pembentukan kelembagaan PUG serta dukungan pembiayaan pembangunan yang *responsive gender*. Selain itu juga telah diamanatkan Standar Pelayanan Minimal urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.

Pelaksanaan SPM tersebut merupakan konsekuensi pelaksanaan program pembangunan yang responsif gender dan responsifanak.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan *responsive* gender dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Development Index* (GDI) dengan nilai minimal 40 dan terbesar 80. IPG merupakan IPM yang terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Berdasarkan BPS (2016) pada tahun 2013 IPG Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 64,23 dan di peringkat 275 se Kabupaten/Kota di Indonesia. Adapun IPG Kabupaten Tulang Bawang Barat lima tahun terakhir ( 2016 – 2019) dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.43
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 - 2019

| Uraian | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| IPG Kab. Tubaba | 67,93 | NA | 88,53 | 88,45 |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

### *c. Pangan*

MenurutUndang-UndangNomor18Tahun2012tentangPangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan. Pencapaian kinerja urusan pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2015 -2019 disajikan pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Ketersediaan pangan utama | Kg/kap | 240 | 142 | 137 | 136 | 130 |
| 2 | Ketersediaan Energi Per Kapita | Kkal/kap / hari | 2650 | 2550 | 2350 | 2350 | 7244 |
| 3 | Ketersediaan Protein Per Kapita | gram/kap / hari | 46,6 | 47 | 48 | 49 | 67,34 |
| 4 | Skor PPH | - | 82,6 | 84 | 81 | 82 | 86,2 |
| 5 | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 |
| 6 | Penanganan Daerah Rawan Pangan | % | 80 | 90 | 85 | 80 | 80 |

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2020*

### *d. Pertanahan*

Sesuai pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang pertanahan sebagai berikut:

a) Pemberian izin lokasi yang meliputi: (a) izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal; (b) perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku; dan (c) penanaman modal adalah yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas penanaman asing maupun penanaman modal dalamnegeri.
b) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanahbaik dengan cara memberikan ganti kerugian maupun tanpa memberikan ganti kerugian (secarasukarela).
c) Penyelesaian sengketa tanah garapan. Sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanahgarapan.
d) Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk

pembangunan. Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yangterkaitdengantanahakibatpelepasanataupenyerahanhak atas tanah, dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut atau bentuklain.

e) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* yang menjadi tanah *objeklandreform*.

f) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang dikuasai hak milik, hak guna usaha, hakgunabangunan,danhakpakaitanah,hakpengelolaan,atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yangberlaku.

g) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang di kuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan,atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undan g an yang berlaku atau sebagainya ,yangbelum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yangberlaku.

h) Pemberian izin membuka tanah. Diartikan sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

i) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini diartikan merupakan pelaksanaan dan penetapan letak tepat rencana kegiatan yang telah jelas anggarannya baik dari pemerintah, swasta maupun perorangan yang akan

membutuhkan tanah di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan data informasi pola penatagunaan tanah yang sesuai dengan kawasan rencana tata ruang wilayah. Adapun pola penatagunaan tanah adalah informasi mengenai keadaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kawasan yang disiapkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pembangunan dan penataan pertanahan menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikembangkan menjadi lebih baik karena mempunyai peranan sosial dan ekonomi yang penting. Seiring dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas.Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut yaitu melalui pengadaanlahan.

***e. Lingkungan Hidup***

Kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat dari kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam pengelolaan sampah kegiatan yang dilakukan terdiri atas pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan daur ulang. Indikator kinerja yang ditunjukkan dalam penanganan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat ditunjukkan melalui pengelolaan persampahan. Sampai pada tahun 2014, kinerja penanganan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat baru mencapai 10,39%(Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat, 2014).

Berdasarkan analisa daya dukung wilayah, konsep untuk penanganan persampahan adalah pengelolaan sampah secara terpadu, meliputi: (1) Proyeksi kebutuhan prasarana persampahan; (2) *Sanitary landfill* dan *open dumping* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA); (3) *Zero waste* atau program 3R, selengkapnya diuraikan pada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penanganan sampah di KabupatenTulang Bawang Barat dilakukan oleh dinas lingkungan hidup. Pengelolaan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) harus yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

KabupatenTulang Bawang Barat memiliki satu buah TPSA yaitu TPSA Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terletak di Tiyuh Penumangan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Jumlah total timbunan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 4.475 $m^3$ per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 979 $m^3$ per hari (21,87%). Dengan demikian masih tersisa sampah sebanyak 78,13% yang belum terangkut/terbuang ke TPSA. Berikut adalah kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2020 disajikan dalam Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Kinerja Pengelolaan Persampahan
Tahun 2016 s.d. 2020 Kab. Tulang Bawang Barat

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase penanganan sampah (%) | 32,87 | 33,51 | 44,14 | 44,17 | 36,97 |
| 2 | Rasio Ketersediaan Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk (%) | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang Barat*

Berdasarkan analisa daya dukung wilayah, rekomendasi yang dapat diusulkan untuk penanganan limbah dan sanitasi di

Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dengan konsep Sanitasi berbasis Masyarakat (Sanimas) yaitu pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Sanimas dapat meliputi kegiatan:(1) Sosialisasi kegiatan dan persiapan-persiapan; (2) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan;(3)Pemantauan dan evaluasi di tingkat masyarakat; (4)Pemanfaatan/penggunaan; (5) Pemeliharaan fasilitas sanitasi; dan (6) Instansi Pengolah Air Limbah (IPAL).

### *f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Pelayanan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.

Berkut data tentang kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017 - 2018 yaitu pada tabel dibawah ini 2.46.

Tabel 2.46
Persentase Penduduk Yang Memilik Catatan Sipil
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 – 2020

| ***No*** | ***Penduduk Memiliki Catatan Sipil*** | ***2019 (%)*** | ***2020 (%)*** |
|---|---|---|---|
| 1 | Penduduk usia 0 – 18 dengan kepemilikan akte kelahiran | | |
| | a. Ya, Dapat ditunjukkan | 87,8 | 95 |
| | b. Ya, Tidak dapat ditunjukkan | 0 | 0 |
| | c. Tidak Memiliki | 12,2 | 5 |
| | d. Tidak Tahu | 0,00 | 0 |
| | | | |
| 2 | Penduduk 5 tahun keatas yang mempunyai nomor induk kependudukan berdasarkan jenis kelamin | | |
| | a. Laki – laki | 99,9 | 99,9 |
| | b. Perempuan | 98,29 | 98,9 |
| | | | |
| 3 | Penduduk yang mempunyai KTP dan KK | | |
| | a. KTP | 60,00 | 77,31 |
| | b. KK | 50,86 | 100 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulang Bawang Barat 2020*

### *g. Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh ( Desa )*

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usahanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian. Hasil kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan tiyuh tahun 2016-2020disajikan pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
Tahun 2016 s.d. 2020Kab. Tulang Bawang Barat

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase PKK aktif(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok) | 93 | 103 | 4391 | 103 | 103 |
| 3. | Persentase Posyanduaktif (%) | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Persentase LPMBerprestasi (%) | 25 | 25 | 35 | 20 | 40 |
| 5. | Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) | 3,5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6. | Persentase Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%) | 89 | 90 | 93 | 95 | 100 |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh*
*Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020*

### *h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

Kinerja pengendalian penduduk dan keluarga bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat diukur dengan beberapa indikator pencapaian kinerja dengan ketersediaan data yang dapat dilihat dari tahun 2017 hingga 2020, disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016 s.d. 2020Kab. Tulang Bawang Barat

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Rata-rata jumlah anak per Keluarga | 1,69 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,6 |
| 2. | Rasio akseptor KB | 69,29 | 68,29 | 73,8 | 76,08 | 52,7 |
| 3. | Cakupan peserta KB aktif(%) | 64,02 | 71,20 | 73,87 | 76,08 | 52,7 |
| 4. | Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinyadibawah usia 20 tahun (%) | 15,38 | 15,34 | 15,33 | 15,23 | 15,1 |
| 5. | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidakterpenuhi (*UnmetNeed*) (%) | 17,49 | 18,33 | 15,72 | 13,56 | 8,83 |
| 6. | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun | 76,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,8 |
| 7. | Angka pemakaiankontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan caramodern) (%) | 60,02 | 67,98 | 73,87 | 76,08 | 77,33 |
| 8. | Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%) | 56,09 | 54,99 | 55,01 | 55,4 | 56,8 |
| 9. | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yangber-KB (%) | 70,69 | 70,81 | 80,89 | 86,5 | 86,8 |
| 10. | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) | 83,09 | 83,12 | 83,3 | 83,6 | 84,0 |

*Sumber : Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2020*

### *i. Perhubungan*

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat

dukungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan kota dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Hal ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah. Fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016-2020 disajkan dalam Tabel 2.49.

Tabel 2.49
Perlengkapan Jalan yang Tersedia Tahun 2015 s.d. 2019
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No. | Uraian | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rambu | Unit | 258 | 130 | TAD | TAD | TAD |
| 2 | *Guardrail* | Unit | TAD | 6.400 M | TAD | TAD | TAD |
| 3 | Penerangan JalanUmum | Unit | TAD | 305 | TAD | TAD | TAD |

*Keterangan : TAD = Tidak Ada Data*
*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2020*

### *j. Komunikasi dan Informasi*

Pembangunan dalam urusan komunikasi dan informasi selama tahun 2011 hingga 2017 terus mengalami kemajuan yang ditandai oleh indikator pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, serta kerjasama informasi dan media massa. Jumlah jaringan komunikasi hingga tahun 2016 terus meningkat baik dalam jumlah maupun kualitas pelayanannya. Sebagian besar masyarakat telah menikmati layanan jaringan komunikasi baik milik pemerintah maupun milik swasta.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memiliki *website* dengan alamat http://www.Tulangbawangbaratkab.go.id/. *Website* tersebut dapat dikunjungi oleh semua pihak. Adapun Web tersebut berisi tentang profil Pemerintah Kabupaten Tulang

Bawang Barat, Visi dan Misi, Sejarah, Arah Kebijakan, Isu Strategis, Peta Wilayah, Lambang Wilayah, Demografis dan Geografis, Keperintahan, Pendidikan, Pariwisata, Pelayanan Umum, Badan Kepegawaian Daerah, LPSE, OPD, Info Lelang, dll. Namun demikian informasi pada beberapa hal pokok tidak tersedia data secara lengkap dan *update* sehingga belum mencerminkan gambaran umum wilayah secara lengkap dan terkini sedangkan belum semua organisasi perangkat daerah memiliki *website*.

Surat kabar yang terbit di Tulang Bawang Barat yaitu Lampung Post, Radar, dan Tribun serta beberapa surat kabar nasional. Mayoritas masyarakat telah memiliki radio dan TV. Jumlah wartawan media cetak dan elektronik cukup tersedia dan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan institusi media cetak dan elektronik cukup baik, terbukti dengan seringnya liputan berita yang dilakukan oleh media cetak dan elektronik terutama tentang program pembangunan di wilayah tersebut. Indikator kinerja pengembangan komunikasi Informasi dan media massa tahun 2016- 2020 disajikan pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tahun 2016 s.d. 2020 Kab. Tulang Bawang Barat

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah jaringan komunikasi | Jaringan | 60 | 62 | 77 | 82 | 86 |
| 2 | Website milik pemerintahdaerah | Web | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Rasio wartel/warnet | % | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | Jumlah surat kabar nasional/lokal | Buah | 111 | 130 | 225 | 60 | 232 |
| 5 | Jumlah penyiaran radio/TV | Siaran | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | Jumlah Wartawan Media Cetak & Elektronik (L/P) | Orang | 130 | 82 | 121 | 60 | 232 |
| 7 | Jumlah Penyediaan Informasi bagi tamu | Buah | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |

*Keterangan : TAD = Tidak Ada Data*
*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. TBB, 2020*

### *k. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah*

Peran koperasi, usaha mikro dan kecil sangat penting dalam pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Belum semua koperasi yang ada beroperasi secara aktif. Permasalahan pengembangan usaha masih mewarnai dinamika organisasi koperasi. Usaha mikro dan kecil masih perlu ditingkatkan secara signifikan, hal ini perlu ditunjang dengan upaya peningkatan jumlah enterpreneur. Jumlah usaha mikro dan kecil dengan katagori sehat perlu ditingkatkan demikian juga dengan jumlah koperasi yang sehat perlu ditingkatkan. Indikator kinerja memiliki persentase peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020 yaitu indikator kinerja jumlah UMKM dengan jumlah peningkatan sebesar 12,65%. Indikator pencapaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah tahun 2016 - 2020disajikan pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan MenengahTahun 2016 s.d. 2020Kab. Tulang Bawang Barat

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Koperasi aktif (%) | 39 | 44,3 | 44,3 | 45,6 | 46,03 |
| 2 | Usaha Mikro dan Kecil Kategori Sehat (%) | 38 | 32,2 | 40 | 41 | 41 |
| 3 | Jumlah UMKM (Unit) | 3.438 | 3.603 | 3.634 | 3.706 | 7.425 |
| 4 | Koperasi yang ada(Unit) | 141 | 124 | 124 | 125 | 126 |
| 5 | Koperasi sehat (Unit) | 22 | 27 | 27 | 27 | 28 |

*Sumber :Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang Barat, 2020*

### *l. Penanaman Modal*

Ketersediaan modal merupakan salah satu faktor penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan modal sangat ditentukan olehtersedianya informasi peluang usaha terutama usaha unggulan, kegiatan promosi peluang penanaman modal, sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, peningkatan jumlah investor berskala nasional dan internasional, tersedianya sistem perizinan yang

efisien dan efektif serta modern.Pola investasi PMDN belum nyata terlihat mampu menggerakkan perekonomian lokal masyarakat daerah, hal ini ditunjukkan dengan jenis investasi PMDN yang terkonsentrasi pada sektor perkebunan dan olahan awal hasil perkebunan belum kepada capaian produk industri hilir.

Untuk meningkatkan daya tarik investor, Pemerintah Daerah perlu melakukan promosi tentang potensi daerah serta kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada investor. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi berarti akan meningkatkan aktifitas ekonomi di wilayah Kabupaten tulang Bawang Barat yang dapat berdampak kepada peningkatan daya serap lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Capaian indikator penanaman modal tahun 2016-2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Capaian Indikator Penanaman Modal Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN) | Investor | 14 | 4 | 27 | 31 | 27 |
| 2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) | Rp (juta) | 38.407 | 2.138 | 12.675 | 11.500 | 40.628 |

*Sumber : Dinas PM&PPTSP*

### *m. Kepemudaan dan Olahraga*

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa

kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Kegiatan dalam rangka pembinaan kepada pemuda dan kegiatan kepemudaan secara langsung dapat meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan kepada pemuda untuk selalu peka terhadap perkembangan jaman dan perkembangan lingkungannya.

Kegiatan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jenis kegiatan kepemudaan yangtelah dilaksanakan antara lain, terkait dengan bidang pendidikan politik dan demokratisasi; sumberdaya ekonomi;

kepedulian terhadap masyarakat; ilmu pengetahuan dan teknologi; olahraga, seni, dan budaya; kepedulian terhadap lingkungan hidup; pendidikan kewirausahaan; dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.Jumlah sarana olahraga di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 hingga 2020 disajikan pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Jumlah Sarana Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Gedung Olahraga (unit) | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2. | Lapangan olahraga (unit) | 225 | 240 | 254 | 254 | 254 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga*
*Kab. Tulang Bawang Barat, 2020*

***n. Statistik***

Perencanaan pembangunan yang terkait dengan statistik dapat diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu Buku "Tulang Bawang Dalam Angka" dan "PDRB Tulang Bawang Dalam Angka". Data yang digunakan dalam kurun waktu5 (lima) tahun yaitu 2010-2015. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Tulang Bawang Barat dalam menyediakan suatu dokumen perencanaan makin membaik. Akan tetapi,beberapa data masih belum tersedia dan waktu penyusunan perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena terlambatnya waktu penyusunan penerbitan dapat berimplikasi pada proses perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Analisis data sekunder untuk formulasi kebijakan pembangunan daerah sangat diperlukan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pembangunan. Melalui kajian ilmiah berbasis analisis data diharapkan implementasi kebijakan tidak akan jauh hasilnya dari yang diharapkan dan simulasi anternatif kebijakan dapat disusun dengan tepat.

***o. Persandian***

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi.

Dalam RPJMD sebagaimana pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, persandian bukan menjadi urusan tersendiri melainkan menjadi bagian dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

### *p. Kebudayaan*

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah wilayah transmigrasi yang penduduknya didominasi dari daerah Jawa, Sunda dan Bali, sehingga Tulang Bawang Barat memiliki beberapa kebudayaan Lampung, Jawa dan Bali. Berbagai bentuk kesenian tradisi baik Lampung, Jawa dan Bali termasuk didalamnya kesenian daerah atau kesenian rakyat, dan kesenian klasik yang hingga kini eksistensinya masih diakui oleh masyarakat luas. Nuansa Budaya Lampung, Jawa dan Bali dalam kehidupan masyarakat masih terasa sangat kentalhingga saat ini. Oleh karena itu, sangat beralasan jika senipertunjukan dan tradisi Jawa yang melekat di masyarakat Tulang Bawang Barat perlu dilestarikan dan dikembangkan. Terlebih kesenian tradisiyang merupakan aset potensial bagi pengembangan pariwisata budaya di Tulang Bawang Barat.

Upaya memelihara dan mengembangkan kesenian tradisi yang sudah merakyat merupakan kontribusi besar dalam pembangunan budayanasional. Hal ini sekaligus merupakan salah satu upaya untuk mengurangi masuk dan berkembangnya budaya asing yang sering bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Beberapa seni pertunjukan tradisi Lampung dan Jawa di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang hingga saat ini masih eksis dan berkembang di masyarakat diantaranya yaitu begawi, tari sembah, dan tari kuda lumping. Kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa dilihat dari beberapa indikator, diantaranya yaitu dibangunnya pusat budaya "Balai Adat Sesat Agung". Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 hingga 2020 disajikan pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja UrusanKebudayaan Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Penyelenggaraan kegiatan seni (kali) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Cakupan kajian seni (%) | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 3. | Cakupan Fasilitas Seni (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tulang Bawang Barat, 2020*

### *q. Perpustakaan*

Perpustakaan merupakan wadah dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disebutkan bahwa salah satu tujuan perpustakaan adalah menyediakan wadah bagi pelestarian hasil budaya bangsa, baik berupa karya cetak, maupun karya rekam, melalui program wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan "Koleksi Deposit" dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai OPD yang baru terbentuk harus terus berupaya untuk menjalankan amanat dari undang-undang. Jenis koleksi karya rekam dan cetak yang disimpan ataudikumpulkan dari berbagai lembaga dan mediadiharapakan mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi jumlah judul maupun eksemplarnya.Agar mempermudah pengunjung dalam mencari buku dan sinopsi, maka Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah harus menotomasikan bahan pustaka dan dokumentasi yang telah dikoleksi.

### *r. Kearsipan*

Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagiorganisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Kearsipan itu sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui sistem sentralisasi dimana semua arsip yang ada dari berbagai bidang (unit) disimpan dan dikelola pada satu ruangan tersendiri dan melalui

sistem desentralisasi dimana arsip-arsip dibagi menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan khusus di tiap unit.

Menurut Undang-undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Dengan kata lain arsip merupakan suatu bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga arsip perlu di kelola dan dimanfaatkan dengan baik agar keselamatan dan keamanan arsip tersebut bisa terjamin. Pemanfatan arsip yang opimal dapat dicapai melalui tahapan manajemen arsip modern yaitu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat serta pengawasan yang ketat.

Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 1 (satu) Pusat Informasi Arsip Daerah yang berfungsi menyediakan informasi tertentu bagi instansi yang membutuhkan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pengarsipan.

Kendalayangdihadapidalampengelolaan arsip adalah rotasi pegawai dimana pegawai pengelola arsip yang telah mengikuti pelatihan SIMARDI terkena rotasi pegawai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD yang ditinggal kembali menerapkan proses pengelolaan arsip secara manual.

**3) Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan**

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu bidang urusan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan,

energi dan sumberdaya mineral, perdagangan , perindustrian dan transmigrasi.

### *a. Kelauatan dan Perikanan*

Kawasan yang diperuntukan untuk pengembangan usaha pembibitan dan pemeliharaan ikan air tawar dalam satu wadah (akukultur). Jenis usaha perikanan yang dikembangkan masyarakat berupa budidaya tambak rakyat dan perikanan tangkap sungai dan rawa. Jumlah rumah tangga dengan mata pencarian menangkap ikan di sungai sebesar 1.184 rumah tangga,

dengan rincian sejumlah 351 rumah tangga di rawa, 697 rumah tangga di sungai dan 121 rumah tangga di genangan air lainnya dengan sentra lokasi pengembangan di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Pagar Dewa dan Gunung Terang.

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan tajam dari tahun 2016 hingga 2020 mencapai 155%. Potensi produksi perikanan budidaya dapat menjadi alternatif mata pencaharian utama bagi penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat. Capaian produksi ini sebaiknya diimbangi dengan keberadaan pameran dan promosi produk-produk perikanan dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Capaian kinerja urusan perikanan tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Indikator | Sat | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Produksi perikanan Budidaya | Ton | 850,0 | 1.263,6 | 1.371,8 | 1.565,5 | 4.684,44 |
| 2 | Tingkat Konsumsi Ikan Penduduk | Kg/th | 27,0 | 28,0 | 29,17 | 20,98 | 25,48 |

*Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2020*

### *b. Pariwisata*

Kabupaten Tulang Bawang Barat belum banyak meyediakan fasilitas penginapan yang mumpuni seperti hotel berbintang. Penginapan yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih berupa hotel melati dan penginapan lainnya. Hotel melati

hanya terdapat di Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah pada tahun 2016 terdata hanya terdapat 10 penginapan dengan jumlah kamar sebanyak 132 unit. Jumlah rumah makan semakin tahun meningkat dan tersebar di 8 kecamatan, terdata pada tahun 2016 sebanyak 108 unit dengan jumlah tenaga kerja 553 orang (Tulang Bawang Barat dalam Angka 2017).

Selanjutnya capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 hingga 2020disajikan pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kunjungan wisatawan domestik | Orang | 415 | 506 | 1975 | 1975 | 1975 |
| 2 | Persentase objek wisata yang dipromosikan | % | 39 | 47 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Jumlah Objek wisata unggulan | Objek | 6 | 8 | 13 | 13 | 13 |
| 4 | Jenis kelas dan jumlah restoran | Unit | 25 | 36 | 48 | 48 | 48 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020*

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah kunjungan wisatawan domestik di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2014 hingga 2018 meningkat tiap tahunnya, dari 325 orang pada tahun 2014 meningkat hingga 1975 orang pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan peningkatan promosi objek yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Promosi yang dilakukan dari hanya 13% pada tahun 2014 meningkat menjadi 90% pada tahun 2018. Berdasarkan hal ini terbukti bahwa promosi objek wisata menjadi hal paling penting dalam meningkatkan kinerja urusan pariwisata di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Peningkatan jumlah objek wisata unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi 13 lokasi objek wisata pada tahun 2017 juga menjadi indikator dalam peningkatan

jumlah kunjungan wisatawan yang didukung oleh peningkatan keberadaan jumlah restoran

***c. Pertanian***

Urusan sektor pertanian mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Luas lahan lahan sawah (sawah irigasi dan tadah hujan) di Tulang Bawang Barat sebesar 12.178 Ha. Menurut data Dinas Pertanian melalui Sensus Pertanian, Lahan Perkebunan dan Kehutanan, areal tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 seluas 41.664 Ha. Karet merupakan komoditi hasil perkebunan yang mendominasi luas areal tersebut seluas 42.274 Ha dari total luas lahan perkebunan rakyat.

Potensi sub sektor tanaman pangan khususnya tanaman padi di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017 cukup tinggi jika dilihat dari total luas lahan sawah baik yang beririgasi (8.127 Ha) maupun yang non irigasi (4.051 Ha) mencapai 12.178 Ha. Lahan sawah beririgasi terutama di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tu mijajar (4.211 Ha), Tulang Bawang Tengah (2.884 Ha), dan Tulang Bawang Udik (1.032 Ha). Sementara lahan

sawah non irigasi tersebar di 7 kecamatan (kecuali Kecamatan Way Kenanga), terutama di Kecamatan Tulang Bawang Udik (1.558 Ha). Luas panen padi sawah tahun 2017 mencapai 61.630 Ha, sedangkan luas panen padi ladang hanya 848 Ha. Potensi sub sektor tanaman pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Potensi Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2019
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Kriteria | Padi Sawah | Padi ladang | Jagung | Ubi Kayu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas Panen(Hektar) | 14.433 | 4.307 | 5.494 | 24.536 |
| 2 | Produksi (Ton) | 69.986 | 12.395 | 27.636 | 529.442 |
| 3 | Produktivitas (Kuintal/Hektar) | 48,49 | 28,78 | 50,30 | 215,78 |

*Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tulang Bawang Barat 2020*

Luas lahan tegal/kebun di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 mencapai 39.210 Ha, tersebar di 8 kecamatan, terutama di Kecamatan Tulang Bawang Udik (12.932 Ha), Tulang

Bawang Tengah (9.887 Ha), Gunung Terang (5.024 Ha) dan di Kecamatan Gunung Agung (3.430 Ha). Luas panen tanaman pangan lainnya didominasi oleh tanaman ubi kayu yang mencapai 29.288,5 Ha, sementara tanaman pangan seperti jagung, kacang tanah, ubi jalar dan kacang hijau, masing-masing sebesar 1.297,7 Ha, 142,9, Ha, 111,9 Ha dan 9,4 Ha seperti padatabel berikut ini :

Tabel 2.58
Luas Panen Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2019
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Kecamatan | Jagung | Kacang Tanah | Kacang Hijau | Ubi Kayu | Ubi Jalar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulang Bawang Udik | 303 | 90 | 10 | 5.600 | 4 |
| 2 | Tumijajar | 1.739 | 100 | - | 2.841 | 3 |
| 3 | Tulang Bawang Tengah | 912 | 49 | 28 | 9.336 | 18 |
| 4 | Pagar Dewa | 739 | - | - | 2.072 | 7 |
| 5 | Lambu Kibang | 6 | - | - | 506 | - |
| 6 | Gunung Terang | 552 | - | - | 1085 | - |
| 7 | Gunung Agung | 27 | - | 9 | 601 | - |
| 8 | Way Kenanga | 112 | - | - | 680 | - |
| 9 | Batu Putih | 220 | - | - | 3268 | 9 |
| | **Jumlah** | 4.610 | 239 | 47 | 26.189 | 41 |

*Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020*

Potensi sub sektor tanaman hortikultura di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017 yang menonjol adalah tanaman cabai dengan luas tanaman mencapai 97 Ha dengan produksi 134,3 Ton yang tersebar di 6 kecamatan, dengan sentra produksi di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, dan Pagar Dewa.

Sementara potensi produksi tanaman buah-buahan didominasi oleh pisang (29.320 Ha), mangga (8.988 Ha), pepaya (4.440 Ha), dan jeruk (1.044 Ha). Potensi sub sektor tanaman perkebunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2015 terutama didominasi oleh tanaman karet (42.274 Ha) dengan produksi 27.824 Ton, diikuti tanaman kelapa sawit (6.057 Ha) dengan produksi 14.642 Ton, kelapa dalam (416 Ha) dengan produksi 3.235 Ton, dan kopi (133 Ha) dengan produksi 414 Ton. (Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2016). Potensi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan tahun 2018 Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59
Potensi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018

| No | Sub sector | 2020 |
|---|---|---|
| **1** | **Tanaman Hortikultura (Ton)** | |
| | a. Cabai | 667.2 |
| | b. Pisang | 2740.4 |
| | c. Mangga | 16054.2 |
| | d. Pepaya | 4834.1 |
| | e. Jeruk | 199.8 |
| | f. Nanas | 194.1 |
| **2** | **Tanaman Perkebunan (Ton)** | |
| | a. Karet | 24,328 |
| | b. Kelapa Sawit | 2.643 |
| | c. Kelapa Dalam | 282 |
| | d. Kopi | 7 |
| | e. Tebu | 19.720 |

*Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020*

Potensi sub sektor peternakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 didominasi oleh kambing (61.925 ekor) dengan sentra di Kecamatan Gunung Terang dan Tulang Bawang Tengah. Sedangkan populasi sapi potong sebanyak (17.900 ekor) yang tersebar di 8 kecamatan, sebaran ternak kerbau hanya terdapat daerah rawa dan sepanjang sempadan sungai seperti di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Pagar Dewa.

### *d. Perdagangan*

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 156 unit perusahaan yang menjalankan usahanya. Sebanyak 12 perusahan berbentuk PT/CV dan 140 Koperasi. Jumlah koperasi sebanyak 140 yang terdiri atas 19 koperasi Unit Desa di Kecamatan Tulang Bawang Tengah (7), 5 Koperasi karyawan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah (3) dan 116 bentuk lainnya (Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2017).

Sarana perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 23 pasar yang tersebar di setiap kecamatan, kecuali di Kecamatan Pagar Dewa dan dengan jumlah pedagang yang terdaftar sebanya 4.768pedagang. Jumlah pasar tradisional dan persentase pasar yang memenuhi syarat di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2015 hingga 2019berjumlah 23 pasar

dan persentase 30% pasar yang memenuhi syarat. Indikator pencapaian kinerja urusan perdagangan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No. | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Pasar Modern | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah Pasar Tradisional | Unit | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 3 | Cakupan bina kelompok pedagang | Kelompok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Persentase lokasi PKL yang tertata | % | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 17,39 |
| 5 | Persentase pasar yang memenuhi persyaratan | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Tingkat terlindunginya konsumen | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

*Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2020*

### *e. Perindustrian*

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki tujuh jenis industri pengolahan. Total Industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat berjumlah 963 unit, sebagian besar merupakan industri makanan dan minuman sebanyak 563 unit atau sekitar 58,4 % dari total industri dan di posisi kedua indutri kayu sebanyak 121 unit (12,56%). Letak unit usaha tersebut tersebar dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Tengah yaitu dengan 195 unit industry dan kecamatan yang terendah jumlah unit usaha industri yaitu Kecamatan Pagar Dewa dan Way Kenanga sebanyak 39 unit.Jumlah industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61
Jumlah Industri Tahun 2020 di Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Kecamatan | Industri Dari Kulit | Industri Dari Kayu | Industri Dari Logam / Logam Mulia | Industri Anyaman | Industri Grabah | Industri Dari Kain / Tenun | Industri Makanan dan Minuman | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulang Bawang Udik | 0 | 9 | 9 | 11 | 4 | 12 | 38 | 83 |
| 2 | Tumijajar | 0 | 27 | 11 | 15 | 14 | 18 | 98 | 183 |
| 3 | Tulang Bawang Tengah | 1 | 31 | 6 | 13 | 24 | 20 | 100 | 195 |
| 4 | Pagar Dewa | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 39 |
| 5 | Lambu Kibang | 0 | 8 | 2 | 10 | 15 | 10 | 107 | 152 |
| 6 | Gunung Terang | 0 | 15 | 13 | 8 | 5 | 9 | 50 | 100 |
| 7 | Gunung Agung | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 68 | 81 |
| 8 | Way Kenanga | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 26 | 39 |
| 9 | Batyu Putih | 0 | 18 | 4 | 2 | 5 | 4 | 58 | 91 |
| | Jumlah | 1 | 121 | 49 | 68 | 73 | 88 | 563 | 963 |

*Sumber : Dinas Koperindag Kab. Tulang Bawang Barat 2020*

Unit usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga menurut kecamatan dan jenis industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 didominasi industri makanan dan minuman (563) dan industri dari kayu (121) dari total industri kecil dan kerajinan sejumlah 963. Industri kecil yang berbahan baku dari kayu terutama ada di Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang Udik dan Tulang Bawang Tengah. Sementara sentra industri kecil untuk makanan dan minuman terutama di Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Tahun 2016 s.d. 2020Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Industri (%) | 5,27 | 7,33 | 7,64 | 8,47 | -6,52 |

*Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2020*

**4) Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Penunjang**

***a. Administrasi Pemerintahan***

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, diantaranya aspek kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemampuan daya beli.

Selain dilihat berdasarkan tingkat kemiskinan, urusan ini juga dapat dinilai berdasarkan indikator Persentase Penyelesaian Penegakan Perda. Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpo lPP Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3.

***b. Perencanaan***

Proses perencanaan merupakan bagian dari siklus kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*). Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya membuat strategi untuk mencapai tujuan untuk itu disusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025. Pelaksanaan perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) setiap tahunnya yaitu dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan PeraturanBupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasitarget tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihatpada tabel 2.63 berikut ini :

Tabel 2.63
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Tahun 2016-2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3. | Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUB | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4. | Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tulang Bawang Barat*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang 32 Tahun 2014 mengamanatkan untuk menyusun RPJMD bagi Kepala Daerah selambatnya 6 bulan setelah dilantik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menetapkan RPJMD pertama tahun 2011-2016, yang telah habis masa berlakunya dan RPJMD yang kedua untuk tahun 2017 - 2022.

### *c. Keuangan*

Dari sisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan beberapa kebijakan mengenai keungan yaitu kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

#### *a) Sumber Pendapatan*

Pendapatan daerah berasal dari 3 (tiga) sumber penerimaan yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

*1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah.

*2) Dana perimbangan*

Dana perimbangan terdiri dari : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus. Sedangkan, Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari : hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya.

*3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah*

Untuk pos pendapatanLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi :

1. Dana darurat; merupakan dana yang diterima dari pemerintah dan bantuan uang dan barang dari badan atau lembaga tertentu untuk penanggulangan bencana alam yang disalurkan melalui pemerintah daerah dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Hibah; uang maupun barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah daerah. Sumbangan pihak ketiga; merupakan sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga yang tidak mempunyai konsekuensi pegeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan.
3. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah; termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

***b) Target Pendapatan Daerah***

Pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

*1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

1. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing sektor penyumbang pendapatan serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk itu, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 secara nasional meningkat.

Untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat, peningkatan yang bersumber dari pajak daerahmulai dari Tahun Anggaran 2016sampai dengan Tahun Anggaran 2020 rata-rata sebesar 20,38% data disajikan pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kab. Tulang Bawang BaratTahun 2016s/d 2020

| No | TAHUN | TARGET PAJAK DAERAH (Rp) | REALISASI PAJAK DAERAH (Rp) | PERKEMBANGAN REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (Rp) | (%) |
| 1 | 2016 | 7.858.500.000,- | 8.168.766.399,00 | 859.316.808,00 | 11,75 |
| 2 | 2017 | 9.666.000.000,- | 10.351.767.923,50 | 2.183.001.524,50 | 26,72 |
| 3 | 2018 | 12.106.000.000,- | 14.017.374.388,50 | 3.665.606.465,00 | 35,41 |
| 4 | 2019 | 12.571.000.000,- | 15.014.588.729,28 | 997.214.340,78 | 7,11 |
| 5 | 2020 | 13.571.000.000,- | 18.893.601.708,31 | 5.322.601.708,31 | 139% |

Selanjutnya, tren komposisi realisasi PAD pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.65
Komposisi Realisasi PAD Tahun 2016 - 2020

| No | TAHUN | TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp) | REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp) | PERKEMBANGAN REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (Rp) | (%) |
| 1 | 2016 | 29.235.329.180,- | 21.857.024.136,63 | -2.033.024.623,63 | -8,51% |
| 2 | 2017 | 61.931.599.221,- | 56.213.354.797,15 | 34.356.330.660,52 | 157,2% |
| 3 | 2018 | 32.359.786.824,37,- | 27.611.116.135,77 | -28.602.238.661,38 | -50,88% |
| 4 | 2019 | 33.883.490.825,- | 32.400.517.401,12 | 4.789.401.265,35 | 14,36% |
| 5 | 2020 | 41.786.212.089,09,- | 41.083.482.151,98,- | 702.729.937,11 | 98% |

*b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :*

Memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai *(performance based)*, karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi.

*c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:*

1. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
2. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis

Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya

3. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

*2) Dana Perimbangan*

Dana perimbangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum. Dan penetapan target Dana Perimbangan ditetapkan atas indikator yang terukur, seperti data yang disajikan dibawah ini terkait dengan target dan realisasi Dana perimbangan Tahun 2016s/d 2020 data disajikan dalam Tabel 2.66 dibawah ini :

Gambar. 2.66
Target dan Realisasi Dana Perimbangan
Tahun 2016 s.d. 2020

| TAHUN | TARGET | REALISASI |
|---|---|---|
| 2016 | 818.719.968.834,- | 715.404.583.663,- |
| 2017 | 670.354.955.317,- | 674.301.172.719,- |
| 2018 | 727.232.130.000,- | 725.406.877.464,- |
| 2019 | 687.455.134.000,- | 661.079.127.842,- |
| 2020 | 627.960.894.371,- | 623.486.362.983,- |

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

   a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.

c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA.

d. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN, berikut adalah gambaran DAU Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 2.67
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun 2016 s.d. 2020

| TAHUN | TARGET | REALISASI |
|---|---|---|
| 2016 | 464.431.679.000,- | 464.431.679.000,- |
| 2017 | 461.031.611.000,- | 459.231.176.000,- |
| 2018 | 463.478.442.000,- | 463.478.442.000,- |
| 2019 | 487.448.839.000,- | 488.530.984.000,- |
| 2020 | 443.399.456.000,- | 441.732.032.000,- |

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Tabel 2.68
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun 2016 s.d. 2020

| TAHUN | TARGET | REALISASI |
|---|---|---|
| 2016 | 334.968.747.000,- | 231.757.814.915,- |
| 2017 | 182.579.332.441,- | 178.477.408.444,- |
| 2018 | 239.852.920.000,- | 237.255.143.339,- |
| 2019 | 184.295.574.000,- | 156.731.192.068,- |
| 2020 | 165.213.456.000,- | 164.079.498.740,- |

*3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khs.

### 2.1.4. Aspek Daya Saing

Aspek daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Daya saing daerah di definisikan oleh *Centrefor Regionaland Urban Studies* (CURDS), Inggris sebagai kemampuan sektor

bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya.

Sejalan denga paradigma barudi era globalisasi, iptek menjadi faktor yang memberikan kontribusisignifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasiparadigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian duniayang semula berbasiskan pada sumber daya alam menjadiperekonomian yang berbasiskan pengetahuan (*Knowledge BasedEconomy*/KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur darikemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikanmodal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing adalah denganmemperkuat sistem inovasi daerah (SIDa). Sistem ini diharapkanakan mampu membangkitkan kreatifitas dan inovasi yangdiperlukan, agar produk-produk Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat bersaingsecara langsung dengan produk daerah/negara lain,baik di pasardomestik maupuninternasional.

## A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

### 1. PengeluaranKonsumsiRumahTanggaPer Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) per Kapita adalah salah satu komponen utama dalam penghitungan Produk Domestik Bruto. Pada tahun 2014, PKRT menyumbang lebih dari separuh dalam PDB Indonesia yaitu sebesar 56,07 persen.Polapengeluarandapatdigunakansebagai salahsatualat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan atau semakin tinggi persentase pengeluaran untuk bukan makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan pada tahun 2017 sebesar 44,90%, sedangkan persentase pengeluaran bukan makanan

ditahun 2013 sebesar 45,19%, sehingga dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase dari tahun 2013 hingga ke 2017 sebesar 0,29%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk semakin meningkat.

PKRT per kapita diketahui dengan membagi jumlah pengeluaran konsumsi RT dengan jumlah RT. Dikarenakan data PKRT per kapita Kabupaten Tulang Bawang Barat belum ada data atau terukur maka digunakan pedekatan data PKRT Provinsi Lampung tahun 2014 hingga 2018 dengan rasio mencapai 10,43 pada tahun 2017, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Lampung

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Pengeluaran RT | 789.061 | 849.293 | 922.638 | 929.024 | 974.424 |
| 2 | Kelompok Makanan | 412.617 | 467.940 | 478.452 | 484.800 | 503.976 |
| 3 | Kelompok Bukan Makanan | 376.444 | 381.353 | 444.186 | 444.224 | 470.448 |
| 4 | Jumlah RT | 73.863 | 75.261 | 76.684 | 71.648 | |
| | **Rasio** | **10,68** | **11,28** | **12,03** | **12,96** | |

*Sumber : Lampung dalam Angka 2016-2020*

**2. Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian. Jika nilai NTP pada waktu tertentu lebih besar dari 100 persen, berarti kesejahteraan petani pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar dan berlaku sebaliknya. Nilai Tukar Petani digunakan pendekatan data yaitu menggunakan data NTP di Provinsi Lampung dikarenakan data NTP Kabupaten Tulang Bawang Barat belum ada atau terukur, yaiti data disajikan pada Tabel 2.68, dapat dilihat bahwa NTP

Provinsi Lampung pada tahun 2016 berada diatas 100 sehingga dapat diartikan bahwa kesejahteraan petani lebih baik.

Tabel 2.70
Nilai Tukar Petani Tahun 2016 s.d. 2020
Provinsi Lampung

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks yang diterima Petani (It) | 130,32 | 136,06 | 137,46 | 136,47 | 103,34 |
| 2 | Indeks yang dibayar Petani (Ib) | 123,97 | 126,74 | 130,17 | 133,82 | 106,81 |
| | **Rasio** | **105** | **107** | **105,6** | **102** | **97** |

*Sumber :Lampung dalam Angka 2016 - 2020*

### 3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya. Persentase konsumsi rumah tangga non pangan di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan per Kapita Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Lampung

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total pengeluaran RT non pangan | 376.444 | 381.353 | 358.110 | 367.991 | 368.032 |
| Total pengeluaran | 789.061 | 849.293 | 747.374 | 745.118 | 804.484 |
| **Pengeluaran RT non pangan (%)** | **47,71** | **44,90** | **47,92** | **49,39** | **45,74** |

*Sumber : Lampung dalam Angka 2016 - 2020*

## B. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

### *1) Kawasan Rawan Bencana*

Secara geografis, bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah banjir. Berdasarkan kapasitas drainasenya, Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas tiga kelompok, yaitu kawasan yang tidak pernah tergenang,

kadang-kadang tergenang, dan terus menerus tergenang. Kawasan yang tergolong sering tergenang, adalah daerah dengan topografi rawa dan bantaran sungai.

Potensi banjir dapat terlihat dari sistem lahan yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu sistem lahan rawa dan bantaran sungai Tulang Bawang. Sungai Way Kanan dan Way Kiri terdapat di Kecamatan Gunung Terang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik.

***2) Bank***

Jasa perbankan di Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya dilayani oleh 7 bank. Bank tersebut terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional.

***3) Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih***

Kondisi rumah tangga di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki akses terhadap air minum baku pada tahun 2018 hanya mencapai 28,1%.

***4) Rumah tangga yang menggunakan listrik***

Jaringan listrik di kabupaten rulang bawang barat semakin tahun semakin meningkat, pada tahun 2017 terdata sebanyak 66.694 sambungan listrik dan meningkat menjadi 74.767 pada tahun 2019 jumlah pelanggan listrik dengan persentase RT pengguna listrik sebesar 94,35%.

**C. Fokus Iklim Investasi**

Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayahmerupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disampingprosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angkakriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasidi Kabupaten Tulang Bawang Barat

Angka kriminalitas diketahui dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan tiap 10.000 penduduk dibagi jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Angka kriminalitas di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2016 sebesar 4,27 yang merupakan angka paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, angka kriminalitas di Kabupaten Tulang Bawang

Barat cenderung berfluktuatif. Tindak kriminal yang sering terjadi adalah pencurian dan penyalahgunaan narkoba.

Angka kriminalitas perlu dikendalikan agar tidak mengganggu iklim investasi. Peningkatan lapangan kerja dan meningkatkan kesadaran dan ketaan hukum untuk masyarakat sangat diperlukan. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga iklim berinvestasi yang positif.

Faktor yang dominan menjadi sumber konfik dan materi demonstrasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa konflik agraria baik itu antara masyarakat/masyarakat adat dengan pihak perusahaan maupun antar individu pemilik lahan.

## D. Fokus Sumber Daya Manusia

### *1) Kualitas Tenaga Kerja*

Salah satu faktor penting penentu daya saing daerah adalah ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan kreatif. Jumlah SDM yang kreatif dalam membentuk daya saing daerah sebesar 45%. Dikarenakan ketersediaan SDM kreatif sangatlah penting. Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat dari rasio jumlah penduduk yang dapat mencapai jenjang kelulusan hingga tingkat pendidikan diploma, sarjana dan pascasarjana. Karena data SDM menurut tingkat pendidikan tidak tersedia maka didekati dengan data SDM seProvinsi Lampung.

Jumlah lulusan sarjana dan pascasarjana di Provinsi Lampung terus meningkat hingga tahun 2014, sedangkan jumlah lulusan diploma mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2012hingga tahun 2014, sehingga hal ini mempengaruhi penurunan rasio lulusan diploma. Rasio lulusan sarjana paling tinggi pada tahun 2011 yaitu 5,36 dan pada tahun 2014 menurun hingga 4,78 sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Rasio lulusan pascasarjana meningkat pada tahun 2014.

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Daerah Otonomi Baru yang baru berusia 11 tahun maka ketersediaan SDM terdidik, berkualitas dan kreatif masih terbatas. Oleh karena

itu pengembangan lembaga pendidikan tinggi baik akademik maupun pendidikan vokasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat sangat diperlukan.

***2) Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)***

Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) diketahui dari ketergantungan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun) dibagi penduduk usia produktif (penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun) dikalikan 100. Rasio ketergantungan pada tahun 2016 adalah 32 meningkat pada tahun 2020 hingga 54. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk usia tidak produktif berbanding terbalik dengan penurunan jumlah penduduk usia produktif. Tingkat ketergantungan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016-2020disajikan pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Tingkat Ketergantungan Tahun 2016 s.d. 2020
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penduduk Usia Tidak Produktif (<15, >64 tahun)** | 87.781 | 79.740 | 95.979 | 92.520 | 96.866 |
| Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun) ** | 176.931 | 170.436 | 175.227 | 180.695 | 189.296 |
| **Rasio** | **49** | **46** | **54** | **51** | **51** |

*Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2016-2020*
*Statistik Kesejahteraan Rakyat Tulang Bawang Barat 2016-2020*
*** ) Data diolah*

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Salah satu pengendalian dan evaluasi yang wajib untukdilaksanakan oleh daerah adalah pengendalian dan evaluasiterhadap hasil dari pelaksanaan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untukmelihat sejauh mana tingkat capaian dari pelaksanaan RPJMDtersebut dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang

diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagiproses perencanaan dan penganggaran1234 yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Pada pelaksanaan RKPD dilakukan pengendalian dan evaluasiterhadap pelaksanaan per Triwulan. Hasil pengendaliandan evaluasi terhadap hasil RKPD Triwulan IV akan menjadi *feedback*/ umpan balik bagi perencanaan daerah yaitu Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan OPD sampai dengan bulan Desember2019. Selanjutnya hasil pengendalian dan evaluasi akan menjadi salah satu input bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Adapun faktor – faktor pendorong untuk keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain adalah :

a. komitmen dari masing-masing OPD untuk bisa segera melaksanakan kegiatannya tepat waktu.
b. penjadwalan kegiatan yang sudah dilakukan sejak awal tahunoleh OPD.
c. anggaran tepat waktu.
d. SDM yang cukup memadai dan memiliki kompetensi yang tinggi.
e. mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan tugas telah berjalanbaik.
f. beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga, telah selesai administrasinya.

Sedangakan untuk faktor yang kemungkinan besar dapat menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain :

a. petunjuk teknis pelaksanaan dana pusat yang terlambat

b. kegiatan pengadaan melalui pelelangan yang belum selesaidilaksanakan/ gagal lelang/ membutuhkan waktu lama
c. pelaksanaan anggaran perubahan yang efektifnya hanya satubulan
d. peraturan perundang-undangan sebagai dasar suatu kegiatanyang terkadang terlambat turun atau terjadi perubahan ditengah pelaksanaan kegiatan.

Selajutnya untuk jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruhOPD (40 OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Baratpada tahun anggaran 2022, sebagai bentuk dukungan terhadap lima prioritas pembangunan pemerintah daerah :

1. Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, jaring pengaman sosial dan pengembangan ekonomi rakyat kreatif
2. Pembangunan SDM Berkarakter dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar
3. Pengembangan Ekowisata dan Pelestarian Budaya
4. Pembangunan Infrastruktur
5. Reformasi Birokrasi

Adapun evaluasi tahun 2021 yang dituangkan adalah berdasarkan realisasi anggaran yang dianggarkan untukprogram dan kegiatan pada masing – masing OPDyang melaksanakan urusan dan capaian target kinerja RPJMD.

2.2.1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan OPD

Untuk mengetahui capaian kinerja dari realisasi anggaran yang dianggarkan untuk program dan kegiatan pada masing – masing OPD dapat dilihat pada tabel, yaitu sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**
**RINGKASAN REALISASI OPD TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | SKPD | ANGGARAN | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Penyerapan Anggaran dan Realisasi** | **425.639.873.436,00** | **438.585.465.095,00** | 103,04 |
| | **Urusan Wajib Pelayanan Dasar** | **360.649.657.749,00** | **371.230.933.537,00** | 102,93 |
| 1 | Dinas Pendidikan | 83.303.747.999,00 | 86.094.531.405,00 | 103,35 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 86.661.073.245,00 | 77.691.048.175,00 | 89,65 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 151.249.113.255,00 | 170.492.226.436,00 | 112,72 |
| 4 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 16.204.530.250,00 | 14.778.375.907,00 | 91,20 |
| 5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah | 1.023.325.000,00 | 995.764.475,00 | 97,31 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 4.636.612.000,00 | 4.582.046.614,00 | 98,82 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 14.784.106.000,00 | 13.813.730.525,00 | 93,44 |
| 8 | Dinas Sosial | 2.787.150.000,00 | 2.783.210.000,00 | 99,86 |
| | **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** | **31.119.676.251,00** | **30.146.470.863,00** | 96,87 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja daan Transmigrasi | 510.752.334,00 | 501.304.513,00 | 98,15 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 559.575.000,00 | 559.575.000,00 | 100,00 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 525.970.000,00 | 519.918.150,00 | 98,85 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 3.053.900.000,00 | 3.024.205.000,00 | 99,03 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.514.960.334,00 | 2.497.293.427,00 | 99,30 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh | 1.317.345.000,00 | 1.316.212.052,00 | 99,91 |
| 15 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4.154.848.000,00 | 4.005.592.000,00 | 96,41 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 1.650.850.883,00 | 1.615.752.889,00 | 97,87 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5.292.675.200,00 | 5.271.860.666,00 | 99,61 |
| 18 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 3.594.102.000,00 | 3.215.068.736,00 | 89,45 |
| 19 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu | 726.500.000,00 | 713.438.812,00 | 98,20 |
| 20 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | 6.487.922.000,00 | 6.211.203.479,00 | 95,73 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan | 730.275.500,00 | 695.046.139,00 | 95,18 |
| | **Urusaan Pilihan** | **4.107.972.120,00** | **7.659.665.564,00** | 186,46 |
| 22 | Dinas Perikanan | 522.725.620,00 | 518.717.500,00 | 99,23 |
| 23 | Dinas Pertanian | 2.772.384.000,00 | 6.331.516.573,00 | 228,38 |
| 24 | Dinas Peternakan | 812.862.500,00 | 809.431.491,00 | 99,58 |
| | **Urusaan Penunjang** | **29.762.567.316,00** | **29.548.395.131,00** | 99,28 |
| 26 | Sekretariat Daerah | 29.762.567.316,00 | 29.548.395.131,00 | 99,28 |
| | 1. Bagian Administrasi Pembangunan | 752.269.000,00 | 721.771.100,00 | 95,95 |
| | 2. Bagian Kesejahtraan Rakyat | 1.025.306.000,00 | 939.969.000,00 | 91,68 |
| | 3. Bagian Ekonomi | 503.864.600,00 | 498.383.600,00 | 98,91 |
| | 4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 3.100.360.000,00 | 3.079.175.000,00 | 99,32 |
| | 5. Bagian Tata Pemerintahan | 819.090.000,00 | 805.140.000,00 | 98,30 |
| | 6. Bagian Umum | 9.985.976.797,00 | 9.960.347.911,00 | 99,74 |
| | 7. Bagian Hukum | 900.000.000,00 | 899.900.000,00 | 99,99 |
| | 8. Bagian Organisasi | 897.213.000,00 | 893.288.001,00 | 99,56 |
| | 9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2.754.808.000,00 | 2.735.863.000,00 | 99,31 |
| | 10 Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9.023.679.919,00 | 9.014.557.519,00 | 99,90 |
| 27 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 16.000.000.000,00 | 15.949.300.298,00 | 99,68 |
| 28 | Sekretariat Korps Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia | 306.720.000,00 | 305.915.000,00 | 99,74 |
| 29 | Kecamatan Tulang Bawang Tengah | 2.600.000.000,00 | 2.599.350.000,00 | 99,98 |
| 30 | Kecamatan Tulang Bawang Udik | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 100,00 |
| 31 | Kecamatan Tumijajar | 1.450.000.000,00 | 1.447.942.396,00 | 99,86 |
| 32 | Kecamatan Pagar Dewa | 300.000.000,00 | 298.887.000,00 | 99,63 |
| 33 | Kecamatan Gunung Agung | 300.000.000,00 | 299.599.000,00 | 99,87 |
| 34 | Kecamatan Gunung Terang | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 100,00 |
| 35 | Kecamatan Lambu Kibang | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 100,00 |
| 36 | Kecamatan Way Kenanga | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 100,00 |
| 37 | Kecamatan Batu Putih | 300.000.000,00 | 299.986.000,00 | 100,00 |
| 38 | Inspektorat | 2.527.427.500,00 | 2.478.631.400,00 | 98,07 |
| 39 | Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah | 7.239.599.609,00 | 7.204.264.233,00 | 99,51 |
| 40 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 4.098.519.500,00 | 4.039.979.810,00 | 98,57 |
| 41 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 2.103.571.500,00 | 2.096.247.800,00 | 99,65 |
| 42 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah | 4.449.121.477,00 | 4.427.994.876,00 | |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Wajib Pelayanan Dasar | Dinas Pendidikan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 774.305.000,00 | 774.305.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan Pameran Daerah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 89.500.000,00 | 89.430.000,00 |
| | | | Penyusunan Standar Pelayanan Minimal | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | | | Inventarisasi Aset Sekolah | 100.000.000,00 | |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 199.200.000,00 | 199.200.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 62.400.000,00 | 62.400.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | |
| | | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 119.250.000,00 | 119.223.500,00 |
| | | | **Program Pendidikan Anak Usia Dini** | | |
| | | | Apresiasi Bunda PAUD Berprestasi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| | | | Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri (DAK) | 27.600.000,00 | 24.000.000,00 |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD | 0,00 | 0,00 |
| | | | Penyelenggaraan Gebyar PAUD-DIKMAS, Apresiasi Bunda PAUD dan Hari Anak Nasional | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| | | | Pelatihan Drumband PAUD | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | | | **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** | | |
| | | | Festifal Lomba Seni Siswa Nasional SD, SMP | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sosialisasi,Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD & SMP | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan UAS/UN Tingkat SD/MI/SMP/MTS Negeri/Swasta | 383.500.000,00 | 331.695.800,00 |
| | | | Lomba O2SN SD dan O2SN SMP, Pembinaan Pocil dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Propinsi | 0,00 | 0,00 |
| | | | Lomba OSN SD dan OSN SMP dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Propinsi | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 |
| | | | Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD dan SMP | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pentas Pendidikan Agama Islam | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pembinaan Pocil | 0,00 | 0,00 |
| | | | Peningkatan Sarana dan Prasaran Sekolah | 0,00 | 0,00 |
| | | | Monitoring Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | | | Pengembangan Penyusunan Standarisasi Penumbuhkembangan Karakter Siswa | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | | |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemilihan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| | | | Peningkatan Mutu dan Kwalitas Tenaga Kependidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Melalui Regulasi Guru dan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| | | | Sosialisasi Penilaian Angka Kredit | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sosialisasi Dan Rekonsiliasi Percepatan Penyaluran Tunjangan Guru | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan** | | |
| | | | Peningkatan Mutu Pendidikan (DAK) | 38.035.568.000,00 | 37.613.971.745,00 |
| | | | Sosialisasi Peningkatan Mutu Lembaga PKBM dan Tutor Paket A, B dan C | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan Sosialisasi Monitoring Ujian Paket B | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan Sosialisasi Monitoring Ujian Paket C | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | | | Pembinaan Akreditasi Sekolah | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sosialisasi Program Indonesia Pinter | 0,00 | 0,00 |
| | | | Tubaba Eco Camp | 206.900.000,00 | 206.510.000,00 |
| | | | **Program Membangun Tulang Bawang Barat Cerdas** | | |
| | | | Membangun Tulang Bawang Barat Cerdas | 3.330.000.000,00 | 3.329.978.010,00 |
| | | | Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Program Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan** | | |
| | | | Penyusunan Standar Operasional Prosedur | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sekolah | 0,00 | 0,00 |
| | | | Makanan Sehat Di Sekolah | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 |
| | | | **Program Pengelolaan Dana Operasional Sekolah** | | |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Dana Operasional Sekolah | 38.040.524.999,00 | 41.308.817.350,00 |
| **JUMLAH** | | | | **83.303.747.999,00** | **85.994.531.405,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**

**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Wajib Pelayanan Dasar<br>Kesehatan | Dinas Kesehatan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 12.787.000,00 | 12.787.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 7.027.697.500 | 6.704.068.923 |
| | | | Pengawasan dan Pengamanan Aset Daerah | 20.860.000,00 | 13.860.000,00 |
| | | | Pembinaan Peningkatan Tata Kelola Administrasi dan Rekonsiliasi Data BMD | 68.108.750,00 | 68.108.750,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 292.800.000 | 288.000.000 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 325.050.000 | 315.953.720 |
| | | | **Program Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak** | | |
| | | | Perbaikan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat | 186.570.000,00 | 186.570.000,00 |
| | | | Pelayanan kesehatan bayi, anak dan remaja | 44.905.000,00 | 43.405.000,00 |
| | | | Pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi | 145.835.000,00 | 145.835.000,00 |
| | | | Peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut | 32.220.000,00 | 32.220.000,00 |
| | | | Pengelolaan jaminan persalinan (Jampersal) | 930.274.000,00 | 863.255.400,00 |
| | | | **Program Upaya Kesehatan** | | |
| | | | Peningkatan upaya pelayanan kesehatan dasar | 3.077.705.000 | 2.249.387.162 |
| | | | Upaya kesehatan tradisional dan komplementer | 47.723.500,00 | 47.723.500,00 |
| | | | Pengembangan pusat pengolahan pasca panen tanaman obat (P4TO) | 19.600.000,00 | 17.184.755,00 |
| | | | Akreditasi fasilitas kesehatan | 873.780.000 | 501.620.000 |
| | | | Penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas dan jaringannya | 181.200.000,00 | 181.135.364,00 |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan bantuan operasional kesehatan (BOK) | 6.714.243.000 | 6.192.370.200 |
| | | | Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya | 4.955.214.652,00 | 4.509.048.544,70 |
| | | | Peningkatan upaya dan mutu kesehatan rujukan | 140.100.000,00 | 140.100.000,00 |
| | | | Penyediaan data dan informasi kesehatan | 131.368.000,00 | 116.788.000,00 |
| | | | Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit | 5.067.000.000,00 | 4.623.081.201,30 |
| | | | **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** | | |
| | | | Pemberdayaan masyarakat dengan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) | 196.950.000,00 | 196.750.000,00 |
| | | | Peningkatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) | 218.525.000,00 | 218.525.000,00 |
| | | | **Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan** | | |
| | | | Pengendalian dan pemberantasan penyakit menular | 172.800.000,00 | 172.800.000,00 |
| | | | Pelayanan imunisasi | 44.025.000,00 | 44.025.000,00 |
| | | | Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah | 3.239.975.000,00 | 2.841.475.000,00 |
| | | | Pengendalian dan pemberantasan penyakit tidak menular | 654.530.000,00 | 649.530.000,00 |
| | | | Pelayanan kesehatan jiwa | 226.450.000,00 | 226.450.000,00 |
| | | | Peningkatan kualitas sanitasi dasar masyarakat | 201.155.000,00 | 201.155.000,00 |
| | | | Peningkatan sanitasi tempat pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum | 68.145.000,00 | 68.145.000,00 |
| | | | **Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan** | | |
| | | | Peningkatan ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat | 3.242.427.000,00 | 3.234.359.047,00 |
| | | | Pendistribusian obat/ peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya | 74.266.000,00 | 74.049.500,00 |
| | | | Pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya | 15.644.419.093,00 | 15.637.199.806,00 |
| | | | Kalibrasi dan maintenance peralatan kesehatan | 265.000.000,00 | 250.552.500,00 |
| | | | **Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional** | | |
| | | | Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | 12.923.650.000 | 6.673.276.087 |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesta) | 4.649.604.000,00 | 4.621.050.000,00 |
| | | | **Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan** | | |
| | | | Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan | 135.515.000,00 | 135.515.000,00 |
| | | | Penilaian tenaga kesehatan teladan | 3.175.000,00 | 3.175.000,00 |
| | | | **Program Upaya Kesehatan** | | |
| | | | **Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan** | | |
| | | | Pengadaan peralatan kesehatan rumah sakit | 13.908.581.000,00 | 13.600.368.332,00 |
| | | | **Program pengembangan data/informasi/statistik daerah** | | |
| | | | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah | 107.642.500,00 | 7.642.500,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembanguan Daerah | 213.040.000,00 | 213.040.000,00 |
| | | | Penyusunan Perencanaan Prioritas Pembangunan | 176.157.250,00 | 175.603.280,00 |
| **JUMLAH** | | | | **86.661.073.245,00** | **76.497.188.572,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Pelayanan Dasar | Dinas PUPR | **Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan** | | |
| | | | Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (DAK) | 3.345.826.000,00 | 3.324.510.000,00 |
| | | | Pendampingan Pembangunan Pamsimas III ( Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat) | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| | | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.971.832.000,00 | 1.836.638.454,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 175.000.000,00 | 174.496.500,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | Pembangunan gedung kantor | 2.048.515.100,00 | 2.003.044.700,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 35.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 215.600.000,00 | 165.466.803,00 |
| | | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 1.846.140.000,00 | 1.505.610.800,00 |
| | | | Pembangunan sarana Pendukung Gedung Perkantoran | 54.392.600,00 | 49.415.600,00 |
| | | | Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Dinas Jabatan | 259.729.700,00 | 259.729.700,00 |
| | | | Pembangunan sarana Pendukung Gedung Perkantoran 1 | 2.184.244.200,00 | 1.975.676.200,00 |
| | | | Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Dinas Jabatan 1 | 145.045.000,00 | 97.480.400,00 |
| | | | **Program pembangunan jalan dan jembatan** | | |
| | | | Pembangunan jembatan | 629.687.100,00 | 629.687.100,00 |
| | | | Peningkatan Jalan 2 | 1.507.025.000,00 | 2.278.753.700,00 |
| | | | Peningkatan Jalan 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pembangunan Jembatan 1 | 2.254.505.000,00 | 10.466.241.600,00 |
| | | | Peningkatan Jalan 1 (DAK) | 1.934.866.200,00 | 1.934.866.200,00 |
| | | | Peningkatan Jalan 2 (DAK) | 0,00 | 0,00 |
| | | | Penggantian Jembatan (DAK) | 1.578.170.600,00 | 1.578.170.600,00 |
| | | | Peningkatan Jalan Strategis 1 | 3.822.375.500,00 | 3.541.252.555,23 |
| | | | **Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong** | | |
| | | | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | 1.054.288.400,00 | 1.020.602.800,00 |
| | | | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 | 176.592.200,00 | 176.592.200,00 |
| | | | **Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan** | | |
| | | | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan | 18.400.000.000,00 | 18.373.873.264,00 |
| | | | **Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan** | | |
| | | | Pengadaan alat-alat berat | 100.675.000,00 | 96.410.000,00 |
| | | | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat | 1.000.000.000,00 | 981.466.000,00 |
| | | | **Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya** | | |
| | | | Pelaksanaan normalisasi saluran sungai | 58.510.700,00 | 58.510.700,00 |
| | | | Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) | 638.664.600,00 | 638.664.600,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Saluran dan Embung | 801.000.000,00 | 771.557.679,00 |
| | | | Peningkatan Jaringan Irigasi 1 (DAK) | 564.248.100,00 | 564.248.100,00 |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku** | | |
| | | | Pengelolaan Dan Operasional SPAM | 500.000.000,00 | 487.025.539,00 |
| | | | Pembangunan Jaringan SR SPAM (DAK) | 445.342.400,00 | 445.342.400,00 |
| | | | Pembangunan Jaringan SR SPAM (DAK Penugasan) | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pembangunan Jaringan SR SPAM (DAK Reguler) | 1.607.220.000,00 | 1.359.987.100,00 |
| | | | **Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya** | | |
| | | | Sosialisasi dan Montoring Sumber Daya Air | 60.000.000,00 | 59.900.000,00 |
| | | | **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh** | | |
| | | | Pembangunan/peningkatan infrastruktur | 53.272.816.870,00 | 50.674.126.255,00 |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan 1 | 364.611.800,00 | 364.611.800,00 |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan 2 | 12.348.995.000,00 | 11.372.048.700,00 |
| | | | Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1 | 14.373.959.300,00 | 12.591.419.800,00 |
| | | | Dukungan Kegiatan RSMW | 1.000.000.000,00 | 952.930.800,00 |
| | | | Pengelolaan Kompleks Islamic Centre dan Sesat Agung | 3.000.000.000,00 | 2.861.682.125,00 |
| | | | **Program Pemugaran Bangunan Bersejarah** | | |
| | | | Pemugaran Bangunan Bersejarah | 822.130.000,00 | 702.431.700,00 |
| | | | Pemugaran Bangunan Bersejarah 1 | 96.346.800,00 | 96.346.800,00 |
| | | | Pelestarian Bangunan Arsitektur Tradisional | 191.011.700,00 | 171.133.700,00 |
| | | | Pelestarian Bangunan Arsitektur Tradisional 1 | 1.664.965.000,00 | 1.546.193.400,00 |
| | | | **Program Perencanaan Tata Ruang** | | |
| | | | Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah | 259.415.000,00 | 100.989.000,00 |
| | | | Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang | 200.000.000,00 | 167.890.400,00 |
| | | | **Program Pemanfaatan Ruang** | | |
| | | | Pemanfaatan Ruang Kawasan | 225.577.700,00 | 225.577.700,00 |
| | | | Pemanfaatan Ruang Kawasan 1 | 4.547.633.300,00 | 4.483.365.300,00 |
| | | | **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** | | |
| | | | Pembinaan, Peningkatan dan Pengendalian Tenaga Kontruksi | 450.000.000,00 | 392.210.462,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Cipta Karya | 4.021.850.385,00 | 3.963.094.000,00 |
| | | | Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bina Marga | 4.688.135.000,00 | 4.633.144.200,00 |
| | | | Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Irigasi | 57.170.000,00 | 2.960.000,00 |
| | | | Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | | | **151.249.113.255,00** | **152.437.377.436,23** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Pelayanan Dasar | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman | **Program Pemanfaatan Ruang** | | |
| | | | Pembangunan Taman Ekowisata | 967.324.000,00 | 855.370.800,00 |
| | | | Pembuatan dan Perawatan | 1.161.684.300,00 | 1.144.622.400,00 |
| | | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 353.498.000,00 | 351.161.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan Pameran | 0,00 | 0,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 103.800.000,00 | 103.300.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 199.200.000,00 | 199.200.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 76.120.000,00 | 75.495.000,00 |
| | | | **Program Pengembangan Perumahan** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen UPL dan UKL | 123.041.550,00 | 121.647.975,00 |
| | | | Pemeliharaan dan Pengelolaan Rumah Susun ASN | 0,00 | 0,00 |
| | | | Penyusunan Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tulang Bawang Barat | 87.500.000,00 | 87.400.000,00 |
| | | | Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2020 | 163.688.000,00 | 163.643.000,00 |
| | | | Perencanaan dan Pengawasan Land Clearing dan Pembentukan Badan Jalan | 102.400.000,00 | 101.105.000,00 |
| | | | Perencanaan Kota Budaya | 437.591.000,00 | 429.530.000,00 |
| | | | Land cLearing dan Pembentukan Badan Jalan | 1.819.550.500,00 | 1.603.371.700,00 |
| | | | Pembuatan Software Data Base Perumahan dan Permukiman | 68.000.000,00 | 67.385.000,00 |
| | | | Pembangunan dan Sosialisasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) | 1.998.161.000,00 | 1.997.559.000,00 |
| | | | **Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah** | | |
| | | | Perencanaan Pengadaan Tanah | 602.155.900,00 | 576.265.000,00 |
| | | | Persiapan Pengadaan Tanah | 241.150.000,00 | 229.144.000,00 |
| | | | Pelaksanaan Pengadaan Tanah | 6.777.510.000,00 | 5.900.730.302,00 |
| | | | Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah | 760.600.000,00 | 635.731.730,00 |
| | | | **Program Pengelolaan** | | |
| | | | Upaya Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | 156.556.000,00 | 130.714.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **16.204.530.250,00** | **14.778.375.907,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Pelayanan Dasar | Badan Kesatuan Bangsa dan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 292.811.000,00 | 265.250.475,00 |
| | | | Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.234.000,00 | 3.234.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 |
| | | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | | |
| | | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 12.650.000,00 | 12.650.000,00 |
| | | | **Program pengembangan wawasan kebangsaan** | | |
| | | | Kegiatan Penanganan Konflik Sosial | 523.250.000,00 | 523.250.000,00 |
| | | | Pengawasan Orang Asing | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 |
| | | | Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 |
| | | | **Program pendidikan politik masyarakat** | | |
| | | | Verifikasi/Sosialisasi Ormas dan LSM | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 |
| | | | Verifikasi Berkas dan Fasilitasi Penyerahan Bantuan Keuangan Pada Partai Politik | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **1.023.325.000,00** | **995.764.475,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Pelayanan Dasar | Satuan Polisi Pamong Praja | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.739.312.000,00 | 3.700.454.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 212.800.000,00 | 197.692.614,00 |
| | | | **Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan** | | |
| | | | Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan | 590.900.000,00 | 590.300.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **4.636.612.000,00** | **4.582.046.614,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Wajib Pelayanan Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 187.400.000,00 | 186.110.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 55.000.000,00 | 54.800.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 81.450.000,00 | 80.056.940,00 |
| | | | **Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam** | | |
| | | | Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| | | | Pemantauan dan Monitoring Penanggulangan Bencana | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | | | Peningkatan Peranan Pemuda Dalam Bidang Rekonstruksi di Wilayah Paska Bencana | 17.050.000,00 | 17.050.000,00 |
| | | | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarpras di Daerah Pasca Bencana | 14.284.106.000,00 | 13.316.613.585,46 |
| **JUMLAH** | | | | **14.784.106.000,00** | **13.813.730.525,46** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Wajib Pelayanan Dasar | Dinas Sosial | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 309.650.000,00 | 307.810.000,00 |
| | | | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan Pameran Daerah | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 54.300.000,00 | 54.300.000,00 |
| | | | **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan** | | |
| | | | Kegiatan Maju dan Sejahtera (Mantra) Tubaba | 2.193.150.000,00 | 2.193.150.000,00 |
| | | | Kegiatan Pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar (ASLUT) | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| | | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bencana Alam dan Bencana Sosial (TAGANA) | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| | | | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| | | | Pendampingan Program Keluarga Harapan | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 |
| | | | Validasi, Verifikasi Bantuan Pangan Non Tunai | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| | | | Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat | 17.000.000,00 | 16.500.000,00 |
| | | | **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** | | |
| | | | Moniitoring dan Evaluasi Lembaga Kesejateraan Sosial Anak (LKSA) | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| | | | Penanaman Nilai-Nilai Perjuangan, Perintis Kemerdekaan dan Kepahlawanan | 8.000.000,00 | 6.400.000,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Penyusunan Renja dan RKA SKPD | 35.950.000,00 | 35.950.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **2.787.150.000,00** | **2.783.210.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 227.325.334,00 | 219.979.513,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** | | |
| | | | Inventarisasi Lembaga Pelatihan Kerja | 16.875.000,00 | 16.875.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Kesempatan Kerja** | | |
| | | | Penyusunan informasi bursa tenaga kerja | 37.100.000,00 | 37.100.000,00 |
| | | | **Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan** | | |
| | | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 |
| | | | Pembinaan Hubungan Antara Perusahaan dan Pekerja | 15.700.000,00 | 13.600.000,00 |
| | | | Menentukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten | 21.700.000,00 | 21.700.000,00 |
| | | | **Program pengembangan wilayah transmigrasi** | | |
| | | | Inventarisasi Lahan Eks Transmigrasi dan Penyelesaian Masalah Pertanahan | 17.852.000,00 | 17.850.000,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Penyusunan Renja dan RKA SKPD | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **510.752.334,00** | **501.304.513,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 204.285.000,00 | 204.285.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 |
| | | | **Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan** | | |
| | | | Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera | 29.150.000,00 | 29.150.000,00 |
| | | | Peringatan Hari Kartini | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | | | Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Melalui Peringatan Hari Ibu | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | | | **Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak** | | |
| | | | Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan | 19.910.000,00 | 19.910.000,00 |
| | | | Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Upaya Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA) | 46.670.000,00 | 46.670.000,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Penyusunan Renja dan RKA | 24.410.000,00 | 24.410.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **559.575.000,00** | **559.575.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Ketahanan Pangan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 5.045.000,00 | 5.045.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 187.159.000,00 | 181.109.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 21.900.000,00 | 21.900.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 53.016.000,00 | 53.016.000,00 |
| | | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | | |
| | | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani** | | |
| | | | Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten | 100.000.000,00 | 99.998.150,00 |
| | | | Pembinaan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)** | | |
| | | | Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sosialisasi Penguatan dan Pengebangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| | | | Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **525.970.000,00** | **519.918.150,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Lingkungan Hidup | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 7.450.000,00 | 7.450.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 330.780.000,00 | 310.660.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 96.000.000,00 | 91.200.000,00 |
| | | | Pengadaan mebeleur | 60.000.000,00 | 59.675.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 71.750.000,00 | 71.750.000,00 |
| | | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | 0 | 0,00 |
| | | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 0 | 0 |
| | | | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan** | | |
| | | | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 800.900.000,00 | 799.950.000,00 |
| | | | **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan** | | |
| | | | Pemantauan Kualitas Lingkungan | 20.820.000,00 | 20.470.000,00 |
| | | | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 |
| | | | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | 45.200.000,00 | 45.150.000,00 |
| | | | Koordinasi penyusunan AMDAL | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 |
| | | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| | | | **Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan** | | |
| | | | Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi | 3.100.000,00 | 0 |
| **JUMLAH** | | | | **1.553.900.000,00** | **1.524.205.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 411.008.334,00 | 406.510.982,00 |
| | | | Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| | | | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan Pameran Daerah | 0,00 | 0,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 276.800.000,00 | 276.600.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 43.500.000,00 | 41.302.275,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 |
| | | | **Program Penataan Administrasi Kependudukan** | | |
| | | | Sosialisasi kebijakan kependudukan | 69.236.000,00 | 69.236.000,00 |
| | | | Penerbitan Dokumen Kependudukan | 580.100.000,00 | 576.953.700,00 |
| | | | Pelayanan Dokumen Kependudukan | 336.476.000,00 | 333.435.672,00 |
| | | | Pengelolaan SIAK | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| | | | Koordinasi dan Konsultansi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan | 42.050.000,00 | 41.889.000,00 |
| | | | Peningkatan Sistem dan Inofasi Pelayanan | 90.370.000,00 | 85.945.798,00 |
| | | | Peningkatan Kinerja Aparatur Kependudukan | 532.795.000,00 | 532.795.000,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Penyusunan Renja dan RKA SKPD | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| | | | Penyusunan RFK SKPD | 4.425.000,00 | 4.425.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **2.514.960.334** | **2.497.293.427** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 351.648.100,00 | 350.715.152,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 95.588.900,00 | 95.588.900,00 |
| | | | **Program peningkatan disiplin** | | |
| | | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan formal | 22.125.000,00 | 22.125.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat** | | |
| | | | Gelar Nasional dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) | 0,00 | 0,00 |
| | | | Lomba PKK | 0,00 | 0,00 |
| | | | Jambore PKK | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pembinaan PKK | 69.438.000,00 | 69.438.000,00 |
| | | | Pembinaan dan Pengembangan BUMTi | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rakor dan Rakon PKK | 20.668.000,00 | 20.668.000,00 |
| | | | **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam** | | |
| | | | Lomba Tiyuh | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program Bulan Bhakti Gotong Royong | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pameran Hasil Usaha Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pendampingan dan Pembinaan Penyusunan Indeks Desa Membangun | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| | | | Tiyuh Siaga Mandiri | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Program Pembinaan dan** | | |
| | | | Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Tiyuh | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Desa | 36.425.000,00 | 36.425.000,00 |
| | | | Tahapan Penyusunan APBT | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Tiyuh dan Kelembagaan Pemerintah Tiyuh** | | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh | 0,00 | 0,00 |
| | | | Penyelenggaraan Tata Kelola Penyusunan Profil Tiyuh | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | | | Peningkatan Kapasitas Kader PKK | 148.027.000,00 | 148.027.000,00 |
| | | | Pelatihan Pengembangan Potensi Tiyuh/Kewirausahaan | 196.850.000,00 | 196.650.000,00 |
| | | | **Program Perencanaan** | | |
| | | | Penyusunan Renja dan RKA SKPD | 18.975.000,00 | 18.975.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **1.317.345.000,00** | **1.316.212.052,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 222.965.000,00 | 207.715.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 192.000.000,00 | 192.000.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 35.000.000,00 | 0 |
| | | | **Program Keluarga Berencana** | | |
| | | | Kesatuan Gerak PKK, KB dan Kesehatan | 24.085.000,00 | 24.085.000,00 |
| | | | Peningkatan Kualitas Pelayanan KB Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (DAK) | 1.234.536.000,00 | 1.193.930.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan dan Penyuluhan Melalui Balai Penyuluhan KB | 2.446.262.000,00 | 2.387.862.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **4.154.848.000,00** | **4.005.592.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Perhubur | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan | 2.062.000,00 | 2.062.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 335.023.000,00 | 328.443.000,00 |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan Pameran Daerah | 0 | 0 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 |
| | | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | | |
| | | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| | | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 |
| | | | **Pogram peningkatan pelayanan angkutan** | | |
| | | | Pembentukan Tim Amdalalin | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 |
| | | | Pengumpulan Dokumen dan Analisis Database Pelayanan Angkutan | 323.300.000,00 | 323.200.000,00 |
| | | | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan** | | |
| | | | Perawatan dan Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) | 308.806.000,00 | 308.806.000,00 |
| | | | Pengadaan Fasilitas LLAJ | 43.600.000,00 | 43.580.000,00 |
| | | | **Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas** | | |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Operasional Manajemen Rekayasa Lalu Lintas | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 |
| | | | **Program Pengembangan Data/Informasi** | | |
| | | | Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Kepegawaian | 5.474.000,00 | 5.474.000,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Penyusunan Renja dan RKA SKPD | 3.391.000,00 | 3.391.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **1.277.246.000** | **1.270.546.000** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Komunikasi dan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 609.233.000 | 603.417.486 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 456.000.000 | 455.700.000 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000 | 93.600.000 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 86.180.000 | 85.720.000 |
| | | | **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** | | |
| | | | Penerbitan Buletin Surat Kabar Pemerintah Daerah | 113.742.500 | 113.742.500 |
| | | | Penerbitan Informasi Melalui Penerbitan Buku Selayang Pandang | 72.720.100 | 72.630.000 |
| | | | Operasional Peliputan dan Pelayanan Dokumentasi | 125.340.000 | 117.640.000 |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembinaan Pengawasan Menara Tower Telekomunikasi, Warnet dan Radio | 17.660.400 | 17.660.400 |
| | | | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | 2.957.213.000 | 2.956.912.100 |
| | | | Pengelolaan dan Pemutakhiran Web Site | 368.332.200 | 367.429.080 |
| | | | Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 4.900.000 | - |
| | | | **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi** | | |
| | | | E-Govermance | 387.754.000 | 387.409.100 |
| **JUMLAH** | | | | **5.292.675.200,00** | **5.271.860.666,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 4.790.000,00 | 4.790.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 510.891.000,00 | 420.721.111,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 143.300.000,00 | 142.900.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 187.200.000,00 | 187.200.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 125.400.000,00 | 123.084.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 92.800.000,00 | 88.393.225,00 |
| | | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | | |
| | | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 30.000.000,00 | 29.250.000,00 |
| | | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan formal | 30.000.000,00 | 0,00 |
| | | | **Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif** | | |
| | | | Sosialisasi Informasi Dukungan Penyediaan | 88.000.000,00 | 88.000.000,00 |
| | | | **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah** | | |
| | | | Penyelenggaraan pelatihan | 57.495.000,00 | 57.495.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan Promosi | 0,00 | 0,00 |
| | | | Monitoring Evaluasi dan | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi** | | |
| | | | Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 |
| | | | Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pelatihan Penyusunan Rapat Anggota Tahunan | 54.655.000,00 | 54.655.000,00 |
| | | | **Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan** | | |
| | | | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| | | | Pemantauan dan Informasi Stock dan Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| | | | Peningkatan Ketersediaan Data Kemetrologian | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| | | | Tera Ulang Alat UTTP | 275.000.000,00 | 274.950.000,00 |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyuluhan dan Sosialisasi Tentang Perlindungan Konsumen | 0,00 | 0,00 |
| | | | Monitoring Penyaluran Barang Bersubsidi | 125.000.000,00 | 111.000.000,00 |
| | | | **Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri** | | |
| | | | Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri | 230.300.000,00 | 179.800.000,00 |
| | | | Penyusunan Data Pasar dan Perdagangan | 104.000.000,00 | 104.000.000,00 |
| | | | Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagan Kaki Lima dan Asongan | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan | 84.750.000,00 | 82.350.000,00 |
| | | | Penyusunan Kebijakan Perdagangan | 0,00 | 0,00 |
| | | | Peningkatan Sarana dan Disiplin Petugas Pasar | 244.000.000,00 | 244.000.000,00 |
| | | | Promosi dan Sosilisasi Perdagangan Pasar Desa | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Program pengembangan industri kecil dan menengah** | | |
| | | | Promosi Hasil Industri dan Kerajinan Unggulan Daerah | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Mutu Industri Kreatif | 214.551.000,00 | 171.190.000,00 |
| | | | Pelatihan Kerajinan Anyaman | 132.650.000,00 | 87.900.000,00 |
| | | | Pendataan Industri Kecil Menengah | 50.000.000,00 | 48.020.000,00 |
| | | | Pengembangan Industri Olahan Makanan | 359.300.000,00 | 315.350.400,00 |
| | | | **Program penataan struktur** | | |
| | | | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten | 50.000.000,00 | 0,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Penyusunan Renja dan RKA SKPD | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **3.594.102.000,00** | **3.215.068.736,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 494.900.000,00 | 481.838.812,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 138.000.000,00 | 138.000.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **726.500.000,00** | **713.438.812,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 414.778.000,00 | 404.158.588,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 34.700.000,00 | 34.600.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 45.660.000,00 | 42.410.000,00 |
| | | | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | | |
| | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 20.840.000,00 | 20.840.000,00 |
| | | | **Program peningkatan peran serta kepemudaan** | | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan | 108.180.000,00 | 108.180.000,00 |
| | | | Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda | 0 | 0 |
| | | | **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga** | | |
| | | | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | 290.600.000,00 | 290.600.000,00 |
| | | | **Program pengembangan data/informasi/statistik daerah** | | |
| | | | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah | 28.936.000,00 | 28.936.000,00 |
| | | | **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** | | |
| | | | Persentasi Aset Budaya dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Rumah Badik Lampung | 170.690.000,00 | 170.316.000,00 |
| | | | Pendataan Sistematis Aset dan Cagar Budaya Dalam Komunitas Budaya Masyarakat/Etnogravi | 115.050.000,00 | 114.963.000,00 |
| | | | **Program Pengelolaan Keragaman Budaya** | | |
| | | | Penyelenggaraan dialog kebudayaan | 701.800.000,00 | 701.800.000,00 |
| | | | Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah (Pentas Seni Lampung Fair) | 0 | 0 |
| | | | Festival Bambu | 532.000.000,00 | 532.000.000,00 |
| | | | Festival Tubaba | 0 | 0 |
| | | | Festival Ragem Sai Mangi Wawai | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| | | | **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** | | |
| | | | Festival Krakatau | 0 | 0 |
| | | | Promosi Pariwisata Dalam Daerah dan Pengenalan Berbagai Macam Kopi Khas Lampung | 381.790.000,00 | 381.790.000,00 |
| | | | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** | | |
| | | | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata | 3.155.698.000,00 | 2.893.509.891,79 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kura-Kura | 101.800.000,00 | 101.700.000,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Penyusunan Renja dan RKA | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **6.487.922.000,00** | **6.211.203.479,79** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 179.157.100,00 | 174.777.739,00 |
| | | | Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | Penyusuan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.600.000,00 | 26.500.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor | 120.000.000,00 | 119.050.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 |
| | | | **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan** | | |
| | | | Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat | 13.400.000,00 | 0 |
| | | | Peningkatan Pengelola Kearsipan | 15.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | Lomba Bercerita dan Pidato Bahasa Lampung Tingkat Provinsi | 14.618.400,00 | 14.618.400,00 |
| | | | Pengembangan Minat dan Kebiasaan Membaca | 0,00 | 0 |
| | | | Kegiatan Pengadaan Buku Pustaka | 200.000.000,00 | 197.500.000,00 |
| | | | **Program Promosi Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Kegiatan Promosi Daerah | 1.900.000,00 | 0 |
| **JUMLAH** | | | | **730.275.500,00** | **695.046.139,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Tulang Bawang Tengah | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | | |
| | | | Pembangunan Sarana dan | | 751.244.296,00 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat | 25.580.000,00 | 25.580.000,00 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 21.995.000,00 | 21.995.000,00 |
| | | | Pengadaan Seragam Linmas Lengkap Kelurahan | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| | | | Pembangunan Taman | 34.829.296,00 | 34.179.296,00 |
| | | | PembangUnan Sumur Bor | 432.000.000,00 | 432.000.000,00 |
| | | | Pembangunan Pos Kamling | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| | | | Pembangunan saluran | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 |
| | | | Program Pelayanan | | |
| | | | Penyusunan Dokumen | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan | 128.909.000,00 | 128.909.000,00 |
| | | | Operasional Kelurahan | 198.710.000,00 | 198.710.000,00 |
| | | | Operasional Kelurahan Mulya Asri | 199.948.000,00 | 199.948.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan | 89.014.000,00 | 89.014.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana | | |
| | | | pengadaan Kendaraan | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 32.840.000,00 | 32.840.000,00 |
| | | | Rehabilitasi sedang/berat | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| | | | Program Pembinaan dan | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Program Perencanaan | 28.910.408,00 | 28.910.408,00 |
| | | | Penyelenggaraan Musrenbang | 21.740.000,00 | 21.740.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan Musrenbang | 12.950.000,00 | 12.950.000,00 |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 42.120.000,00 | 42.120.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan | 58.260.000,00 | 58.260.000,00 |
| JUMLAH | | | | **2.600.000.000,00** | **2.599.350.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Tulang Bawang Udik | Kecamatan Tulang Bawang Tengah | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 106.700.000,00 | 106.700.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 85.200.000,00 | 85.200.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin aparatur | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tyuh | 19.700.000,00 | 19.700.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Tumijajar | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dayamurni | 210.641.000,00 | 210.641.000,00 |
| | | | Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 31.095.296,00 | 31.095.296,00 |
| | | | Pengadaan Seragam Linmas Lengkap Kelurahan Dayamurni | 40.000.000,00 | 39.800.000,00 |
| | | | Pembangunan Saluran Drainase Keluarahan Dayamurni | 201.888.000,00 | 201.888.000,00 |
| | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana | 185.200.000,00 | 184.670.000,00 |
| | | | Pemasangan Lampu Penerangan Depan Rumah | 108.000.000,00 | 107.820.000,00 |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 92.410.000,00 | 92.210.000,00 |
| | | | Operasional Kelurahan Dayamurni | 228.786.000,00 | 228.538.500,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 151.300.000,00 | 151.000.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 115.400.000,00 | 115.000.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 33.252.000,00 | 33.252.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin aparatur | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | |
| | | | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dana Tivuh | 14.550.000,00 | 14.550.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 21.377.704,00 | 21.377.600,00 |
| **JUMLAH** | | | | **1.450.000.000,00** | **1.447.942.396,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan PagarDewa | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 7.725.000,00 | 7.725.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 96.250.000,00 | 96.037.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24.500.000,00 | 24.350.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 32.000.000,00 | 31.250.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin aparatur | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh | 10.325.000,00 | 10.325.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **298.887.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Gunung Agung | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran | 68.049.800.000,00 | 68.049.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 50.500.000,00 | 50.100.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan | 22.700.000,00 | 22.700.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Disiplin** | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 16.250.000,00 | 16.250.000,00 |
| | | | **Program Pembinaan dan Fasilitasi** | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh | 6.478.000,00 | 6.478.000,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 21.350.000,00 | 21.350.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan Musyawarah Bulanan | 10.872.200,00 | 10.872.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **299.599.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Gunung Terang | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 123.955.000,00 | 123.955.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.070.000,00 | 10.070.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 37.200.000,00 | 37.200.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin aparatur | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh | 5.915.000,00 | 5.915.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 20.760.000,00 | 20.760.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Lambu Kibang | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 3.800.100,00 | 3.800.100,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 131.797.400,00 | 131.797.400,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.757.500,00 | 8.757.500,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh | 11.590.000,00 | 11.590.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 21.955.000,00 | 21.955.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Way Kenanga | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Penyususanan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran | 113.960.000,00 | 113.960.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan dinas/oprasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/Bekala Gedung kantor | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/Bekala Kendaraan Dinas/Operasional | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | |
| | | | Pengadaan Pakaian dinas berserta | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program pembinaan dan fasilitasi | | |
| | | | Pendampingan pengelolaan alokasi dana tyuh | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| | | | Program perencanaan pembangunan daerah | | |
| | | | Musrenbang kecamatan | 22.040.000,00 | 22.040.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Batu Putih | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 116.176.000,00 | 116.162.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 9.470.000,00 | 9.470.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin aparatur | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tyuh | 4.059.000,00 | 4.059.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 22.195.000,00 | 22.195.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **299.986.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Sekretariat Daera | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | Bagian Administrasi Pemerintahan | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 289.700.600,00 | 289.165.600,00 |
| | | | Penyusunan Laporan RFK | 97.850.000,00 | 92.487.500,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 96.000.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 33.900.000,00 | 33.848.000,00 |
| | | | **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi** | | |
| | | | Pembangunan Tubaba Smart City | 167.418.400,00 | 147.720.000,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Monitoring dan Pengendalian Pembangunan | 67.400.000,00 | 64.950.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **752.269.000,00** | **721.771.100,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Sekretariat Dae<br><br>Bagian Kesejahteraan Rakyat | **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** | | |
| | | | Penilaian dan Perlombaan UKS Tingkat Kabupaten | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pembinaan dan Perlombaan UKS Tingkat Provinsi | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 223.356.000,00 | 217.219.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 37.090.000,00 | 37.090.000,00 |
| | | | **Program Pembinaan Keragaman Agama** | | |
| | | | Penyelenggaraan Syafari Ramadhan | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi | 347.050.000,00 | 268.050.000,00 |
| | | | Lomba Da'i Cilik dan Festival Qosidah | 0,00 | 0,00 |
| | | | Penyelenggaraan Transit Haji Daerah | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Pengajian | 123.610.000,00 | 123.610.000,00 |
| | | | Seleksi Tilawatil Qur'an | 200.600.000,00 | 200.400.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **1.025.306.000,00** | **939.969.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Sekretariat Dae | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | Bagian Perekonomian | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 240.872.600,00 | 238.852.600,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 91.200.000,00 | 91.200.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional | 49.270.000,00 | 49.247.500,00 |
| | | | **Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah** | | |
| | | | Pengawasan Monitoring dan Evauasi Perekonomian Infasi Daerah | 91.600.000,00 | 90.782.000,00 |
| | | | Evaluasi dan Pelaporan Layanan Informasi Ekonomi Terpadu | 30.912.000,00 | 30.912.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **503.854.600,00** | **500.994.100,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Sekretariat Daera<br>Bagian Protokol<br>dan Komunikasi<br>Pimpinan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.647.780.000,00 | 1.630.595.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** | | |
| | | | Pelayanan Umum Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 846.400.000,00 | 842.400.000,00 |
| | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 180.840.000,00 | 180.840.000,00 |
| | | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 425.340.000,00 | 425.340.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **3.100.360.000,00** | **3.079.175.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Sekretariat Dae | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | Bagian Tata Pemerintahan | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 137.050.000 | 137.050.000,00 |
| | | | Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 124.900.000 | 124.900.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional | 93.600.000 | 93.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional | 40.481.000 | 40.481.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** | | |
| | | | Fasilitasi Pejabat Daerah | 40.700.000 | 40.700.000,00 |
| | | | **Program Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah** | | |
| | | | Fasilitasi Rapat APKASI | 30.000.000 | 30.000.000,00 |
| | | | Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Daerah | 58.800.000 | 58.800.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Tiyuh** | | |
| | | | Penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan kepalo Tiyuh | 34.600.000 | 34.600.000,00 |
| | | | Pembentukan Kecamatan, Tiyuh dan Kelurahan | 38.137.000 | 35.387.000,00 |
| | | | **Program Penataan Daerah Otonomi** | | |
| | | | Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah | 220.822.000 | 209.622.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **819.090.000** | **805.140.000** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Sekretariat Daerah Bagian Umum | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 5.088.276.797 | 5.088.276.797 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 710.000.000 | 709.760.000 |
| | | | | | |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 180.600.000 | 156.300.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 120.000.000 | 119.996.114 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 507.000.000 | 507.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 300.000.000 | 300.000.000 |
| | | | | | |
| | | | **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** | | |
| | | | Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah | 1.812.100.000 | 1.812.015.000 |
| | | | Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Wakil Kepala Daerah | 1.268.000.000 | 1.267.000.000 |
| | | | | | |
| | | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | - | - |
| **JUMLAH** | | | | **9.985.976.797,00** | **9.960.347.911,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Sekretariat Daerah Bagian Hukum | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 180.020.000,00 | 180.020.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | | | | | |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 41.500.000,00 | 41.500.000,00 |
| | | | | | |
| | | | **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan** | | |
| | | | Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah atau Rancangan Peraturan Daerah | 134.030.000,00 | 134.030.000,00 |
| | | | Jasa Bantuan Hukum/Advokasi Hukum | 264.800.000,00 | 264.700.000,00 |
| | | | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| | | | Klinik Layanan Konsultasi Hukum Peraturan Tiyuh | 81.050.000,00 | 81.050.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **900.000.000,00** | **899.900.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Sekretariat Daerah Bagian Organisasi | **Program Pelayanan Adm. Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 270.113.000 | 266.688.000 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan dinas / Operasional | 105.600.000 | 105.600.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ Operasianal | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur** | | |
| | | | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur | 70.000.000 | 70.000.000 |
| | | | Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja | 8.500.000 | 8.400.000 |
| | | | Momeradum Off Understanding (MOU) Pemerintah Kabupaten | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja | 14.500.000 | 14.400.000 |
| | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan | 14.500.000 | 14.400.000 |
| | | | Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan | 17.500.000 | 17.400.000 |
| | | | Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah | 140.000.000 | 139.900.001 |
| | | | Bimtek dan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi | | |
| | | | Bimtek Penyusunan Sistem Akuntabilitas kinerja Aparatur pemerintah sakip | 225.000.000 | 225.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | **897.213.000** | **893.288.001** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | **Program Pelayanan Adm. Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 241.356.000 | 241.276.000 |
| | | | Dana Operasional dan Pengelolaan ULP Kabupaten Tubaba | 1.587.850.000 | 1.569.850.000 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 244.600.000 | 244.235.000 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | 98.400.000 | 98.400.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | 58.322.000 | 58.322.000 |
| | | | **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi** | | |
| | | | Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | 418.920.000 | 418.420.000 |
| | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 52.680.000 | 52.680.000 |
| | | | Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 52.680.000 | 52.680.000 |
| **JUMLAH** | | | | **2.754.808.000,00** | **2.735.863.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Sekretariat Daerah<br>Bagian Perencanaan dan Keuangan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 6.875.554.919 | 6.866.972.519,00 |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 136.760.000 | 136.760.000,00 |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 223.200.000 | 223.200.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional | 266.940.000 | 266.940.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | 1.366.040.000 | 1.365.500.000,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Penyusunan Renja dan RKA SKPD | 155.185.000 | 155.185.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **9.023.679.919,00** | **9.014.557.519,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Sekretariat Daerah<br>Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang Barat | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 154.350.000,00 | 153.977.966,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.056.989.795,00 | 3.050.826.858,00 |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan Pameran Daearh | 0 | 0 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 912.000.000,00 | 886.135.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 379.500.000,00 | 379.200.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 389.200.000,00 | 388.593.150,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 226.756.000,00 | 226.594.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Disiplin aparatur** | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 262.200.000,00 | 255.300.000,00 |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 194.000.000,00 | 194.000.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | |
| | | | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 141.299.280,00 | 141.299.280,00 |
| | | | Kursus-Kursus Singkat Pengelolaan Keuangan | 69.486.684,00 | 69.481.684,00 |
| | | | **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah** | | |
| | | | Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan | 429.285.070,00 | 429.068.520,00 |
| | | | Rapat-Rapat Paripurna | 460.569.892,00 | 460.319.640,00 |
| | | | Kegiatan Reses | 1.536.258.553,00 | 1.536.127.926,00 |
| | | | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah | 1.766.326.401,00 | 1.766.241.219,00 |
| | | | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah | 1.765.022.828,00 | 1.765.021.513,00 |
| | | | Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan | 786.910.666,00 | 786.654.766,00 |
| | | | Penyusunan Raperda dan Nasakah Akademis | 250.000.000,00 | 249.495.000,00 |
| | | | Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD | 447.668.666,00 | 447.668.666,00 |
| | | | Parlementaria dan Liputan Kegiatan | 40.519.800,00 | 40.519.800,00 |
| | | | Bimbingan Teknis dan Pendidikan Non Formal Anggota DPRD | 882.255.473,00 | 877.166.118,00 |
| | | | ADKASI Bimtek Pimpinan DPRD | 139.431.892,00 | 139.405.262,00 |
| | | | Pembahasan Raperda | 358.800.000,00 | 356.199.860,00 |
| | | | Workshop DPRD | 680.613.000,00 | 679.448.960,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Penyusunan Renja dan RKA SKPD | 600.556.000,00 | 600.555.110,00 |
| **JUMLAH** | | | | **16.000.000.000,00** | **15.949.300.298,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Sekretariat Daera<br><br>Sekretariat Korps Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 179.620.000,00 | 179.615.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 39.000.000,00 | 38.700.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 60.600.000,00 | 60.100.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | | | **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur** | 0 | 0 |
| | | | Hut Korpri | 0 | 0 |
| **JUMLAH** | | | | **306.720.000,00** | **305.915.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Tulang Bawang Tengah | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | | |
| | | | Pembangunan Sarana dan | 751.244.296,00 | 751.244.296,00 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat | 25.580.000,00 | 25.580.000,00 |
| | | | Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 21.995.000,00 | 21.995.000,00 |
| | | | Pengadaan Seragam Linmas Lengkap Kelurahan | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| | | | Pembangunan Taman | 34.829.296,00 | 34.179.296,00 |
| | | | PembangUnan Sumur Bor | 432.000.000,00 | 432.000.000,00 |
| | | | Pembangunan Pos Kamling | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| | | | Pembangunan saluran | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 |
| | | | Program Pelayanan | | |
| | | | Penyusunan Dokumen | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan | 128.909.000,00 | 128.909.000,00 |
| | | | Operasional Kelurahan | 198.710.000,00 | 198.710.000,00 |
| | | | Operasional Kelurahan Mulya Asri | 199.948.000,00 | 199.948.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan | 89.014.000,00 | 89.014.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana | | |
| | | | pengadaan Kendaraan | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 32.840.000,00 | 32.840.000,00 |
| | | | Rehabilitasi sedang/berat | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| | | | Program Pembinaan dan | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Program Perencanaan | 28.910.408,00 | 28.910.408,00 |
| | | | Penyelenggaraan Musrenbang | 21.740.000,00 | 21.740.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan Musrenbang | 12.950.000,00 | 12.950.000,00 |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 42.120.000,00 | 42.120.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan | 58.260.000,00 | 58.260.000,00 |
| JUMLAH | | | | **2.600.000.000,00** | **2.599.350.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Tulang Bawang Udik | Kecamatan Tulang Bawang Tengah | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 106.700.000,00 | 106.700.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 85.200.000,00 | 85.200.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin aparatur | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tyuh | 19.700.000,00 | 19.700.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Tumijajar | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dayamurni | 210.641.000,00 | 210.641.000,00 |
| | | | Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 31.095.296,00 | 31.095.296,00 |
| | | | Pengadaan Seragam Linmas Lengkap Kelurahan Dayamurni | 40.000.000,00 | 39.800.000,00 |
| | | | Pembangunan Saluran Drainase Keluarahan | 201.888.000,00 | 201.888.000,00 |
| | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana | 185.200.000,00 | 184.670.000,00 |
| | | | Pemasangan Lampu Penerangan Depan Rumah | 108.000.000,00 | 107.820.000,00 |
| | | | Program Pelayanan Administrasi | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 92.410.000,00 | 92.210.000,00 |
| | | | Operasional Kelurahan Dayamurni | 228.786.000,00 | 228.538.500,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 151.300.000,00 | 151.000.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 115.400.000,00 | 115.000.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 33.252.000,00 | 33.252.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin aparatur | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi | | |
| | | | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dana Tiyuh | 14.550.000,00 | 14.550.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 21.377.704,00 | 21.377.600,00 |
| **JUMLAH** | | | | **1.450.000.000,00** | **1.447.942.396,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan PagarDewa | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 7.725.000,00 | 7.725.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 96.250.000,00 | 96.037.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24.500.000,00 | 24.350.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 32.000.000,00 | 31.250.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin aparatur | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh | 10.325.000,00 | 10.325.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **298.887.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Gunung Agung | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran | 68.049.800.000,00 | 68.049.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 50.500.000,00 | 50.100.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana** | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan | 22.700.000,00 | 22.700.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Disiplin** | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 16.250.000,00 | 16.250.000,00 |
| | | | **Program Pembinaan dan Fasilitasi** | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh | 6.478.000,00 | 6.478.000,00 |
| | | | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 21.350.000,00 | 21.350.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan Musyawarah Bulanan | 10.872.200,00 | 10.872.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **299.599.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Gunung Terang | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 123.955.000,00 | 123.955.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.070.000,00 | 10.070.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 37.200.000,00 | 37.200.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin aparatur | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh | 5.915.000,00 | 5.915.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 20.760.000,00 | 20.760.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Lambu Kibang | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 3.800.100,00 | 3.800.100,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 131.797.400,00 | 131.797.400,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.757.500,00 | 8.757.500,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tiyuh | 11.590.000,00 | 11.590.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 21.955.000,00 | 21.955.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Way Kenanga | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Penyususanan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran | 113.960.000,00 | 113.960.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan dinas/oprasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/Bekala Gedung kantor | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/Bekala Kendaraan Dinas/Operasional | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | |
| | | | Pengadaan Pakaian dinas berserta | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program pembinaan dan fasilitasi | | |
| | | | Pendampingan pengelolaan alokasi dana tyuh | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| | | | Program perencanaan pembangunan daerah | | |
| | | | Musrenbang kecamatan | 22.040.000,00 | 22.040.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Kecamatan Batu Putih | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 116.176.000,00 | 116.162.000,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 9.470.000,00 | 9.470.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin aparatur | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi | | |
| | | | Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Tyuh | 4.059.000,00 | 4.059.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | 22.195.000,00 | 22.195.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **300.000.000,00** | **299.986.000,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Inspektorat | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 584.853.500,00 | 552.323.500,00 |
| | | | Penyelenggaraan Pameran Daerah | 0,00 | 0,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 285.775.000,00 | 285.235.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 98.400.000,00 | 98.400.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung | 78.300.000,00 | 77.900.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 159.485.000,00 | 158.535.000,00 |
| | | | **Program Peningkatan Disiplin** | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Program Peningkatan Kapasitas** | | |
| | | | Pelatihan Kantor Sendiri | 114.400.000,00 | 114.400.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | | |
| | | | Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga | 24.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kegiatan Diklat Aparatur | 34.171.600,00 | 34.171.400,00 |
| | | | **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** | | |
| | | | Pelaksanaan Pengawasan | 216.900.000,00 | 216.900.000,00 |
| | | | Penanganan Kasus | 68.450.000,00 | 68.450.000,00 |
| | | | Tindak Lanjut Hasil Temuan | 104.100.000,00 | 104.100.000,00 |
| | | | Evaluasi Lakip | 27.750.000,00 | 27.750.000,00 |
| | | | Evaluasi SPIP | 27.700.000,00 | 27.700.000,00 |
| | | | Pengawasan Khusus Pemeriksaan, Evaluasi dan | 67.200.000,00<br>70.500.000,00 | 67.200.000,00<br>70.500.000,00 |
| | | | Verifikasi LHKPN | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| | | | Penanganan Laporan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | | Evaluasi dan Monitoring Aksi Pencegahan Korupsi Serta Verifikasi Pelaporan Rencana | 42.650.000,00 | 42.650.000,00 |
| | | | Audit Kinerja | 47.400.000,00 | 47.400.000,00 |
| | | | Revieu RKPD | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | | | Revieu RKA | 17.900.000,00 | 17.900.000,00 |
| | | | Revieu Penyerapan Anggaran | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| | | | Revieu Penyerapan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| | | | Monitoring Dana BOS | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| | | | Telaah Sejawat | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | | | Probity Audit | 44.137.500,00 | 44.137.500,00 |
| | | | Pemeriksaan Serentak | 24.850.000,00 | 24.850.000,00 |
| | | | Pemutakhiran Data Tindak | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | | | Revieu LKPD | 13.875.000,00 | 13.500.000,00 |
| | | | Evaluasi Implementasi SAKIP | 36.025.000,00 | 36.025.000,00 |
| | | | Audit Dengan Tujuan | 70.750.000,00 | 70.750.000,00 |
| | | | Revieu DAK | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pendampingan dan | 69.700.000,00 | 69.700.000,00 |
| | | | Penilaian Mandiri Reformasi | 30.654.900,00 | 30.654.000,00 |
| | | | Survey Penegakan Intergritas | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | | | **2.527.427.500,00** | **2.478.631.400,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.240.059.500,00 | 1.201.537.900,00 |
| | | | Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| | | | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| | | | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban | 79.280.000,00 | 79.280.000,00 |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 22.920.000,00 | 22.920.000,00 |
| | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Daerah | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 88.000.000,00 | 86.110.450,00 |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan | 16.080.000,00 | 16.080.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 234.800.000,00 | 232.300.000,00 |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 182.260.000,00 | 181.708.460,00 |
| | | | Program peningkatan disiplin aparatur | | |
| | | | Pengadaan pakaian dinas beserta | 38.250.000,00 | 38.200.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | |
| | | | Penyusunan Perencanaan Kawasan Perkotaan | 113.600.000,00 | 113.600.000,00 |
| | | | Pendampingan Kerjasama Dengan | 88.950.000,00 | 81.950.000,00 |
| | | | Kajian Terhadap Implementasi Kebijakan dan Potensi Dalam Pengembangan | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | Penyusunan rancangan RKPD | 94.020.000,00 | 94.020.000,00 |
| | | | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | 176.810.000,00 | 176.685.000,00 |
| | | | Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 |
| | | | Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara | 54.800.000,00 | 54.800.000,00 |
| | | | Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 |
| | | | Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan | 435.000.000,00 | 435.000.000,00 |
| | | | Penyusunan Rancangan RKPD | 52.603.000,00 | 52.603.000,00 |
| | | | Koordinasi Perencanaan Menggunakan E Planning | 127.767.000,00 | 127.767.000,00 |
| | | | Koordinasi dan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya | 72.882.000,00 | 72.882.000,00 |
| | | | Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Tubaba | 76.550.000,00 | 76.200.000,00 |
| | | | Fasilitasi Aksi Daerah | 48.272.000,00 | 48.272.000,00 |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Koordinasi dan Pendampingan Perencanaan Bidan Fisik dan Prasarana | 157.600.000,00 | 156.566.000,00 |
| | | | Koordinasi dan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Bidang | 90.725.000,00 | 90.725.000,00 |
| | | | Pendampingan Kegiatan Percepatan Sanitasi | 115.897.000,00 | 110.497.000,00 |
| | | | Monitoring, Evaluasi Program dan | 70.736.000,00 | 70.718.000,00 |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana TP/UB dan | 28.500.000,00 | 27.700.000,00 |
| | | | Pembuatan Video Profil Pembangunan dan Investasi | 56.875.000,00 | 56.875.000,00 |
| | | | Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (S'DGES) | 56.676.000,00 | 56.676.000,00 |
| | | | Penyusunan/Updating Data Sistem Jaringan Berbasis GIS | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 |
| | | | Penyusunan Profil OPD Koordinasi | 8.120.000,00 | 8.120.000,00 |
| | | | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik | | |
| | | | Penyusunan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kab. Tulang Bawang Barat | 79.687.000,00 | 79.687.000,00 |
| | | | Penyusunan Data Inflasi | 9.050.000,00 | 9.050.000,00 |
| | | | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat | 2.300.000,00 | 2.200.000,00 |
| | | | Penyusunan Pusat Data Base | 2.700.000,00 | 2.600.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| JUMLAH | | | | **4.098.519.500,00** | **4.039.979.810,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BPKAD | Pengendalian Surat Perintah Pencairan | 160.515.000,00 | 160.096.000,00 |
| | | | Penyusunan Perubahan Anggaran | 886.544.000,00 | 886.544.000,00 |
| | | | Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 789.029.000,00 | 784.029.000,00 |
| | | | Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 |
| | | | Pendampingan Pelaporan Dana Perimbangan, Pendapatan Lainnya dan Pinjaman Daerah | 48.175.000,00 | 48.175.000,00 |
| | | | Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 |
| | | | Sosialisasi Paket Regulasi Tentang | 57.500.000,00 | 57.500.000,00 |
| | | | Penyusunan Paket Regulasi Tentang | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 |
| | | | Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pengembangan Sistem Informasi | 212.946.489,00 | 212.452.000,00 |
| | | | Pendukung Operasional Penyelenggaraan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, | 142.000.000,00 | 141.930.000,00 |
| | | | Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah | 108.540.000,00 | 108.540.000,00 |
| | | | Pengawasan dan Pengamanan Aset | 117.380.000,00 | 117.380.000,00 |
| | | | Penyusunan Neraca Aset | 99.800.000,00 | 99.800.000,00 |
| | | | Pendampingan Penyusunan Laporan | 45.430.000,00 | 45.430.000,00 |
| | | | Penyusunan Standar Satuan | 0,00 | 0,00 |
| | | | Penyusunan Analisa Standar | 43.958.000,00 | 43.958.000,00 |
| | | | Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi | 106.834.000,00 | 106.834.000,00 |
| | | | Inventarisasi Aset | 197.690.000,00 | 197.690.000,00 |
| | | | Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Penerima TPG, Tamsil Guru, Sertifikasi | 56.461.000,00 | 56.346.000,00 |
| | | | Rekonsiliasi Dana JKN Pada Aplikasi Simda Keuangan | 54.052.000,00 | 40.052.000,00 |
| | | | Bimtek Aplikasi Simda Versi | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| | | | Sosialisasi Pengelolaan DAK Fisik dan | 39.100.000,00 | 39.100.000,00 |
| | | | Pengendalian Pelaksanaan | 129.250.000,00 | 129.250.000,00 |
| | | | Verifikasi dan Penginputan Data Belanja | 156.950.000,00 | 156.950.000,00 |
| | | | Konsolidasi dan Rekonsiliasi Dana BOS | 43.265.000,00 | 38.025.000,00 |
| | | | Penilaian dan Penghapusan Barang | 60.180.000,00 | 60.180.000,00 |
| | | | Pengelolaan Administrasi Gaji dan | 63.675.000,00 | 63.675.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **7.239.599.609,00** | **7.204.264.233,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | BPPRD | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 820.400.000,00 | 818.511.000,00 |
| | | | Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 |
| | | | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 80.600.000,00 | 80.600.000,00 |
| | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | |
| | | | Pemungutan Pajak Daerah | 131.353.000,00 | 129.353.000,00 |
| | | | Perhitungan dan Penetapan Pajak | 87.383.500,00 | 86.383.000,00 |
| | | | Penyusunan Peraturan Bupati Tentang BPHTB | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Pajak dan Retrebusi Daerah | 69.592.000,00 | 69.408.000,00 |
| | | | Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB kabupaten Tualang | 221.130.000,00 | 220.840.000,00 |
| | | | Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB | 2.908.000,00 | 2.760.000,00 |
| | | | Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | 147.400.000,00 | 147.182.000,00 |
| | | | Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah Melalui Promosi Daerah | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| | | | Optimalisasi Penerimaan PAD | 336.555.000,00 | 335.460.800,00 |
| | | | Pembuatan Web Service Berbasis Representasional State Transfer Javascript | 76.650.000,00 | 76.150.000,00 |
| **JUMLAH** | | | | **2.103.571.500,00** | **2.096.247.800,00** |

**Hasil Pelaksanaan Program Pada RENJA Perangkat Daerah /**
**RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | SKPD | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urusan Penunjang | Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala | 31.470.000,00 | 31.470.000,00 |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 375.191.500,00 | 362.615.139,00 |
| | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Daerah | 0,00 | 0,00 |
| | | | BKD | 86.427.245,00 | 86.267.245,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 50.250.000,00 | 50.250.000,00 |
| | | | Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS | | |
| | | | Pengelolaan pegawai yang akan | 50.358.922,00 | 50.358.922,00 |
| | | | Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Penyusunan Kebutuhan PNS dan Evaluasi Tenaga Kontrak | 12.590.000,00 | 12.180.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Struktural | 363.941.800,00 | 363.941.800,00 |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD | 2.369.189.000,00 | 2.369.104.000,00 |
| | | | Penataan Sistem Administrasi Kenaikan | 71.149.256,00 | 71.149.256,00 |
| | | | Pembinaan Jabatan | 34.870.000,00 | 32.640.000,00 |
| | | | Pemutakhiran Data PNS | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 |
| | | | Seleksi Pengadaan ASN | 469.220.980,00 | 465.900.937,00 |
| | | | Seleksi dan Evaluasi Kinerja ASN | 385.362.774,00 | 383.017.577,00 |
| **JUMLAH** | | | | **4.449.121.477,00** | **4.427.994.876,00** |

2.2.2. Capaian Kinerja RPJMD

Adapun untuk capaian kinerja dari RPJMD yaitu capaian indikator kinerja daerah dan capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah

| No | Aspek | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Target | | Realiasasi | | Persentase Capaian Kinerja RPJMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 1 | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | Pertumbuhan PDRB / Rata – Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi | 5,70 | 5,75 | 5,38 | -1,32 | 94,39 | -22 |
| | | IPM ( Indeks Pembangunan Manusia) | 66,07 | 65,95 | 65,93 | 65,97 | 99,79 | 100,,03 |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 3,2 | 1,2 | 3,59 | 3,46 | 112,19 | 288,33 |
| | | | | | | | | |
| 2 | Aspek Daya Saing Daerah | Nilai Tukar Petani (NTP) | 105,00 | 106,67 | 102,00 | 110 | 97,14 | 103,12 |
| | | | | | | | | |
| 3 | Aspek Pelayanan Umum | IPG ( Indeks Pemberdayaan Gender ) | 61,61 | 62,39 | 61,61 | 63,95 | 100 | 102,50 |
| | | Nilai SAKIP | CC | B | CC | BB | 100 | 100 |

| No | Aspek | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Target | | Realiasasi | | Persentase Capaian Kinerja RPJMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| | | IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) | 73 | 75 | 73 | 73 | 100 | 100 |
| | | Nilai LPPD | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | 100 | 100 |
| | | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | 100 | 100 |
| | | Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap | 40 | 42 | 41,16 | 47 | 109,90 | 111,9 |

b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | | Realiasasi | | Persentase Capaian Kinerja RPJMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 1 | Meningkatnya Drajat Pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah | 12,15 | 12,23 | 12,04 | 12,51 | 99,09 | 99,84 |
| | | Angka Rata – Rata Lama Sekolah (angka) | 6,87 | 6,89 | 7,13 | 8,05 | 103,78 | 116,83 |
| | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Drajat Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) | 69,61 | 69,74 | 69,88 | 70,65 | 100,39 | 101,30 |
| | | | | | | | | |
| 3 | Penurunan Pengangguran | TPT ( Tingkat Pengangguran Terbuka) (%) | 7,50 | 6,67 | 3,59 | 3,46 | 47,86 | 46,13 |
| | | | | | | | | |
| 4 | Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Terpenuhinya Hak – Hak Anak | IPG | 61,61 | 62,39 | 61,61 | 88,45 | 100 | 141,76 |
| | | Nilai Sekor Kabupaten Layak Anak | 500 | 550 | 444,18 | 650 | 88,87 | 118,18 |
| | | | | | | | | |
| 5 | Meningkatnya PMKS Yang Mandiri | Peresentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Menjadi Mandiri | 13,85 | 4,23 | 14 | 15 | 101,08 | 354,6 |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | | Realiasasi | | Persentase Capaian Kinerja RPJMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | |
| 6 | Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan | Jumlah Pemuda Berprestasi | 70 | 80 | 64 | 64 | 91,45 | 80 |
| | | | | | | | | |
| 7 | Meningkatnya Prestasi OLahraga | Jumlah Cabang OLah Raga Yang Berprestasi | 4 | 5 | 2 | 2 | 50,00 | 40 |
| | | | | | | | | |
| 8 | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan | 3,50 | 3,25 | 1,22 | 1,00 | 34,86 | 30,76 |
| | | Nilai Tukar Petani (NTP) | 105,00 | 106,67 | 101 | 110 | 96,19 | 103,12 |
| | | | | | | | | |
| 9 | Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan | PDRB Sektor Industri Pengolahan | 29,35 | 29,65 | 29,91 | 30,30 | 99,25 | 102,19 |
| | | | | | | | | |
| 10 | Meningkatnya Investasi | Nilai Investasi (Rupiah) | 151.577. 800.000 | 166.735. 580.000 | 216.198. 000.000 | 201.749. 350.000 | 142,63 | 120,99 |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | | Realiasasi | | Persentase Capaian Kinerja RPJMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | |
| 11 | Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan | PDRB Sektor Perdagangan | 11,17 | 11,44 | 10,58 | 12 | 94,72 | 104,89 |
| | | | | | | | | |
| 12 | Meningkatnya Kontribusi Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM | Jumlah Aset Koperasi (Juta Rupiah) | 17.350 | 18.600 | 17.367 | 21.500 | 100 | 115,59 |
| | | Persentase kenaikan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah | 2,0% | 2,2% | 2,20% | 2% | 100 | 90,90 |
| | | | | | | | | |
| 13 | Meningkatnya sektor pariwisata | Pendapatan Sektor Pariwisata (Rupiah) | 85 Juta | 102 juta | 85 Juta | 150 Juta | 100 | 147,05 |
| | | Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik | 3000 | 4000 | 22.891 | 6000 | 763,03 | 150 |
| | | | | | | | | |
| 14 | Meningkatnya Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap | Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap | 40% | 45% | 41,16% | 40% | 102,90 | 88,88 |
| | | Persentase Jembatan Dalam Kondisi Mantap | 40% | 45% | 41,16% | 55% | 102,90 | 122,22 |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | | Realiasasi | | Persentase Capaian Kinerja RPJMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | |
| 15 | Meningkatnya ketersediaan jaringani irigasi dalam kondisi mantap dan berfungsi | Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik | 35 | 37 | 90 | 45 | 120 | 121,62 |
| | | | | | | | | |
| 16 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air minum | Persentase Tiyuh Yang Dialiri Air Bersih | 75 | 80 | 19,30 | 90 | 25,73 | 112,5 |
| | | | | | | | | |
| 17 | Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata | Persentase Tiyuh yang tersambung jaringan telekomunikasi | 75 | 85 | 100 | 90 | 133,33 | 105,88 |
| | | | | | | | | |
| 18 | Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 72 | 73 | 75 | 75 | 104,17 | 102,73 |
| | | | | | | | | |
| 19 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, | Indeks Reformasi Birokrasi | 70 | 75 | NA | NA | NA | NA |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | | Realiasasi | | Persentase Capaian Kinerja RPJMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| | Akuntabel dan Transparan | Nilai SAKIP | CC | B | CC | BB | 100 | 100 |
| | | IKM | 73 | 75 | 73 | 73 | 100 | 100 |
| | | Skor LPPD | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | 100 | 100 |
| | | Opini BPK | WTP | Wtp | WTP | WTP | 100 | 100 |
| | | | | | | | | |
| 20 | Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Rukun, Aman dan Nyaman | Indeks Desa Membangun | 0,6146 | 0,600 | 0,6235 | 0,65 | 101,45 | 108,33 |
| | | | | | | | | |
| 21 | Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya | Jumlah Aset Budaya Yang Dilestarikan | 5 | 5 | 4 | 6 | 80 | 120 |

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Didalam proses perencanaan, perumusan masalah merupakan salah satu tahapan awal yang harus dilakukan. Pemahaman akan permasalahan yang terjadi didalam proses pembangunan daerah menjadi hal yang sangat lah vital karena melalui rumusan masalah ini kita dapat mengidentifikasi isu strategis yang akan menjadi titik tolak perencanaan pembangunan. Isu strategis ini kemudian akan berkembang menjadi prioritas pembangunan yang akan menjadi koridor dalam penyusunan program kerja daerah.

### *2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah*

Adapun untuk permasalahan daerah yang berkenaan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 sebagai berikut :

A. Prioritas dan Sasaran 1 :

***Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah***

Permasalahan yang ada :

1. Penataan wajah kota yang sedang dalam proses
2. Terbatasnya penyediaan kelengkapan jalan untuk daerah pedalaman / perbatasan
3. Pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan prasana jalan
4. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap yang belum optimal
5. Akses wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya daerah pinggiran/terisolir.

B. Prioritas dan Sasaran 2 :

***Peningkatan Kualitas Pendidikan***

Permasalahan yang ada :

1. Kualitas sarana dan prasarana sekolah belum merata, kondisi fisik ruang kelas untuk kegiatan belajar terutama sekolah diwilayah pengembangan masih perlu untuk diperhatikan.

2. Kualifikasi Pendidik PAUD Non Formal yang terlatih masih belum mencapai target, karena belum terpadu.
3. Masih adanya kesenjangan mutu dan pelayanan pendidikan diantara sekolah sekolah.

C. Prioritas dan Sasaran 3 :

***Peningkatan Pelayanan Kesahatan Masyarakat***

Permasalahan yang ada :

1. Masih adanya kasus Angka Kematian Ibu
2. Persiapan Puskesmas terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang cukup tinggi.
4. Masih belum optimalnya SDM Kesehatan serta distribusi yang tidak merata di setiap wilayah.
5. Akses pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu sebagian tidak mengenai sasaran yang tepat

D. Prioritas dan Sasaran 4 :

***Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat***

Permasalahan yang ada :

1. Dalam Pengembangan investasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian makro nasional;
2. Meski sudah dilakukan, namun promosi investasi masih perlu ditingkatkan (Jaringan Komunikasi & web).
3. Masih rendahnya kualitas pengurusan perijinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditandai dengan belum optimalnya integritas dan transparansi serta akuntabilitas pengurusan perijinan. Diperlukan adanya perbaikan tatakelola perijinan dan peningkatan budaya aparatur.
4. Belum adanya BUMD yang dimiliki Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.

E. Prioritas dan Sasaran 5 :

***Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi***

Permasalahan yang ada :

1. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi informatika.
3. Harus segera dilakukan penyelesaian atas keterbatasan kapasitas dan kuantitas PNS, serta distribusi pegawai yang tidak merata. Hal ini justru terutama dirasakan di kelurahan dan kecamatan yang merupakan ujung tombak pelayanan ke pada masyarakat.
4. Perlu ditingkatkannya kemampuan SDM aparatur dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara sistem;
5. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, optimalisasi Pusat Informasi Pembangunan serta transparansi pelaporan keuangan daerah;
6. Tuntutan masyarakat untuk keterbukaan publik dalam penyelenggaraan pemerintahanakan semakin besar (UU no.14 tentang keterbukaan informasi publik);
7. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan dalam menunjang teknologi informasi menuntut pengelolaan manajemen yang lebih baik;
8. Belum terkoordinasinya *e-goverment* dengan sempurna di seluruh SKPD.

### *2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah*

Dengan berkaca pada kondisi daerah dan evaluasi RKPD tahun lalu, kita dapat melihat persoalan-persoalan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya pada tahun 2022. Persoalan-persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah terutama dalam merencanakan program kerja

selanjutnya. Berikut ini merupakan persoalan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

**A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

1. Bidang Pendidikan
    a. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan pendidikan;
    b. Kualitas sumber daya manusia pendidikan yang belum memadai dan merata;
    c. Belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga pendidikan;
    d. Masih terjadinya disparitas kualitas pendidikan antara perkotaan dan perdesaaan.

2. Bidang Kesehatan
    a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dibidang kesehatan
    b. masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
    c. masih belum optimalnya pelayanan kesehatan dan pengaduannya
    d. masih terkendalanya pembangunan Puskesmas
    e. masih ditemukannya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya dan obat keras yang dijual tanpa resep dokter
    f. masih tingginya kasus yang tidak dapat ditangani di RSUD
    g. masih terkendalanya pengadaan obat melalui sistem elektronik
    h. Proporsi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan cakupan layanan belum ideal;
    i. Rendahnya PHBS masyarakat;
    j. Masih rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan kesehatan;
    k. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan;

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    a. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam pemanfaatan teknologi informasi (TI);
    b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional urusan kebina margaan;
    c. Luasnya coverage wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
    d. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan penyediaan infrastruktur jalan.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
    a. Minimnya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
    b. Minimnya penyediaan utilitas lingkungan pemukiman.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    a. Masih adanya gejolak yang sering timbul dimasyarakat, akibat informasi yang kurang jelas yang dapat memicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
    b. Minimnya alat transportasi yang belum dimiliki kantor BPBD, sehingga berakibat pada kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat yang terganggu karena menunggu kendaraan untuk penyaluran bantuan bencana;
    c. Minimnya sumber daya yang dimiliki sementara tugas penanggulangan bencana kadang tidak dapat diprediksi belum lagi perlunya staf untuk selalu bersiaga di posko yang ada;
    d. Masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan.

6. Bidang Sosial
    a. Program dan kegiatan masih belum bias mengcover seluruh masalah-masalah social yang terjadi. Update data PMKS belum maksimal;

b. Perlu dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan wadah ketrampilan bagi pencari kerja untuk hidup lebih mandiri.

**B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

1. Bidang Ketenaga Kerjaan
   a. Para Pencari Kerja masih banyak yang menunggu lowongan kerja pada sektorinformal, artinya ketertarikan pada sector wirausaha masih menjadi minim;
   b. Kurangnya animo perusahaan dalam memberikan informasi bursa tenaga kerja perusahaannya;
   c. Pelaksanaan masih relatif kurang karena hanya bulan sehingga sasaran kurang memadai.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   a. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk permasalahan berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi;
   b. Masih tingginya ketimpangan gender dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
   c. Keterlibatan peran organisasi perempuan dalam pengambilan kebijakan belum optimal sehingga peran organisasi perempuan dalam pembangunan belum terlaksana secara maksimal.

3. Bidang Pertanahan
   a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus hak atas tanah;
   b. Rendahnya pengetahuan dalam proses ijin penggunaan pemanfaatan tanah;
   c. Masih tingginya okupansi masyarakat terhadap tanah-tanah negara.

4. Bidang Lingkungan Hidup
   a. Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan

hidup, terlihat banyaknya masyarakat yang berada di sekitar sungai yang membuang sampah dan material di sungai, begitu juga dengan lingkungan yang masih banyak terlihat kurang terawat dan tertata dengan baik;

b. Masih adanya pemilik kegiatan/usaha yang belum peduli dalam pengelolaan lingkungan terutama yang menghasilkan limbah sehingga keadaan lingkungan masih banyak yang tercemar dan banyak pengaduan masyarakat adanya pencemaran lingkungan;
c. Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin berat dan komplek, berbagai upaya yang telah dilakukan masih terasa belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan;
d. Adanya perubahan terhadap kualitas lingkungan hidup akibat aktivitas masyarakat yang terus meningkat;
e. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, terutama masyarakat dekat bantaran sungai;
f. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup masih belum dilaksanakan secara maksimal;
g. Pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan masih lemah.

5. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   a. masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dibidang kependudukan dan catatan sipil;
   b. masih rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi waktu dalam proses-proses pelaksanaan kegiatan terkait kependudukan dan catatan sipil oleh seluruh *stakeholder;*
   c. kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. belum meratanya akomodasi anggaran Bantuan Operasional di tingkat RT, RW dan Lembaga Desa;

b. belum meratanya kapasitas Lembaga Desa dan SDM-nya yang menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa serta tidak optimalnya pembagian tugas dan wewenang.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   a. kurangnya kualitas, kuantitas, dan pemerataan SDM di lapangan;
   b. kurangnya ketersediaan alkon Non-MKJP;
   c. kurangnya dukungan aparat desa / kecamatan dalam pengelolaan pembangunan keluarga;
   d. belum terkoordinasinya pelaksanaan program pembangunan keluarga diberbagai tingkat administrasi.

9. Bidang Perhubungan
   a. terbatasnya anggaran untuk memfasilitasi wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan perlengkapan jalan;
   b. masih kurangnya ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
   c. terkendalanya teknis operasional pembangunan halte / shelter;
   d. masih rendahnya ketersediaan PJU diwilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

10. Bidang Komunikasi dan Informasi
   a. belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi oleh SKPD;
   b. belum optimalnya pemanfaatan media-media penyebaran informasi;
   c. masih kurangnya kapasitas SDM aparatur dalam pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tugas;
   d. belum optimalnya koordinasi dalam pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi yang menyebabkan kurangnya sinergitas program / kegiatan.

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    a. Masih ada koperasi masih belum berklasifikasi;
    b. Pertumbuhan anggota koperasi yang masih lambat;
    c. Masihrendahnya persentase usaha mikro binaan yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha;
    d. Masih adanya koperasi yang belum meningkat volume usahanya;
    e. Tidak adanya monitoring dan evaluasi kemajuan KUMKM pasca pelatihan.

12. Bidang Penanaman Modal
    a. masih kurangnya ketertarikan calon investor untuk berinvestasi karena peluang investasi yang dipromosikan tidak sesuai dengan permintaan pasar;
    b. masih kurangnya dukungan dari pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat maupun pemerintah diatasnya, diantaranya regulasi yang tidak menentu, tidak adanya sistem insentif, dan perizinan yang menyulitkan;
    c. masih rendahnya pelaporan/LKPM dari investor;
    d. kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.

13. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
    a. masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga;
    b. masih rendahnya keterlibatan pihak pengusaha dan masyarakat umum dalam pengembangan olahraga, salah satunya dengan menjadi orang tua angkat di bidang olahraga.

14. Bidang Kebudayaan
    a. Sarana pengembangan seni, adat dan tradisi masih sangat terbatas;
    b. Pengelolaan lembaga-lembaga kesenian daerah masih lemah;

c. Sarana pengembangan seni, budaya, adat/tradisi masih sangat terbatas;
d. Masih terbatasnya tenaga ahli yang mumpuni dibidang Pengelolaan benda koleksi museum dan cagar budaya.

15. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
    a. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai terutama kurang tersedianya depo penyimpanan arsip yang layak, sehingga arsip SKPD yang telah dikirim ke Depo Arsip tidak dapat diolah dan disimpan dengan baik;
    b. Kurangnya tenaga/staf yang mampu mengolah arsip;
    c. Belum adanya pejabat Arsiparis;
    d. Kurangnya SDM yang menangani pelayanan perpustakaan;
    e. Kurangnya jenis dan jumlah buku bacaan perpustakaan;
    f. Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).

**C. Urusan Pilihan**

1. Bidang Perikanan
    a. adanya ancaman alih fungsi lahan budidaya perikanan;
    b. belum optimalnya upaya pelestarian lingkungan perairan umum;
    c. adanya ancaman penyakitikan;
    d. masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha budidaya perikanan;
    e. masih kurangnya kesadaran pelaku usaha pengolahan ikan akan pentingny asanitasi dan higienitas dalam proses usahanya.

2. Bidang Pariwisata
    a. masih terkendalanya proses pembangunan sarana dan prasarana di kawasan wisata akibat rendahnya aksesibilitas kekawasan wisata;
    b. masih kurangnya penataan di beberapa objek wisata;
    c. belum meratanya partisipasi dan antusiasme ditingkat kecamatan dalam upaya pelestarian budaya;

d. belum optimalnya manajemen pelaksanaan kegiatan yang mendukung kepariwisataan daerah.

3. Bidang Pertanian dan Peternakan
   a. tingginya alih fungsi lahan pertanian;
   b. tingginya ancaman cuaca yang dapat menyebabkan kekeringan/banjir di sawah;
   c. belum optimalnya distribusi bahan pangan pertanian;
   d. belum terciptanya diversifikasi konsumsi pangan oleh penduduk;
   e. belum efektifnya Sistem Alih Teknologi;
   f. belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan sarana pengolahan, pengemasan serta pemasaran produk peternakan;
   g. tingginya ancaman keberlangsungan budidaya ternak di masyarakat akibat tidak terkontrolnya fluktuasi harga pasar produk peternakan oleh Disnakan;
   h. masih tingginya ancaman penyakit flu burung (dicurigai varian baru) dan brucellosis yang dapat mempengaruhi produktivas usaha peternakan;
   i. masih adanya ancaman peredaran produk peternakan yang tercemar oleh bahan berbahaya dan tidak halal di masyarakat;
   j. masih rendahnya pemanfaatan limbah peternakan;
   k. produk olahan peternakan yang dihasilkan belum memenuhi standar SSOP (***Sanitation Standard Operating Procedure***). Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

4. Perdagangan
   a. diperlukannya kebijakan yang konkret untuk mengendalikan keberadaan toko modern di tiap kecamatan;
   b. masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan barang yang netto-nya tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan;

c. Belum terbentuk Unit / UPTD Kemetrologian yang bertugas untuk melakukan Tera Ulang;
d. belum tersedianya peralatan UTTP dan tenaga ahli.

5. Perindustrian
   a. masih terkendalanya pemasaran produk, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar;
   b. masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan IKM;
   c. belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional.

**D. Urusan Pemerintah Fungsi Pendukung**

**Setda dan Setwan**

**E. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang**

1. Pendapatan dan Keuangan
2. Bidang Perencanaan
   a. belum optimalnya pemahaman tentang mekanisme perencanaan baik ditingkat SKPD, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan;
   b. belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan;
   c. masih belum seragamnya pemahaman indikator kinerja.

3. Bidang Kepegawaian dan Diklat
   a. Masih kurangnya tingkat pemahaman penggunaan jasa pelayanan kepegawaian terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian;
   b. Sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang kurang mencukupi mengingat kompleksnya tugas dan tanggung jawab pelayanan kepegawaian baik yang dilakukan dengan propinsi maupun pusat.

**F. Urusan Pemerintah Fungsi Pengawasan**

4. Bidang Pengawasan
    a. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada SKPD dalam satu tahun belum bisa menjangkau secara keseluruhan SKPD yang ada mengingat jumlah aparatur pengawas /auditor terbatas.
    b. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada sekolah SMPN, SMAN / SMKN untuk prosentase cakupan pembinaan dalam satu tahun masih kecil mengingat keterbatasan aparatur pengawas yang ada.
    c. Keterbatasan anggaran dalam peningkatan profesionalisme tenaga pengawas/auditor dana paratur Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian makro ekonomi dan sosial serta pencapaian sektoral bidang fisik, ekonomi dan sosial, dapat diidentifikasi berbagai masalah pokok yang dapat menjadi pertimbangan untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya, yang dapat dirumuskan.

Tabel 2.62
Keterkaitan Hasil Evaluasi dan Isu Strategis
Kabupaten Tulang Bawang Barat

| Evaluasi | Isu Strategis |
|---|---|
| Belum Optimalnya tingkat pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.<br>Menurunnya angka APM pada jenjang pendidikan SMP.<br>Menurunya APK pada jenjang perguruan tinggi | Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dan Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tulang Bawang Barat |
| Tingginya angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular<br>Belum optimalnya pengelolaan sistem jaminan kesehatan masyarakat bagi penduduk kemiskinan<br>Ketersediaan sumber air bersih dan sanitasi dasar masih rendah | |
| Masih banyak ruas jalan kabupaten yang kondisinya belum mantap ( rusak )<br>Masih rendah (dibawah angka nasional) zonasi kawasan pemukiman dan cakupan rumah sehat<br>Belum tersedianya sarana terminal dan terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilyah | Peningkatan sarana dan prasarana daerah yaitu infrastruktur yang mantap dan pemerataan pembangunan wilayah serta penguatan kenektivitas nasional |
| Masih rendahnya promosi investasi, baik di tingkat nasional maupun luar negri dan kurangnya data potensi unggulan daerah<br>Lemahnya database koperasi dan UMKM yang koprehensip dan mutakhir<br>Belum berkembangnya jaringan usaha atar desa dalam suatu kawasan terpadu<br>Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemahaman aparatur pemerintahan, dalam memahami regulasi, pengelolaan pemerintahan dan pembangunan<br>Masih tingginya jumlah PMKS dan belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial PMKS<br>Menurunya angka partisipasi angkatan kerja, terbatasnya peluang dan informasi lapangan pekerjaan | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan peluang kerja guna penaggulangan kemiskinan |

Setelah mensintesiskan isu strategis ini, kemudian diolah dan dianalisis untuk menjadi prioritas pembangunan tahun 2022, dengan hasil seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.63
Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022

| Isu Strategis | Prioritas Pembangunan |
|---|---|
| Masihterbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagimasyarakat dan Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tulang Bawang Barat | Pembangunan SDM Melalui Meningkatkan Aksebilitas dan Kualitas Pelayanan Dasar |
| Peningkatan sarana dan prasarana daerah yaitu infrastruktur yang mantap dan pemerataan pembangunan wilayah serta penguatan kenektivitas nasional | Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan peluang kerja guna penaggulangan kemiskinan | Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi rakyat dan Peningkatan Nilai Tambah Sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan |
| | Peningkatan Investasi Melalui Kemudahan Berusaha |

Prioritas pembangunan ini selanjutnya akan diurutkan berdasarkan kriteria, adapun kriterianya adalah seperti berikut :

Tabel 2.64
Kriteria Prioritas Pembangunan

| No. | Kriteria |
|---|---|
| 1 | Mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional |
| 2 | Kesesuaian dengan Prioritas Provinsi Lampung |
| 3 | Dampak bagi masyarakat umum |
| 4 | Tingkat kemungkinan dalam pelaksanaannya |
| 5 | Daya ungkit terhadap pembangunan daerah |
| 6 | Tingkat kemendesakan |
| 7 | Hasil konsultasi publik |

Setelah dilakukan pengurutan berdasarkan kriteria – kriteria diatas dan berdasarkan analisa data yang didapat maka terbentuk lah prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2021, sebagaimana yang ada didalam tabel dibwah ini :

Tabel 2.65
Urutan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022

| Peringkat | Prioritas |
|---|---|
| 1 | Pemilihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, jaring pengaman sosial dan pengembangan ekonomi rakyat kreatif |
| 2 | Pembangunan SDM Berkarakter dan peningkatan kualitas melapelayanan dasar |
| 3 | Pengembangan Ekowisata dan pelestaran Budaya |
| 4 | Pembangunan Infrasruktur |
| 5 | Reformasi Birokrasi |

Ke-lima prioritas pembangunan ini selanjutnya akan menjadi fokus pembangunan pada tahun 2022 dan akan memagari kebijakan dan program yang akan disusun selanjutnya.

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah merupakan suatu bagian yang penting dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Dimana kita dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang telah dan akan dirancang.

Tahun 2022 merupakan tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Keberhasilan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga proyeksi tahun 2022 harus tepat pada sasaran yang diharapkan untuk dapat mendukung keberhasilan RPJMD.

Indikator - indikator yang digunakan dalam menentukan proyeksi ke depan diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, sumber - sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan ekonomi yang bersumber dari kebijakan ekonomi nasional, provinsi, dan kabupaten akan mempengaruhi aspek pendanaan daerah.

Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun prioritas pembangunan, dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan, terutama pemulihan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19 agar arah pembangunan daerah Tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah dari kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta isu strategis daerah, sebagai dasar untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Stabilitas perekonomian daerah menjadi salah satu syarat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal

ini diperlukan peran serta pemerintah daerah yang bertugas sebagai fasilitator (*agent of development*) untuk memberikan jaminan kepastian berusaha. Pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien dan berkelanjutan, maka diperlukan perencanaan pembangunan wilayah dengan tetap memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan perkembangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pertumbuhan, memperkuat integrasi nasional dan meningkatkan daya dukung lingkungan.

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi.

Namun demikian, perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor riil, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan ke luar daerah, serta adanya pandemi Covid-19 hal ini juga sangat mempengaruhi dari perkembangan

perekonomian ditahun 2021 ini dan sangat mungkin akan berkelanjutan ditahun 2022.

Upaya memperkuat perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi kepada ekonomi nasional dan global. Di lain sisi ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan teknologi. Adapun kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan berkenaan dengan dampak dari pandemi covid-19 terhadap ekonomi makro di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah :

1. Memaksimalkan penanganan kesehatan, dengan memastikan ketersedian sarana dan prasarana kesehatan, dan SDM kesehatan sebagai ujung tombak dalam penanganan kesehatan
2. Penyedian jaring pengaman sosial, agar dampak social pada masyarakat akibat pandemi Covid 19 ini diminimalisir. penyediaan jaring pengaman sosial ini berupa program maju dan sejahtera (Mantra) dimana penduduk yang terkena dampak dan miskin mendapatkan tunjangan dari pemerintah kabupaten.
3. Penganganan dampak ekonomi/ pemulihan ekonomi. Untuk penanganan dampak ekonomi akibat Covid 19 dan pemulihannya, Pemerintah Tulang Bawang Barat memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok dan mengarahkan ketersediaaan anggaran pada dinas terkait untuk mendukung perekonomian, seperti sektor pertanian, peternakan, infratruktur, pemberdayaan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan dana desa.

Pemulihan ekonomi dan pemerataannya diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, kondisi ini sejalan dengan target yang ingin dicapai melalui penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah, antara lain :

1. Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi
2. Meningkatkan kapasitas produksi
3. Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat
4. Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil
5. Pemerataan distribusi pendapatan

Adapun untuk arah kebijakan Ekonomi yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022, mengacu kepada Visi Daerah yang ada dalam RPJP dan visi Kepala Daerah yang ada dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017-2022, adapun untuk visi di RPJP yaitu sebagai berikut :

***"Tulang Bawang Barat Kabupaten Agraris Yang Makmur Dan Sejahtera"***

Sedangkan untuk visi Kepala daerah yang ada dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

***" Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, Dan Berdaya Saing "***

Hal ini dilakukan agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakandan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2017-2022 akan tetap diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
3. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

## A. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021-2022

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dipengaruhi oleh indicator ekonomi makro Indonesia dan Provinsi Lampung. Perkembangan perekonomian KabupatenTulang Bawang Baratdapat dilihat melalui pertumbuhan PDRB-nya. Dalam Pertumbuhannya terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Rancangan Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dari analisis statistik perekononomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi Perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019-2020 disampaikan dalam karakteristik serta proyeksi pada tahun 2021 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat**
**Tahun 2019 - 2020 dan Proyeksi 2021 - 2022**

| No. | Indikator | Keadaan Tahun | | ProyeksiTahun | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | PDRB | | | | |
| | - ADH Konstan (dlm Jutaan) | 7.850,70 | 7.747,24 | 8,714.62 | 8.400,67 |
| 2. | PDRB perkapita | | | | |
| | - ADH Konstan (dlm Jutaan) | 28,73 | 27.07 | 31.52 | 28,49 |
| 3. | LPE (%) | 5.38 | -1.32 | 4,7 -5,5 | 4,4 – 4,7 |
| 4. | Laju Inflasi | 2.92 | 2,0 | 2,21 | 3,0 – 3,1 |

*Ket. *) = Data Proyeksi Perhitungan Manual*
***) = Data Ilflasi Kota Bandar Lampung*

Keberhasilan pembangunan ekonomi pada saat era otonomi ini, merupakan tolak ukur dalam menilai pencapaian keberhasilan pembangunan di tiap sektor yang dilakukan oleh kabupaten/kota, diantaranya tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang yang terbentuk pada tahun 2008, dimana telah berupaya dan bekerja keras guna meningkatan pembangunan di segala bidang, yaitu dengan meningkatkan pemerataan pembangunan di tiap sektor ekonomi, agar tidak tertinggal dengan kabupaten lainnya. Upaya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan meratakan hasil-hasil pembangunan keseluruh kecamatan. Berbagai program dan kebijakan ekonomi yang telah dilaksanakan, perlu untuk dievaluasi baik dari sisi hasil maupun implikasinya. Hasil evaluasi tersebut dalam bentuk ukuran kuantitatif yang memberikan gambaran tentang keadaan masa lalu, masa kini, dan sasaran yang akan dicapai di masa mendatang.

Melihat sejauh mana gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam lima tahun belakangan ini, dapat di lihat melalui beberapa kajian berikut ini, diantaranya pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan PDRB.

**Gambar 3.1.**
**PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016– 2020**

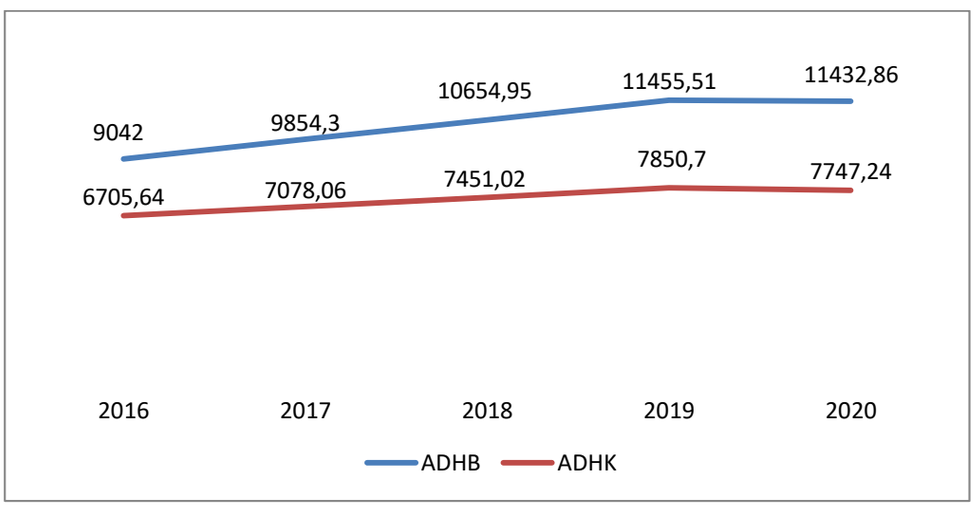


*Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021*

Pada dasarnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2016 hingga tahun 2020 berjalan fluktuatif menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,65%, seperti yang tersaji dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 2016-2020**

| Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laju PertumbuhanEkonomi( LPE) | 5,27 | 5,64 | 5,46 | 5,38 | -1,31 | 3.65 |

*Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021*

Indikator makro yang paling banyak digunakan untuk melihat kinerja perekonomian suatu daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan pergerakan kinerja ekonomi suatu daerah. Pada tingkat pertumbuhan yang tinggi diharapkan produktivitas dan pendapatan masyarakat akan meningkat sejalan dengan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Akan tetapi, laju pertumbuhan yang tinggi tidak menjamin bahwa lapangan usaha berperan besar dalam pembentukan nilai PDRB, apabila dilihat dari sisi output. Nilai PDRB per sektor ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 berdasarkan PDRB ADHK dan PDRB ADHK adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel3.3**
**Nilai PDRB per Sektor Ekonomi**
**Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 (Juta Rupiah)**

| Sektor Ekonomi | PDRB ADHB | PDRB ADHK |
|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4025,25 | 2651.19 |
| PertambangandanPenggalian | 56,24 | 38.68 |
| IndustriPengolahan | 3242.44 | 2167.72 |
| Listrik dan Gas | 4.73 | 3.84 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah | 10.98 | 7,51 |
| Konstruksi | 969.67 | 702.01 |
| Perdagangan Besar dan Eceran | 1233.87 | 905.53 |
| Transportasi dan pergudangan | 95.27 | 65.42 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 104.95 | 66.36 |
| Informasi dan Komunikasi | 626.53 | 436.85 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 62.36 | 41.88 |
| Reasl Estate | 224.69 | 169.99 |
| Jasa Perusahaan | 7.74 | 5.32 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan | 356.47 | 211.14 |
| Jasa Pendidikan | 303.62 | 198.94 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 56.89 | 39.06 |
| Jasa Lainnya | 51.17 | 34.81 |
| **Total** | **11 342.86** | **7 747.24** |

*Sumber :BPS Tulang Bawang Barat (Kabupaten Tulang Bawang Barat 2021)*

Melalui data PDRB diatas dapat diketahui pertanian dan industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat. Petumbuhan ekonomi tercermin dari besaran persentase kenaikan/penurunan PDRB atas dasar harga konstan terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh perubahan tingkat harga barang dan jasa. Karena itu, pertumbuhan ekonomi wilayah menggambarkan tingkat ekonomi riil di wilayah tertentu.Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional atau nasional.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui besaran pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi akan dapat diketahui

naik atau turunnya total produk yang dihasilkan suatu daerah. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut atau meningkat.

## B. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Selain didasarkan pada kondisi ekonomi tahun 2019 dan tahun 2020, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Bara tuntuk tahun 2022 akan sangat dipengaruhi juga oleh berbagai factor eksternal yang berupa tantangan dan prospek kedepannya. Tantangan dan prospek perekonomian daerah ini dapat berupa kebijakan pemerintah baik kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten sendiri maupun wilayah diatasnya ataupun berupa fenomena-fenomena lainnya baik yang bersifat lokal, nasional, maupung lobal, seperti yang terjadi diawal tahun 2020 yaitu bencana non alam penyebaran wabah virus covid-19 yang bukan hanya terjadi secara nasional akan tetapi telah menjadi pandemi di dunia, hal ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan ekonomi pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentunya akan sangat berpengaruh terhadap laju perekonomiannya, terlebih setelah terjadinya wabah virus covid-19 maka arah kebijakan yang kurang tepat dapat menghambat kemajuan perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat bersumber pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2017-2022, adapun untuk kebijakan ekonomi yang bersumber dari RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 termasuk dalam periode keempat yaitu meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas perekonomian daerah
    a. Terwujudnya perkembangan industri dan UKM berbasis potensi local
    b. Terciptanya produk pertanian yang berdaya saing
    c. Deversifikasi pertanian
    d. Terwujudnya ketahanan pangan

e. Meningkatnya akses informasi dan kemudahan perizinan investasi.
f. Terwujudnya lembaga ekonomi produktif yang mandiri dan maju
g. Terkelolanya sumber daya alam dan energi yang berwawasan lingkungan
h. Peningkatan iklim investasi
i. Peningkatan dan stimulasi promosi investasi industri pengolahan produk – produk pertanian serta sentra – sentra produksi
j. Diverikfikasi hasil produk – produk pertanian
k. Pembangunan dan pengembangan Kawasan agropolitan dan agrominapolitan yang berbasis pada tanaman pertanian, perkebunan, dan perikanan

2. Kesenjangan pembangunan ekonomi antara kecamatan dan desa semakin dikurangi.Dengan proses dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pusat – pusat perdagangan baru.

Sedangkan untuk kebijakan ekonomi yang bersumber dari RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022, adapun tujuan dan sasaran serta setrategi dari perekonomian yang akan dicapai ataupun dilaksanakan yaitu:

1. Tujuan

   Meningkatnya Perekonomian Kab. Tulang Bawang Barat

2. Sasaran

   Untuk sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

   a. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap perekonomian daerah;
   b. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah;
   c. Meningkatnya kontribusi investasi / penanaman modal dalam pembangunan ekonomi daerah;
   d. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
   e. Meningkatkan kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah;

f. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah.

3. Startegi

Adapun strategi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan;
b. Pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri);
c. meningkatkan jaminan kepastian, keamanan, kerjasama dan promosi investasi, serta peningkatan pelayanan prima perizinan dan non perizinan;
d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, utilitas pendukung perdagangan, peningkatan perlindungan keonsumendan pengamanan perdagangan di daerah;
e. Peningkatan akses permodalan, teknologi, pemasaran, dan perlindungan usaha, penerapan peraktek berkoperasi yang baik dan benar, serta pemoderennisasian usaha koperasi;
f. Peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi dan objek pariwisata daerah serta pengembangan pemasaran pariwisata daerah.

Selain kebijakan diatas ada beberapa kebijakan tambahan untuk menstabilkan dan mengakselerasikan terhadap pencapaian, yang diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian daerah, yaitu sebagai berikut :

1. mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
2. stabilitas ekonomi terjaga dengan baik, salah satunya tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang semakin ditekan.
3. potensi ekonomi yang relatif besar di sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan.
4. menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
5. menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas.

6. meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*).
7. meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas.
8. memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. membangun promosi bersama *(joint marketing)* dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

Sebagaimana gambaran diatas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

a. Diperkirakan perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir serta masa masa pemulihan perekonomian sebagai akibat dari wabah covid-19. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup :
   a) Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
   b) Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global;
   c) Menurunkan angka kemiskinan;
   d) Menurunkan angka pengangguran;
   e) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis;

f) Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
g) Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
h) Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

b. Prospek perekonomian daerah dengan adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usahausaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah :
   a) Meningkatkan aksesibilitas dan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah;
   b) Menyediakan infrastruktur perekonomian yang memadai dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;
   c) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
   d) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan salah satu bagian pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagian dalam pengelolaan keuangan daerah adalah :

(1) kebijakanpendapatandaerah,
(2) kebijakan belanja daerah, dan
(3) kebijakan pembiayaan daerah.

Tiga kebijakan akan menjadi arahan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Strategi dan kebijakan pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam kebijakan pendanaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Perlunya konsistensi penetapan angka proyeksi pendapatan sejak dalam dokumen perencanaan hingga dokumen anggaran, sehingga sinkronisasi belanja prioritas program dan kegiatan dapat terjaga mulai dari penyusunan RKPD sampai penetapan RAPBD.
b. Belanja SKPD didorong untuk peningkatan perekonomian daerah dan penerimaan pendapatan daerah, khususnya penerimaan retribusi dan pajak daerah
c. Optimalisasi sumber pendapatan dan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya
d. Penentuan target pendapatan daerah, agar memperhitungkan potensi riil secara cermat, terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum.
e. Dalam menentukan Target PAD, agar mempertimbangkan kondisi perekonomian sebelumnya, target indikator makro ekonomi dan realisasi penerimaan PAD minimal 3 tahun sebelumnya, sehingga memiliki prosedur operasional baku dalam penetapan target proyeksi pendapatan.
f. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
g. Optimalisasi pendapatan PAD dari pajak dan retribusi melalui pendataan dan penetapan objek pajak
h. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam memacu pendapatan dari Dana Transfers
i. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD tahun 2005-2025 dan RPJMD 2017-2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan

sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR).

## A. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangandaerahdan kerangka pendanaan meliputi beberapa komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada kelompok pendapatan, hanya Pendapatan Asli Daerah yang termasuk ke dalam kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II. Oleh karenanya, proyeksi pendapatan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya meliputi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas, maka setiap tahunnya diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien, selain itu untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dalam mengefisienkan penggunaannya.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Bupati atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

## B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Adapun sumber penerimaan daerah terdiri dari :

1. PendapatanAsli Daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah),
2. Pendapatan Transfer (meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah),
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Penyesuaian dan Otonomi khususdan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya) dan
4. Peneriamaan Pembiayaan Daerah (sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjamandan Penerimaan Piutang Daerah).

Pencapaian target proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2022 akan dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi potensi pajak daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
b. Intensifikasidan ekstensifikasi penerimaan PAD danpembenahanmanajemen.
c. Evaluasi/revisi Perdadan Perbup pajak daerah dan retribusi daerah
d. Mengoptimalkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersif atelastis.
e. Target pendapatan harus cermat, terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum.
f. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada obyek pajak
g. Revisi dan evaluasi Perda/Perbup dalam penyesuaian dasar penetapan tarip daerah.
h. Penyiapan data sistem, standar pengelolaan, keterampilan atas PBB perkotaan dan pedesaan yang akan berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan secara progresif.

Agar kebijakan pendapatan daerah tersebut dapat dicapai, maka ditetapkan beberapa strategi yaitu :

a. pemberdayaan semua aparat dengan cara meningkatkan motivasi, kompensasi, disiplin dan etos kerja dalam rangka meningkatkan kinerja.
b. meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi dan institusi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah mulai dari tingkat Tiyuh/Kampung, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.
c. memperluas jangkauan pelayanan, dengan memperluas tempat-tempat pelayanan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya di kabupaten sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

d. melakukan pendekatan yang intensif dengan berbagai pihak, baik dalam rangka peningkatan sumbangan pihak ketiga maupun penerimaan yang bersumber dari bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

**Tabel 3.4.**
**Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan**
**Kabupaten Tulang Bawang Barat**
**Tahun 2019 s.d. Tahun 2023**

| NO URUT | URAIAN | JUMLAH | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALISASI 2019 (Rp) | REALISASI 2020 (Rp) | ANGGARAN 2021 (Rp) | PROYEKSI / TARGET 2022 (Rp) | PROYEKSI / TARGET 2023 (Rp) |
| 1. | **PENDAPATAN TOTAL** | **946.904.183.516,40** | **865.445.745.442,98** | **905.468.640.861,00** | **864.969.274.684,00** | **864.969.274.684,00** |
| 1.1. | ***PENDAPATAN ASLI DAERAH*** | **32.400.517.401,12** | **41.083.482.151,98** | **39.564.544.704,00** | **46.323.278.812,00** | **46.323.278.812,00** |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 15.014.588.729,28 | 18.893.601.708,31 | 18.273.500.000,00 | 20.373.500.000,00 | 20.373.500.000,00 |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | 3.228.954.102,00 | 4.760.043.398,67 | 5.454.630.000,00 | 2.015.380.000,00 | 2.015.380.000,00 |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 2.358.292.765,46 | 2.499.398.811,74 | 2.601.414.704,00 | 2.499.398.812,00 | 2.499.398.812,00 |
| 1.1.4 | Lain – lain pemdapatan Asli Daerah yang Sah | 11.798.681.804,38 | 14.930.438.233,26 | 13.235.000.000,00 | 21.435.000.000,00 | 21.435.000.000,00 |
| 1.2. | ***PENDAPATAN TRANSFER (PP12)*** | | | **830.108.569.331,00** | **818.645.995.872,00** | **818.645.995.872,00** |
| 1.2.1. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | | | 749.973.528.000,00 | 749.568.632.000,00 | 749.568.632.000,00 |
| 1.2.2. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | | | 80.135.041.331,00 | 69.077.363.872,00 | 69.077.363.872,00 |
| 1.2. | ***DANA PERIMBANGAN*** | **661.079.127.842,00** | **623.486.362.983,00** | | | |
| 1.2.1. | Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 15.816.951.774,00 | 17.674.832.243,00 | | | |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 488.530.984.000,00 | 441.732.032.000,00 | | | |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 156.731.192.068,00 | 164.079.498.740,00 | | | |
| 1.3 | ***LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*** | | | **35.795.526.826,00** | | |
| 1.3.3 | Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan | | | 35.795.526.826,00 | | |
| 1.3. | ***LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*** | **253.424.538.273,28** | **200.875.900.308,00** | | | |
| 1.3.1. | Pendapatan Hibah | 53.006226.000,00 | 40.361.630.000,00 | | | |
| 1.3.3. | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 80.693.362.330,41 | 61.513.503.973,00 | | | |
| 1.3.4. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 27.722.014.000,00 | 7.654.649.000,00 | | | |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 435.000.000,00 | 0.00 | | | |
| 1.3.6. | Pendapatan Lainnya | 2.406.270.942,87 | 450.984.335,00 | | | |
| 1.3.7. | Dana Desa | 89.161.665.000,00 | 90.895.123.000,00 | | | |

## C. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Namun demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengambil langkah kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target bidang pemulihan ekonomi, pembangunan SDM dan peningkatan kualitas pelayanan publik, pelestarian budaya, dan pengembangan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 diarah kandengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

a. Belanja pegawai dialokasikan secara cermat dan tepat;
b. Belanja hibah dan bansoss esuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Belanja bagi hasil kepada desa, guna memperkuat kapasitas fiskal desa;
d. Belanja bankeu dari daerah dan/atau pusat, untuk pemerataan dan/atau peningkatan pembangunan yang mendukung kebijakan Pemerintah KabupatenTulang Bawang Barat;
e. Belanja tidak terduga dalam rangkaan partisipasi terjadinya kejadian luar biasa dan bencana.
f. Kebijakan belanja pada SKPD terbagi ke dalam urusan pemerintah daerah (urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum).

g. Pengalokasian kebijakan belanja direncanakan sebagai berikut:
    1) Belanja pendidikan minimal 20%, dalam rangka penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan perwujudan wajar dikdas 12 tahun
    2) Belanja kesehatan minimal sebesar 10% dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.
    3) Belanja peningkatan daya beli masyarakat, daya dukung dan daya tampung lingkungan
    4) Belanja untuk menurunkan jumlah angkatan kerja yangmenganggur
    5) Belanja daerah yang mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, dan infrastruktur.
    6) Belanja daerah dalam pemenuhan standar pelayanan berbasis kinerja.
    7) Belanja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan dalam pemenuhan prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
    8) Belanja untuk menunjang efektivitas tupoksi SKPD.

Pengalokasian anggaran Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi yang ada, kondisi faktual, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta kemampuan keuangan daerah untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022. Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Tulang Bawang Barat memerlukan anggaran untuk penataan kelembagaan pelayanan pemerintahan yang ditunjang dengan peningkatan kualitas aparatur. Pada sisi lainnya, pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk menjamin peningkatan kualitas infrastruktur perekonomian, dan juga terselenggaranya pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya.

Adapun arah kebijakanbelanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

**Tabel 3.5**
**Realisasi dan Proyeksi Belanja**
**Kabupaten Tulang Bawang Barat**
**Tahun 2019 s.d Tahun 2023**

| No Urut | Uraian | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | Anggaran 2021 | Proyeksi / Terget 2022 | Proyeksi / Terget 2023 |
| 2 | **BELANJA** | **958.598.521.942,04** | **939.564.357.427,00** | **884.968.640.861,00** | **847.900.595.251,00** | **847.900.595.251,00** |
| 2 | **BELANJA** | | | | | |
| 2.1. | ***Belanja Operasi*** | | | **552.400.006.031,00** | | |
| 2.2 | ***Belanja Modal*** | | | **186.516.654.630,00** | | |
| | ***(Belanja Operasional dan Modal)*** | | | | **706.474.338.651,00** | **706.474.338.651,00** |
| 2.3 | ***Belanja Tidak Terduga*** | | | **5.000.000.000,00** | **10.000.000.000,00** | **10.000.000.000,00** |
| 2.4 | ***Belanja Transfer*** | | | **141.051.980.200,00** | **131.426.256.600,00** | **131.426.256.600,00** |
| 2.1. | ***BELANJA TIDAK LANGSUNG*** | **429.081.910.761,00** | **489.867.250.510,00** | | | |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 298.266.977.138,00 | 285.457.930.894.00 | | | |
| 2.1.2. | Belanja Bunga | 3.224.933.575,00 | 3.179.928.163,00 | | | |
| 2.1.4. | Belanja Hibah | 10.648.977.008,00 | 11.275.122.336,00 | | | |
| 2.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | 6.590.500.000,00 | 6.814.800.000,00 | | | |
| 2.1.6. | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 1.068.454.064,00 | - | | | |
| 2.1.7. | Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 109.282.068.976,00 | 136.340.648.999 | | | |
| 2.1.8. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 16.798.820.118,00 | | | |
| 2.2. | ***BELANJA LANGSUNG*** | **529.516.611.181,04** | **479.697.106.917,48** | | | |

## D. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terbagi kedalam dua komponen yaitu penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. PenerimaanPembiayaan
    a. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (Silpa)
    b. Pencairan dana cadangan
    c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
    d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
    e. Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman daerah atau bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai program/kegiatan strategis.
2. Pengeluaran pembiayaan
    a. Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi), dialokasikan jika terjadi surplus anggaran.
    b. Penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku UMKM

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2022 di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain diarahkan untuk :

a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya belanja Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), dan dana cadangan bencana;
c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (prudential).

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

**Tabel 3.6**
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah**
**Tahun 2019– 2020 dan Proyeksi 2022 - 2023**

| No Urut | Uraian | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | Anggaran 2021 | Proyeksi / Target 2022 | Proyeksi / Terget 2023 |
| **3** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | | |
| 3.1. | ***PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH*** | **69.893.740.482,26** | **137.922.726.986,00** | **18.000.000.000,00** | **25.000.000.000,00** | **25.000.000.000,00** |
| 3.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 21.444.567.467,26 | 55.003.523.200,92 | 18.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 47.928.173.015,00 | 82.919.203.786,00 | - | - | - |
| 3.1.5. | Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman | 521.000.000,00 | - | - | - | - |
| 3.2. | ***PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH*** | **3.363.769.793,00** | **12.955.079.172,00** | **38.500.000.000,00** | **42.068.679.433,00** | **42.068.679.433,00** |
| 3.2.1. | Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah | 500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 3.2.2. | Pembayaran Pokok Hutang | 2.863.769.793,00 | 11.455.079.172,00 | 38.000.000.000,00 | 41.068.679.433,00 | 41.068.679.433,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **66.529.970.689,26** | **124.967.647.814,92** | **(20.500.000.000,00)** | **56.662.843.018,00** | **(17.068.679.433,00)** |

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN DAERAH

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program yang secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Lampung demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan untuk semua (*developmentforall*) dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadapp erekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Dalam pelaksanaannya pembangunan memerlukan pula suatu filosofi yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Adapun filosofi luhur nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu ”**Gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem karta raharja**” dengan pengertian sebagai berikut :

**Gemah ripah** : Perwujudan keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan lahir dan batin.

**Loh jinawi** : Perwujudan keadaan lahan (tanah) berserta tanam-tanaman yang ada di atasnya sangat subur.

**Tata tentrem** : Suatu kondisi masyarakat yang taat pada aturan, disiplin, demokratis, bijak dalam bertindak, aman, tentram, dan damai.

**Karta raharja** : Tercapainya tingkat kemakmuran/kesejahteraan di masyarakat yang berpedoman pada keselamatan lahir dan batin.

Senada dengan filosofi leluhur nenek moyang bangsa Indonesia maka Provinsi Lampung memiliki pedoman atau selogan pembangunan yang menggambarkan potensi daerah dan harapan masyarakatnya yaitu " ***Sai Bumi Rua Jurai*** ". yang berarti Satu Daerah Dua Golongan yang memiliki maksud yaitu :

- Sai Bumi : Satu Daerah yaitu Daerah Lampung
- Rua Jurai : Dua Golongan Yaitu Memiliki dau kebudayaan keturunan dan adat istiadat yang berbeda. Kebudayaan dibedakan menjadi dua golongan yaitu :
  - Ulun Pepadun yang berdialek Nyo (apa)
  - Ulun Peminggir / Pesisir berdialek Api (apa)

Sejalan dengan pedoman dan selogan pembangunan Provinsi Lampung maka Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan salah satu daerah keturunan dari ulun Pepadun juga memiliki selogan pembangunan dan pedoman yaitu "***Ragem Sai Mangei Wawai***" yang memiliki arti atau makna bahwasannya kesuksesan yang diraih harus selalu berpedoman kepada keputusan bersama, dan dengan berpegangan kepada perinsip ***" Nemen, Nedes, Nerimo"*** yaitu masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat harus ***Nemen : Berusaha Keras Tidak Putus Asa, Nedes : Bertahan Dalam Keadaan Apapun, Nerimo : Berlapang Dada Dengan Keberhasilan Yang Diberikan Oleh Yang Maha Kuasa,*** sehingga apa yang menjadi harapan yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat **TOP** ***(Terdepan Optimis Pasti Maju)*** dapat terwujud.

Berlandaskan pada filosofi tersebut diatas, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan (RKPD). Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun

sebelumnya.Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain :

a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional seperti terhadap, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan KabupatenTulang Bawang Barat tahun 2022 didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun2017 – 2022.

Adapun Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 – 2022 adalah :

**“ TULANG BAWANG BARAT MAJU, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING ”**

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka selanjutnya dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

A. Misi pertama

a. Misi

**“ Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) Yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif ”**

b. Tujuan dan sasaran

| Tujuan | Indikator Tujuan | Kondisi Awal | Target Tujuan | | | | | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Kondisi Awal | Target Indikator Sasaran Strategis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatkan kualitas hidup manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 64,58 | 65,33 | 66,07 | 66,81 | 67,55 | 68.29 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; | Harapan Lama Sekolah | 11,98 | 12,08 | 12,15 | 12,23 | 12,32 | 12,51 |
| | | | | | | | | | Angka rata rata lama sekolah (angka) | 6,84 | 6,85 | 6,87 | 6,89 | 6,91 | 6,93 |
| | | | | | | | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; | Angka harapan hidup (AHH) | 69,34 | 69,47 | 69,61 | 69,74 | 69,87 | 70,00 |
| | | | | | | | | Penurunan Pengangguran; | TPT (Tingkat Pengganggguran Terbuka) (%) | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| | | | | | | | | Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan serta Terpenuhinya hak-hak anak; | IPG | 60,04 | 60,82 | 61,61 | 62,39 | 63,17 | 63,95 |
| | | | | | | | | | Nilai Skor Kab. Layak Anak | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Meningkatnya PMKS Yang Mandiri; | % Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi mandiri | 13,08 | 13,47 | 13,85 | 14,23 | 14,62 | 15,00 |
| | | | | | | | | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan. | Jumlah Pemuda Berprestasi | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| | | | | | | | | Meningkatnya Prestasi Olahraga. | Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

B. Misi Ke-Dua

a. Misi

**“ Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan ”**

b. Tujuan dan Sasaran

| Tujuan | indikator tujuan | Kondisi Awal | Target Tujuan | | | | | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Kondisi Awal | Target Indikator Sasaran Strategis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya Perekonomian Kab. Tulang Bawang Barat; | Rata- rata Laju Pertumbuhan Ekonomi | 5,44 | 5,64 | 5,70 | 5,75 | 6,00 | 6,30 | Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, dan perikanan | Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian | 3,02 | 3,20 | 3,50 | 3,60 | 3,80 | 4,00 |
| | | | | | | | | | Nilai Tukar Petani (NTP) | 101,67 | 103,33 | 105,00 | 106,67 | 108,33 | 110,00 |
| | | | | | | | | Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan | PDRB Sektor Industri Pengolahan | 28.60 | 29.00 | 29.35 | 29.65 | 30.00 | 30.30 |
| | | | | | | | | Meningkatnya Investasi | Nilai Investasi ( Rupiah ) | 120.298.500.000 | 137.798.000.000 | 151.577.800.000 | 166.735.580.000 | 183.408.500.000 | 201.749.350.000 |
| | | | | | | | | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan | PDRB Sektor Perdagangan | 10,61 | 10,89 | 11,17 | 11,44 | 11,72 | 12,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM | jumlah aset koperasi (Juta Rupiah) | 15.000 | 16.125 | 17.350 | 18.600 | 20.000 | 21.500 |
| | | | | | | | | | Persentase kenaikan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| | | | | | | | | Meningkatnya sektor pariwisata | Pendapatan sektor pariwisata | 30 Juta | 60 Juta | 85 Juta | 102 Juta | 120 Juta | 150 Juta |
| | | | | | | | | | Jumlah Kunjungan wisatawan domestic | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |

C. Misi ke Tiga

a. Misi

**“ Memperluas Cakupan Prasarana Sarana dan Utilitas Wilayah Yang Bersinergi dan Terintegrasi Antar Wilayah ”**

b. Kebijakan dan Sasaran

| Tujuan | indikator tujuan | Kondisi Awal | Target Tujuan | | | | | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Kondisi Awal | Target Indikator Sasaran Strategis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkunan Hidup; | Prosentase Infrastruktur dalam kondisi mantap | 30 | 35 | 40 | 45 | 46 | 47. | Meningkatnya Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap | % Panjang Jalan dengan Kondisi mantap | 30 | 35 | 40 | 45 | 46 | 47 |
| | | | | | | | | | % Jembatan dalam kondisi Mantap | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| | | | | | | | | Meningkatnya ketersediaan jaringani irigasi dalam kondisi mantap dan berfungsi | % Jaringan irigasi yang baik | 25% | 30% | 35% | 37% | 40% | 45% |
| | | | | | | | | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air minum; | Persentase Tiyuh yang dialiri air bersih | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata. | Persntase Tiyuh yang tersambung jaringan telekomunikasi | 60 | 72 | 75 | 85 | 88 | 90 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan, | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

D. Misi ke Empat

a. Misi

**“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Efektif ”**

b. Kebijakan dan Sasaran

| Tujuan | indikator tujuan | Kondisi Awal | Target Tujuan | | | | | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Kondisi Awal | Target Indikator Sasaran Strategis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan; | Indeks Reformasi Birokrasi | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan | Indeks RB | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| | | | | | | | | | Nilai SAKIP | C | CC | CC | B | B | BB |
| | | | | | | | | | IKM | 60 | 70 | 73 | 75 | 77 | 80 |
| | | | | | | | | | Skor LPPD | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
| | | | | | | | | | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

E. Misi ke Lima

a. Misi

**“ Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Demokratis, Partisipatif, Taat Hukum dan Mentransformasi Budaya Daerah Sebagai Sumber Daya Energi Sosial Pembangunan “**

b. Kebijakan dan Sasaran

| Tujuan | indikator tujuan | Kondisi Awal | Target Tujuan | | | | | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Kondisi Awal | Target Indikator Sasaran Strategis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya daerah yang transformatif. | Angka konflik / Kriminalitas | 4,27 | 3,67 | 3,07 | 2,48 | 1,88 | 1,28 | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman; | Persentase Tiyuh rawan Kriminal | 4,30 | 4,25 | 4,15 | 4,10 | 4,05 | 4,00 |
| | | | | | | | | | Indeks Desa membangun | 0,5969 | 0,6058 | 0,6146 | 0,6235 | 0,6323 | 0,65 |
| | % warisan Budaya yang lestari | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Meningkatnya pelestarian warisan Budaya | Jumlah aset budaya yang dilestarikan | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencanadan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan kepada agenda prioritas dalam RPJM nasional diatas maka pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan prioritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan;
3. Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan prioritas tersebut diatas yang dituangkan pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 diambil tema pembangunan nasional yaitu **"Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif"**.

Senada dengan tema RKP 2022 untuk tema pembangunan tahun 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung adalah **"Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Serta Peningkatan SDM Berkualitas**". Yang Memiliki Prioritas

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, aman dan Berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Adapun untuk sasaran pembangunan berkenaan dengan Perencanaan Pembangunan Tahun 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memperhatikan hasil penelaahan pokok pokok pikiran DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyusunan RKPD tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen Nomor : 170 / 51 / I.11 / TUBABA / 2021 yang disusun berdasarkan hasil reses (penjaringan aspirasi masyarakat) dari dapil I, II, III dan IV meliputi bidang :

1. Bidang infrastruktur
2. Bidang pendidikan
3. Bidang kesehatan
4. Bidang pemerintahan
5. Bidang peternakan, pertanian dan perkebunan
6. Bidang keamanan dan ketertiban dan
7. Bidang lain – lain.

Mengacu agenda pembangunan Nasional, indikasi tema pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat serta prioritas pembanguan tahun 2022 serta memperhatikan pokok – pokok pikiran DPRD, maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 adalah "**Peningkatan Kualitas SDM dan Pemulihan Ekonomi untuk Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing**, dengan prioritas pembangunan

1) Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, jaring pengaman sosial dan pengembangan ekonomi rakyat kreatif.
2) Pembangunan SDM Berkarakter dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
3) Pengembangan Ekowisata dan Pelestarian Budaya.
4) Pengembangan Infrastruktur.
5) Reformasi Birokrasi.

Berikut ini tabel hubungan antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Propinsi dengan Prioritas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (RKPD) 2022.

Tabel.4.1.
Prioritas Pembangunan Nasional, Pemerintah Propinsi Lampung dan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

| No | Nasional | Provinsi | Kabupaten |
|---|---|---|---|
| 1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, jaring pengaman sosial dan pengembangan ekonomi rakyat kreatif. |
| 2 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | | |
| 3 | Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manuasia | Pembangunan SDM Berkarakter dan peningkatan kualitas pelayanan dasar |
| 4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | Pengembangan Ekowisata dan Pelestarian Budaya |
| 5 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur | Pengembangan Infrastruktur |
| 6 | Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | |
| 7 | Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya | Reformasi Birokrasi |
| | | Reformasi Birokrasi | |

Memperhatikan RPJMD tahun 2022, Sasaran Pembagunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 yaitu:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Penurunan Pengangguran;
4. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan serta Terpenuhinya hak-hak anak;
5. Meningkatnya PMKS Yang Mandiri;
6. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan;
7. Meningkatnya Prestasi Olahraga;
8. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, dan perikanan;
9. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan;
10. Meningkatnya Investasi;
11. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;
12. Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM;
13. Meningkatnya sektor pariwisata;
14. Meningkatnya Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap;
15. Meningkatnya ketersediaan jaringani irigasi dalam kondisi mantap dan berfungsi;
16. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air minum;
17. Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata.
18. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan;
19. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan
20. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman;
21. Meningkatnya pelestarian warisan Budaya.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 untuk tahun 2022 yaitu :

1. Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun;
2. Perluasan kesempatan menempuh dan menuntaskan pendidikan menengah dan tinggi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata;
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata;
4. Pengembangan budaya baca dan peningkatan akses perpustakaan bagi masyarakat;
5. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat, kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi;
6. Peningkatan pembinaan upaya kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat;
7. Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
8. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan;
9. Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin;
10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu tenaga kesehatan;
11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatan kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing;

12. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan;
13. Peningkatan kualitas hidup, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan;
14. Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya;
15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pada setiap aspek penghidupannya;
16. Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;
17. Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, kepeloporan;
18. Fasilitasi pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda;
19. Fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi kepemudaan;
20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani;
21. Peningkatan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan;
22. Meningkatkan integritas dan kapasitas sumber daya aparatur publik;
23. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang – Undang Pelayanan Publik;
24. Pendayagunaan peraturan perundang – undangan secara lebih maksimal dan tata peraturan daerah lebih efektif;
25. Memantapkan kelembagaan, SDM pengelolaan keuangan, dana administrasi pemerintah tiyuh;

26. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip *Good Governance*;
27. Meningkatkan pengelolaan asset daerah secara tertib dan taat asas;
28. Mengembangkan *sistem e-planning*;
29. Meningkatkan kapasitas SDM;
30. Meningkatkan administrasi birokrasi;
31. Mempermudah alur perizinan melalui PTSP berbasis IT;
32. Implementasi *e-budgeting;*
33. Peningkatan kualifikasi kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
34. Peningkatan pembinaan jiwa KORPS dan Kode Etik ASN;
35. Menjalin kemitraan antara Pemerintah, Polri, TNI dan Masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
36. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
37. Penguatan Sistem peringatan dini ditingkat hulu dan hilir;
38. Pengarustamaan pengurangan resiko bencana diseluruh sektor pembangunan;
39. Implementasi standar pelayanan minimum (SPM) penanggulangan bencana;
40. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dalam pemulihan pasca bencan, termasuk perencanaan, penganggaran dan monitoring;
41. Mewujudkan prilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan keagamaan;
42. Peningkatan kesadaran apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya;
43. Peningkatan kualitas perlindungan, pemgembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya;
44. Peningkatan keberdayaan masyarakat;
45. Peningkatan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahaan;
46. Penguatan kebebasan masyarakat sipil;

47. Optimalisasi pemenuhan hak – hak politik masyarakat;
48. Memperkuat kelembagaan demokrasi;
49. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum;
50. Peningkatan kapasitas integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum;
51. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan (jalan dan jembatan) untuk mendukung konektivitas antarwilayah.
52. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana (termasuk fasilitas) perhubungan untuk mendukung keterjangkauan layanan transportasi dan menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi.
53. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan ramah lingkungan.
54. Perluasan cakupan layanan infrastruktur jaringan telekomuni-kasi,informasi dan energihingga menjangkau seluruh pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten
55. Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat
56. Penguatanpembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis daerah serta untuk mecukupi kebutuhan pangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan
57. Mengembangkan kawasan peruntukan industrisedang dan atau besar, serta mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) untuk meningkatkan nilai tambah komoditi hasil pertanian dan menciptakan kesempatan kerja di daerah.

58. Peningkatan kapasitas industry kecil dan menengah (IKM) pengolahan berbasis agro (Agroindustri) yang produktif, berdayasaing, tahan krisis, padat karya, serta berwawasan lingkungan
59. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdayasaing dan percepatan realisasi penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas daerah dan nasional.
60. Optimalisasi kerjasama investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor- sektor prioritas daerah dan nasional
61. Pengembangan landasan udara M. Bun Yamin untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah
62. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan penting
63. Penguatan implementasi elemen perlindungan konsumen (*commercial fairness*, standar, kemetrologian, pengawasan barang beredar) untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat
64. Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar dan berdaya saing tinggi
65. Peningkatan tatalaksana, penataan badan hukum, peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan Koperasi
66. Pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata,

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja merupakan rencana teknis dari prioritas pembangunan yang dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yang kemudian dibuat program dan dari program ini dideskripsikan lagidalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menjadi alat utama dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Rencana program beserta kegiatan-kegiatan nya ini berasal dari mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang melibatkan pendekatan *top down* berupa usulan dari SKPD terkait, *bottom up* berupa partisipasi masyarakat, serta pendekatan teknokratik. Pendekatan *bottom up* berasal dari aspirasi masing-masing wilayah dengan melihat kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Pendekatan *top down* berasal dari SKPD dengan melihat pada persoalan sektoral yang ditanganinya. Sementara pendekatan teknokratik berasal dari pemikiran dan perumusan prioritas pembangunan. Perencanaan program dan kegiatan prioritas ini juga meliputi target pencapaian beserta indikatornya dan penganggaran yang akan dibebankan pada APBD kabupaten serta waktu dan lokasi pelaksanaannya.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun SKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.

2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaandanSKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD.

Rencana program dan kegiatan prioritas sudah disesuaikan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diperbaharui dengan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 secara terperinci dituangkan kedalam bentuk matriks yang disajikan dengan rencana program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing SKPD sebagai mana tabel berikut :

Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Pendidikan
**SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 01 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja perangkat Daerah | Kab. Tubaba | 100 | % | 50.000.000 | APBD | | 100% | 55.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Tubaba | 100 | % | 172.736.432.041 | APBD | | 100% | 190.010.075.245 |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | Kab. Tubaba | 100 | % | 71.040.000 | APBD | | 100% | 78.144.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | terlaksananya pelatihan pegawai penyusunan PAK | Kab. Tubaba | 100 | % | - | APBD | | 100% | - |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | terpenuhinya alat tulis kantor | Kab. Tubaba | 100 | % | 102.355.000 | APBD | | 100% | 112.590.500 |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | terpenuhinya logistik | Kab. Tubaba | 100 | % | 151.008.000 | APBD | | 100% | 166.108.800 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan | Kab. Tubaba | 100 | % | 41.866.000 | APBD | | 100% | 46.052.600 |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | terlaksananya koordinasi dan konsultasi | Kab. Tubaba | 100 | % | 50.309.000 | APBD | | 100% | 55.339.900 |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan | Kab. Tubaba | 100 | % | 17.830.000 | APBD | | 100% | 19.613.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | terbayarnya jasa komunikasi dan listrik | Kab. Tubaba | 100 | % | 24.000.000 | APBD | | 100% | 26.400.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | terbayarnya jasa mobilitas | Kab. Tubaba | 100 | % | 303.000.000 | APBD | | 100% | 333.300.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | terbayarnya jasa pemeliharaan | Kab. Tubaba | 100 | % | 28.000.000 | APBD | | 100% | 30.800.000 |
| 1 | | | | | **URUSAN PEMRINTAHAN WAJIB YANG BERKAIATAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | | **URUSAN PEMERIMNTAH BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | pembangunan tuang guru/TU | Kab. Tubaba | 100 | % | 2.592.291.000 | APBD | | 100% | 2.851.520.100 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Perbaikan Ruang UKS | Kab. Tubaba | 12 | sklh | 1.457.940.000 | APBD | | 12 sklh | 1.603.734.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Perbaikan Perpustakaan | Kab. Tubaba | 15 | sklh | 1.300.508.000 | APBD | | 15 sklh | 1.430.558.800 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Perbaikan Sarana dan prasarana sekolah | Kab. Tubaba | 50 | sklh | 4.281.576.000 | APBD | | 50 sklh | 4.709.733.600 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Rehab Sekolah SD | Kab. Tubaba | 50 | sklh | 4.553.336.000 | APBD | | 50 sklh | 5.008.669.600 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi Sedang/berat Ruang guru/kepala sekolah/TU | Rehab Ruang | Kab. Tubaba | 1 | ruang | 119.645.000 | APBD | | 100% | 131.609.500 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 11 | Rehabilitasi Sedang/berat Perpustakaan Sekolah | Rehab Ruang | Kab. Tubaba | 1 | ruang | 114.225.000 | APBD | | 100% | 125.647.500 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 22 | Pengadaan alat praktek dan peraga siswa | tersedianya alat praktek | Kab. Tubaba | 34 | paket | 3.610.000.000 | APBD | | 100% | 3.971.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 23 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | terlaksananya ujian | Kab. Tubaba | 100 | % | 150.000.000 | APBD | | 100% | 165.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | tercapainya evaluasi satuan pendidikan | Kab. Tubaba | 100 | % | 150.000.000 | APBD | | 100% | 165.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | tercapainya presatasi siswa | Kab. Tubaba | 100 | % | 100.000.000 | APBD | | 100% | 110.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 26 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terlaksanaan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah | Kab. Tubaba | 0 | SD | 0 | APBD | | 1 SD | - |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Terlaksananya pengembangan karir di Kabupaten tulang Bawang Barat | Kab. Tubaba | 0 | | 0 | APBD | | 40 Kepala Sekolah GURU SD 978, GURU SMP 656 | - |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah | pelaksanaan pembinaan | Kab. Tubaba | 0 | sek | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | terbayarknya BOS | Kab. Tubaba | 174 | SD | 28.000.000.000 | APBD | | 164 SD | 30.800.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | tercapainya laporan BOS dengan baik | Kab. Tubaba | 222 | SD | 100.000.000 | APBD | | 174 SD | 110.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Peningkatan sarana | Kab. Tubaba | 1 | ruang | 258.000.000 | APBD | | 1 | 283.800.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 06 | Pembangunan Laboraturium | Peningkatan sarana | Kab. Tubaba | 6 | ruang | 4.125.566.350 | APBD | | 50 SMP | 4.538.122.985 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan sarana | Kab. Tubaba | 11 | ruang | 210.000.000 | APBD | | 50 SMP | 231.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Peningkatan sarana | Kab. Tubaba | 8 | ruang | 1.040.000.000 | APBD | | 50 SMP | 1.144.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 18 | Rehabilitasi Sedang/Berat laboraturium | Peningkatan sarana | Kab. Tubaba | 1 | ruang | 365.890.650 | APBD | | 50 SMP | 402.479.715 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana prasarana dan utilitas sekolah | Peningkatan sarana | Kab. Tubaba | 100 | % | 2.090.000.000 | APBD | | 50 SMP | 2.299.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 35 | Pengadaan alat praktek dan peraga siswa | Peningkatan sarana | Kab. Tubaba | 26 | paket | 1.162.870.000 | APBD | | 50 SMP | 1.279.157.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 36 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Tersenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Kab. Tubaba | 100 | % | 100.000.000 | APBD | | 100% | 110.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | terlaksananya tindak lanjut satuan SMP | Kab. Tubaba | 0 | % | - | APBD | | 100% | - |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | terlaksana prestasi siswa SD | Kab. Tubaba | 100 | % | 100.000.000 | APBD | | 100% | 110.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | terbayarknya BOS | Kab. Tubaba | 50 | SMP | 13.899.400.000 | APBD | | 33 SMP | 15.289.340.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Pembangunan gedung/ ruang kelas / ruang guru PAUD | Peningkatan sarana | Kab. Tubaba | 1 | ruang | 101.080.000 | APBD | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Peningkatan sarana | Kab. Tubaba | 1 | ruang | 89.000.000 | APBD | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 12 | Pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD | Peningkatan sarana | Kab. Tubaba | 2 | pkt | 50.000.000 | APBD | | 696 Guru | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 14 | Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Paud | Evaluasi | Kab. Tubaba | 50 | paud | 50.000.000 | APBD | | 696 Guru | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Terbayarnya insentif guru, terlaksananya kegiatan PAUD | Kab. Tubaba | 696 | Guru | 985.200.000 | APBD | | 696 Guru | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Terbayarnya BOP paud | Kab. Tubaba | 175 | Lmbg | 4.015.800.000 | APBD | | 183 Lmbg | 4.417.380.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 19 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | kapasitasBOP paud | Kab. Tubaba | 175 | Lmbg | 100.000.000 | APBD | | 183 Lmbg | 110.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | | **Pengelolaan Pendidikan Noformal / Kesetaraan** | | | | | | APBD | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | terlaksannya Pendidikan kesetaraaan | Kab. Tubaba | 100 | % | 50.000.000 | APBD | | 100% | 55.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 17 | Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal / kesetaraan | terlaksannya Pendidikan kesetaraaan | Kab. Tubaba | 100 | % | 725.200.000 | APBD | | 100% | 797.720.000 |
| 1 | 01 | 03 | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 03 | 2.01 | | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar | Terlaksananya penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal | Kab. Tubaba | 100 | % | - | APBD | | 100% | - |
| 1 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | terlaksananya penyusunan silabus | Kab. Tubaba | 100 | % | - | APBD | | 100% | - |
| 1 | 01 | 04 | | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 04 | 2.01 | | **Pemerataaan Kuantitas Dan Kualitas Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sataun Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan | tersedianya Guru Penggerak (TBBC) | Kab. Tubaba | 100 | % | 3.030.000.000 | APBD | | 100% | 3.333.000.000 |
| 1 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan tenaga Kependidikan | Kab. Tubaba | 100 | % | 250.000.000 | APBD | | 100% | 275.000.000 |
| 2 | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 22 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 02 | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | terlaksananya objek pemajuan budaya | Kab. Tubaba | 0 | % | - | APBD | | 100% | - |
| 2 | 22 | 03 | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | terlaksananya pelatihan SDM dan Kesenian Tradisional | Kab. Tubaba | 100 | % | 250.000.000 | APBD | | 100% | 275.000.000 |
| 2 | 22 | 05 | | | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 05 | 2.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 05 | 2.01 | 01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | terlaksananya pendaftaran objek wisata | Kab. Tubaba | 100 | % | 100.000.000 | APBD | | 100% | 110.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **253.253.368.041** | | | | **278.578.704.845** |

Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Kesehatan
**SKPD : Dinas Kesehatan**

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | |
| **X.XX.01 2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | TUBABA | | | | | | |
| X.XX.01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan kegiatan SKPD | TUBABA | 4 Dokumen | 767.724.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4 Dokumen | 279.220.000,00 |
| X.XX.01 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun | TUBABA | 4 Dokumen | 47.382.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 67.026.000,00 |
| X.XX.01 2.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun mengalami perubahan | TUBABA | 4 Dokumen | 20.003.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 50% | 9.360.000,00 |
| X.XX.01 2.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun | TUBABA | 4 Dokumen | 32.615.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 17.760.000,00 |
| X.XX.01 2.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun yang mengalami perubahan | TUBABA | 4 Dokumen | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 50% | 9.270.000,00 |
| X.XX.01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen LAKIP, Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD | TUBABA | 4 Dokumen | 8.868.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 11.320.000,00 |
| X.XX.01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | TUBABA | 4 Dokumen | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 9.750.000,00 |
| **X.XX.01 2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| X.XX.01 2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | TUBABA | 12 bln | 30.470.538.981,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 29.117.436.736,00 |
| X.XX.01 2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | TUBABA | 12 bln | | | | 0% | |
| X.XX.01 2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah layanan pelaksanaan verifikasi | TUBABA | 2 Kegiatan | 101.640.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 229.800.000,00 |
| X.XX.01 2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD | TUBABA | 1 Dokumen | | | | 0% | |
| X.XX.01 2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | TUBABA | 1 Dokumen | | | | 0% | |
| X.XX.01 2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | TUBABA | 1 Dokumen | | | | 0% | |
| X.XX.01 2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | TUBABA | 1 Dokumen | | | | 0% | |
| X.XX.01 2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah pelaporan serta pelaaksanaan analisis Prognosis Realisasi Anggaran | TUBABA | 1 Dokumen | 123.872.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 100.050.000,00 |
| **X.XX.01 2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| X.XX.01 2.03 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.03 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.03 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksanya Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | 0 | | | | 0 | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| X.XX.01 2.03 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.03 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD | Jumlah Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.03 07 | Pemanfaatan Barang Milik daerah SKPD | Jumlah adanya pemanfaatan barang milik daerah SKPD | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| **X.XX.01 2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| X.XX.01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | jumlah bimtek | TUBABA | 100% | 13.000.000,00 | APBD | | 0 | |
| **X.XX.01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | TUBABA | | | | | | |
| X.XX.01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | TUBABA | 12 bln | 429.448.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 279.373.000,00 |
| X.XX.01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah bulan tersedianya Peralatan Rumah Tangga | TUBABA | 12 bln | 296.700.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 20.400.000,00 |
| X.XX.01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan tersedianya Bahan Logistik Kantor | TUBABA | 12 bln | 246.576.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 257.136.000,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| X.XX.01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | Jumlah bulan tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan | TUBABA | 12 bln | 161.200.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 195.520.000,00 |
| X.XX.01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.06 07 | Penyediaan Bahan / Material | Jumlah Tersedianya Bahan / Material | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Terselenggaranya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | TUBABA | 1.00 | 15.012.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 210.847.000,00 |
| X.XX.01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.06 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| **X.XX.01 2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah** | | TUBABA | | | | | | |
| X.XX.01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan | Jumlah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan | TUBABA | 3.00 | | | | 0 | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| X.XX.01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.07 03 | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Tersedianya Alat Besar yang memenuhi standar | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.07 04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Tersedianya Mebel yang memenuhi standar | | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.07 07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Tersedianya  Aset Tetap Lainnya | | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.07 08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Tersedianya Aset Tak Berwujud | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.07 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | TUBABA | 1.00 | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 15.000.000,00 |
| X.XX.01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang memenuhi standar permenkes | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang memenuhi standar | TUBABA | 0 | | | | 0 | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| **X.XX.01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | TUBABA | | | | | | |
| X.XX.01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulanan penyediaan Jasa Surat Menyurat | TUBABA | 12 bln | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Juumlah bulanan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | TUBABA | 12 bln | 72.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 72.000.000,00 |
| X.XX.01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulanan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | TUBABA | 12 bln | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.08 04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah penyediaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | TUBABA | 1.00 | 307.200.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 274.200.000,00 |
| **X.XX.01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah** | | TUBABA | | | | | | |
| X.XX.01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.09 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Besar | TUBABA | 0 | | | | 0 | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| X.XX.01 2.09 04 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Terpeliharanya Mabel | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | TUBABA | 12 bln | 132.180.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 34.120.000,00 |
| X.XX.01 2.09 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.09 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Terpeliharanya Aset Tak Berwujud | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.09 12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Jumlah Terpeliharanya Tanah | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| **X.XX.01 2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | TUBABA | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| X.XX.01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan BLUD | TUBABA | 17 Faskes | 20.129.600.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik-BOKKBBOK | | 100% | 28.741.762.000,00 |
| **X.XX.01 2.11** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah** | | TUBABA | | | | | | |
| | **(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)** | | TUBABA | | | | | | |
| X.XX.01 2.11 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuia dengan peraturan daerah | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.11 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.11 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar kesehatan | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| X.XX.01 2.11 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai peraturan daerah | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| **X.XX.01 2.12** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | | TUBABA | | | | | | |
| | **(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)** | | TUBABA | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| X.XX.01 2.12 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang cukup | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| **1.02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | TUBABA | | | | | | |
| **1 02 02 2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | | TUBABA | | | | | | |
| 1 02 02 2.01 01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana | Jumlah sarana dan prasaranan pembangunan rumah sakit yang memenuhi standar | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.01 02 | Pembangunan Puskesmas | Jumlah pembangunan puskesmas yang memenuhi syarat | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.01 03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Terlaksananya Fasilitas kesehatan yang memadai | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.01 04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.01 05 | Pengembangan Rumah Sakit | Terlaksananya pengembangan rumah sakit | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.01 06 | Pengembangan Puskesmas | Terlaksananya Pengembangan Puskesmas | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.01 07 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Terlaksananya pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | TUBABA | 0 | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1 Pustu | 330.000.000,00 |
| 1 02 02 2.01 08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.01 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | TUBABA | 100 | 43.200.000,00 | | | 0 | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 02 02 2.01 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.01 11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.01 12 | Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mempunyai sarana Kesehatan sesuai standar | TUBABA | 0 | 848.622.000,00 | Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum | | 0 | 650.000.000,00 |
| 1 02 02 2.01 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mempunyai Prasarana dan Pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | TUBABA | 0 | 0,00 | DAK Non Fisik-BOKKBBOK | | 0 | 243.931.000,00 |
| 1 02 02 2.01 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | TUBABA | 70% | 1.111.484.000,00 | Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum | | 70% | 1.865.168.000,00 |
| 1 02 02 2.01 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah alat kalibrasi dan pemeliharaannya | TUBABA | 17 Fasyankes | 0,00 | DAK Non Fisik-BOKKBBOK | | 17 Fasyankes | 99.100.000,00 |
| 1 02 02 2.01 16 | Pengadaan Obat Vaksin | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mempunyai ketersedian obat dan vaksin di puskesmas sesuai standar | TUBABA | 70% | 3.040.560.990,00 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan; DAK Non Fisik-BOKKBBOK; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 70% | 3.325.000.000,00 |
| 1 02 02 2.01 17 | Pengadaan Bahan Habis pakai | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mempunyai ketersedian Bahan Habis pakai di puskesmas sesuai standar | TUBABA | 70% | 1.499.999.655,00 | DAK Non Fisik-BOKKBBOK | | 70% | 1.252.382.000,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 02 02 2.01 18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.01 19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.01 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Pemeliharan Fasilitas Kesehatan yang mempunyai Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| **1 02 02 2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota** | | TUBABA | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Peningkatan deteksi dini dan sweeping pd ibu hamil dan bayi risiko tinggi di 16 Puskesmas | TUBABA | 100% | 616.140.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 100% | 45.000.000,00 |
| 1 02 02 2.02 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan Bayi baru Lahir yang miskin dan tidak memiliki kartu jaminan di fasilitas kesehatan | TUBABA | 100% | 266.500.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- Jaminan Persalinan | | 100% | 1.208.857.000,00 |
| 1 02 02 2.02 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Peningkatan deteksi dini dan sweeping bayi risiko tinggi yang memiliki kelainan kongenital di 16 Puskesmas | TUBABA | 100% | 131.760.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 100% | 40.000.000,00 |
| 1 02 02 2.02 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Peningkatan deteksi dini dan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita di wilayah 16 Puskesmas | TUBABA | 100% | 558.178.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 100% | 25.000.000,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 02 02 2.02 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar | Terdeteksinya secara dini masalah kesehatan peserta didik dan tersedianya informasi untuk menilai perkembangan kesehatan peserta didik. | TUBABA | 100% | 331.903.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 60.000.000,00 |
| 1 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat | TUBABA | 100% | 235.007.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 55.000.000,00 |
| 1 02 02 2.02 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat | TUBABA | 100% | 332.365.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 40.000.000,00 |
| 1 02 02 2.02 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar (%) | TUBABA | 100% | 159.725.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 100% | 22.063.000,00 |
| 1 02 02 2.02 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus | Penderita Diabetes Militus mendapatkan pelayanan sesuai standar (%) | TUBABA | 100% | 143.415.880,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 100% | 22.063.000,00 |
| 1 02 02 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat | Jumlah pembinaan pelayanan kesehatan jiwa berat bagi pelayanan kesehatan | TUBABA | 100% | 105.438.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 100% | 18.500.000,00 |
| 1 02 02 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Penderita TBC Paru mendapatkan pelayanan sesuai standar (%) | TUBABA | 100% | 385.773.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 100% | 105.569.000,00 |
| 1 02 02 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | TUBABA | 100% | 182.557.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 100% | 89.072.000,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 02 02 2.02 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah penyelidikan epidemiologi dan surveilans penyakit di 16 Puskesmas | TUBABA | 100% | 2.978.945.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 100% | 36.560.000,00 |
| 1 02 02 2.02 14 | Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanan dan atau berpotensi bencana | Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana di 16 Puskesmas | TUBABA | 100% | | | | 100% | |
| 1 02 02 2.02 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di 16 Puskesmas | TUBABA | 100% | 1.179.863.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 260.000.000,00 |
| 1 02 02 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di 16 Puskesmas | TUBABA | 60% | 124.423.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 60% | 105.000.000,00 |
| 1 02 02 2.02 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan di 16 Puskesmas dan rumah sakit | TUBABA | 71% | 883.959.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 71% | 282.932.000,00 |
| 1 02 02 2.02 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan di 16 Puskesmas | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.02 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan tradisional lainnya | Jumlah puskesmas yang wilayah kerjanya memanfaatkan tanaman obat untuk bahan jamu tradisional | TUBABA | 85% | 13.500.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 85% | 40.000.000,00 |
| 1 02 02 2.02 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah layanan Surveilans Kesehatan | TUBABA | 100% | 1.473.579.100,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 100% | 27.702.000,00 |
| 1 02 02 2.02 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah pembinaan pelayanan kesehatan jiwa bagi pelayanan kesehatan | TUBABA | 70% | 99.370.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 70% | 80.518.000,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 02 02 2.02 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | TUBABA | 100% | 52.650.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 100% | 24.725.000,00 |
| 1 02 02 2.02 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | TUBABA | 100% | 710.873.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK; DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 435.068.000,00 |
| 1 02 02 2.02 24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah tersedianya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.02 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah layanan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular ke pelayanan kesehatan | TUBABA | 91,60% | 968.660.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 91,60% | 322.131.000,00 |
| 1 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah tersedianya Jaminan Kesehatan Masyarakat | TUBABA | 100% | 7.666.293.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 5.050.476.000,00 |
| 1 02 02 2.02 27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Jumlah tersedianya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.02 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan / Nasional | Jumlah kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan / Nasional | TUBABA | 100% | 0,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 100% | 110.738.000,00 |
| 1 02 02 2.02 29 | Penyelengaraan Kabupaten / Kota Sehat | Adanya penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat | TUBABA | 100% | 0,00 | | | 100% | |
| 1 02 02 2.02 30 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah adanya Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | TUBABA | 0 | 0,00 | | | 0 | |
| 1 02 02 2.02 31 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan | Jumlah adanya Penelitian Kesehatan | TUBABA | 0 | 0,00 | | | 0 | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 02 02 2.02 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah rumah sakit yang mendapatkan operasional dan pemeliharaan | TUBABA | 0 | 20.000.000,00 | | | 0 | |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah puskesmas yang mendapatkan operasional dan pemeliharaan | TUBABA | 100% | 0,00 | | | 100% | |
| 1 02 02 2.02 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapatkan operasional dan pemeliharaan | TUBABA | 0 | 0,00 | | | 0 | |
| 1 02 02 2.02 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / kota | Jumlah terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan | TUBABA | 5% | 217.882.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- Akreditasi Puskesmas | | 5% | 1.047.749.000,00 |
| 1 02 02 2.02 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi an Pemberian Obat Massal) | Jumlah kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi an Pemberian Obat Massal) | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.02 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | TUBABA | 100% | 144.021.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 243.040.000,00 |
| 1 02 02 2.02 38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dipelayanan kesehatan yang memenuhi standar | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| **1 02 02 2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| 1 02 02 2.03 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah dokumen Profil Dinas Kesehatan | TUBABA | 100% | 8.168.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 10.050.000,00 |
| 1 02 02 2.03 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah dokumen Profil Dinas Kesehatan | TUBABA | 50% | 11.964.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 50% | 48.730.000,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 02 02 2.03 03 | Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah adanya Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | TUBABA | 0 | | | | 0 | |
| **1 02 02 2.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota** | | TUBABA | | | | | | |
| 1 02 02 2.04 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah adanya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | TUBABA | 100% | | | | 100% | |
| 1 02 02 2.04 02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah adanya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | TUBABA | 100% | | | | 100% | |
| 1 02 02 2.04 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Terlaksananya Program Akreditasi di setiap Fasilitas Kesehatan | TUBABA | 100% | 13.500.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 40.000.000,00 |
| 1 02 02 2.04 04 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Terlaksanya Sistem Rujukan yang Berjenjang | TUBABA | 100% | | | | 100% | |
| **1 02 03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | TUBABA | | | | | | |
| **1 02 03 2.01** | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / kota** | | TUBABA | | | | | | |
| 1 02 03 2.01 01 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah adanya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | TUBABA | | | | | 100% | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 02 03 2.01 02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah adanya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | TUBABA | | | | | | |
| **1 02 03 2.02** | **Perencanaan Kebtuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten / Kota** | | TUBABA | | | | | | |
| 1 02 03 2.02 01 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Buku Profil SDM Kesehatan | TUBABA | 1 | 2.992.700.175,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | | 100% | 40.000.000,00 |
| 1 02 03 2.02 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Terdatanya Kebutuhan pegawai sesuai ABK dan Anjab di seluruh Bidang Kesehatan,Puskesmas Klinik swasta | TUBABA | | | | | | |
| 1 02 03 2.02 03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah adanya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | TUBABA | 1 | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 3.909.109.000,00 |
| **1 02 03 2.03** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota** | | TUBABA | | | | | | |
| 1 02 03 2.03 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah adanya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan | TUBABA | 1 | 0,00 | DAK Fisik-Bidang Keseh atan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan | | 100% | 199.010.000,00 |
| **1.02-04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| **1.02.04.2.03** | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | | | | | | | | |
| 1.02.04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | TUBABA | 100% | 0,00 | DAK Fisik-Bidang Keseh atan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan | | 100% | 92.494.100,00 |
| **1.02.04.2.06** | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | | | | | | | | |
| 1.02.04.2.06.01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | TUBABA | 100% | 0,00 | DAK Fisik-Bidang Keseh atan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan | | 100% | 46.611.000,00 |
| **1.02 05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | TUBABA | | | | | | |
| **1 02 05 2.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota** | | TUBABA | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | '(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 02 05 2.01 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya Program Upaya Promosi Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat | TUBABA | 0% | 316.110.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 0% | 179.746.900,00 |
| **1 02 05 2.02** | **Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota** | | TUBABA | | | | | | |
| 1 02 05 2.02 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat | TUBABA | 55% | 438.775.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 55% | 130.000.000,00 |
| **1 02 05 2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota** | | TUBABA | | | | | | |
| 1 02 05 2.03 01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksana Upaya Kesehatan ersumber Daya Masyarkat (UKBM) | Meningkatkan cakupan program Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | TUBABA | 53% | 432.127.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 53% | 195.000.000,00 |
| **TOTAL TA 2022** | | | | | **84.115.549.781,00** | **TOTAL PERKIRAAN TA 2023** | | | **82.405.445.736,00** |

Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
**SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

| KODE | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Satuan | | | | | |
| (1) | | | | | | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| **X** | **XX** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran** | | | | **-** | | | | - |
| **X** | **XX** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Ketersediaan Dokumen pengkajian/ penelitian yang dimanfaatkan** | | | | | | | | - |
| X | XX | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah kegiatan koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | DPUPR | 1 | Keg | - | APBD | | | - |
| **X** | **XX** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan** | **Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Penunjang Keuangan** | | | | | | | | - |
| X | XX | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terealisasinya Pembayaran Gaji & Tunjangan ASN | DPUPR | 1 | Keg | 2.969.388.716,00 | APBD | | 1Dok | 3.266.327.587,60 |
| X | XX | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keungan SKPD | Jumlah Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | DPUPR | 1 | Keg | 309.840.000,00 | APBD | | | 340.824.000,00 |
| **X** | **XX** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah sarana dan prasarana penunjang** | | | | | APBD | | | - |
| X | XX | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Bermanfaat | DPUPR | 1 | unit | 294.800.000,00 | APBD | | 1keg | 324.280.000,00 |
| X | XX | 01 | 2,08 | | **Pengadaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | - |
| X | XX | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | tersedianya air dan listrik | DPUPR | 12 | bln | 91.500.000,00 | APBD | | | 100.650.000,00 |

| KODE | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Satuan | | | | | |
| (1) | | | | | | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| X | XX | 01 | 2,08 | 4 | Jasa Pelayanan umum kantor | terpenuhinya pelayanan umum | DPUPR | 12 | bln | 539.400.000,00 | APBD | | | 593.340.000,00 |
| X | XX | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | - |
| X | XX | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas atau Lapangan | Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah | DPUPR | 1 | Keg | 285.360.000 | APBD | | 1 Th | 313.896.000,00 |
| X | XX | 01 | 2.09 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Perizinan Alat Berat | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat | DPUPR | 1 | Keg | 999.936.600,00 | APBD | | | 1.099.930.260,00 |
| X | XX | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | DPUPR | 5 | unit | - | APBD | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| **1** | **03** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Jumlah pendayagunaan sumber daya air** | | | | **-** | **APBD** | | | - |
| **1** | **03** | **02** | **2,01** | | **Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantaipada wilayah sungai (WS)dalam 1 daerah kab/kota** | **Pengelolaan SDA** | | | | **-** | **APBD** | | | - |
| 1 | 03 | 02 | 2,01 | 49 | Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya | pemeliharaan embung | DPUPR | 4 | DI | 499.182.450,00 | APBD | | | 549.100.695,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Rumah Tangga yang terlayani Sumber Air** | | | | **-** | **APBD** | | | - |
| 1 | 03 | 03 | 2,01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota | **Jumlah Kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat** | | | | **-** | APBD | | | - |
| 1 | 03 | 03 | 2,01 | 04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaaan | Jumlah Sambungan Rumah SPAM Kawasan Perdesaan Kondisi Baik | DPUPR | 100 | % | 5.080.207.448,00 | APBD | | | 5.588.228.192,80 |

| KODE | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Satuan | | | | | |
| (1) | | | | | | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | 03 | 03 | 2,01 | 06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaaan | Jumlah Sambungan Rumah SPAM Kawasan Perdesaan Kondisi Baik | DPUPR | 100 | % | 1.497.441.060,00 | DAK | | | 1.647.185.166,00 |
| 1 | 03 | 03 | 2,01 | 15 | Operasi pemeliharaan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah Sambungan Rumah SPAM Kawasan Perdesaan Kondisi Baik | DPUPR | 100 | % | 149.744.106,00 | APBD | | | 164.718.516,60 |
| 1 | 03 | 03 | 2,01 | 16 | Operasi pemeliharaan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaaan | Jumlah Sambungan Rumah SPAM Kawasan Perdesaan Kondisi Baik | DPUPR | 100 | % | 199.658.808,00 | DAK | | | 219.624.688,80 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 05 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **persentase Saluran drainase / gorong-gorong yang dibangun dan terpelihara** | | | | | APBD | | | - |
| **1** | **03** | **05** | **2,01** | | **Pengelolaan dan pengembangan Sistem air limbahdomestik dalamdaerah kab/kota** | **Panjang Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | APBD | | | - |
| 1 | 03 | 05 | 2,01 | 03 | Pembangunan penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota | panjang Saluran drainase yang berfungsi dengan baik | Tubaba | 4 | keg | 4.740.666.600,00 | APBD | | | 5.214.733.260,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 06 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **persentase Saluran drainase / gorong-gorong yang dibangun dan terpelihara** | | | | | APBD | | | - |
| **1** | **03** | **06** | **2,01** | | **Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Panjang Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | APBD | | | - |
| 1 | 03 | 06 | 2,01 | 05 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | panjang Saluran drainase yang berfungsi dengan baik | Tubaba | 0 | 0 | - | APBD | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Satuan | | | | | |
| (1) | | | | | | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| **1** | **03** | **07** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | **Jumlah pembangunan sarana prasarana utilitas Dasar Masyarakat yang bersifat strategis** | | | | **-** | APBD | | | - |
| **1** | **03** | **07** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **-** | APBD | | | - |
| 1 | 03 | 07 | 2,01 | 01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jalan Lingkungan Yang di tingkatkan | DPUPR | | | - | APBD | | | - |
| 1 | 03 | 07 | 2,01 | 02 | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pembangunan Infrastruktur sesuai standar | DPUPR | | | 1.498.650.000,00 | APBD | | | 1.648.515.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | **08** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persntase bangunan gedung aset pemerintah sesuai standar** | **Tubaba** | **80 Persen** | | **-** | **APBD** | | **90 Persen** | - |
| **1** | **03** | **08** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **jumlah bangunan gedung aset pemetintah sesuai standar** | | | | **-** | APBD | | | - |
| 1 | 03 | 08 | 2,01 | 02 | Perencanaan, Pembangunan, pengawasann dan Pemanfaatan, Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota | jumlah kegiatan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan | DPUPR | 1 unit | | 16.349.985.000,00 | APBD | | | 17.984.983.500,00 |
| 1 | 03 | 08 | 2,01 | 02 | Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten /Kota | jumlah kegiatan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan | DPUPR | 1 unit | | 5.000.000.000,00 | APBD | | | 5.500.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| **1** | **03** | **10** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Panjang Jalan Kondisi Mantap dan Jumlah** | | | | **-** | APBD | | | - |

| KODE | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Satuan | | | | | |
| (1) | | | | | | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| **1** | **03** | **10** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **Panjang Jalan Kabupaten/kota kondisi baik, Jumlah Jembatan dalam kondisi baik** | | | | **-** | APBD | | | - |
| 1 | 03 | 10 | 2,01 | 01 | Penyusunan rencana kebijakan dan strategi pengembangan jaringanjalan serta perencanaan teknis penyelenggaraaan jalan dan jembatan | perencanaan panjang jalan Mantap | DPUPR | 100 | % | 2.000.000.000,00 | APBD | | | 2.200.000.000,00 |
| 1 | 03 | 10 | 2,01 | 08 | Rekonstruksi Jalan | panjang jalan Mantap | DPUPR | 100 | % | 34.264.016.394,00 | APBD | | | 37.690.418.033,40 |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang jalan kabupaten Terpelihara | DPUPR | 150 | Km | 9.999.905.815,00 | APBD | | | 10.999.896.396,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| 1 | 3 | 11 | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | | | | | - |
| **1** | **3** | **11** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil** | | | | | | | | | - |
| 1 | 3 | 11 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Lokal terlatih | DPUPR | 0 | Orng | - | APBD | | | - |
| 1 | 3 | 11 | 2.01 | 6 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Lokal terlatih | DPUPR | 0 | Orng | - | APBD | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| **1** | **03** | **12** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Persentase Dokumen Tata Ruang yang dimanfaatkan** | | | | | | | | - |
| **1** | **03** | **12** | **2.01** | | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | **luas area pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang** | | | | | | | | - |
| 1 | 03 | 12 | 2,03 | 03 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan RTRW dan RDTR | DPUPR | 0 | dok | - | APBD | | 1Keg | - |
| **1** | **03** | **12** | **2,04** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah kab/kota** | **Jumlah Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang** | | | | **-** | **APBD** | | | - |

| KODE | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Satuan | | | | | |
| (1) | | | | | | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | 03 | 12 | 2,04 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah Rapat Koordinasi | DPUPR | | | 203.001.134,00 | APBD | | | 223.301.247,40 |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | **86.972.684.131,00** | | | | **95.669.952.544,10** |

Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan
**SKPD : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 04 | 01 | | | **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Renja | Dinas Perkimta | 1 | Keg | 5.000.000 | APBD | | 1 Keg | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA SKPD | Dinas Perkimta | 1 | dok | 5.000.000 | APBD | | 1 dok | 5.500.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA Perubahan SKPD | Dinas Perkimta | 1 | dok | 5.000.000 | APBD | | 1 dok | 5.500.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA Perubahan SKPD | Dinas Perkimta | 1 | dok | 5.000.000 | APBD | | 1 dok | 5.500.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA Perubahan SKPD | Dinas Perkimta | 1 | dok | 5.000.000 | APBD | | 1 dok | 5.500.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen LAKIP Dinas Perkimta | Dinas Perkimta | 1 | dok | 5.000.000 | APBD | | 1 dok | 5.500.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen LPPD | Dinas Perkimta | 1 | dok | 5.000.000 | APBD | | 1 dok | 5.500.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Perkimta | 1 | Keg | 2.003.381.852 | APBD | | 1 Keg | 2.203.720.037 |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | Dinas Perkimta | 1 | thn | 106.200.000 | APBD | | 1 thn | 116.820.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Tersedianya Dokumen Lapaoran Keuangan Akhir Tahun Dinas Perkimta | Dinas Perkimta | 1 | dok | 5.000.000 | APBD | | 1 dok | 5.500.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan Dinas Perkimta | Dinas Perkimta | 4 | dok | 16.200.000 | APBD | | 4 dok | 17.820.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 04 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan pengelolaan Administrasi kepegawaian | gaji pegawai | Dinas Perkimta | 1 | thn | 17.850.000 | APBD | | 1 thn | 19.635.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.05 | 04 | Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | pelaksanaan koordinasi | Dinas Perkimta | 1 | thn | 32.150.000 | APBD | | 1 thn | 35.365.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatanKantor | Dinas Perkimta | 1 | thn | 10.694.000 | APBD | | 1 thn | 11.763.400 |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianyalogistik | Dinas Perkimta | 1 | thn | 120.864.000 | APBD | | 1 thn | 132.950.400 |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Dinas Perkimta | 1 | thn | 2.630.000 | APBD | | 1 thn | 2.893.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dinas Perkimta | 1 | thn | - | APBD | | 1 thn | - |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Perkimta | 1 | thn | 19.056.000 | APBD | | 1 thn | 20.961.600 |
| 1 | 04 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | - |
| 1 | 04 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Perkimta | 2 | unit | - | APBD | | 2 unit | - |
| 1 | 04 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Perkimta | 5 | unit | 10.398.000 | APBD | | 5 unit | 11.437.800 |
| 1 | 04 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dinas Perkimta | 1 | keg | - | APBD | | 1 keg | - |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Dinas Perkimta | 1 | thn | - | APBD | | 1 thn | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas Perkimta | 1 | thn | 36.600.000 | APBD | | 1 thn | 40.260.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas Perkimta | 1 | thn | 168.000.000 | APBD | | 1 thn | 184.800.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Perkimta | 1 | thn | 69.770.000 | APBD | | 1 thn | 76.747.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpelihatanya Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Perkimta | 1 | thn | 6.330.000 | APBD | | 1 thn | 6.963.000 |
| 1 | 04 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 03 | | | **Program Pengembangan Perumahan** | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 03 | 2.01 | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 03 | 2.01 | 01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana datau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terindentifikasinya Perumahan di Lokasi Rawan Bencana dan Tersedianya Data Penerima Rumah Bagi Korban Bencana | Dinas Perkimta | 1 | dok | 20.000.000 | APBD | | 1 dok | 22.000.000 |
| 1 | 04 | 03 | | | **Program Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 03 | 2.02 | | **Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 04 | 03 | 2.02 | 02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Tersusunya Buku Kawasan Kumuh Perkotaan Panaragan Jaya, Tersusunya Buku Paduan Pembangunan Uluan Nughik, Tersedianya Citra Satelit Uluan Nughik, Perencanaan Taman Rumah SEKDA | Dinas Perkimta | 1 | Dok | - | APBD | | | - |
| 1 | 04 | 03 | 2.02 | 03 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Penduduk | Pendampingan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Program Pusat | Dinas Perkimta | 1 | keg | - | APBD | | | - |
| 1 | 04 | 03 | 2.02 | 08 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Tersusunya Buku RP2KPKP | Dinas Perkimta | 1 | dok | - | APBD | | | - |
| 1 | 04 | 03 | 2.03 | | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | | Dinas Perkimta | | | | | | | |
| 1 | 04 | 03 | 2.03 | 01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Perencanaan DED Taman Kota Pulung Kencana | Dinas Perkimta | 1 | dok | - | APBD | | | - |
| 1 | 04 | 03 | 2.03 | 02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Perbaikan dan Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni Program Daerah, Tersususun Data Base Perumahan | Dinas Perkimta | 200/1 | Unit/keg | 60.000.000 | APBD | | | 66.000.000 |
| 1 | 04 | 05 | | | **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 05 | 2.01 | | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 05 | 2.01 | 01 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Drainase 14 Titik, Jalan Permukiman 5 Titik dan Sumur Bor 4 Titik | Dinas Perkimta | 23 | titik | 220.000.000 | APBD | | | 242.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 04 | 05 | 2.01 | 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utlitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpeliharanya Taman Yang ada Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terpenuhinya Pembangunan Taman Rumah Dinas SEKDA, Terpenuhinya Pembangunan Taman Kantor Bersama (Panaragan), Terpenuhinya Pembangunan Taman Ekowisata dan Edukasi Embung Gunung Sari, Terpenuhinya Penerangan di Komplek Perkantoran Pemkab Tulang Bawang Barat | Dinas Perkimta | 3/250 | keg/titik | 2.680.000.000 | APBD | | | 2.948.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 10 | | | | **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 04 | | | **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan** | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | 01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terselesainya Konflik-Konflik Pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat | Kab.Tubaba | 1 | keg | - | APBD | | | - |
| 2 | 10 | 05 | | | **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan** | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 05 | 2.01 | | **Penyeselesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 05 | 2.01 | 01 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Apprasial Untuk Pengadaan Tanah | Dinas Perkimta | 1 | Keg | 1.851.362.400 | APBD | | | 2.036.498.640 |
| 2 | 10 | 05 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pennylesaian Masalah Ganti Kerugian dna Sangunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemrintah Daerah | Tersedianya Apprasial Untuk Pengadaan Tanah | Dinas Perkimta | 2 | Keg | 2.378.637.600 | APBD | | | 2.616.501.360 |
| 2 | 10 | 12 | | | **Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah** | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 12 | 2.01 | | **Fasilitasi,Invetarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat** | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 13 | | | **Program Survei,Pengukuran dan Pemetaan** | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 13 | 01 | | **Survei,Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah,Swasta dan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 13 | 01 | 01 | Survei dan Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta lokasi Tanah Pemerintah/Pemda | Tersedianya Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda Kabupaten Tulang Bawang Barat | Dinas Perkimta | 2 | Keg | - | APBD | | | - |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **9.870.123.852** | | | | **10.857.136.237** |

Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
**SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 05 | 01 | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| | | 01 | | | **Perencanan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| | | 01 | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Tubaba | 2 | Dok | 10.000.000 | APBD | | 2 Dok | 10.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Tubaba | 1 | Thn | 1.527.053.084 | APBD | | 1 Thn | 1.527.053.084 |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan | Tubaba | 1 | thn | 47.280.000 | APBD | | 1 thn | 5.808.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| | | 01 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut | Tersedianya Pakaian Dinas | Tubaba | 100 | % | 312.000.000 | APBD | | 100% | 312.000.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | terlaksananya pelatihan pegawai penyusunan PAK | Tubaba | 100 | % | - | APBD | | 100% | - |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 03 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya penunjang kegiatan kantor | Tubaba | 1 | Keg | 9.888.000 | APBD | | 1 Keg | 10.000.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Tubaba | 324 | Anggota | 709.104.000 | APBD | | 1 Tahun | - |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Kelancaran tugas kantor | Tubaba | 12 | Bln | 8.973.000 | APBD | | 1 Tahun | 10.000.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tubaba | 1 | Th | 19.939.000 | APBD | | 1 Tahun | 21.932.900 |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Kelancaran Pelaksaan Tugas | Tubaba | 1 | Tahun | 6.600.000 | APBD | | 1 Tahun | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya sewa kendaaraan Mobiltas Darat | Tubaba | 1 | Tahun | 159.600.000 | APBD | | 1 Tahun | - |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas atau Lapangan | Kelancaran Pelaksaan Tugas | Tubaba | 1 | Tahun | 111.670.000 | APBD | | 1 Tahun | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 02 | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | - |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | | **Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | - |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 01 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | Tubaba | 100 | Orang | 2.722.576.000 | APBD | | 1 Tahun | 2.722.576.000 |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 02 | Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Berdasarkan Perda dan Perkada | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | Tubaba | 20 | Kasus | - | APBD | | 12 Keg | - |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | | **Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota** | | | | | | | | | - |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 03 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota | Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti | Tubaba | 20 | Kasus | 150.000.000 | APBD | | 5 Keg | 150.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **5.794.683.084** | | | | **6.374.151.392** |

Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
**SKPD : Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | 05 | 04 | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA SKPD | Dinas Perkimta | 1 | dok | 6.400.000 | APBD | | 1 dok | 7.040.000 |
| 1 | 05 | 04 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Damkar Tubaba | 1 | Tahun | 1.231.141.891 | APBD | | 2 Dok | 1.354.256.080 |
| 1 | 05 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Damkar Tubaba | 12 | Bulan | 99.600.000 | APBD | | 2 Dok | 109.560.000 |
| 1 | 05 | 04 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.06 | 02 | Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | Damkar Tubaba | 12 | Bulan | 10.000.000 | APBD | | 1Tahun | 11.000.000 |
| 1 | 05 | 04 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Damkar Tubaba | 12 | Bulan | 240.240.000 | APBD | | 1 Tahun | 264.264.000 |
| 1 | 05 | 04 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Peningkatan pelayanan perkantoran | Damkar Tubaba | 12 | Bulan | 4.466.000 | APBD | | 1 Tahun | 4.912.600 |
| 1 | 05 | 04 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Damkar Tubaba | 12 | Bulan | 20.012.000 | APBD | | 1 Tahun | 22.013.200 |
| 1 | 05 | 04 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Sarana prasarana kendaraan dinas yang memadai | Damkar Tubaba | 1 | Th | 530.000.000 | APBD | | 1 Tahun | 583.000.000 |
| 1 | 05 | 04 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Perlengkapan kantor yang memadai | Damkar Tubaba | | | - | APBD | | 1 Tahun | - |
| 1 | 05 | 04 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan dan mesin lainnya yang memadai | Damkar Tubaba | | | - | APBD | | 1 Tahun | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | 05 | 04 | 2.08 | | **Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | Damkar Tubaba | 1 | Th | 25.200.000 | APBD | | 1 Tahun | 27.720.000 |
| 1 | 05 | 04 | 2.08 | 04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | Damkar Tubaba | 1 | Th | 163.686.000 | APBD | | 1 Tahun | 180.054.600 |
| 1 | 05 | 04 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.09 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan dinas yang terawat secara berkala | Damkar Tubaba | 1 | Th | 113.670.000 | APBD | | 1 Tahun | 125.037.000 |
| 1 | 05 | 04 | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 01 | pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota | persentase tenaga pengendali bahaya kebakaran yang terlatih | Damkar Tubaba | | | - | APBD | | 1 Tahun | - |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Pem,bayaran Honorarium Tenaga Pengendalian bahaya kebakaran yang terlatih | Damkar Tubaba | 1 | Th | 851.340.000 | APBD | | 1 Tahun | |
| 1 | 05 | 04 | 2.05 | | **Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan Manusia** | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 4 | 2.05 | 03 | Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi | Sarana prasarana dinas yang memadai | Damkar Tubaba | | | | APBD | | 1 Tahun | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Jumlah** | | | | | | | | | **3.295.755.891** | | | | **3.625.331.480** |

Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
**SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 05 | 01 | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokomentasi | Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 5.200.000 | APBD | | 1 Tahun | 5.200.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kelancaran Pelaksaan Tugas | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 1.697.690.783 | APBD | | 1 Tahun | 1.867.459.861 |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD | Kelancaran Pelaksaan Tugas | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 51.240.000 | | | 1 Tahun | 56.364.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | BPBD Kab.Tubaba | | | 0 | | | | - |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kelancaran Pelaksaan Tugas | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 1.883.500 | APBD | | 1 Tahun | 2.071.850 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 22.194.000 | APBD | | 1 Tahun | 24.413.400 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | tersedianya kebersihan kantor | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 2.000.000 | APBD | | 1 Tahun | 2.200.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedia nya penambahan daya tahan tubuh | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 97.680.000 | APBD | | 1 Tahun | 107.448.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tertip administrasi Pengelola Berkas | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 2.700.000 | APBD | | 1 Tahun | 2.970.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 16.720.000 | APBD | | 1 Tahun | 18.392.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Tersedianya Sewa Gedung/Kantor/Gudang | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 0 | APBD | | 1 Tahun | - |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 10 | pengadaan sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lain | Tersedianya Sewa Gedung/Kantor/Gudang | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 32.500.000 | APBD | | 1 Tahun | 35.750.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | - |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 01 | penyediaan jasa surat menyurat | Tertip administrasi Pengelola Berkas | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 1.000.000 | APBD | | 1 Tahun | 1.100.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Kelancaran Pelaksaan Tugas | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 10.382.500 | APBD | | 1 Tahun | 11.420.750 |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya sewa kendaaraan Mobiltas Darat | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 180.000.000 | APBD | | 1 Tahun | 198.000.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas atau Lapangan | Kelancaran Pelaksaan Tugas | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 85.170.000 | APBD | | 1 Tahun | 93.687.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kelancaran Pelaksaan Tugas | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 2.190.000 | APBD | | 1 Tahun | 2.409.000 |
| 1 | 05 | 03 | | | **Program Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | | **Pelayanan Imformasi Rawan Bencana Kabuapten/Kota** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | 01 | penyusunan kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Persentase dokumen administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu (persen/tahun) | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Keg | 200.000.000 | APBD | | 1 Keg | 220.000.000 |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | 02 | Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kab | terlaksananya Pengurangan Resiko Bencana | BPBD Kab.Tubaba | | | 0 | APBD | | | - |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | | **Pelayanan Pencegahan dan Kisiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 02 | Pelatihan Pencagahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota | simulasi pencagahan dan mitigasi bencana | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Keg | 10.000.000 | APBD | | 1 Keg | 11.000.000 |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 03 | pengendalian operasi dan penyediaan sarana | belanja petugas Resque + BPJS Tenaga Kerja | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Keg | 121.620.000 | APBD | | 1 Keg | 133.782.000 |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 01 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Meningkatkannya Tanggap Darurat pada Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zionis Prioritas | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Keg | 0 | APBD | | 1 Keg | - |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana | BPBD Kab.Tubaba | | | 0 | | | | - |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Menyelamatkan Korban Bencana Secara Cepat Tepat yang Terkordinasi, Berhasil dan Berdaya Guna | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Keg | 0 | APBD | | 1 Keg | - |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 06 | Respon cepat bencana non alam epidemi / wabah penyakit | terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Keg | 200.000.000 | APBD | | 1 Keg | 220.000.000 |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Tersedianya Bantuan Logistik untuk Korban Bencana | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Keg | 0 | APBD | | 1 Keg | - |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 01 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana | BPBD Kab.Tubaba | | | 0 | | | | - |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana | BPBD Kab.Tubaba | 1 | Keg | 10.000.000 | APBD | | 1 Keg | 11.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 03 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan | BPBD Kab.Tubaba | | | 0 | | | | - |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi | BPBD Kab.Tubaba | | | 0 | | | | - |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 05 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan | BPBD Kab.Tubaba | | | 0 | | | | - |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **2.750.170.783** | | | | **3.025.187.861** |

Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Sosial
**SKPD : Dinas Sosial**

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | Jml Sat | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| **1 06 01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | | | | |
| X.XX.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 |
| X.XX.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 |
| X.XX.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 1.891.688.022,00 | | | | 1.891.688.022,00 |
| X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 49.680.000,00 | | | | 49.680.000,00 |
| X.XX.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |
| X.XX.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 |
| X.XX.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |
| X.XX.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 19.999.900,00 | | | | - |
| X.XX.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | - |
| X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tercapainya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 17.780.000,00 | | | | 17.780.000,00 |
| X.XX.01.2.06,04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Penambah Daya tahan Tubuh | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 123.552.000,00 | | | | 123.552.000,00 |
| X.XX.01.2,06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianyan bahan cetak keperluan kantor | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 15.000.000,00 | | | | 15.000.000,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | Jml Sat | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 29.980.000,00 | | | | 30.000.000,00 |
| X.XX.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | |
| X.XX.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Tercapainya Pengadaan Mebel | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |
| X.XX.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | |
| X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 28.800.000,00 | | | | 28.800.000,00 |
| X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 190.200.000,00 | | | | 190.200.000,00 |
| X.XX.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | - |
| 1.06.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 29.000.000,00 | | | | 29.000.000,00 |
| X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |
| | | | | | | | | | - |
| 1.06-02 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | | | | - |
| 1.06.02.2.03 | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | - |
| 1.06.02.2.03.03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 18.000.000,00 | | | | - |
| 1.06-04 | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | | | | - |
| 1.06.04.2.01 | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | | | | | | - |
| 1.06.04.2.01.01 | Penyediaan Permakanan | Terlaksananya Penyediaan Permakanan | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 5.330.000,00 | | | | 5.330.000,00 |
| 1.06.04.2.01.02 | Penyediaan Sandang | Terlaksananya Penyediaan Sandang | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |
| 1.06.04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu | Terlaksananya Penyediaan Alat Bantu | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |
| 1.06.04.2.01.04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Terlaksananya Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | Jml Sat | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |
| 1.06.04.2.01.06 | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |
| 1.06.04.2.01.07 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Terlaksananya Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |
| 1.06.04.2.01.08 | Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesejhatan Dasar | Terlaksananya Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesejhatan Dasar | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 4.935.000.000,00 | | | | 1.035.000.000,00 |
| 1.06.04.2.01.09 | Pemerian Layanan Data dan Pengaduan | Terlaksananya Pemerian Layanan Data dan Pengaduan | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |
| 1.06.04.2.02 | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial** | | | | | | | | - |
| 1.06.04.2.02.11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 1.849.000,00 | | | | - |
| 1.06.04.2.02.14 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Tercapainya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 310.000.000,00 | | | | - |
| 1.06-05 | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | | | | | - |
| 1.06.05.2.01 | **Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar** | | | | | | | | - |
| 1.06.05.2.01.01 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Tercapainya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |
| 1.06.05.2.01.02 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | Tercapainya Rujukan Anak-Anak Terlantar | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |
| 1.06.05.2.01.03 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 10.821.000,00 | | | | - |
| 1.06.05.2.02 | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | - |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | Jml Sat | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 1.06.05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 10.000.000,00 | | | | - |
| 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 8.300.000,00 | | | | - |
| 1.06-06 | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | | | | - |
| 1.06.06.2.01 | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | | | | | | | | - |
| 1.06.06.2.01.05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Terlaksananya Pelayanan Dukungan Psikososial | Kabupaten Tubaba | 1 Th | - | | | | - |
| 1.06.06.2.02 | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | | | | | | | | - |
| 1.06.06.2.02.01 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Kabupaten Tubaba | 1 Th | 16.000.000,00 | | | | 17.600.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | **7.725.680.022** | | | | **8.498.248.024** |

Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
**SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 08 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN** | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Lancarnya penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 1 | thn | 1.542.068.154,00 | APBD | | 1 thn | 1.696.274.969 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya penatausahaan dan pengajuan verivikasi keuangan skpd | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 | % | 67.140.000,00 | APBD | | 100% | 73.854.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.03 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.03 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 | % | 4.760.000,00 | APBD | | 100% | 5.236.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.03 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 | % | | APBD | | 100% | - |
| 2 | 08 | 01 | 2.03 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersusunnya Renja dan RKA SKPD | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 | % | 58.560.000,00 | APBD | | 100% | 64.416.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.03 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Lancarnya penyediaan ATK | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 | % | | APBD | | 100% | - |
| 2 | 08 | 01 | 2.03 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi skpd | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 6 | Kali | 4.120.000,00 | APBD | | 6 Kali | 4.532.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan dan mesin | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 | % | | APBD | | 100% | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 % | | 7.200.000,00 | APBD | | 100% | 7.920.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa pelayanan umur kantor | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 % | | 177.100.000,00 | APBD | | 100% | 194.810.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 % | | 2.000.000,00 | APBD | | 100% | 2.200.000 |
| 2 | 08 | 02 | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | *02 | Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota | Terlaksananaya Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 % | | 5.000.000,00 | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | *03 | Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Terlaksananya Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 1 | Keg. | 25.000.000,00 | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | *04 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Perempuan dan anak Kab. Tulang Bawang Barat | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 1 | Keg. | 10.000.000 | APBD | | 100 Orang | 11.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota** | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Perempuan dan anak Kab. Tulang Bawang Barat | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 2 | Kali | 90.000.000 | APBD | | 2 Kali | 99.000.000 |
| 2 | 08 | 03 | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | | **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 1 | Kali | 104.900.000 | APBD | | 1 Kali | 115.390.000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | *02 | Koordinasi dan singkronisasi pelaksa naan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | tersdianya layanan rujukan | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 1 | Keg. | 74.142.000 | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | - |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penaganan bagi Perempuan korban kekersan Kewenangan Kabupaten/Kota | tersedianya Jejaring antar Lembaga penyedia layananananak | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 1 | Keg. | 10.910.000 | | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | tersedianya sarana dan prasarana | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 | % | 50.000.000 | APBD | | 100% | 55.000.000 |
| 2 | 08 | 04 | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak Anak tingkat daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Komunikasi, informasi dan edukasi KG bagi Keluarga kewenangan Kabupaten/kota | perempuan Kab. Tulang Bawang Barat | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 1 | Kali | | APBD | | 1 Keg | - |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas keluarga Kewenangan kabupaten/kota | perempuan Kab. Tulang Bawang Barat | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 1 | Kali | 125.000.000 | APBD | | 1 Keg | 137.500.000 |
| 2 | 08 | 05 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | | **Pengumpulan, pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 01 | Penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya data gender dan anak di kewenangan Kabupaten/Kota | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 | % | | APBD | | 1 Keg | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 08 | 06 | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PAH)** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | | **Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 01 | Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 % | | 95.000.000,00 | APBD | | 1 Keg | 104.500.000 |
| 2 | 08 | 07 | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | | **Pencegahan Kekerasan terhadap Anak ysng melibatkn para pihak lingkup Daerah Kabupaten / Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Singkronisasi Kekerasan terhadap Anak kewenagan Kabupaten / Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Kekerasan terhadap Anak | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 12 bulan | | 48.050.000 | | | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | | **Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 % | | 35.000.000 | | | | 38.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan anak yang memerlikan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pendampingan anak yang memerlikan perlindungan Khusus | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 % | | 187.902.000 | | | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 04 | Pengaduan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Terkoordinasinya Pengaduan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 % | | | | | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | | **Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daaerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.04 | | koordinasi dan singkronisasi penigkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daaerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi penigkatan kapasitas sumber daya Lembaga | Din. PP& PA Kab. Tubaba | 100 % | | 65.896.000 | | | | 72.485.600 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **2.789.748.154** | | | | **3.068.722.969** |

Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Pangan
**SKPD : Dinas Ketahanan Pangan**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 09 | 01 | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan LAKIP, PK, LPPD, LKPJ, RENJA, RKPD, RKA | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 5.884.000 | APBD | | 12 Bulan | 6.472.400 |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 1.503.719.271 | APBD | | 12 Bulan | 1.654.091.198 |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium pejabat pengelola keuangan | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 62.160.000 | APBD | | 12 Bulan | 68.376.000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas harian PNS dan NON PNS | DKP Kab.Tubaba | 21 | Staf | 18.250.000 | APBD | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 22.415.000 | APBD | | 12 Bulan | 24.656.500 |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 10.580.000 | APBD | | 1 Tahun | 11.638.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya biaya perjalanan dinas | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 87.852.000 | APBD | | 1 Tahun | 96.637.200 |
| 2 | 09 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | DKP Kab.Tubaba | 1 | Keg. | 16.629.000 | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya biaya air dan listrik kantor | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 18.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 19.800.000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya biaya kebersihan kantor, keamanan dan supir belanja makan minum pegawai | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 159.600.000 | APBD | | 12 Bulan | 175.560.000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya biaya pajak randis R2 | DKP Kab.Tubaba | 6 | Bulan | 9.000.000 | APBD | | 6 Bulan | 9.900.000 |
| 2 | 09 | | | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 02 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 02 | 2.01 | | **Penyediaan Infrasruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 09 | 02 | 2.01 | 01 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Terciptanya pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) pada kelompok tani | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | | APBD | | 12 Bulan | - |
| 2 | 09 | 03 | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 01 | Penyusunan dan Penentapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Tersususunnya Penentapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 25.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 27.500.000 |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Diseversifikasi pangan masyarakat berupa tanaman sayuran | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 470.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 517.000.000 |
| 2 | 09 | 04 | | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 04 | 01 | | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 04 | 01 | 01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan | Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Kerentanan dan | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 25.000.000 | | | | |
| 2 | 09 | 04 | 2.02 | | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| | 09 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Pemahaman pada kelompok tani dan masyarakat penanganan dan kerawanan pangan | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | | APBD | | 12 Bulan | - |
| | 09 | 04 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 50.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 55.000.000 |
| | 09 | 04 | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| | 09 | 04 | 2.01 | | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota/Kota** | | | | | | | | | |
| | 09 | 04 | 2.01 | 02 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | | APBD | | 12 Bulan | - |
| | 09 | 04 | 2.01 | 05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | DKP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | | APBD | | 12 Bulan | - |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **2.484.089.271** | | | | **2.732.498.198** |

Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Lingkungan Hidup
**SKPD : Dinas Lingkungan Hidup**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 11 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Renja Dinas (Dokumen) | DLH Kab.Tubaba | 15 | Dok. | 20.700.000 | APBD | | 2 | 22.770.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DLH Kab.Tubaba | 2 | | 19.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | DLH Kab.Tubaba | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedinaya Gaji dan Tunjangan ASN | DLH Kab.Tubaba | 12 | bulan | 2.402.127.015 | APBD | | 2 | 2.642.339.717 |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | DLH Kab.Tubaba | 1 | tahun | 80.970.000 | APBD | | | 89.067.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 05 | koodinasi dan penyusunan laporan keungan akhir tahun SKPD | Terlaksananya koodinasi dan penyusunan laporan keungan akhir tahun SKPD | DLH Kab.Tubaba | 1 | tahun | 3.500.229 | APBD | | | 3.850.252 |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Per Triwulan (RFK & Tepra) (Dok) | DLH Kab.Tubaba | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perngkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Terlksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | DLH Kab.Tubaba | 1 | tahun | 5.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 11 | 01 | 2.05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | DLH Kab.Tubaba | 2 | | | APBD | | 2 | - |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | APBD | | | - |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersediannya Peralatan dan perlengkapan kerja kantor (paket) | DLH Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 97.092.000 | APBD | | 1 | 106.801.200 |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Logistik Kantor | DLH Kab.Tubaba | 12 | | 81.394.000 | APBD | | 12 | 89.533.400 |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (bulan) | DLH Kab.Tubaba | 12 | | 17.756.900 | APBD | | 12 | 19.532.590 |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksanya koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah (bulan) | DLH Kab.Tubaba | 12 | | 19.128.000 | APBD | | 12 | 21.040.800 |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Teredianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DLH Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 36.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayananan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayananan Umum Kantor | DLH Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 167.084.871 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | tersedianyaJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DLH Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 55.670.000 | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | DLH Kab.Tubaba | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 02 | | | **Program Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten /Kota** | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota | | DLH Kab.Tubaba | | | | APBD | | | |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 02 | Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/kota | | DLH Kab.Tubaba | | | | APBD | | | |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | | **Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kab/kota** | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | 01 | Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang | | DLH Kab.Tubaba | | | | APBD | | | |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | 02 | Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | DLH Kab.Tubaba | | | | APBD | | | |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | 03 | Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KPD yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup | | DLH Kab.Tubaba | | | | APBD | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 03 | | | **Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Nilai IKLH Kab, Tulang Bawang Barat (Persen) | DLH Kab.Tubaba | 65% | | 40.000.000 | APBD | | 65% | 44.000.000 |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | | DLH Kab.Tubaba | 1 | Dok. | 15.000.000 | APBD | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 04 | | | **Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | | **Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kab/kota** | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragam Hayati | | DLH Kab.Tubaba | | | | APBD | | | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | | DLH Kab.Tubaba | | | | APBD | | | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | DLH Kab.Tubaba | 60 | % | 150.000.000 | APBD | | | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 05 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Terlaksananya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | DLH Kab.Tubaba | 20 | % | 45.000.000 | APBD | | | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 06 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Lainnya | | DLH Kab.Tubaba | | | | APBD | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 05 | | | **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)** | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | | **Penyimpanan Sementara Limbah B3** | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3. | Jumlah rekomendasi perizinan pengelolaan B3 (Rekomendasi) | DLH Kab.Tubaba | 10 | Rekom. | 20.000.000 | APBD | | 5 | 22.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 06 | | | **Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)** | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Dokumen lingkungan hidup yang disusun dan diperiksa kelayakannya (dokumen) | DLH Kab.Tubaba | 150 | rekom | 86.000.000 | APBD | | 10 | 94.600.000 |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terbina dan Terwasinya usaha/kegiatan dalam penataan izin lingkungan dan Izin PPLH (Usaha/Kegiatan) | DLH Kab.Tubaba | 15 | lembaga usaha | 40.000.000 | APBD | | 20 | 44.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 07 | | | **Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH** | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 07 | 2.01 | | **Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengakuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH** | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 07 | 2.01 | 01 | Koordinasi, sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH | Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH | DLH Kab.Tubaba | 1 | | 15.000.000 | APBD | | | |
| 2 | 11 | 07 | 2.01 | | **Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH** | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 07 | 2.01 | 01 | Peberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | | DLH Kab.Tubaba | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 08 | | | **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | | **Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota** | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan | | DLH Kab.Tubaba | | | | | | |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan | | DLH Kab.Tubaba | | | | | | |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup | Terselenggaranya penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup | DLH Kab.Tubaba | 3 | kali | 24.000.000 | | | |
| 2 | 11 | 09 | | | **Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat** | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 | | **Pemberian Penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota** | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 | 01 | Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Terselenggaranya Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | DLH Kab.Tubaba | 3 | Kali | 20.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 10 | | | **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 | | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus pengaduaan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti dan diselesaikan (Kasus) | DLH Kab.Tubaba | 5 | | 20.000.000 | APBD | | 5 | 22.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyelidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan | | DLH Kab.Tubaba | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 11 | | | **Program Pengelolaan Persampahan** | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | | **Pengelolaan Sampah** | | | | | | | | - |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 01 | Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kab/kota | Dokumen Jakstrada pengelolaan sampah | DLH Kab.Tubaba | 1 | Dok | 15.000.000 | APBD | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 02 | Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali | volume timbunan sampah tertangani | DLH Kab.Tubaba | 5 | % | 102.000.000 | APBD | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Prosentase Sampah yang terkelola (Persen) | DLH Kab.Tubaba | 8 | **%** | 975.000.000 | APBD | | 55% | 1.072.500.000 |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 07 | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/kota | Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/kota | DLH Kab.Tubaba | 100 | **%** | 161.960.000 | APBD | | 10 | 178.156.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **4.734.383.015** | | | | **5.207.821.317** |

(1.031.044.234)

Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
**SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 12 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersususnnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Disdukcapil Kab.Tubaba | 4 | Dok | | APBD | | 1 Dok | - |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersusunnya Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD | Disdukcapil Kab.Tubaba | 2 | Dok | | APBD | | 2 Dok | - |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersusunnya Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD | Disdukcapil Kab.Tubaba | 1 | Dok | | APBD | | 3 Dok | - |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 04 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Disdukcapil Kab.Tubaba | 12 | Bulan | | APBD | | 12 Bulan | - |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Disdukcapil Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 2.158.708.542 | APBD | | 12 Bulan | 2.374.579.396 |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi | Kegiatan keuangan SKPD | Disdukcapil Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 85.600.000 | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran | Tersusunnya Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran | Disdukcapil Kab.Tubaba | 15 | Dok | 2.900.000 | APBD | | 2 Dok | 3.190.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 12 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Terlakasanya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Disdukcapil Kab.Tubaba | 4 | Kali | | APBD | | 4 Kali | - |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik.Penerangan Bangunan | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik. Penerangan Bangunan | Disdukcapil Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 1.140.000 | APBD | | 12 Bulan | 1.254.000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Disdukcapil Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 248.360.000 | APBD | | 12 Bulan | 273.196.000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Disdukcapil Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 1.746.000 | APBD | | 12 Bulan | 1.920.600 |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Disdukcapil Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 101.388.000 | APBD | | 12 Bulan | 111.526.800 |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Disdukcapil Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 2.030.000 | APBD | | 12 Bulan | 2.233.000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Disdukcapil Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 24.251.000 | APBD | | 12 Bulan | 26.676.100 |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Pengadaan Mebel | Disdukcapil Kab.Tubaba | | | | APBD | | 100% | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah Kegiatan | Disdukcapil Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 107.120.000 | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | jumlah Kegiatan | Disdukcapil Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 219.000.000 | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan | Disdukcapil Kab.Tubaba | 7 | unit | 101.470.000 | APBD | | 12 Bulan | 111.617.000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeleiharanta Peralatan dan Mesin Lainnya | Disdukcapil Kab.Tubaba | 4 | Unit | 3.990.000 | APBD | | 12 Bulan | 4.389.000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Disdukcapil Kab.Tubaba | 12 | Bulan | | APBD | | 12 Bulan | - |
| 2 | 12 | 04 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | | **Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan** | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 01 | Pengolahan dan Penyajian data kependudukan | Terlaksananyan Pengolahan dan Penyajian data kependudukan | Disdukcapil Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 16.415.000 | | | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | | **Penyelenggaran Pengelolaan Administrasi Kependudukan** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | 05 | Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | Terselenggaranya sosialisasi kependudukan | Disdukcapil Kab.Tubaba | 100 | % | 58.500.000 | APBD | | 100% | 64.350.000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **3.132.618.542** | | | | **3.445.880.396** |

Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
**SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 13 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Ketersediaan dokumen pengkajian/penelitian yang dimanfaatkan** | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Terlaksanaya penyusunan program dan kegiatan PD dalam dokumen perencanaan | DPMT | 3 | Bulan | 8.000.000 | APBD | | 1 Dokumen | 8.800.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Terlaksanaya penyusunan program dan kegiatan perubahan PD dalam dokumen perencanaan | DPMT | 1 | Dok | | APBD | | 1 Dokumen | - |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 05 | Evaluasi Pelaporan Perangkat Daerah | terlaksananya evaluasi kinerja PD | DPMT | 4 | Dok | | APBD | | 4 Dokumen | - |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | DPMT | 12 | Bln | 1.785.363.474 | APBD | | 1 Laporan | 1.963.899.821 |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Penatausahaan dan pengujuan/verivikasi keuangan skpd | DPMT | 12 | Bln | 58.730.000 | | | | 64.603.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja | DPMT | 4 | Dok | 8.000.000 | APBD | | 8 | 8.800.000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas harian PNS dan NON PNS | DPMT | 33 | Staf | | APBD | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | DPMT | 12 | Bln | 1.500.000 | APBD | | 12 Bulan | 1.650.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | DPMT | 12 | Bln | 7.996.000 | APBD | | 12 Bulan | 8.795.600 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Tersedianya Penyediaan dan peralatan rumah tangga | DPMT | 12 | Bln | 2.959.000 | APBD | | 12 Bulan | 3.254.900 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DPMT | 12 | Bln | 78.664.000 | APBD | | 12 Bulan | 86.530.400 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | DPMT | 12 | Bln | 4.300.000 | APBD | | 12 Bulan | 4.730.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | DPMT | 12 | Bln | 23.840.000 | APBD | | 12 Bulan | 26.224.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | - |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | DPMT | 100 | % | 12.610.000 | APBD | | 12 Bulan | 13.871.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan msin lainnya | DPMT | 100 | % | 59.990.000 | APBD | | | 65.989.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | | **Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | - |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DPMT | 12 | Bln | 6.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 6.600.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor | DPMT | 12 | Bln | 200.400.000 | APBD | | | 220.440.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DPMT | 12 | Bulan | 47.470.000 | APBD | | 12 Bulan | 52.217.000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeleiharanta Peralatan dan Mesin Lainnya | DPMT | 12 | Bulan | 1.450.000 | APBD | | 12 Bulan | 1.595.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 03 | | | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | | | | | | APBD | | | - |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | | **Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa** | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Terlaksananya kerja sama dengan pihak ketiga | DPMT | 93 | Tiyuh | | APBD | | 100 Tiyuh | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 04 | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA** | | | | | | | | | - |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Tersusunnya Dokumen RPJM Tiyuh, RKP Tiyuh dan APBT Tiyuh | DPMT | 93 | Tiyuh | 100.000.000 | APBD | | 93 Tiyuh | 110.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | | | | | | | | - |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | | | | | | | | | - |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 05 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. | Upaya mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan. | DPMT | 93 | Tiyuh | 200.000.000 | APBD | | 1 Kegiatan | 220.000.000 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Terlaksananya Pengembangan Potensi Tiyuh dan Pelatihan manajemen pariwisata bagi SDM Tiyuh dalam rangka peningkatan PAT dan Kesejahteraan Tiyuh | DPMT | | | | APBD | | | - |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran TTG Nasional Dan Lomba Posyantek | DPMT | 93 | Tiyuh | 60.000.000 | APBD | | 93 Tiyuh | 66.000.000 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Partisipasi dalam bulan bakti gotong royong masyarakat | DPMT | | | | APBD | | | - |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | Jml Sat | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| **JUMLAH** | | | | | **2.667.272.474** | | | | **2.933.999.721** |

Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
**SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluraga Berencana**

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | Jml Sat | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| **2 14 01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | | | | |
| **2 14 01 2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| 2 14 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Tubaba | 12 bln | 1.579.795.004 | APBD | | | 1.579.795.004 |
| 2 14 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Penatausahaan dan pengujuan/verivikasi keuangan skpd | Kab. Tubaba | 12 Bln | 112.680.000 | APBD | | | 123.948.000 |
| 2 14 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran | Tersusunnya Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran | Kab. Tubaba | 2 Kali | 15.600.000 | APBD | | | 17.160.000 |
| **2 14 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | - |
| 2 14 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Tubaba | 12 bln | 20.200.000 | APBD | | | 22.220.000 |
| 2 14 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Tubaba | 12 bln | 97.296.000 | APBD | | | 107.025.600 |
| 2 14 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Tubaba | 12 Bln | | APBD | | | |
| **2 14 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | - |
| 2 14 01 2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor | Kab. Tubaba | 12 Bln | 228.018.000 | APBD | | | 250.819.800 |
| | | | | | | | | | - |
| 2 14 03 | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | | | | | - |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | Jml Sat | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 14 03 2.01 | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | | | | | | | | - |
| 2 14 03 2.01 02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal | Terselanggaranya Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal | Kab. Tubaba | 1 keg | 119.856.000 | APBD | | | 131.841.600 |
| 2 14 03 2.01 05 | Pengunaan Media Massa Catak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kerarifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK | Terlaksananya Kagiatan Pengunaan Media Massa Catak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kerarifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK | Kab. Tubaba | 1 keg | 97.956.037 | APBD | | | 107.751.641 |
| 2 14 03 2.01 07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana Dibalai Penyuluhan KKBPK | Terpenuhinya Pelaksanaan Pengelolaan Operasional dan Sarana Dibalai Penyuluhan KKBPK | Kab. Tubaba | 1 keg | - | APBD | | | - |
| 2 14 03 2.04 | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | | | | | | | | - |
| 2 14 03 2.04 01 | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Kab. Tubaba | 1 keg | 191.324.000 | APBD | | | 210.456.400 |
| **JUMLAH** | | | | | 2.462.725.041 | | | | |

Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Perhubungan
**SKPD : Dinas Perhubungan**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 15 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | - |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 02 | dokumenkoordinasi dan penyusunan SKPD | tersedianya dokumen renja | Dis.Hub Kab.Tubaba | 4 | Dok | 4.300.000 | APBD | | 1 Dok | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah tersediannya LAKIP SKPD | Dis.Hub Kab.Tubaba | 1 | dok | 3.500.000 | APBD | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Dis.Hub Kab.Tubaba | 100 | % | 1.835.511.710 | APBD | | 100% | 2.019.062.881 |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersediannya Honorarium Penangelola keuangan | Dis.Hub Kab.Tubaba | 12 | Bln | 44.880.000 | APBD | | 12 Bln | 49.368.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan | Dis.Hub Kab.Tubaba | 2 | Dok | 3.500.000 | APBD | | 2 Dok | 3.850.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 03 | pendataan dan pengolhan administrasi kepegawaian | tertibnya admonistrasi kepegawaian | Dis.Hub Kab.Tubaba | 12 | bulan | 2.500.000 | APBD | | 17 Stell | 2.750.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.03 | 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terbayarnya tagihan telepon, Listrik, air, dan internet | Dis.Hub Kab.Tubaba | 12 | bulan | 10.796.000 | APBD | | 1 TH | 11.875.600 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 15 | 01 | 2.03 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terbayarnya Honor TKS dan terlaksananya tertib administrasi keuangan | Dis.Hub Kab.Tubaba | 12 | Bln | 47.520.000 | APBD | | 12 Bln | 52.272.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.03 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya ATK; | Dis.Hub Kab.Tubaba | 1 | TH | 20.000.000 | APBD | | 1 TH | 22.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Tersediannya Kursi Pejabat | Dis.Hub Kab.Tubaba | 1 | Unit | | APBD | | 1 Unit | - |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Listrik Kantor | Dis.Hub Kab.Tubaba | 12 | Bln | 25.200.000 | APBD | | 12 Bln | 27.720.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersediannya jasa Pelayanan Umum Kantor | Dis.Hub Kab.Tubaba | 1 | TH | 204.200.000 | APBD | | 1 TH | 224.620.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah dana yang dibutuhkan | Dis.Hub Kab.Tubaba | 1 | TH | 15.100.000 | APBD | | 1 TH | 16.610.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 09 | pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan | terehabilitasinya gedung kantor | Dis.Hub Kab.Tubaba | 1 | keg. | 10.000.000 | | | | |
| 2 | 15 | 02 | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Pemasangan Traffic Light (Alat Pengatur Indikator Lalu Lintas / APILL), Pemasangan Rambu Portable | Dis.Hub Kab.Tubaba | | | | APBD | | 1 Keg | - |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Tersedianya lampu penerangan jalan (PJU) sebagai Perlengkapan Jalan di wilayah Kab. Tulang Bawang Barat | Dis.Hub Kab.Tubaba | 12 | Bln | 434.400.000 | APBD | | 12 Bln | 477.840.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2. 04 | | **Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilita paarkir** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2. 04 | 02 | koordinansi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fsilitas parkir kewenangan kabupaten/kota | umalh dana yang dibutuhkan | Dis.Hub Kab.Tubaba | 12 | Bln | 14.500.000 | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2. 05 | | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2. 05 | 08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | jumlah ketersediaan pemasanagan perlengkapan jalan | Dis.Hub Kab.Tubaba | 12 | Bln | 21.700.000 | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2. 06 | | **Pelaksanaan Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2. 06 | 01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | rata-rata penurunan angka kecelakaan transportasi | Dis.Hub Kab.Tubaba | 12 | Bln | 33.000.000 | APBD | | 12 Bln | 36.300.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 15 | 02 | 2. 06 | 04 | Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi | Terlaksannya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Melaksanakan Pam Lalu Lintas serta Turwali Sabara dan Turwali Lantas Polres Tubaba, Dokumen Analisis Database Keselamatan Lalu Lintas | Dis.Hub Kab.Tubaba | 12 | Bln | 135.000.000 | APBD | | 100% | 148.500.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2.10 | | **Penetapan Kawasan Perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.10 | 01 | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Pengadaan Mikro Bus, Pengadaan Depo Bus | Dis.Hub Kab.Tubaba | 16 | Unit | | APBD | | 100% | - |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **2.865.607.710** | | | | **3.152.168.481** |

Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Komunikasi dan Informatika
**SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 16 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | | **PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (renstra, renja dan rka) | Dinas Kominfo | | | - | APBD | | | - |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | | **ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan | Dinas Kominfo | 12 | Bulan | 1.894.001.910 | APBD | | 12 Bulan | 2.083.402.101 |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksannya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas Kominfo | 12 | Bulan | 57.480.000 | APBD | | | 63.228.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | | **ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Kominfo | 32 | Stel | | APBD | | 32 Stel | - |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | | **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Dinas Kominfo | 12 | Bulan | | APBD | | 12 Bulan | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas Kominfo | 5 | Unit | | APBD | | 5 Unit | - |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Dinas Kominfo | 5 | Unit | | APBD | | 5 Unit | - |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Dinas Kominfo | 4 | Jenis | 96.000.000 | APBD | | 4 Jenis | 105.600.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Dinas Kominfo | 13 | item | | APBD | | 13 item | - |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Kominfo | 8 | Kali | | APBD | | 8 Kali | - |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | | **PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebeleur Kantor | Dinas Kominfo | 10 | Jenis | | APBD | | 10 Jenis | - |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit yang dimaksud | Dinas Kominfo | 5 | Unit | | APBD | | 5 Unit | - |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | | **PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas Kominfo | 12 | Bulan | 82.800.000 | APBD | | 12 Bulan | 91.080.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas Kominfo | 12 | Bulan | 159.600.000 | APBD | | 12 Bulan | 175.560.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | | **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit yang dimaksud | Dinas Kominfo | 3 | Unit | 44.000.000 | APBD | | 3 Unit | 48.400.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit yang dimaksud | Dinas Kominfo | 2 | Unit | | APBD | | 2 Unit | - |
| 2 | 16 | 02 | | | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | | **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah dokumentasi | Dinas Kominfo | 10 | Album | 50.000.000 | APBD | | 10 Album | 55.000.000 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah penyebaran informasi melalui surat kabar pemda | Dinas Kominfo | 10 | Edisi | 50.000.000 | APBD | | 10 Edisi | 55.000.000 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | Persentase berita pemkab melalui medsos | Dinas Kominfo | 100 | % | 50.000.000 | APBD | | 100% | 55.000.000 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Layanan Hubungan Media | Jumlah advetorial | Dinas Kominfo | 800 | Tayang | 7.216.000.000 | APBD | | 800 Tayang | 7.937.600.000 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 08 | Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Menara Telekomunikasi Warnet dan Radio | Dinas Kominfo | 107 | Menara | 100.000.000 | APBD | | 107 Menara | 110.000.000 |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Persentase Kepuasan Masyarakat | Dinas Kominfo | 50 | % | | APBD | | 50% | - |
| 2 | 16 | 03 | | | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | | **PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Sub Domain yang Tertata | Dinas Kominfo | 90 | % | | APBD | | 90% | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Dinas Kominfo | 1 | Jenis | | APBD | | 1 Jenis | - |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | | **PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 02 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Penerapan OPD yang sudah menjalankan aplikasi | Dinas Kominfo | 87 | % | | APBD | | 87% | - |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Pengunjung | Dinas Kominfo | 8000 | Pengunjung | 200.000.000 | APBD | | 8000 Pengunjung | 220.000.000 |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Titik Hotspot | Dinas Kominfo | 5 | Titik | 500.000.000 | APBD | | 5 Titik | 550.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **10.499.881.910** | | | | **11.549.870.101** |

Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
**SKPD : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 17 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 05 | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah pelatihan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 400.800.000 | | | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 03 | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 1 | | | | | 1 | 35.000.000 |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pemeriksaan yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 04 | | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Penilaian | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah penghargaan yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 06 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 | Pemberdayaan, Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 07 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah kecamatan yang dilaksanakan Pendataan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah UMKM yang diharapkan mendapatkan kemitraan usaha | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang te | Kabupaten Tubaba | 50 | | | | | 50 | 100.000.000 |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah peserta pelatihan | Kabupaten Tubaba | 80 | | | | | 80 | 150.000.000 |
| 2 | 17 | 08 | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 1 | | 30.000.000 | | | 1 | 200.000.000 |
| 3 | 30 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 04 | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 04 | 2.01 | | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 04 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah pengawasan/sidak pasar yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 04 | 2.01 | 03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah titik / lokasi pasar murah yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | | **Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar Kabupaten/kota** | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah pemantauan yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 4 | | 30.000.000 | | | 4 | 30.000.000 |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah pemantauan yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah titik / lokasi pasar murah yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | 01 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Jumlah Pemeriksaan yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | 03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah monitoring yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 03 | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar yang dibangun/rehab | Kabupaten Tubaba | 4 | | | | | 3 | 500.000.000 |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar yang dikelola | Kabupaten Tubaba | 0 | | 600.000.000 | | | 3 | 0 |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya** | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Peserta/pedagang yang dibina | Kabupaten Tubaba | 50 | | 11.500.000 | | | 50 | 35.000.000 |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | 02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah peserta/ Pengelola pasar | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 06 | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | | **Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah alat UTTP yang ditera | Kabupaten Tubaba | 100 | | | | | 100 | 800.000.000 |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah peserta | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 50 | 0 |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 03 | Penyidikan Metrologi Legal | Jumlah penyidikan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 2 | 0 |
| 3 | 30 | 07 | | | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Promosi tingkat kabupaten yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 1 | | 150.000.000 | | | 1 | 250.000.000 |
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | 03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Jumlah Promosi tingkat Provinsi dan nasional yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 | 31 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | | **Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen yang tersusun | Kabupaten Tubaba | 1 | | | | | 1 | 50.000.000 |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 1 | | | | | 1 | 100.000.000 |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Industri kepada IKM (IKM) | Kabupaten Tubaba | 30 | | | | | 30 | 500.000.000 |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Promosi yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 4 | | 200.000.000 | | | 4 | 616.700.000 |
| 3 | 31 | 04 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | | **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | Jumlah kegiatan | | 0 | | 0 | | | 1 | 0 |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | Jumlah kegiatan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | 02 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten / Kota | Jumlah Diseminasi dan publikasi yang dilaksanakan | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| X | XX | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | persentase jumlah dokumen yg diterbitkan tepat waktu | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen yang tersusun | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 2 | 0 |
| X | XX | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen yang tersusun | Kabupaten Tubaba | 0 | | 6.000.000 | | | 2 | 0 |
| X | XX | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen yang tersusun | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 4 | 0 |
| X | XX | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | persentase jumlah dokumen yg diterbitkan tepat waktu | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Kabupaten Tubaba | 12 | | 2.291.519.272 | | | 12 | 2.346.174.322 |
| X | XX | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya honorarium penata usahaan | Kabupaten Tubaba | 12 | | 70.680.000 | | | 12 | 68.640.000 |
| X | XX | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen yang tersusun | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| X | XX | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | tersedianya Mesin/Kartu Absensi (Unit) | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| X | XX | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pegawai yang memperoleh pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| X | XX | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| X | XX | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Lamanya pelaksanaan (bulan) | Kabupaten Tubaba | 12 | | | | | 12 | 900.000 |
| X | XX | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya atk dan peralatan kantor (bulan) | Kabupaten Tubaba | 12 | | 11.412.000 | | | 12 | 12.387.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| X | XX | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga (bulan) | Kabupaten Tubaba | 12 | | | | | 12 | 464.000 |
| X | XX | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kntr (bulan) | Kabupaten Tubaba | 12 | | 99.264.000 | | | 12 | 104.276.000 |
| X | XX | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Lamanya pelaksanaan (bulan) | Kabupaten Tubaba | 12 | | 38.503.000 | | | 12 | 39.500.000 |
| X | XX | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan selama (Bulan) | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| X | XX | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Lamanya pelaksanaan (bulan) | Kabupaten Tubaba | 12 | | 22.585.000 | | | 12 | 13.633.000 |
| X | XX | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebeleur (paket) | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| X | XX | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan peralatan (paket) | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| X | XX | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | tersedianya jasa komunikasi SD air dan listrik (bulan) | Kabupaten Tubaba | 12 | | 33.600.000 | | | 12 | 33.600.000 |
| X | XX | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan) | Kabupaten Tubaba | 12 | | 262.848.000 | | | 12 | 284.400.000 |
| X | XX | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | tersedianya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional(bulan) | Kabupaten Tubaba | 12 | | 99.670.000 | | | 12 | 38.670.000 |
| X | XX | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dean mesin (bulan) | Kabupaten Tubaba | 12 | | | | | 12 | 1.830.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| X | XX | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan gedung kantor (thn) | Kabupaten Tubaba | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **4.358.381.272** | | | | 0 |

Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
**OPD : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 01 | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersusunnya Dokumen Perencanaan** | Kab.Tubaba | 5 | Dokumen | | APBD | | 5 | - |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja | Kab.Tubaba | 2 | Dokumen | 2.000.000 | APBD | | 2 | 2.200.000 |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi Penyusunan RKA | Kab.Tubaba | 1 | Dokumen | 2.500.000 | APBD | | 1 | 2.750.000 |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Penyusunan capaian dan realiasi kinerja | Kab.Tubaba | 1 | Dokumen | 2.500.000 | APBD | | 1 | 2.750.000 |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Kab.Tubaba | 1 | Dokumen | 2.000.000 | APBD | | 1 | 2.200.000 |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu** | | | | | | | | - |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 1.878.716.437 | APBD | | 2 | 2.066.588.081 |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Penatausahaan Keuangan | Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 74.280.000 | APBD | | 2 | 81.708.000 |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Tersusunnya Laporan Keuangan | Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 3.000.000 | APBD | | 12 | 3.300.000 |
| 2 | 19 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 2 | 19 | 01 | 2.05 | 02 | pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya | tersedianya pakain dinas ASN | Kab.Tubaba | 14 | | 12.000.000 | | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat | Kab.Tubaba | 1 | stel | | | | 0 | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 19 | 01 | 2.03 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Meningkatnya Tata Kelola dan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | - |
| 2 | 19 | 01 | 2.03 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 1.000.000 | APBD | | 12 | 1.100.000 |
| 2 | 19 | 01 | 2.03 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 3.407.050 | APBD | | 12 | 3.747.755 |
| 2 | 19 | 01 | 2.03 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 2.000.000 | APBD | | 12 | 2.200.000 |
| 2 | 19 | 01 | 2.03 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 103.488.000 | APBD | | 12 | 113.836.800 |
| 2 | 19 | 01 | 2.03 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan | Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 3.003.900 | APBD | | 12 | 3.304.290 |
| 2 | 19 | 01 | 2.03 | 08 | fasilitasi kunjungan | terpenuhinya kebutuhan | Kab.Tubaba | 1 | tahun | 1.500.000 | | | | 1.650.000 |
| 2 | 19 | 01 | 2.03 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Keluar Daerah | Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 9.705.000 | APBD | | 12 | 10.675.500 |
| 2 | 19 | 1 | 2.09 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | - |
| 2 | 19 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan peralatan (paket) | | 1 | Th | 18.000.000 | | | 0 | 19.800.000 |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah** | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Din. Perpus Kab.Tubaba | 1 | Th | 19.800.000 | APBD | | | 21.780.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | Mobil dinas Kepala Dinas | Din. Perpus Kab.Tubaba | 1 | Th | 192.048.000 | APBD | | | 211.252.800 |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Din. Perpus Kab.Tubaba | 1 | Th | 38.170.000 | APBD | | | 41.987.000 |
| 2 | 19 | 01 | 2.03 | 06 | pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | terlksananaya pemeliharaan sapras kantor | Din. Perpus Kab.Tubaba | 1 | th | 4.000.000 | | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.03 | 10 | Pemeriharaan / Rehabilitasi Saranan Dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor | Kab.Tubaba | 1 | Th | | APBD | | 12 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 02 | 2.04 | | **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan** | **Jumlah Pemuda yang Berperan Aktif** | | | | | | | | - |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | | **Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **Jumlah Pasukan Pengibar Bendera** | | | | | | | | - |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 09 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibaran Bendera | Jumlah Pasukan Pengibar Bendera | Kab.Tubaba | 45 | Orang | 300.004.050 | APBD | | 45 | 330.004.455 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 03 | | | **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan** | **Meningkatnya Prestasi Olahraga** | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten Kota** | **Jumlah olahraga yang akan di perlombakan** | | | | | | | - |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah olahraga yang akan di perlombakan | Kab.Tubaba | 1 | Event | | APBD | 3 | - |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi** | | | | | | | | - |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | 01 | Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Peserta Yang Diikuti | Kab.Tubaba | 1 | Cabor | | APBD | 3 | - |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | | | | | | | | - |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 | 02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Peserta Yang Diikuti | Kab.Tubaba | 1 | Event | 409.995.000 | APBD | 3 | 450.994.500 |
| 2 | 19 | 03 | 2.05 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga rekreasi | tersedianya pemeliharaan lapangan olahraga | Kab.Tubaba | 1 | unit | 200.000.000 | | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.05 | 03 | **penyediaan pengembangan dan pemeloiharaan sarana dan prasarana olahbraga rekreasi** | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 04 | | | **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan** | **Keikutsertaan Prestasi Pemuda Kepramukaan** | | | | | | | - |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | **Keikutsertaan jambore pemuda indonesia** | | | | | | | - |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | 08 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | Keikutsertaan jambore pemuda indonesia | Kab.Tubaba | 1 | Keg | 300.000.000 | APBD | 2 | 330.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 02 | | | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | **Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata** | | | | | | | - |
| 3 | 26 | 02 | 2.01 | | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | **Jumlah Objek Wisata** | | | | | | | - |
| 3 | 26 | 02 | 2.01 | 03 | Pengembangan daya tarik wisata kabupaten | Jumlah Objek Wisata | Kab.Tubaba | 2 | Event | 375.000.000 | APBD | 3 | 412.500.000 |
| 3 | 26 | 02 | 2.01 | 04 | monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota | jumlah event pariwisata kab. Tulng Bawang Barat | Kab.Tubaba | 1 | event | 25.000.000 | APBD | | |
| 3 | 26 | 03 | | | **Program Pemasaran Pariwisata** | **Jumlah Promosi Pariwisata** | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Jumlah Objek Wisata** | | | | | | | | - |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 03 | Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata | Jumlah Media Pemasaran Pariwisata | Kab.Tubaba | 3 | Media | | APBD | | 3 | - |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 03 | Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata | Jumlah Media Pemasaran Pariwisata | Kab.Tubaba | 3 | Media | | APBD | | 3 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 05 | | | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | **Jumlah Peserta yang diikuti** | | | | | | | | - |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **Jumlah Peserta yang diikuti** | | | | | | | | - |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang berbasisi pariwisata | Kab.Tubaba | 200 | Orng | 18.225.000 | | | 1 | 20.047.500 |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Kemitraan Pelaku Kepariwisataan | Kab.Tubaba | 4 | Kemitra | | | | 1 | - |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi dan Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | Kab.Tubaba | 1 | Event | | | | 1 | - |
| 3 | 26 | 05 | 2.02 | | **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** | **Jumlah Peserta yang diikuti** | | | | | | | | - |
| 3 | 26 | 05 | 2.02 | 01 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah peserta | Kab.Tubaba | 100 | Orng | 25.000.000 | | | 1 | 27.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **4.026.342.437** | | | | **4.428.976.681** |

Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Penanaman Modal
**OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 18 | 1 | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Renstra dan Renja | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 2 | Dokumen | 5.000.000 | APBD | | 2 Dokumen | 6.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LAKIP) | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 2 | Laporan | 0 | APBD | | 2 Laporan | - |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 1 | Thn | 2.957.960.662 | APBD | | 1 Thn | 3.000.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 1 | Thn | 51.100.000 | APBD | | 1 Thn | 63.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD | Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 0 | APBD | | 12 Bulan | - |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan kantor | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 0 | APBD | | 12 Bulan | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 9.660.000 | APBD | | 12 Bulan | 6.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 88.440.000 | APBD | | 12 Bulan | 90.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 5.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 6.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Menelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 20.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 21.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 55.200.000 | APBD | | 12 Bulan | 56.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | Mobil dinas Kepala Dinas | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 212.100.000 | APBD | | 12 Bulan | 193.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 1 | Thn | 28.800.000 | APBD | | 1 Thn | 36.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 18 | | | | **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 02 | | | **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 02 | 2.02 | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal | Tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 1 | Dokumen | 0 | APBD | | 1 Dokumen | - |
| 2 | 18 | 03 | | | **Program Promosi Penanaman Modal** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | keikutsertaan dlm acara promosi investasi | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 2 | Kali | 0 | APBD | | 2 Kali | 11.000.000 |
| 2 | 18 | 04 | | | **Program Pelayanan Penanaman Modal** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | | **Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Tersedianya aplikasi pelayaanan perizinan secara online dan website | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 15.000.000 | APBD | | 1 Thn | 16.000.000 |
| 2 | 18 | 05 | | | **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | | **Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal | Dokumen laporan kegiatan | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 1 | Dokumen | 32.520.000 | APBD | | 1 Dokumen | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal | Dokumen laporan kegiatan | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 1 | Dokumen | 280.620.000 | APBD | | 1 Dokumen | 43.000.000 |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal | Dokumen laporan kegiatan | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 1 | Dokumen | 42.336.000 | APBD | | 1 Dokumen | 33.000.000 |
| 2 | 18 | 06 | | | **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | | **Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | 01 | Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 2 | Dokumen | 20.000.000 | APBD | | 2 Dokumen | 21.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **3.823.736.662** | | | | **4.206.110.328** |

Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
**SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 23 | 01 | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Din. Perpus Kab.Tubaba | 1 | Keg | - | APBD | | 1 Keg | - |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LAKIP) | Din. Perpus Kab.Tubaba | 1 | Keg | - | APBD | | 1 Keg | - |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Din. Perpus Kab.Tubaba | 12 | Bln | 1.940.602.660 | APBD | | 1 Keg | 1.940.602.660 |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksannya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Din. Perpus Kab.Tubaba | 1 | Keg | 32.160.000 | APBD | | 1 Keg | 32.160.000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun | Din. Perpus Kab.Tubaba | 1 | Keg | - | APBD | | 1 Keg | - |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Din. Perpus Kab.Tubaba | 100 | % | 3.909.000 | APBD | | 1 Keg | 10.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik | | Din. Perpus Kab.Tubaba | 100 | % | 82.368.000 | APBD | | 100% | 82.368.000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Din. Perpus Kab.Tubaba | 100 | % | - | APBD | | | - |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Din. Perpus Kab.Tubaba | 7 | Kali | 11.651.000 | APBD | | 7 kali | 20.000.000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Din. Perpus Kab.Tubaba | 100 | % | 6.240.000 | APBD | | 100% | 6.240.000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | Mobil dinas Kepala Dinas | Din. Perpus Kab.Tubaba | 100 | % | 207.000.000 | APBD | | 100% | 169.800.000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | "01 | 2.07 | "01 | Penyediaan jasa Pemeliharaaan , biaya pajak kendaraan kendaraan Dinas | Terpeliharanya kendaraan Dinas | Din. Perpus Kab.Tubaba | 100 | % | 26.500.000 | | | 100% | 34.260.000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | 09 | Pembangunan Gedung Perpustakaan | Tersedianya Gedung Perpustakaan Daerah | Din. Perpus Kab.Tubaba | 100 | % | - | APBD | | | - |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Din. Perpus Kab.Tubaba | 100 | % | - | APBD | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Din. Perpus Kab.Tubaba | 100 % | | - | APBD | | | - |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Din. Perpus Kab.Tubaba | 3 | Mobil | 26.500.000 | APBD | | | 34.260.000 |
| 2 | 23 | | | | **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 02 | | | **Program Pembinaan Perpustakaan** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Terselengggaranya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Din. Perpus Kab.Tubaba | 1 | Keg | - | APBD | | 1 Keg | - |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 05 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Din. Perpus Kab.Tubaba | 2 | Keg | 20.000.000 | APBD | | | 25.000.000 |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 09 | Pengeloaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Terselenggareanya Pengeloaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Din. Perpus Kab.Tubaba | 3 | Keg | - | APBD | | | - |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 1 | Sosialisasi Budaya Baca dan literasi satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus masyarakat | | Din. Perpus Kab.Tubaba | 100 | % | 170.000.000 | | | | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Terselenggaranya Lomba Bercerita dan Pidato Bahasa Lampung | Din. Perpus Kab.Tubaba | 1 | Keg | - | APBD | | 1 Keg | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Mengembangkan minat dan Kebiasaan Baca Masyarakat | Din. Perpus Kab.Tubaba | 1 | Keg | 20.000.000 | APBD | | 1 Keg | 20.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | | | | **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan** | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 02 | | | **Program Pengelolaan Arsip** | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 02 | 2.02 | | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 02 | 2.02 | 02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Terselenggaranya Peningkatan Pengelola Kearsipan | Din. Perpus Kab.Tubaba | 1 | Keg | 15.000.000 | APBD | | 1 Keg | 15.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **2.535.430.660** | | | | **2.788.973.726** |

Urusan Pemerintahan Pilihan
Bidang Kelautan dan Perikanan
**SKPD : Dinas Perikanan**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 3 | 25 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Perikanan | 100 | % | - | APBD | | | - |
| 3 | 25 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Perikanan | 100 | % | - | APBD | | | - |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Perikanan | 100 | % | 1.375.296.181 | APBD | | | 1.436.997.806 |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas Perikanan | 100 | % | 71.260.000 | APBD | | | 78.386.000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas Perikanan | 100 | % | 10.000.000 | APBD | | | 11.000.000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinas Perikanan | 100 | % | 70.096.000 | APBD | | | 77.105.600 |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dinas Perikanan | 100 | % | | APBD | | | - |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Dinas Perikanan | 100 | % | 10.000.000 | APBD | | | 10.000.000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | - |
| 3 | 25 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Dinas Perikanan | 100 | % | - | APBD | | | - |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas Perikanan | 100 | % | 43.200.000 | APBD | | | 47.520.000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas Perikanan | 100 | % | 210.600.000 | APBD | | | 231.660.000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | - |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas Perikanan | 100 | % | 28.500.000 | APBD | | | 31.350.000 |
| 3 | 25 | 02 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | | | | | - |
| 3 | 25 | 02 | 2.02 | | **Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | - |
| 3 | 25 | 02 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Pembinaan Nelayan dan KUB | Dinas Perikanan | 100 | % | - | APBD | | | - |
| 3 | 25 | 03 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | | | | | - |
| 3 | 25 | 03 | 2.04 | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | | | | | | | | | - |
| 3 | 25 | 03 | 2.04 | 05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Peningkatan Produksi Benih BBI | Dinas Perikanan | 100 | % | 30.000.000 | APBD | | | 33.000.000 |
| 3 | 25 | 03 | 2.04 | 07 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Konservasi Kura - Kura | Dinas Perikanan | 100 | % | - | APBD | | | - |
| 3 | 25 | 04 | | | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | - |
| 3 | 25 | 04 | 2.01 | | **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | - |
| 3 | 25 | 04 | 2.01 | 01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Pembinaan Pokmaswas dan Sosialisasi Ilegal Fishing | Dinas Perikanan | 100 | % | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 3 | 25 | 05 | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 3 | 25 | 05 | 2.03 | | **Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | - |
| 3 | 25 | 05 | 2.03 | 01 | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pameran, Lomba Masak Serba Ikan Tk. Prov dan Kab | Dinas Perikanan | 100 | % | 25.000.000 | APBD | | | 27.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **1.928.952.181** | | | | **2.121.847.399** |

Urusan Pemerintahan Pilihan
Bidang Pertanian
**SKPD : Dinas Pertanian**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 3 | 27 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Ketersediaan dokumen pengkajian/penelitian yang dimanfaatkan** | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Terlaksanaya penyusunan program dan kegiatan PD dalam dokumen perencanaan | Kab. Tubaba | 1 | Dok | - | APBD | | 1 Dokumen | - |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 05 | Evaluasi Pelaporan Perangkat Daerah | terlaksananya evaluasi kinerja PD | Kab. Tubaba | 3 | Dok | - | APBD | | 4 Dokumen | - |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Tubaba | 12 | Bln | 3.633.989.538 | APBD | | 1 Laporan | 3.997.388.492 |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Penatausahaan dan pengujuan/verivikasi keuangan skpd | Kab. Tubaba | 12 | Bln | 46.080.000 | | | | 50.688.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja | Kab. Tubaba | | | - | APBD | | | - |
| 3 | 27 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas harian PNS dan NON PNS | Kab. Tubaba | 80 | Staf | - | APBD | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kab. Tubaba | 12 | Bln | 1.004.000 | APBD | | 12 Bulan | 1.104.400 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Kab. Tubaba | 12 | Bln | 10.029.000 | APBD | | 12 Bulan | 11.031.900 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Tersedianya Penyediaan dan peralatan rumah tangga | Kab. Tubaba | 12 | Bln | 1.001.000 | APBD | | 12 Bulan | 1.101.100 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Tubaba | 12 | Bln | 109.996.000 | APBD | | 12 Bulan | 120.995.600 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Tubaba | 12 | Bln | 4.800.000 | APBD | | 12 Bulan | 5.280.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kab. Tubaba | 12 | Bln | 51.924.000 | APBD | | 12 Bulan | 57.116.400 |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Tersedianya Sewa Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | | 1 | Th | - | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | Kab. Tubaba | | | - | APBD | | 12 Bulan | - |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan msin lainnya | Kab. Tubaba | | | - | APBD | | | - |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | | **Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Tubaba | 12 | Bln | 29.040.000 | APBD | | 12 Bulan | 31.944.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor | Kab. Tubaba | 12 | Bln | 159.600.000 | APBD | | | 175.560.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Tubaba | 12 | Bulan | 27.340.000 | APBD | | 12 Bulan | 30.074.000 |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | 02 | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | | **Pengawasan penggunaan sarana pertanian** | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 01 | pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi lokasi | luas lahan yang dilajukan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi lokasi | Kab. Tubaba | 9 | Kec | 215.000.000 | APBD | | 500 Ha | 236.500.000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | luas lahan yang dilaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | Kab. Tubaba | 9 | Kec | 145.000.000 | APBD | | 300 Ha | 159.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | 03 | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | | **Pembangunan prasarana pertanian** | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 02 | pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian | Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian | Kab. Tubaba | | paket | - | APBD | | 5 Paket | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 03 | Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani | Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian | Kab. Tubaba | paket | | - | APBD | | 5 Paket | - |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 04 | pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit | Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit | Kab. Tubaba | paket | | - | APBD | | 2 Paket | - |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 06 | pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air | Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air | Kab. Tubaba | paket | | - | APBD | | 10 Paket | - |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 07 | Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya | Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air | Kab. Tubaba | paket | | - | APBD | | 10 Paket | - |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | 05 | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | | **pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota** | | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | 01 | pengendalian organisme pengganggu tumbuhan(OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Jumlah wilayah yang dilaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan(OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Kab. Tubaba | 9 | kecamatan | 50.000.000 | APBD | | 9 Kec | 55.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | | | | |
| | | | | | **Pelaksanaan penyuluhan pertanian** | | | | | | | | | |
| | | | | | peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa | | | 61 | org | 263.900.000 | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| | | | | | pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa | | | 10 | Poktan | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **4.798.703.538** | | | | **5.278.573.892** |

Urusan Pemerintahan Pilihan
Bidang Pertanian
**SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 3 | 27 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja dan RKA Dinas yang dihasilkan (dokumen) | Kab. Tubaba | 4 | | 5.040.000 | APBD | | 4 | 5.544.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja & keuangan OPD yang dihasilkan (dokumen) | Kab. Tubaba | 4 | | 5.040.000 | APBD | | 4 | 5.544.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (orang) | Kab. Tubaba | 23 | | 2.039.882.257 | APBD | | 23 | 2.243.870.483 |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah penanggungjawab pengelola keuangan dan penglola BMD yang menerima honor (orang) | Kab. Tubaba | 7 | | 48.500.000 | APBD | | 7 | 53.350.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang tersedia (stel) | Kab. Tubaba | 23 | | | APBD | | 23 | - |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis kantor (bulan) | Kab. Tubaba | 12 | | 9.055.000 | APBD | | 12 | 9.960.500 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga (bulan) | Kab. Tubaba | 12 | | 2.545.000 | APBD | | 12 | 2.799.500 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor (bulan) | Kab. Tubaba | 12 | | 115.766.000 | APBD | | 12 | 127.342.600 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan (bulan) | Kab. Tubaba | 12 | | 7.278.000 | APBD | | 12 | 8.005.800 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah (bulan) | Kab. Tubaba | 12 | | 25.763.000 | APBD | | 12 | 28.339.300 |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebeleur kantor yang tersedia (unit) | Kab. Tubaba | 1 | | 25.551.000 | APBD | | 1 | 28.106.100 |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit) | Kab. Tubaba | 1 | | 20.398.000 | APBD | | 1 | 22.437.800 |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah rekening listrik dan internet (bulan) | Kab. Tubaba | 12 | | 17.750.000 | APBD | | 12 | 19.525.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah kendaraan dinas/operasional sewa yang tersedia (unit) | Kab. Tubaba | 1 | | 159.600.000 | APBD | | 1 | 175.560.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) | Kab. Tubaba | 6 | | 26.000.000 | APBD | | 6 | 28.600.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (unit) | Kab. Tubaba | 6 | | | APBD | | 6 | - |
| 3 | 27 | 02 | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | | **Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana | Penyuluhan kelompok pemanfaatan sarana teknologi peternakan tepat guna (orang) | Kab. | 100 | | 179.000.000 | APBD | | 100 | 196.900.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | Pendukung Pertanian | Jumlah kelompok yang menerapkan sarana teknologi peternakan tepat guna (kelompok) | Tubaba | 15 | | 179.000.000 | APBD | | 13 | 196.900.000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.05 | | **Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.05 | 01 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah Inseminasi Buatan (akor) | Kab. Tubaba | 8500 | | 59.000.000 | APBD | | 8500 | 64.900.000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.05 | 05 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Jumlah bantuan bibit ternak ayam kepada kelompok/masyarakat (ekor) | Kab. Tubaba | 2000 | | 120.000.000 | APBD | | 2000 | 132.000.000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 | | **penyediaan benih bibit ternak dan hijauan pajan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 | 01 | pengadaan benih bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | terlaksananya pengadaan benih bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Kab. Tubaba | | | 100.000.000 | APBD | | | |
| 3 | 27 | 03 | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | | **Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) | Kab. Tubaba | 1 | | 10.000.000 | APBD | | 1 | 11.000.000 |
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Roda 4 Operasional Puskeswan (Puskeswan Keliling) (unit) | | 0 | | | | | 0 | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Roda 2 Operasional Puskeswan | | 1 | | | | | 1 | |
| 3 | 27 | 04 | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 | 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Realisasi pemberian vaksin rabies terhadap hewan ternak (ekor) | Kab. Tubaba | 4700 | | 294.000.000 | APBD | | 4700 | 323.400.000 |
| | | | | | | Realisasi pemberian vaksin Avian Influenza (AI) terhadap hewan ternak (ekor) | | 38000 | | | | | 3800 | |
| | | | | | | Jumlah penanganan penyakit hewan menular strategis (ekor) | | 140 | | | | | 140 | |
| | | | | | | Biosecurity perunggasan (liter) | | 100 | | | | | 100 | |
| | | | | | | Surveillens PHMS (sampel) | | 120 | | | | | 120 | |
| | | | | | | Sosialisasi Bahaya penyakit rabies kepada siswa SD (orang) | | 150 | | | | | 150 | |
| 3 | 27 | 04 | 2.04 | | **Kegiatan Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 04 | 2.04 | 01 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah TPH/TPU yang dibina (unit) | Kab. Tubaba | 2 | | 15.000.000 | APBD | | 2 | 16.500.000 |
| | | | | | | Jumlah takmir masjid, jagal, juru sembelih yang terlatih (orang) | | 50 | | | | | 50 | |
| | | | | | | Jumlah Pemeriksaan Hewan Kurban (ekor) | | 250 | | | | | 250 | |
| | | | | | | Jumlah unit usaha Pengolahan/Penjualan Produk Pangan Asal Hewan yang dibina (unit) | | 12 | | | | | 12 | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **3.285.168.257** | | | | **3.613.685.083** |

Urusan Pemerintahan Pilihan
Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja
**SKPD : Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| **1** | **xx** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | **Persentase kepuasan masyrakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah semakin meningkat** | **Kab Tubaba** | | | | | | |
| | | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | Jumlah Dokumen | **Kab Tubaba** | | | | | | |
| | | **01** | **2.01** | **01** | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen | Kab Tubaba | 2 | Dok | | APBD | | - |
| | | **01** | **2.01** | **06** | Koordinasi Dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen | Kab Tubaba | 1 | Dok | | APBD | | - |
| | | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Daerah** | **persentase pemenuhan pelayanan administrasi Keuangan** | **Kab Tubaba** | | | | | | - |
| | | **01** | **2.02** | **01** | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | | | | | 1.470.810.495,00 | APBD | | 1.617.891.545 |
| | | **01** | **2.02** | **03** | Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verivikasi Keuangan SKPD | Honorarium Pengelolaan Keuangan | Kab Tubaba | | | 75.527.970,00 | APBD | | 83.080.767 |
| | | **01** | **2.02** | **04** | Koordniasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen | Kab Tubaba | 1 | Dok | | APBD | | - |
| | | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **persentase pemenuhan pelayanan Kepegawaian** | **Kab Tubaba** | | | | | | - |
| | | **01** | **2.05** | **02** | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab Tubaba | 100 | % | | APBD | | - |
| | | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **persentase pemenuhan pelayanan Umum** | Kab Tubaba | 100 | % | | | | - |
| | | **01** | **2.06** | **01** | Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya lampu penerangan | Kab Tubaba | 100 | % | | APBD | | - |
| | | **01** | **2.06** | **02** | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Kab Tubaba | 100 | % | | APBD | | - |
| | | **01** | **2.06** | **03** | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | tersedianya kebutuhan gula kopi | Kab Tubaba | 100 | % | | APBD | | - |
| | | **01** | **2.06** | **04** | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | tersedinya penambah daya tahan tubuh | Kab Tubaba | 100 | % | 25.608.000,00 | APBD | | 28.168.800 |
| | | **01** | **2.06** | **05** | Peneydiaan Barang Cetakan dan Penggandaan | tersedinya cetak dan fotocopi | Kab Tubaba | 100 | % | | APBD | | - |
| | | **01** | **2.06** | **09** | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | rapat luar daerah dan dalam daerah | Kab Tubaba | 100 | % | | APBD | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| | | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daeah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | Kab Tubaba | 100 | % | | | | | - |
| | | **01** | **2.07** | **06** | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | tersedinya leptop, printer, warless dan sarana pelayanan kantor | Kab Tubaba | 100 | % | | APBD | | | - |
| | | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Presentase penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab Tubaba | 100 | % | | | | | - |
| | | **01** | **2.08** | **02** | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | pembayaran listrik air dan wifi | Kab Tubaba | 100 | % | 14.400.000,00 | APBD | | | 15.840.000 |
| | | **01** | **2.08** | **04** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | presentase jasa pelayanan umum kantor | Kab Tubaba | 100 | % | 159.600.000,00 | APBD | | | 175.560.000 |
| | | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Kab Tubaba | 100 | % | | | | | - |
| | | **01** | **2.09** | **02** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanagan | pembayaran pajak dan perawatan operasional lainnya | Kab Tubaba | 100 | % | 13.000.000,00 | APBD | | | 14.300.000 |
| | | **01** | **2.09** | **06** | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | service peralatan kantor | Kab Tubaba | 100 | % | | APBD | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| **2** | **07** | **03** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | | | | | - |
| | | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaa pelatihan berdasarkan unit kompetensi** | | | | | | | | | - |
| | | **03** | **2.01** | **01** | proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi | Terlaksanya pelaksnanaan Pelatihan kompetensi | TUBABA | 1 | Keg | 35.000.000,00 | | | | 38.500.000 |
| | | **03** | **2.03** | | **Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja** | | | | | | | | | - |
| | | **03** | **2.03** | **01** | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegritasi | Telaksnaya Perizinan dan pendaftaran LPKS | TUBABA | 1 | Keg | 15.000.000,00 | | | | 16.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| **3** | **07** | **04** | | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | | | | | - |
| | | **04** | **2.01** | | **Pelayanan Antarkerja di daerah kabupaten / kota** | | | | | | | | | - |
| | | **04** | **2.01** | **02** | Pelayanan antar kerja | Terlaksananya pelayanan Pencaker | Kab Tubaba | 12 | bln | 20.000.000,00 | | | | 22.000.000 |
| | | **04** | **2.03** | | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | | | | | | | | | - |
| | | **04** | **2.03** | **01** | Pemeliharaan dan Oprasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Terlaksanya pemeliharaan dan Oprasional aplikasi informasi pasar kerja | Kab Tubaba | 1 | keg | 10.000.000,00 | | | | 11.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| | | **04** | **2.03** | **02** | Pelayanan dan Penyediaan Informasi pasar kerja Online | Terlaksanya pelayanan informasi pasar kerja | Kab Tubaba | 12 | bln | 20.000.000,00 | | | | 22.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| **4** | **07** | **05** | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Persesntase Penyelesaian Kasus perselisihan Hubungan industrial, selesai perjanjian bersama** | | | | | | | | - |
| | | **05** | **2.01** | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroprasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota** | **Jumlah Perusahaan yang melaksanakan peraturan dan perjanjian kerjasama** | | | | | | | | - |
| | | **05** | **2.01** | **03** | Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan | Terlaksanaya Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial | Kab Tubaba | 1 | keg | 15.000.000,00 | | | | 16.500.000 |
| | | **05** | **2.02** | | **Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota** | **Jumlah Penyelesaiana perselisihan hubungan industrial** | | | | | | | | - |
| | | **05** | **2.02** | **01** | Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/ kota | Terlaksananya Pencegahan perselisihan HI | Kab Tubaba | 1 | bln | 15.000.000,00 | | | | 16.500.000 |
| | | **05** | **2.02** | **04** | Pelaksanaan Oprasional Lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten / kota | Terlaksananya Oprasional Lembaga Kerjasama Tripartit | Kab Tubaba | 1 | bln | 15.000.000,00 | | | | 16.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| **5** | **32** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **Persentase Perencanaa pembangunan kawasan transmigrasi** | | | | | | | | - |
| | | **02** | **2.01** | | **Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi** | **Jumlah pecadangan tanah untuk kawasan transmigrasi** | | | | | | | | - |
| | | **02** | **2.01** | **01** | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | terlaksnanya identifikasi potensi kawasan transmigrasi | Kab Tubaba | 1 | keg | 20.000.000,00 | | | | 22.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **1.923.946.465** | | | | **2.116.341.112** |

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

**SKPD : Sekretariat Daerah**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 4 | 01 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Renja dan RKA SKPD | TUBABA | 100 | % | 50.000.000,00 | APBD | | | 55.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | TUBABA | 100 | % | 48.800.000,00 | APBD | | | 53.680.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | TUBABA | 100 | % | 50.000.000,00 | APBD | | | 55.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersunannya DPA | TUBABA | 100 | % | 50.000.000,00 | APBD | | | 55.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | TUBABA | 100 | % | - | APBD | | | - |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | TUBABA | 100 | % | 50.000.000,00 | APBD | | | 55.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | TUBABA | 100 | % | 41.320.000,00 | APBD | | | 45.452.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | TUBABA | 100 | % | 12.611.929.303,00 | APBD | | | 13.873.122.233 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas | TUBABA | 100 | % | 375.120.000,00 | APBD | | | 412.632.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | TUBABA | 100 | % | - | APBD | | | - |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun | TUBABA | 100 | % | - | APBD | | | - |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Setda | TUBABA | 100 | % | - | APBD | | | - |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah | TUBABA | 100 | % | - | APBD | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal | TUBABA | 100 % | | - | APBD | | | - |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Jasa Komponen instalasi Listrik | TUBABA | 1 | th | 100.000.000,00 | APBD | | | 110.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | TUBABA | 1 | th | 22.731.000,00 | APBD | | | 25.004.100 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | TUBABA | 1 | th | 68.780.000,00 | APBD | | | 75.658.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman | TUBABA | 1 | th | 1.419.020.000,00 | APBD | | | 1.560.922.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersediaanya Barang Cetakan dan Penggandaan | TUBABA | 1 | th | 90.000.000,00 | APBD | | | 99.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu | TUBABA | 1 | th | - | APBD | | | - |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | TUBABA | 1 | th | - | APBD | | | - |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | TUBABA | 1 | th | 891.525.000,00 | APBD | | | 980.677.500 |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | TUBABA | 1 | th | 100.000.000,00 | APBD | | | 110.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | TUBABA | 1 | th | 6.361.750.000,00 | APBD | | | 6.997.925.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | 1 | th | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | TUBABA | 1 | th | 354.600.000,00 | APBD | | | 390.060.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | TUBABA | 1 | th | 187.000.000,00 | APBD | | | 205.700.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesinlainnya | Terpeliharanya secara Rutin/Berkala peralatan mesin dan kantor | TUBABA | 1 | th | 33.550.000,00 | APBD | | | 36.905.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesinlainnya | Terpeliharanya secara Rutin/Berkala peralatan mesin dan kantor | TUBABA | 1 | th | 252.395.000,00 | APBD | | | 277.634.500 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | TUBABA | 1 | th | - | APBD | | | - |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | | | | | | | | - |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Gaji dan Tunjangan | TUBABA | 1 | th | 565.234.538,00 | APBD | | | 621.757.992 |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Perlengkapan | TUBABA | 1 | th | 75.000.000,00 | APBD | | | 82.500.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Medical Check Up | TUBABA | 1 | th | 50.000.000,00 | APBD | | | 55.000.000 |
| 4 | 01 | 1 | 2.12 | | **Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Rumah Tangga Kepala Daerah | TUBABA | 1 | th | 742.475.000,00 | APBD | | | 816.722.500 |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | TUBABA | 1 | th | 494.975.000,00 | APBD | | | 544.472.500 |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | TUBABA | 1 | th | 457.475.000,00 | APBD | | | 503.222.500 |
| 4 | 01 | 1 | 2.13 | | **Penataan Organisasi** | | | | | | | | | - |
| 4 | 01 | 1 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan | TUBABA | 1 | th | 96.380.000,00 | APBD | | | 106.018.000 |
| 4 | 01 | 1 | 2.13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana | TUBABA | 1 | th | 45.980.000,00 | APBD | | | 50.578.000 |
| 4 | 01 | 1 | 2.13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | TUBABA | 1 | th | 46.380.000,00 | APBD | | | 51.018.000 |
| 4 | 01 | 1 | 2.13 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | TUBABA | 1 | th | 46.380.000,00 | APBD | | | 51.018.000 |
| 4 | 01 | 1 | 2.14 | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 4 | 01 | 1 | 2.14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan | Tersedianya Pelayanan Umum Keprotokolan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tubaba | 1 | th | 966.760.000,00 | APBD | | | 1.063.436.000 |
| 4 | 01 | 1 | 2.14 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Tersedianya Pelayanan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tubaba | 1 | th | 600.000.000,00 | APBD | | | 660.000.000 |
| 4 | 01 | 1 | 2.14 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Tersedianya Pelayanan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tubaba | 1 | th | 250.000.000,00 | APBD | | | 275.000.000 |
| 4 | 01 | 02 | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | - |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | | | | | | | | | - |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Tersusunya dokumen LPPD dan Terfasilitasinya kegiatan kepala daerah dan terfasilitasinya batas daerah | TUBABA | 1 | th | 149.560.000,00 | APBD | | | 164.516.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | TUBABA | 1 | th | 100.000.000,00 | APBD | | | 110.000.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | TUBABA | 1 | th | 100.000.000,00 | APBD | | | 110.000.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | | - |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Tubaba | 1 | th | 1.625.800.000,00 | APBD | | 100% | 1.788.380.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Terlaksananya Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Tubaba | 1 | th | 1.066.400.000,00 | APBD | | 100% | 1.173.040.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Terlaksananya Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Rakyat | Tubaba | 1 | th | 210.000.000,00 | APBD | | 100% | 231.000.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | TUBABA | 1 | th | 99.681.000,00 | APBD | | | 109.649.100 |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Fasilitasi bantuan hukum | Terlaksanya Fasilitasi bantuan hukum | TUBABA | 1 | th | 397.335.000,00 | APBD | | | 437.068.500 |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum | TUBABA | 1 | th | 74.304.000,00 | APBD | | | 81.734.400 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 03 | | | **Program Perekonomian dan Pembangunan** | | | | | | | | | - |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | | | | | | | | | - |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, singkronisasi, Monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD | Terlaksananya Koordinasi, singkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD | TUBABA | 1 | th | 91.976.000,00 | APBD | | | 101.173.600 |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Pengendalian dan distribusi perekonomian | Terlaksananya Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Perekonomian serta Inflasi Daerah | TUBABA | 1 | th | 92.809.000,00 | APBD | | | 102.089.900 |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil | Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Layanan Informasi Ekonomi Terpadu | TUBABA | 1 | th | 89.775.000,00 | APBD | | | 98.752.500 |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | | | | | | | | | - |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | TUBABA | 1 | th | 38.047.000,00 | APBD | | | 41.851.700 |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pengendaliaan dan Evaluasi Program Pembangunan | Terlaksananya Pengendaliaan dan Evaluasi Program Pembangunan | TUBABA | 1 | th | 113.995.000,00 | APBD | | | 125.394.500 |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | TUBABA | 1 | th | 75.638.000,00 | APBD | | | 83.201.800 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | | | | - |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa | TUBABA | 1 | th | 87.496.465,00 | APBD | | | 96.246.112 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Terkelolanya Lay. Pengadaan Secara Elektronik | | 1 | th | 508.207.000,00 | APBD | | | 559.027.700 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | 1 | th | 61.616.535,00 | APBD | | | 67.778.189 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **32.578.199.841,00** | | | | **35.836.019.825** |

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

**SKPD : Sekretariat DPRD**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 4 | 02 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunya Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | 4 | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | 12 | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | - | | | | - |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Tubaba | | | 1.874.193.933 | APBD | | 12 | 2.061.613.326 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tubaba | | | 421.440.000 | APBD | | 12 | 463.584.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Penyusunan Akuntasi Pelaporan Keuangan | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | 12 | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Pengelolaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | 12 | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | 4 | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | 4 | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | | | | | - | | | | - |
| 4 | 02 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Miliki Daerah Pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Barang Miliki Daerah Pada SKPD | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | - | | | | - |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | 19 | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Kepegawaian | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Kepegawaian | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Tubaba | | | 350.000.000 | APBD | | 19 | 385.000.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | 19 | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | 12 | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Makanan & Minuman | Tubaba | | | 154.176.000 | APBD | | 12 | 169.593.600 |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan & Pengandaan | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | 12 | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sekretariat | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah | Tubaba | | | 200.000.000 | APBD | | 19 | 220.000.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tubaba | | | 483.480.000 | APBD | | | 531.828.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tubaba | | | - | APBD | | 4 | - |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Terlaksananya Pengadaan Meubeler | Tubaba | | | 575.000.000 | APBD | | | 632.500.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tubaba | | | 125.000.000 | APBD | | | 137.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik | Tubaba | | | 321.600.000 | APBD | | 12 | 353.760.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tubaba | | | 1.160.700.000 | APBD | | | 1.276.770.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | Tubaba | | | 123.900.000 | APBD | | | 136.290.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | Tubaba | | | 93.950.000 | APBD | | 12 | 103.345.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.14 | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan | Tubaba | | | 3.350.000 | APBD | | | 3.685.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.14 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Terlaksannya Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Tubaba | | | 3.350.000 | APBD | | | 3.685.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | | **Layanan Keuangan dan Kesahteraan DPRD** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 01 | Penyelenggaraan Adminstrasi Keuangan DPRD | Terlaksananya Penyelenggaraan Adminstrasi Keuangan DPRD | Tubaba | | | 10.431.584.440 | APBD | | 12 | 11.474.742.884 |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Tubaba | | | 690.000.000 | APBD | | 30 | 759.000.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.15 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Tubaba | | | 100.000.000 | APBD | | 30 | 110.000.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | | **Layanan Administrasi DPRD** | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 01 | Penyelenggaraan Adminstrasi Keanggotaan DPRD | Terlaksananya Penyelenggaraan Adminstrasi Keanggotaan DPRD | Tubaba | | | 750.000 | APBD | | | 825.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD | Tubaba | | | 58.650.000 | APBD | | | 64.515.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi DPRD | Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi DPRD | Tubaba | | | 9.190.000 | APBD | | | 10.109.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Tubaba | | | 520.000 | APBD | | | 572.000 |
| 4 | 02 | 02 | | | **PRGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | | | | | | - |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | | **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD** | | | | | | | | | - |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Tubaba | | | 3.350.000 | APBD | | | 3.685.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Pembahasan Rancangan Perda | Pembahasan Rancangan Perda | Tubaba | | | 246.800.000 | APBD | | 30 | 271.480.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Tubaba | | | 3.350.000 | APBD | | | 3.685.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Naskah Akademik | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Naskah Akademik | Tubaba | | | 300.000.000 | APBD | | 3 | 330.000.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Tubaba | | | 100.000 | APBD | | 3 | 110.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | | | | | - | | | | - |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Pembahasan KUA dan PPAS | Tubaba | | | 9.000.000 | APBD | | 2 | 9.900.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | Tubaba | | | 9.000.000 | APBD | | 2 | 9.900.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pembahasan APBD | Pembahasan APBD | Tubaba | | | 9.000.000 | APBD | | 1 | 9.900.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pembahasan APBD Perubahan | Pembahasan APBD Perubahan | Tubaba | | | 9.000.000 | APBD | | 1 | 9.900.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Pembahasan Laporan Semesteran | Pembahasan Laporan Semesteran | Tubaba | | | 200.000.000 | APBD | | 1 | 220.000.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Pembahasan Peranggungjawaban APBD | Pembahasan Peranggungjawaban APBD | Tubaba | | | 200.000.000 | APBD | | 2 | 220.000.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | | | - | | | | - |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan & Hukum | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan & Hukum | Tubaba | | | 3.350.000 | APBD | | 2 | 3.685.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Tubaba | | | 3.350.000 | APBD | | 2 | 3.685.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Tubaba | | | 3.350.000 | APBD | | 2 | 3.685.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Tubaba | | | 3.350.000 | APBD | | 2 | 3.685.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumbaer Daya Alam | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumbaer Daya Alam | Tubaba | | | 3.350.000 | APBD | | 2 | 3.685.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 06 | Pengawasan TLHP oleh BPK | Pengawasan TLHP oleh BPK | Tubaba | | | 3.350.000 | APBD | | 2 | 3.685.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Tubaba | | | 200.000.000 | APBD | | 2 | 220.000.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Tubaba | | | 100.000 | APBD | | 2 | 110.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | | | | | - | | | | - |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 02 | Pendalaman Tugas DPRD | Bimbingan Teknis DPRD | Tubaba | | | 2.392.192.000 | APBD | | 90 | 2.631.411.200 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Tubaba | | | 3.350.000 | APBD | | 12 | 3.685.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 04 | Penyediaan Kelompok Pakar ahli | Penyediaan Kelompok Pakar ahli | Tubaba | | | 288.000.000 | APBD | | | 316.800.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Tubaba | | | 216.000.000 | APBD | | 6 | 237.600.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Tubaba | | | 3.350.000 | APBD | | | 3.685.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Penyusunan Program Kerja DPRD | Tubaba | | | 100.000 | APBD | | 1 | 110.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | | **Penyerapan dan Penghipunan Aspirasi Masyarakat** | | | | | | | | | - |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 01 | Kunjungan Kerja Dalam Daerah | Kunjungan Kerja Dalam Daerah | Tubaba | | | 500.000.000 | APBD | | 30 | 550.000.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Tubaba | | | 9.000.000 | APBD | | 1 | 9.900.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 03 | Pelaksanaan Reses | Pelaksanaan Reses | Tubaba | | | 1.618.731.900 | APBD | | 3 | 1.780.605.090 |
| 4 | 02 | 02 | 2.06 | | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | | | | | | | | | - |
| 4 | 02 | 02 | 2.06 | 02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Pengawasan Kode Etik DPRD | Tubaba | | | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | | **Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD** | | | | | | | | | - |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 01 | Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Tubaba | | | 2.003.780.100 | APBD | | 30 | 2.204.158.110 |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 02 | Penyusunan Kinerja Pimpinan DPRD | Penyusunan Kinerja Pimpinan DPRD | Tubaba | | | 3.350.000 | APBD | | 1 | 3.685.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Tubaba | | | 200.000.000 | APBD | | 30 | 220.000.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Tubaba | | | 600.000.000 | APBD | | | 660.000.000 |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Tubaba | | | 1.000.000.000 | APBD | | | 1.100.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **27.298.738.373** | | | | **30.028.612.210** |

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Perencanaan
**SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 18 | 1 | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Dokumen | 35.000.000 | APBD | | 1 Dokumen | 38.500.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Laporan | 40.000.000 | APBD | | 1 Laporan | 44.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Laporan | 35.000.000 | APBD | | 1 Laporan | 38.500.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Tahun | 3.834.221.605 | APBD | | 1 Thn | 4.217.643.766 |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Dokumen | 173.760.000 | APBD | | 1 Dokumen | 191.136.000 |
| | 18 | 1 | 2.02 | 07 | Koodinasi penyusunan laporan keuangaan bulanan/semester SKPD | Tersedianya dokumen laporan keuangan SKPD | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Dokumen | 40.000.000 | APBD | | 1 Dokumen | 44.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Kegiatan | 48.750.000 | APBD | | 1 Kegiatan | 53.625.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Kegiatan | 30.000.000 | APBD | | 1 Kegiatan | 33.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 18 | 1 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tersedianya Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Kegiatan | 105.000.000 | APBD | | 1 Kegiatan | 115.500.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | BAPPEDA Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 20.000.000 | APBD | | | 22.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan kantor | BAPPEDA Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 101.520.000 | APBD | | 12 Bulan | 111.672.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | BAPPEDA Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 30.100.000 | APBD | | 12 Bulan | 33.110.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | BAPPEDA Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 213.228.000 | APBD | | 12 Bulan | 234.550.800 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | BAPPEDA Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 89.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 97.900.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Menelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | DPM-PPTSP Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 238.856.000 | APBD | | 12 Bulan | 262.741.600 |
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan mesin lainnya | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Kegiatan | 97.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 106.700.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnnya | Terpenuhinya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnnya | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Kegiatan | 5.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 5.500.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | BAPPEDA Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 87.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 95.700.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | BAPPEDA Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 306.780.000 | APBD | | 12 Bulan | 337.458.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Thn | 113.146.000 | APBD | | 1 Thn | 124.460.600 |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | BAPPEDA Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 27.100.000 | APBD | | 12 Bulan | 29.810.000 |
| **5** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | **02** | **2.01** | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | **02** | **2.01** | **04** | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | BAPPEDA Kab.Tubaba | 2 | keg | 20.000.000,00 | | | 2 keg | 22.000.000 |
| **5** | **01** | **02** | **2.01** | **05** | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Terlaksananya Musrenbang Kabupaten | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | keg | 200.000.000,00 | APBD | | 1 keg | 220.000.000 |
| **5** | **01** | **02** | **2.01** | **07** | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD DAN RKPD) Kabupaten | BAPPEDA Kab.Tubaba | 2 | dok | 523.680.000,00 | | | 2 dok | 576.048.000 |
| **5** | **01** | **02** | **2.02** | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | **02** | **2.02** | **01** | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya Data Pembangunan dan Informasi Kabupaten TUBABA | BAPPEDA Kab.Tubaba | 100 | % | 0,00 | APBD | | 100% | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| **5** | **01** | **02** | **2.02** | **02** | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Tersusunnya Kebijakan Penganggaran di Daerah | BAPPEDA Kab.Tubaba | 100 % | | 40.000.000,00 | | | 100% | 44.000.000 |
| **5** | **01** | **02** | **2.03** | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | **02** | **2.03** | **01** | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Terlaksananya Monitoring Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah | BAPPEDA Kab.Tubaba | 4 dok | | 45.000.000,00 | APBD | | 4 dok | 49.500.000 |
| **5** | **01** | **02** | **2.03** | **02** | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | Terlaksananya Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah | BAPPEDA Kab.Tubaba | 4 dok | | 52.000.000,00 | | | 4 dok | 57.200.000 |
| **5** | **01** | **02** | **2.03** | **03** | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 dok | | 100.000.000,00 | | | 1 dok | 110.000.000 |
| **5** | **01** | **03** | | | **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2,01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya | BAPPEDA Kab.Tubaba | 6 Dokumen | | 133.080.000 | APBD | 6 | Dokumen | 148.080.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Terlaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Kegiatan | 66.740.000 | APBD | 1 | Kegiatan | 81.740.000 |
| 5 | 01 | 03 | 2,01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonissai Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Data Fasilitasi Aksi Daerah<br>Pengmbangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City dan Smart Regency | BAPPEDA Kab.Tubaba | 2 | Dokumen | 167.260.000 | APBD | 2 | Dokumen | 173.986.000 |
| 5 | 01 | 03 | 2,01 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Terlaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Kegiatan | 66.000.000 | APBD | 1 | Kegiatan | 72.726.000 |
| **5** | **01** | **03** | **2,02** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA** | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2,02 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD) | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Kegiatan | - | APBD | 1 | Kegiatan | - |
| 5 | 01 | 03 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Tersedianya monev perencanaan pembangunan bidang perekonomian | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Kegiatan | 193.568.000 | APBD | 1 | Kegiatan | 200.294.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 01 | 03 | 2,02 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang perekonomian | terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang perekonomian | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Kegiatan | 100.756.000 | APBD | 1 | Kegiatan | 107.482.000 |
| 5 | 01 | 03 | 2,02 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Tersedianya monev perencanaan pembangunan bidang SDA | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Kegiatan | 145.892.000 | APBD | 1 | Kegiatan | 152.618.000 |
| 5 | 01 | 03 | 2,02 | 08 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Tersedianya monev perencanaan pembangunan bidang SDA | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Kegiatan | 50.000.000 | APBD | 1 | Kegiatan | 56.726.000 |
| 5 | 01 | 03 | 2,03 | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | |
| **5** | **05** | | | | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | |
| **5** | **05** | **02** | | | **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** | **Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Inovasi** | | | | | | | | |
| **5** | **05** | **02** | **2.01** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **Persentase Hasil Litbang yang Sesuai Dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pelaksanaa dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan otda | Terlaksananya Fasilitasi / koordinasi penyusunan | BAPPEDA Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 140.000.000 | APBD | 1 | Dokumen | 146.674.000 |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Pelaksanaa dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Terlaksananya Fasilitasi / koordinasi lomba inovasi daerah | BAPPEDA Kab.Tubaba | 12 | Bulan | 100.000.000 | APBD | 1 | Dokumen | 106.674.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 05 | 02 | 2,02 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | **Tersusunnya Dokumen Bidang Sosial dan Kependudukan** | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2,02 | 10 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Tersusunnya Dokumen Suervei Kepuasan Masyarakat | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Dokumen | 205.000.000 | APBD | 1 | Dokumen | 211.674.000 |
| 5 | 05 | 02 | 2,03 | 04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Tersusunnya Peningkatan Kapasitas Petani | BAPPEDA Kab.Tubaba | 1 | Dokumen | 155.000.000 | APBD | 1 | Dokumen | 161.674.000 |
| 5 | 05 | 02 | 2,03 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2,03 | 01 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) | Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan UMKM | Tulang Bawang Barat | 1 | Dokumen | - | APBD | 1 | Dokumen | - |
| **5** | **01** | **03** | **2.03** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Terintegrasinya Data Spasial Infrastruktur Kab. Tubaba | Tulang Bawang Barat | aporan | | 239.730.000 | APBD | | Dokumen Laporan | 246.404.000 |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Tersusunnya Kebutuhan data Sarana Prasarana | Tulang Bawang Barat | 100% | | 70.604.000 | APBD | | 100% | 77.278.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Tersedianya Dokumen Sebaran Sarana dan Prasarana | Tulang Bawang Barat | tumen | | 23.520.000 | APBD | | 1 Dokumen | 30.194.000 |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Tersusunnya Kebutuhan data kewilayahan | Tulang Bawang Barat | 100% | | 25.930.000 | APBD | | 100% | 32.604.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **8.534.221.605** | | | | **9.323.083.766** |

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Keuangan
**SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 02 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja BPKAD | BPKAD Kab.Tubaba | 2 | Dok | 17.324.000 | APBD | | | 19.056.400 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 19.676.000 | APBD | | | 21.643.600 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD | BPKAD Kab.Tubaba | 14 | Bln | 16.050.462.656 | APBD | | | 17.655.508.922 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan BPKAD | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 8.838.000 | APBD | | | 9.721.800 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | tertib administrasi pengelolaan keuangan | Kab. Tubaba | 1 | dok | 7.450.000 | APBD | | 100% | 8.195.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaaan | | Tubaba | 1 | Dok | 13.050.000 | | | | 14.355.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran BPKAD | BPKAD Kab.Tubaba | 3 | Dok | 11.662.000 | APBD | | | 12.828.200 |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pembelian Pakaian Dinas Pegawai | BPKAD Kab.Tubaba | 120 | Stel | 52.500.000 | | | | 57.750.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Data Administrasi Kepegawaian ASN BPKAD | BPKAD Kab.Tubaba | 5 | Dok | 13.794.000 | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Sosialisasi Perundang-Undangan | Jumlah Peserta Sosialisasi Prundang-Undangan yang dikirim | BPKAD Kab.Tubaba | 52 | Peserta | 13.794.000 | APBD | | | 15.173.400 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPKAD | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dibutuhkan | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 75.700.000 | | | | 83.270.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang Dibutuhkan dikantor BPKAD | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 35.000.000 | APBD | | | 38.500.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Logistik Kantor BPKAD | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 200.000.000 | | | | 220.000.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 60.000.000 | APBD | | | 66.000.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan / Material | Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kesehatan BPKAD | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 35.000.000 | | | | 38.500.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitas Makan dan Minum Tamu | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 75.000.000 | | | | 82.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Rarat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 150.000.000 | APBD | | | 165.000.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Penataan Arsip Dinamis pada SKPD | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 13.412.000 | APBD | | | 14.753.200 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Kebutuhan Internet pada BPKAD | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 149.400.000 | APBD | | | 164.340.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Bulan Pemenuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Tubaba | 12 | Bln | 506.650.000 | APBD | | 100% | 557.315.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Surat Menyurat | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 35.000.000 | APBD | | | 38.500.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 12.000.000 | APBD | | | 13.200.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Pemenuhan Pelayanan Umum Kantor | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 356.400.000 | APBD | | | 392.040.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayarkan Perizinan/Pajak oleh BPKAD | BPKAD Kab.Tubaba | 5 | Kendaraan | 193.350.000 | APBD | | | 212.685.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pada BPKAD | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 35.000.000 | APBD | | | 38.500.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor BPKAD | BPKAD Kab.Tubaba | 12 | Bln | 35.000.000 | APBD | | | 38.500.000 |
| 5 | 02 | 02 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | | | - |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | | | | | | | - |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 50.000.000 | | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 50.000.000 | | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | BPKAD Kab.Tubaba | 52 | Dok | 50.000.000 | | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah DPA dan DPPA Kabupaten Tulang Bawang Barat | BPKAD Kab.Tubaba | 52 | Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah Perda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 52 | Dok | 40.000.000 | APBD | | | 44.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 52 | Dok | 40.000.000 | APBD | | | 44.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi, Penyusunan dan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | BPKAD Kab.Tubaba | 52 | Dok | 400.000.000 | APBD | | | 440.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Dokumen terkait dana pinjaman daerah dan pendapatan lainnya | BPKAD Kab.Tubaba | 1 Perda | 400.000.000 | APBD | | | 440.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat | BPKAD Kab.Tubaba | 350 Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat | BPKAD Kab.Tubaba | 1 Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Anggaran Pembiayaan Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat | BPKAD Kab.Tubaba | 1 Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | | | | | | | - |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat | BPKAD Kab.Tubaba | 105 Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | BPKAD Kab.Tubaba | 1500 Lembar | 75.000.000 | APBD | | | 82.500.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) | BPKAD Kab.Tubaba | 1 Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan SPJ Gaji | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan laporan Penyetoran Hasil Pemungutan Perhitungan Pihak Ketiga | BPKAD Kab.Tubaba | 2 | Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Terlaksananya Koordinasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketigam (PFK) | BPKAD Kab.Tubaba | 4 | Dok | 100.000.000 | APBD | | | 110.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotong Atas SP2D dengan Instansi Terkait | BPKAD Kab.Tubaba | 2 | Dok | 51.100.000.000 | APBD | | | 56.210.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | BPKAD Kab.Tubaba | 2 | Dok | 20.000.000 | APBD | | | 22.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan SPJ | BPKAD Kab.Tubaba | 1 Dok | 80.000.000 | APBD | | | 88.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | | | | | | - |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Dokumen Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 1 Dok | 50.000.000 | APBD | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja, Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja, Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban | BPKAD Kab.Tubaba | 1 Dok | 50.000.000 | APBD | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester | Terlaksanaya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester | BPKAD Kab.Tubaba | 1 Dok | 50.000.000 | APBD | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | BPKAD Kab.Tubaba | 1 Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota | BPKAD Kab.Tubaba | 2 | Perda | 75.000.000 | APBD | | | 82.500.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 75.000.000 | APBD | | | 82.500.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 75.000.000 | APBD | | | 82.500.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Sosilisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 52 | Peserta | 75.000.000 | APBD | | | 82.500.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 04 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | | | 9.080.000.000 | | | | 9.988.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | BPKAD Kab.Tubaba | | | 129.187.368.600 | | | | 142.106.105.460 |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | BPKAD Kab.Tubaba | | | 10.000.000.000 | | | | 11.000.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota | | BPKAD Kab.Tubaba | | | 2.238.888.000 | | | | 2.462.776.800 |
| 5 | 02 | 02 | 2.05 | | **Pengelolaan Data dan Implemtasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.05 | 03 | Pembinaan SIPD Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota | Terlaksananya Pembinaan SIPD Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Kegiatan | 20.000.000 | APBD | | | 22.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| 5 | 02 | 02 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | | | - |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | | - |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Dokumen Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Milik Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Data Barang Milik Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengemanan Fisik, Adminstrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 197 | Kend | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengemanan Fisik, Adminstrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 197 | Kend | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | BPKAD Kab.Tubaba | 1 | Dok | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **222.556.719.256** | | | | **244.812.391.182** |

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Keuangan
**SKPD : Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 02 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen RENSTRA dan RENJA | Tubaba | 2 | Dokumen | 25.000.000 | APBD | | | 27.500.000 |
| 5 | 02 | 1 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhi nya Hak Seluruh ASN | Tubaba | 1 | Tahun | 2.900.211.903 | APBD | | | 3.190.233.093 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | tertib administrasi pengelolaan keuangan | Kab. Tubaba | 100 | % | 125.280.000 | APBD | | 100% | 137.808.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaaan | | Tubaba | 1 | Dokumen | - | | | | - |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | - |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pembelian Pakaian Dinas Pegawai | Tubaba | | | - | | | | - |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pelatihan Pegawai | Luar Tubaba | | | - | | | | - |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimtek | Luar Tubaba | | | - | | | | - |
| | | | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Tubaba | 1 | Keg. | 9.000.000 | APBD | | | 9.900.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Tubaba | 1 | Keg. | 136.224.000 | APBD | | | 149.846.400 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Banner Himbauan dan Fotocopy | Tubaba | 1 | Tahun | 40.000.000 | APBD | | | 44.000.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan Dinas | Tubaba | 1 | Tahun | 53.600.000 | APBD | | | 58.960.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Pembelian Meja,Kursi Dan Lemari Arsip Kantor | Tubaba | 1 | Kegiatan | - | APBD | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 100 | % | - | APBD | | 100% | - |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedia nya Amplob Dinas,Kop Dinas, Map Dinas | Tubaba | 1 | Tahun | 45.000.000 | APBD | | | 49.500.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Adanya Tagihan Listrik, Tagihan Air, Tagihan Internet | Tubaba | 1 | Tahun | 102.000.000 | APBD | | | 112.200.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Service Peralatan Kantor | Tubaba | 1 | Tahun | 5.000.000 | APBD | | | 5.500.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedia nya Sapu,Pewangi Ruangan. | Tubaba | 1 | Tahun | 206.400.000 | APBD | | | 227.040.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Adanya Tagihan Pajak Kendaraan Dinas | Tubaba | 1 | Tahun | 67.500.000 | APBD | | | 74.250.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pembelian Cat Tembok,Kunci, Dll | Tubaba | 1 | Tahun | 45.000.000 | APBD | | | 49.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 04 | | | **Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah** | | | | | | | | | - |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | | | | | | | | | - |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | Tubaba | 1 | Kegiatan | 300.000.000,00 | | | | 330.000.000 |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 06 | Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | Tubaba | 1 | Kegiatan | 50.000.000,00 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | Tubaba | 1 | Kegiatan | 50.000.000,00 | APBD | | | 55.000.000 |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 11 | Penagihan Pajak Daerah | | Tubaba | 1 | Kegiatan | 225.000.000,00 | APBD | | | 247.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **4.385.215.903** | | | | **4.823.737.493** |

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Kepegawaian

**SKPD : Badan Kepegawaian Daerah**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 03 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang disusun | Kab. Tubaba | 4 | Dok | - | APBD | | 4 Dok | - |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen yang disusun | Kab. Tubaba | 1 | Dok | - | APBD | | 1 Dok | - |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gajih dan Tunjangan ASN | Kab. Tubaba | 12 | Bulan | 2.534.676.918 | APBD | | 12 Bulan | 2.788.144.610 |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | tertib administrasi pengelolaan keuangan | Kab. Tubaba | 100 | % | 84.200.000 | APBD | | 100% | 92.620.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | tersedianya dokumen laporan semesteran | Kab. Tubaba | 12 | Dok | 15.000.000 | APBD | | 12 Dok | 16.500.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | tertib dokumen perencanaan | Kab. Tubaba | 1 | dok | - | APBD | | 1 Dok | - |
| 5 | 03 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | tersedianya pengamanan barang milik skpd | Kab. Tubaba | 12 | bulan | - | APBD | | 12 Bulan | - |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | tersedianya pakaian dinas harian pegawai | Kab. Tubaba | 180 | Stel | - | APBD | | 180 Stel | - |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | kegiatan ASN | Kab. Tubaba | 6 | Keg | - | APBD | | 6 Keg | - |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | tersedianya dana untuk bayar listrik | Kab. Tubaba | 12 | Bulan | 2.907.000 | APBD | | 12 Bulan | 3.197.700 |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | tersedianya peralatan kantor | Kab. Tubaba | 12 | Unit | 15.455.000 | APBD | | 12 Unit | 17.000.500 |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga | tersedianya peralatan kantor | Kab. Tubaba | 12 | Unit | 5.000.000 | APBD | | 12 Unit | 5.500.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | tersedianya bahan logistik | Kab. Tubaba | 12 | Bulan | 114.720.000 | APBD | | 12 Bulan | 126.192.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | tersedianya penggandaan | Kab. Tubaba | 12 | Bulan | - | | | 12 Bulan | - |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | tersedianya dana untuk sppd | Kab. Tubaba | 12 | Bulan | 14.160.000 | APBD | | 12 Bulan | 15.576.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 100 | % | - | APBD | | 100% | - |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 100 | % | - | APBD | | 100% | - |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 100 | % | - | APBD | | 100% | - |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 12 | Bulan | 66.600.000 | APBD | | 12 Bulan | 73.260.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 100 | % | 5.000.000 | APBD | | 100% | 5.500.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 12 | Bulan | 190.200.000 | APBD | | 12 Bulan | 209.220.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 12 | Bulan | 36.670.000 | APBD | | 12 Bulan | 40.337.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 12 | Bulan | - | APBD | | 12 Bulan | - |
| 5 | 03 | | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 100 | % | - | APBD | | 100% | - |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 100 | % | 10.000.000 | APBD | | 100% | 11.000.000 |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | jml sk pensiun | Kab. Tubaba | 50 | sk | 20.000.000 | APBD | | 50 sk | 22.000.000 |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | kegiatan ASN | Kab. Tubaba | 5 | keg | 10.000.000 | APBD | | 5 keg | 11.000.000 |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | apdet data | Kab. Tubaba | 1000 | Data | 20.000.000 | APBD | | 1000 data | 22.000.000 |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | | **Mutasi dan Promosi ASN** | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | jumlah sk mutasi | Kab. Tubaba | 35 | sk | 10.390.000 | APBD | | 35 sk | 11.429.000 |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | jumlah sk kp | Kab. Tubaba | 535 | sk | 25.000.000 | APBD | | 535 sk | 27.500.000 |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Promosi ASN | jumlah kegiatan | Kab. Tubaba | 5 | keg | 20.000.000 | APBD | | 5 keg | 22.000.000 |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Assessment Center | jumlah pelamar | Kab. Tubaba | 45 | Orng | 150.000.000 | APBD | | 45 orng | 165.000.000 |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 06 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 100 | % | - | APBD | | 100% | - |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 08 | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 100 | % | 540.000.000 | APBD | | 100% | 594.000.000 |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 100 | % | 20.000.000 | APBD | | 100% | 22.000.000 |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 05 | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | jumlah pengharagaan | Kab. Tubaba | 10 | Orng | 10.000.000 | APBD | | 10 orng | 11.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 07 | Pembinaan Disiplin ASN | penurunan pelanggaran disiplin | Kab. Tubaba | 100 | % | 10.000.000 | APBD | | 100% | 11.000.000 |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 09 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 100 | % | 5.000.000 | APBD | | 100% | 5.500.000 |
| 5 | 4 | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | |
| 5 | 04 | 02 | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | | | |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | | | | | | | | | |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 12 | Bulan | 2.943.584.000 | APBD | | 12 Bulan | 3.237.942.400 |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | 08 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | tersedianya dana | Kab. Tubaba | 12 | Bulan | - | APBD | | 12 Bulan | - |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **6.878.562.918** | | | | **7.566.419.210** |

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
**SKPD : Inspektorat**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 6 | | | | | **UNSUR PENGAWASAN UNSUR PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD | Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kabupaten Tubaba | 2 | dok | 15.000.000 | APBD | | | 16.500.000,00 |
| 6 | 01 | 1 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gajih dan Tunjangan ASN | Kabupaten Tubaba | 12 | Bulan | 8.201.913.456 | APBD | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Pelaksanaan | Kabupaten Tubaba | 12 | Bulan | 126.840.000 | APBD | | | 139.524.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang disediakan | Kabupaten Tubaba | | | - | APBD | | | - |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Kabupaten Tubaba | 4 | Keg | 272.500.000 | APBD | | | 299.750.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Sosialisasi yang diselenggarakan | Kabupaten Tubaba | | | - | APBD | | | - |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan | Kabupaten Tubaba | | | - | APBD | | | - |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen yang disediakan untuk penerangan | Kabupaten Tubaba | 10 | Item | 23.000.000 | APBD | | | 25.300.000,00 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Kabupaten Tubaba | 20 | Unit | 35.000.000 | APBD | | | 38.500.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan | Kabupaten Tubaba | 10 | Unit | 15.000.000 | APBD | | | 16.500.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor | Kabupaten Tubaba | 12 | Bulan | 160.472.000 | APBD | | | 176.519.200,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan yang disediakan | Kabupaten Tubaba | 12 | Bulan | 47.000.000 | APBD | | | 51.700.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan yang digunakan untuk rapat koordinasi dan konsultasi | Kabupaten Tubaba | 12 | Bulan | 253.600.000 | APBD | | | 278.960.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebeleur yang disediakan | Kabupaten Tubaba | 4 | Unit | 20.000.000 | APBD | | | 22.000.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya | Tersedianya Peralatan dan Mesin lainya | Kabupaten Tubaba | 3 | Unit | 50.000.000 | APBD | | | 55.000.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | Kabupaten Tubaba | 12 | Bulan | 1.200.000 | APBD | | | 1.320.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan yang disediakan | Kabupaten Tubaba | 12 | Bulan | 21.600.000 | APBD | | | 23.760.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan yang disediakan | Kabupaten Tubaba | 3 | Keg | 159.600.000 | APBD | | | 175.560.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan | Kabupaten Tubaba | 12 | Bulan | 235.220.000 | APBD | | | 258.742.000,00 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemelihraan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Tubaba | 12 | Bulan | 11.440.000 | APBD | | | 12.584.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan gedung kantor dalam satu tahun | Kabupaten Tubaba | 1 | Kali | 20.000.000 | APBD | | | 22.000.000,00 |
| 6 | 01 | 02 | | | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan | Kab. TUBABA | 4 | LHP | 300.000.000 | APBD | | 35 LHA | 330.000.000 |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengwasan Keuangan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan | Kab. TUBABA | 35 | LHP | 160.000.000 | APBD | | 35 LR | 176.000.000 |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Kinerja | Kab. TUBABA | 1 | Laporan | 230.000.000 | APBD | | 30 OPD | 253.000.000 |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan | Kab. TUBABA | 1 | Laporan | 300.000.000 | APBD | | 35 LHE | 330.000.000 |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | | **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah OPD yang Dipantau | Kab. TUBABA | 20 | LHA | 50.000.000 | APBD | | 8 OPD | 55.000.000 |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Review | Kab. TUBABA | 5 | LR | 45.000.000 | APBD | | 5 LR | 49.500.000 |
| 6 | 01 | 03 | | | **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Kebijakan Teknis Pengawasan yang Diterbitkan | Kab. TUBABA | 6 | Dokumen | - | APBD | | 6 Dokumen | - |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | | **Pendamping dan Asistensi** | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Pendamping dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Aparatur/APIP yang Mampu Melakukan Kegiatan Asistensi dan Pendampingan | Kab. TUBABA | 8 | orang | 45.000.000 | APBD | | 8 orang | 49.500.000 |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verfikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Kegiatan yang Diselenggarakan | Kab. TUBABA | 4 | Keg | 52.528.000 | APBD | | 100% | 57.780.800 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **10.851.913.456** | | | | **11.937.104.802** |

Unsur Pemerintahan Umum

**SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | Jml Sat | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| **X.XX** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | | | | |
| **X.XX-01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **8. 01. 01. 2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| **8. 01. 01. 2.02. 01** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Tubaba | 12 Bln | 2.256.066.096,00 | APBD | | | 1.563.605.675 |
| **8. 01. 01. 2.02. 03** | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Penatausahaan dan pengujuan/verivikasi keuangan skpd | Kab. Tubaba | 12 Bln | 41.520.000,00 | APBD | | | 45.672.000 |
| **8. 01. 01. 2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | - |
| **8. 01. 01. 2.05** | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas harian PNS | Kab. Tubaba | 38 ASN | 39.500.000,00 | APBD | | | 43.450.000 |
| **8. 01. 01. 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | - |
| **8. 01. 01. 2.06. 02** | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Tubaba | 1 Th | 40.004.000,00 | APBD | | | 44.004.400 |
| **8. 01. 01. 2.06. 04** | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersusunnya Renja dan RKA SKPD | Kab. Tubaba | 1 Th | 75.504.000,00 | APBD | | | 83.054.400 |
| **8. 01. 01. 2.06. 05** | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Lancarnya penyediaan ATK | Kab. Tubaba | 1 Th | 45.400.000,00 | APBD | | | 49.940.000 |
| **8. 01. 01. 2.06. 08** | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersediaanya fasilitasi untuk kedatangan tamu | Kab. Tubaba | 1 Th | 8.080.000,00 | APBD | | | 8.888.000 |
| **8. 01. 01. 2.06. 09** | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi skpd | Kab. Tubaba | 1 Th | 47.016.000,00 | APBD | | | 51.717.600 |
| **8. 01. 01. 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | - |
| **8. 01. 01. 2.08. 02** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kab. Tubaba | 1 Th | 9.600.000,00 | APBD | | | 10.560.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8. 01. 01. 2.08. 04** | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa pelayanan umur kantor | Kab. Tubaba | 1 Th | 159.600.000,00 | APBD | | | 175.560.000 |
| **8. 01. 01. 2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | - |
| **8. 01. 01. 2.09. 02** | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional | Kab. Tubaba | 1 Th | 36.000.000,00 | APBD | | | 39.600.000 |
| | | | | | | | | | | - |
| 8.01-03 | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | | | | | | - |
| 8.01.03.2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan** | | | | | | | | - |
| 8.01.03.2.01.01 | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Kebijakan Bidang Parpol | Kab. Tubaba | 1 Th | 80.000.000,00 | APBD | | | 88.000.000 |
| 8.01.03.2.01.03 | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik daerah. | Kebijakan Bidang Parpol | Kab. Tubaba | 1 Th | 685.000.000,00 | APBD | | | 753.500.000 |
| 8.01-04 | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | | | | | - |
| 8.01.04.2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | | | | | | | | - |
| 8.01.04.2.01.01 | | Penyusunan Program Kerja Bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi, Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah | Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas | Kab. Tubaba | 1 Th | 500.000.000,00 | APBD | | | 550.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01-05 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA** | | | | | | | | | |
| 8.01.05.2.01 | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | | | | | | | | | |
| 8.01.05.2.01. 03 | Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Terlaksananya kebijakan bidang ekonomi | Kab. Tubaba | 1 Th | 100.000.000,00 | APBD | | | | 110.000.000 |
| 8.01-06 | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | | | | | | - |
| 8.01.06.2.01 | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | | | | | | | | | - |
| 8.01.06.2.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di | Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini | Kab. Tubaba | 1 Th | 554.400.000,00 | APBD | | | | 609.840.000 |
| 8.01.06.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Dini, | Kab. Tubaba | 1 Th | 40.000.000,00 | APBD | | | | 44.000.000 |
| 8.01.06.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen | Kab. Tubaba | 1 Th | - | APBD | | | | - |
| 8.01.06.2.01.06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Telaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | Kab. Tubaba | 1 Th | 100.000.000,00 | APBD | | | | 110.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | | **4.817.690.096,00** | | | | | **4.381.392.075** |

Urusan Kewilayahan
Bidang Kecamatan
**SKPD : Kecamatan Tulang Bawang Tengah**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | | | **Program penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunannya usulan Program Pembangunan Kecamatan | Kec. TBT | 1 | Tahun | 10.000.000 | APBD | | 100% | 11.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji Tunjangan ASN | Kec. TBT | 1 | Tahun | 1.906.544.986 | APBD | | 100% | 2.097.199.485 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan penatausaha dan penguji/verifikasi keuangan SKPD | Terlaksananya penatausaha dan penguji/verifikasi keuangan SKPD | Kec. TBT | 1 | Tahun | 50.160.000 | APBD | | 100% | 55.176.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas pegawai | Kec. TBT | 0 | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (alat listrik) | Kec. TBT | 0 | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. TBT | 1 | Tahun | 10.000.000 | APBD | | 100% | 11.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman | Kec. TBT | 1 | Tahun | 53.856.000 | APBD | | 100% | 59.241.600 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan | Kec. TBT | 1 | Tahun | 10.000.000 | APBD | | 100% | 11.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. TBT | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (pln) | Kec. TBT | 1 | Tahun | 11.400.000 | APBD | | 100% | 12.540.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan | Kec. TBT | | | - | APBD | | 100% | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | Kec. TBT | 1 | Tahun | 124.800.000 | APBD | | 100% | 137.280.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. TBT | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 02 | | | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Program PATEN dan PPKM | Kec. TBT | 12 | Bln | 45.000.000 | APBD | | 100% | 49.500.000 |
| 7 | 01 | 03 | | | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panaragn Jaya, Mulya Asri | Kec. TBT | | | - | APBD | | 100% | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panaragn Jaya, Mulya Asri | Kec. TBT | 100 % | | 910.000.000 | APBD | | 100% | 1.001.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terselenggaranya Asistensi Dana Tiyuh | Kec. TBT | 100 % | | 34.784.000 | APBD | | 100% | 38.262.400 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kelurahan Panaragan Jaya, Mulya Asri | Kec. TBT | 100 % | | 20.000.000 | APBD | | 100% | 22.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **3.186.544.986** | | | | **3.505.199.485** |

Urusan Kewilayahan
Bidang Kecamatan
**SKPD : Kecamatan Tulang Bawang Udik**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | | | **Program penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunannya usulan Program Pembangunan Kecamatan | Kec. TBU | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji Tunjangan ASN | Kec. TBU | 1 | Tahun | 1.185.812.570 | APBD | | 100% | 1.304.393.827 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan penatausaha dan penguji/verifikasi keuangan SKPD | Terlaksananya penatausaha dan penguji/verifikasi keuangan SKPD | Kec. TBU | 1 | Tahun | 32.640.000 | APBD | | 100% | 35.904.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas pegawai | Kec. TBU | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (alat listrik) | Kec. TBU | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. TBU | 1 | Tahun | 15.000.000 | APBD | | 100% | 16.500.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Kec. TBU | 1 | Tahun | 5.392.000 | APBD | | 100% | 5.931.200 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman | Kec. TBU | 4 | Kali | 56.952.000 | APBD | | 100% | 62.647.200 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan | Kec. TBU | | | - | APBD | | 100% | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. TBT | | | 8.000.000 | APBD | | 100% | 8.800.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (pln) | Kec. TBU | 1 | Tahun | 6.000.000 | APBD | | 100% | 6.600.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | Kec. TBU | 1 | Tahun | 124.800.000 | APBD | | 100% | 137.280.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. TBU | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 02 | | | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan efektifitas kecamatan | Kec. TBU | 1 | Tahun | 40.000.000 | APBD | | 100% | 44.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terselenggaranya Asistensi Dana Tiyuh | Kec. TBU | 2 | Kali | 11.216.000 | APBD | | 100% | 12.337.600 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. TBU | 1 | Kali | 20.000.000 | APBD | | 100% | 22.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **1.505.812.570** | | | | **1.656.393.827** |

Urusan Kewilayahan
Bidang Kecamatan
**SKPD : Kecamatan Gunung Terang**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | | | **Program penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunannya usulan Program Pembangunan Kecamatan | Kec. Gn Terang | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji Tunjangan ASN | Kec. Gn Terang | 1 | Tahun | 1.031.113.230 | APBD | | 100% | 1.134.224.553 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan penatausaha dan penguji/verifikasi keuangan SKPD | Terlaksananya penatausaha dan penguji/verifikasi keuangan SKPD | Kec. Gn Terang | 12 | Bln | 26.280.000 | APBD | | 100% | 28.908.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas pegawai | Kec. Gn Terang | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (alat listrik) | Kec. Gn Terang | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Gn Terang | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Kec. Gn Terang | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Dana Penambaha Daya Tahan Tubuh | Kec. Gn Terang | 10 | Orang | 25.560.000 | APBD | | 100% | 28.116.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan | Kec. Gn Terang | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Gn Terang | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (pln) | Kec. Gn Terang | 12 Bln | 4.200.000 | APBD | | 100% | 4.620.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan | Kec. Gn Terang | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | Kec. Gn Terang | 12 Bln | 124.800.000 | APBD | | 100% | 137.280.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua | Kec. Gn Terang | 2 Unit | 6.000.000 | APBD | | 100% | 6.600.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Gn Terang | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 02 | | | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan efektifitas kecamatan | Kec. Gn. Terang | 1 Tahun | 40.000.000 | APBD | | 100% | 44.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terselenggaranya Asistensi Dana Tiyuh | Kec. Gn Terang | 100 % | 73.160.000 | APBD | | 100% | 80.476.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Gn Terang | 100 % | 20.000.000 | APBD | | 100% | 22.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **1.351.113.230** | | | | **1.486.224.553** |

Urusan Kewilayahan
Bidang Kecamatan
**SKPD : Kecamatan Gunung Agung**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | | | **Program penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya usulan program pembangunan kecamatan | Kac. Gn. Agung | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji Tunjangan ASN | Kac. Gn. Agung | 1 | Tahun | 1.119.181.438 | APBD | | 100% | 1.231.099.582 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan penatausaha dan penguji/verifikasi keuangan SKPD | Terlaksananya penatausaha dan penguji/verifikasi keuangan SKPD | Kac. Gn. Agung | 1 | Tahun | 38.040.000 | APBD | | 100% | 41.844.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | Kac. Gn. Agung | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kac. Gn. Agung | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedinya Makan dan Minuman | Kac. Gn. Agung | 1 | Tahun | 48.048.000 | APBD | | 100% | 52.852.800 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan | Kac. Gn. Agung | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kac. Gn. Agung | 1 Tahun | | 3.000.000 | APBD | | 100% | 3.300.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | Kac. Gn. Agung | 1 Tahun | | 124.800.000 | | | 100% | 137.280.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terealisasi biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas | Kec. Gn Terang | 1 Tahun | | 3.000.000 | APBD | | 100% | 3.300.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 03 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kac. Gn. Agung | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Rutin / Berkala Gedung Kantor | Kac. Gn. Agung | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 02 | | | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan efektifitas kecamatan | Kac. Gn. Agung | 1 Tahun | | 40.000.000 | APBD | | 100% | 44.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terselenggarannya pembinaan dan fasilitasi keuangan tiyuh | Kac. Gn. Agung | 100 % | | 43.112.000 | APBD | | 100% | 47.423.200 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kac. Gn. Agung | 1 Taun | | 20.000.000 | APBD | | 100% | 22.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **1.439.181.438** | | | | **1.583.099.582** |

Urusan Kewilayahan
Bidang Kecamatan
**SKPD : Kecamatan Way Kenanga**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | | | **Program penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Way Kenanga | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji Tunjangan ASN | Kec. Way Kenanga | 12 | Bulan | 996.233.622 | APBD | | 100% | 1.095.856.984 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan penatausaha dan penguji/verifikasi keuangan SKPD | Terlaksananya penatausaha dan penguji/verifikasi keuangan SKPD | Kec. Way Kenanga | 12 | Bulan | 35.400.000 | APBD | | 100% | 38.940.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas pegawai | Kec. Way Kenanga | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (alat listrik) | Kec. Way Kenanga | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Way Kenanga | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Kec. Way Kenanga | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya penambahan daya tahan tubuh | Kec. Way Kenanga | 12 | Bulan | 41.280.000 | APBD | | 100% | 45.408.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Way Kenanga | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (pln) | Kec. Way Kenanga | 12 | Bulan | 13.200.000 | APBD | | 100% | 14.520.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | Kec. Way Kenanga | 12 | Bulan | 124.800.000 | APBD | | 100% | 137.280.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Way Kenanga | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 02 | | | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan efektifitas kecamatan | Kec. Way Kenanga | 1 | Tahun | 40.000.000 | APBD | | 100% | 44.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terselenggaranya Asistensi Dana Tiyuh | Kec. Way Kenanga | 12 | Bulan | 45.320.000 | APBD | | 100% | 49.852.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Way Kenanga | 12 | Bulan | 20.000.000 | APBD | | 100% | 22.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **1.316.233.622** | | | | **1.447.856.984** |

Urusan Kewilayahan
Bidang Kecamatan
**SKPD : Kecamatan Lambu Kibang**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | | | **Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunannya usulan Program Pembangunan Kecamatan | Kec. Lambu Kibang | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji Tunjangan ASN | Kec. Lambu Kibang | 1 Tahun | 979.943.656 | APBD | | 100% | 1.077.938.022 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Lambu Kibang | 12 Bln | 30.960.000 | APBD | | 100% | 34.056.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Meningkatkan Kualitas Perlayanan Kepada Masyarakat | Kec. Lambu Kibang | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penengan Bangunan kantor | Kec. Lambu Kibang | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Lambu Kibang | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Kec. Lambu Kibang | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makan dan Minuman | Kec. Lambu Kibang | 1 Tahun | 45.408.000 | APBD | | 100% | 49.948.800 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Kec. Lambu Kibang | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | Kec. Lambu Kibang | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Lambu Kibang | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Lambu Kibang | 1 | Tahun | 8.400.000 | APBD | | 100% | 9.240.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | Kec. Lambu Kibang | 1 | Tahun | 124.800.000 | APBD | | 100% | 137.280.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Lambu Kibang | 1 | Tahun | 6.000.000 | APBD | | 100% | 6.600.000 |
| 7 | 01 | 02 | | | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan efektifitas kecamatan | Kec. Lambu Kibang | 12 | Bln | 40.000.000 | APBD | | 100% | 44.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 06 | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | **Fasilitas, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Terselenggarannya pembinaan dan Fasilitas Keuangan Tiyuh | Kec. Lambu Kibang | 12 | Bln | 44.432.000 | APBD | | 100% | 48.875.200 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Lambu Kibang | 1 | Tahun | 20.000.000 | APBD | | 100% | 22.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **1.299.943.656** | | | | **1.429.938.022** |

Urusan Kewilayahan
Bidang Kecamatan
**SKPD : Kecamatan Tumijajar**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | | 12 | Bln | 1.647.641.130 | APBD | | | 1.507.573.930 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaanpenatausahaan dan perlengkapa/verifikasi keuangan SKPD | Terbayarnya honor pengelolaan keuangan | Kecamatan Tumijajar | 1 | tahun | 43.680.000 | APBD | | | 48.048.000,00 |
| 7 | 01 | 02 | | | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan efektifitas kecamatan | Kecamatan Tumijajar | 1 | Tahun | 40.000.000 | APBD | | 100% | 44.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | | | - |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | **Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa** | | | | | | | | | - |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa | Fasilitas tim asistensi alokasi dana tiyuh | Kecamatan Tumijajar | 1 | keg | 34.880.000 | APBD | | | 38.368.000,00 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan parsipatif | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Kecamatan Tumijajar | 1 | Tahun | 20.000.000 | APBD | | | 22.000.000,00 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 02 | | | **Program peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur** | | | | | | | | - |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan Tumijajar | 1 | Tahun | 455.000.000 | APBD | | 500.500.000,00 |
| 7 | 01 | 01 | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota** | | | | | | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Tersusunnya Dokumen perencanaan dan laporan berkala | Kecamatan Tumijajar | | | - | APBD | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | | | | | | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut | Terpenuhinya pakaian dinas pegawai perlengkapannya | Kecamatan Tumijajar | | | - | APBD | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi umum perangkata daerah** | | | | | | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Boklam dan peralatan listrik | Kecamatan Tumijajar | | | - | APBD | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya ATK | Kecamatan Tumijajar | | | - | APBD | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya makanan dan minuman pegawai | Kecamatan Tumijajar | 12 | Bln | 42.240.000 | APBD | | 46.464.000,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang cetakan dan potocopy | Kecamatan Tumijajar | | | - | APBD | | - |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | | | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Tersedianya jaringan wifi dan listrik | Kecamatan Tumijajar | 1 | tahun | 11.400.000 | APBD | | 12.540.000,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Tersedianya jasa pelayanan kantor serta perlengkapan kendaraan kantor | Kecamatan Tumijajar | 12 | Bln | 124.800.000 | APBD | | 137.280.000,00 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | | | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Tumijajar | 1 | Tahun | 3.000.000 | APBD | | 100% | 3.300.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksanannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Tumijajar | | | - | APBD | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan Linnya | Terlaksanannya Rehab Kantor | Kecamatan Tumijajar | | | - | APBD | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **2.422.641.130** | | | | **2.664.905.243** |

Urusan Kewilayahan
Bidang Kecamatan
**SKPD : Kecamatan Pagar Dewa**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | | | **Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunannya usulan Program Pembangunan Kecamatan | Kec. Pagar Dewa | | - | | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gajih dan Tunjangan ASN | Kec. Pagar Dewa | 100 % | 796.427.776 | APBD | | | 876.070.554 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Lambu Kibang | 12 Bln | 28.290.000 | APBD | | 100% | 31.119.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Meningkatkan Kualitas Perlayanan Kepada Masyarakat | Kec. Pagar Dewa | | - | APBD | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Meningkatkan Perlayanan Administrasi Perkantoran Yang Dibutuhkan | | | | | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penengan Bangunan kantor | Kec. Pagar Dewa | | - | APBD | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Pagar Dewa | | - | APBD | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Kec. Lambu Kibang | | - | APBD | | 100% | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makan dan Minuman | Kec. Pagar Dewa | 12 | Bln | 47.520.000 | APBD | | | 52.272.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Kec. Pagar Dewa | | | - | APBD | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | Kec. Pagar Dewa | | | - | APBD | | | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Lambu Kibang | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Pagar Dewa | 12 | Bln | 5.040.000 | APBD | | | 5.544.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | Kec. Pagar Dewa | 12 | Bln | 112.966.000 | APBD | | | 124.262.600 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Pagar Dewa | 12 | Bln | 33.254.000 | APBD | | 100% | 36.579.400 |
| 7 | 01 | 02 | | | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan efektifitas kecamatan | Kec. Pagar Dewa | 1 | Tahun | 40.000.000 | APBD | | 100% | 44.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | | - |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | **Fasilitas, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | | | - |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Terselenggarannya pembinaan dan Fasilitas Keuangan Tiyuh | Kec. Pagar Dewa | 1 | Keg | 32.930.000 | APBD | | | 36.223.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Pagar Dewa | 12 | Bln | 20.000.000 | APBD | | | 22.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **1.116.427.776** | | | | **1.228.070.554** |

Urusan Kewilayahan
Bidang Kecamatan
**SKPD : Kecamatan Batu Putih**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | | | **Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunannya usulan Program Pembangunan Kecamatan | Kec. Batu Putih | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji Tunjangan ASN | Kec. Batu Putih | 12 | Bln | 842.452.421 | APBD | | 100% | 926.697.663 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Batu Putih | 1 | Tahun | 24.960.000 | APBD | | 100% | 27.456.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Meningkatkan Kualitas Perlayanan Kepada Masyarakat | Kec. Batu Putih | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penengan Bangunan kantor | Kec. Batu Putih | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Batu Putih | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Kec. Batu Putih | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makan dan Minuman | Kec. Batu Putih | 12 | Bln | 26.984.000 | APBD | | 100% | 29.682.400 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Kec. Batu Putih | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | Kec. Batu Putih | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Batu Putih | | | - | APBD | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Batu Putih | 12 | Bln | 3.000.000 | APBD | | 100% | 3.300.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | Kec. Batu Putih | 12 | Bln | 118.766.000 | APBD | | 100% | 130.642.600 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya, Biaya Pemelihraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Batu Putih | 12 | Bln | 28.498.800 | APBD | | 100% | 31.348.680 |
| 7 | 01 | 02 | | | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Program PATEN dan Penanganan Covid tingkat Kecamatan | Kec. Batu Putih | 1 | Tahun | 35.800.000 | APBD | | 100% | 39.380.000 |

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Jml | Sat | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | .(10) |
| 7 | 01 | 06 | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | **Fasilitas, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Terselenggarannya pembinaan dan Fasilitas Keuangan Tiyuh | Kec. Batu Putih | 12 | Bln | 63.587.000 | APBD | | 100% | 69.945.700 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Batu Putih | 1 | Keg | 18.404.000 | APBD | | 100% | 20.244.400 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | **1.162.452.221** | | | | **1.278.697.443** |

# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

## 6.1. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarustamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Tulang Bawang Barat,

serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerjautama (key performance indicators) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan;
4. terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci untuk target indikator kinerja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada table 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021-2022

| No. | Aspek/Fokus/BidangUrusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Target | |
|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 |
| A | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | |
| 1 | LajuPertumbuhanEkonomi | 4.4 | 4,4 - 4,7 |
| 2 | PDRB ADHB | 12.130,96 | 12.999,14 |
| | PDRB ADHK | 8.034,82 | 8.400,67 |
| 3 | IPM ( Indeks Pembangunan Manusia ) | 66,27 | 66,5 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 2,8 | 2,7 |
| 5 | Gini Rasio | 0,27 | 0,25 |
| 6 | Inflasi | 2,21 | 3,0 – 3,1 |
| 7 | Tingkat Kemiskinan | 7,24 | 7,18 |
| B | **Aspek Daya Saing Daerah** | | |
| 1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | 108,33 | 110 |
| C | **Aspek Pelayanan Umum** | | |
| 1 | IPG ( Indeks Pemberdayaan Gender ) | 63,17 | 63,95 |
| 2 | Nilai SAKIP | B | B |
| 3 | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | 80 | 85 |
| 4 | IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) | 77 | 80 |
| 5 | Nilai LPPD | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
| 6 | Opini BPK | WTP | WTP |
| 7 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 74 | 75 |
| 8 | Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap | 46 | 47 |

*Sumber : RPJMD Kabupaten TulangBawang Barat 2017 – 2022*

## 6.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indicator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indicator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Adapun untuk target Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci terdapat dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Tulang Bawang Barat 2021 - 2022

| No | Sasaran | IndikatorKinerja | Target | | Urusan | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | | |
| 1 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. | Harapan lama sekolah | 12,32 | 12,51 | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | Angka rata – rata lama sekolah | 6,91 | 6,93 | | |
| 2 | Menigkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka harapan hidup (AHH) | 69,87 | 70,00 | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 3 | Penurunan pengangguran | TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%) | 2,8 | 2,7 | Ketenaga kerjaan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 4 | Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan serta terpenuhinya hak – hak anak | IPG | 63,17 | 63,95 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Nilai skor kabupaten layak anak | 600 | 650 | | |
| 5 | Meningkatnya PMKS yang mandiri | Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menjadi mandiri | 14,62 | 15,00 | Sosial | Dinas Sosial |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan | Jumlah pemuda berprestasi | 90 | 90 | Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata |
| 7 | Meningkatnya prestasi olahraga | Jumlah cabang olahraga yang berprestasi | 6 | 7 | | |
| 8 | Meningaktnya kontribusi sector pertanian dan perikanan | Laju Pertumbuhan PDRB sector pertanian | 3,80 | 4,00 | Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | Nilai tukar petani (NTP) | 108,33 | 110,00 | Pertanian | Dinas Pertanian |
| 9 | Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan | PDRB sektor industripengolahan | 30.00 | 30.30 | Perindustrian | Dinas Koperindag |
| 10 | Meningkatnya investasi | Nilai investasi | 183.408. 500.000 | 201.749. 350.000 | Invetasi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 11 | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan | PDRB sector perdagangan | 11,72 | 12,00 | Perdagangan | Dinas Koperindag |
| 12 | jumlah Aset koperasi (juta rupiah) | Jumlah asset koperasi (juta) | 20.000 | 21.500 | Koperasi | Dinas Koperindag |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase kenaikan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah | 2 % | 2 % | Perindustrian | Dinas Koperindag |
| 13 | Meningkatnya sector pariwisata | Pendapatan sektor pariwisata | 120 Juta | 150 Juta | Pariwisata | Dinas Pemuda OLahraga dan Pariwisata |
| | | Jumlah kunjungan wisatawan domistik | 5000 | 6000 | | |
| 14 | Meningkatnya ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap | Persentase panjang jalan dengan konsisi mantap | 46 | 47 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Persentase jembatan dalam kondisi mantap | 50 | 55 | | |
| 15 | Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi dalam kondisi mantap dan berfungsi | Persentase jaringan irigasi yang baik | 40% | 45% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 16 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air minum | Persentase tiyuh yang dialiri air bersih | 85 | 90 | | |
| 17 | Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata | Persentase tiyuh yang tersambung jaringan telekomunikasi | 88 | 90 | Komunikasi dan Informatika | Dinas Kumunikasi dan Informasi |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 74 | 75 | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| 19 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan Transparan | Indeks RB | 80 | 85 | Administrasi Pemerintah | Sekretariat Daerah BagianOrganisasi |
| | | Nilai SAKIP | B | BB | | Sekretariat Daerah BagianOrganisasi& BAPPEDA |
| | | IKM | 77 | 80 | | BAPPEDA |
| | | Sekor LPPD | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan |
| | | Opini BPK | WTP | WTP | | BPKAD |
| 20 | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman | Persentase tiyuh rawan kriminal | 4,05 | 4,00 | Ketentraman, Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat | Dinas Satuan Pol PP dan Badang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah |
| | | Indeks desa membangun | 0,6323 | 0,65 | Pemberdayaan masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh |
| 21 | Meningkatnya pelestarian warisan budaya | Jumlah asset budaya yang dilestarikan | 6 | 6 | Kebudayaan | Dinas Pemuda OLahraga dan Pariwisata |

Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2022 pada arah kebijakan pembangunan bidang urusan untuk menjamin sinegritas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar | Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum | 45% | |
| | | Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum | 25% | |
| 2 | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun dalam pendidikan usia dini | 100% | |
| | | Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 15 tahun dalam pendidikan dasar | 100% | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan | 100% | |

2. Urusan Kesehatan

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | 1:1000 Rasio Penduduk | |
| | | Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi | 100% | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 2 | TerpenuhinyaStandarPelayananMinimal (SPM)BidangKesehatan | 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.<br>2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan.<br>3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>4. Pelayanan Kesehatan Balita<br>5. Pelayanan Kesehatanpada Usia PendidikanDasar<br>6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif<br>7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia<br>8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi<br>9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus<br>10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa(ODGJ)Berat<br>11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis<br>12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemah kandayatahan tubuh manusia (HumanImmunodeficiency Virus) | 100% | |
| 3 | Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Angka kematian ibu (AKI)(per 100.000 kelahiran hidup | 90/100.000 | |
| | | Penurunan jumlah kematian | 15% | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ibu (AKI) per tahun | | |
| | | Persentase persalinan difasilitasi Pelayanan kesehatan | 100% | |
| | | Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita | 15% | |
| | | Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen) | 7,5 | |
| | | Insidensi TB per100.000 Penduduk | 231/100.000 | |
| | | Insidensi HIVper 1.000 penduduk yang tidak rerinfeki HIV | 0,19 | |
| | | Temuan kasus TB baru Menggunakan indikator SPM (terdugaTB) | 90% | |
| | | *Treatmentcoverage* pada Pasien TB | 90% | |
| | | Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia12-23 bulan | 71% | |
| | | Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuais tandar | 59% | |
| | | Persentase merokok Penduduk usia10-18 tahun | 8,9% | |
| | | Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) | 40% | |
| | | Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi,kesehatan,dll) | 50% | |

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Simber Daya Air | Persentase Luas Sawah Beririgasi | 46,88% | |
| | | Luas Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Daerah Yang Dibangun | 3.444,10 Ha | |
| | | Luas Jaringan Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Daerah yang direhabilitasi | 245,33 Ha | |
| | | Panjang Infrastruktur Pengendali Banjir Wilayah Sungai Kewenangan Daerah yang Dibangun | 0 | |
| 2 | Tersedianya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak | 65,00 | |
| | | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | 17,01 | |
| | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman | 17,01 | |
| | | Persentase PDAM dengan kinerja sehat | 0 | |
| | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) Layak dan aman | 39,00 | |
| | | Persentase angka BABS di tempat terbuka | 90,00 | |
| | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan | 25,00 | |
| 3 | Terwujudnya konektivitas Jalan | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota | 67% | |
| | | Pembangunan jalan daerah mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Tertular dan terdepan) | 0 | |
| 4 | Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang | Penyelesaian materi teknis dari bantuan teknis RDTR | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Pelaksanaan dan pendampingan persetuuan substansi Teknis RTR | 1 Materi Teknis | |
| | | Penyelesaian materi teknis dari bimbingan teknis RTRW | 1 Materi Teknis | |
| | | Penyelesaian materi teknis dari bimbingan teknis RDTR | 8 Materi Teknis | |
| 5 | Terciptanya pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai | jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatn ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS di luar kawasan hutan) | 3444,10 Ha | |
| | | pelaksanaan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SDEW (DAS di luar kawasan hutan) | 3444,10 Ha | |
| 6 | Terciptanya kepatuhan pemanfaatan ruang pada sawah yang terlindungi | Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah | 3444,10 Ha | |
| | | pelaksanaan fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah | 3444,10 Ha | |

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni. | 100 % | |
| | | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. | 100 % | |
| 2 | Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani | Luas kawasana permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya jumlah rumah layak huni | Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni) | 130 Unit | |
| 4 | Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan pemuliman | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU | 0 | |

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | MeningkatnyapelayananTrantibum yang sesuaistandar | PersentasegangguanTrantibum yang dapatdiselesaikan | 100% | |
| | | PersentasePerdadanPerkada yang ditegakkan | 75% | |
| 2 | Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana | Persentase Penanganan Pra bencana | 100% | |
| | | Persentase Pendampingan Penanganan tanggap darurat bencana | 100% | |
| | | Persentase Penanganan pasca bencana | 100% | |
| | | Persentase Penyelesaian dokumen Kebencanaan samapai dengan dinyatakan sah / legal | 100% | |
| 3 | Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar | Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | 100% | |
| | | Persentase pembentukan relawanpemadam kebakaran di desa / kelurahan | 50% | |
| | | Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | 50% | |

6. Urusan Sosial

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tersedianya Data Fakir Miskin | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 90% | |
| | | Peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM) | 175 orang | |
| | | Peningkatan Kapasitas bagi tenaga kesehatan sosial kecamatan (TKSK) | 9 orang | |
| | | Jumlah Layanan data dan pengaduan yang dimiliki | 100% | |
| 2 | penguatan pelaksanaan perlindungan sosial | Penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan | 5 Badan Usaha | |
| | | Bantuan sosial ekonomi produktif bagi fakir miskin | 100 KPM | |
| | | keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat | 100 KPM | |
| | | peningkatan kapasitan pendsmping PKH | 48 orang | |
| | | peningkatan kapasitan pendsmping PKH | 48 orang | |
| | | Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos | 20 lembaga | |
| | | Peningkatan kopetensi dan profesionalisme SDM Kesos | 9 orang | |
| 3 | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial | Jumlah korban bencana alam yang mendapat pemenuhan kebutuhab dasar | 50 jiwa | |
| | | Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi | 25 kelompok masyarakat | |
| | | Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana alam yang mendapatkan pencegahan konflik sosial | 5 kelompok masyarakat | |
| | | Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan | 1000 orang | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | bencana alam yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial | | |
| | | Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan | 1 orang | |
| | | persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | |
| | | Presentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | |
| | | Presentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | |
| | | Presentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | |

7. Urusan Tenaga Kerja

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja. | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB.LKS,Bipartit,Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan. | 80 | |
| 2 | Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang di Tempatkan dan di Berdayakan. | Jumlah Tenaga Kerja yang di tempatkan di dalam Negeri. | 98 | |
| 3 | Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja. | Jumlah Pekerja yang Meningkat Produktivitasnya Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri. | 100 | |

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | 100% | |
| | | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 95% | |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 91% | |
| 2 | Meningkatnya Pemenuhan Hak dan perlindungan anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 80% | |
| | | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 95% | |

9. Urusan Pangan

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri | Persentase cadangan pangan masyarakat | 7,8% | |
| | | Persentase daerah rentan rawan pangan | 20% | |
| | | Skor pola pangan harapan | 86,2% | |
| 2 | Terjaminya keamanan dan mutu pangan strategis nasional | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | 75% | |

10. Urusan Pertanahan

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terpenuhinya inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah | Jumlah kepala Keluarga penerima akses reforma agraria | 0 | |
| | | Jumlah bidang tanah yang di redistribusi | 0 | |
| 2 | Tersedianya tanah untuk kepentingan umum | Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya | 22,50 Ha | |

11. Urusan Lingkungan Hidup

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup | Indeks kualitas lingkungan hidup ((IKLH) | 60 poin | |
| 2 | Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kigiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | 15 lembaga | |
| 3 | Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota, meliputi :<br>1. Jumlah pengurangan timbunan sampah<br>2. Jumlah penanganan timbunan sampah | <br><br>36,97%<br><br>8% | |

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk | Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 Tahun | 100 % | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun | 98 % | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dan peristiwa kematian yang dilaporkan | 100 % | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan | 100 % | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan | 100 % | |
| | | Pemanfaatan data kependudukan | 80 % | |

13. Urusan Pemberdayaan Masyaraqkat dan Desa

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien | Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dan tata kelola pemdes. | 1854 orang | |
| | | Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar | 618 Lembaga | |
| | | Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar | 6 Sistem Pelayanan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Berkembangnya Status Pembagunan desa | Jumlah Desa Mandiri | 5 Tiyuh | |
| | | Jumlah Desa Berkembang | 68 Tiyuh | |
| | | Jumlah Desa Tertinggal | 0 | |
| 3 | Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa) | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang | 20 BUMT | |

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya indeks pembangunan keluarga | indeks pembangunan keluarga (iBangga) | 50,3 | |
| 2 | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana | Angka Prevalensi Kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) | 73,01% | |
| | | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) | 11,11% | |

15. Urusan Perhubungan

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan publik sektor transportasi | 75,00 | |
| | | On Time Performance Layanan Transportasi | 80% | |
| 2 | Terwujudnya Konektivitas Nasional | Rasio Konektifitas Nasional | 0 | |
| 3 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu keberangkatan | 12,50 % | |

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tersedianya Infrastruktur Digital | Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah | 30% | |
| 2 | Terlaksananya Layanan Pemerintah Secara Digital | Persentase Layanan Publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | 25% | |
| | | Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan | 25% | |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi | Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital | 10% | |
| | | Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/ Replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan | 0,41% | |
| 4 | Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital | Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah | 3 orang | |
| | | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah | 25% | |
| 5 | Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah | Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah (tema : protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi | 50% | |
| | | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah | 30% | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/Kota sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik | 50% | |
| | | Persentase mitra strategis pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah | 50% | |

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terwujudnya koperasi yang modern | Meningkatnya koperasi yg berkualitas | 50% | |
| 2 | Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global | Meningkatnya Usaha Kecil yg menjadi wirausaha | 50% | |

18. Urusan Penanaman Modal

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tercapainya Realisasi Penanaman Modal | Tercapainya Realisasi Penanaman Modal | Rp 201.749.350.000 | |

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Partisipasi Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 60% | |
| 2 | Meningkatnya Pemuda yang Berwirausaha | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 70% | |
| 3 | Meningkatnya Prestasi Olahraga Nasional dan Internasional | Peningkatan Prestasi Olahraga | 2 Medali Emas, 3 Medali Perak, 3 Medali Perunggu | |

20. Urusan Statistik

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tersedianya Data Statistik Dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 30% | |
| | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 100% | |

21. Urusan Persandian

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Menguatnya Keamanan Siber Lingkungan Pemerintah Daerah | Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D | 2 Orang | |
| | | Jumlah CSIRT yang dibentuk disektor pemerintah daerah | 2 Kecamatan | |
| | | Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 2 Orang | |

22. Urusan Kebudayaan

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | 10% | |
| | | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dilindungi | 463 Unit | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | 20% | |
| | | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan | 250 Unit | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | 1% | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang | 5% | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | mengunjungi peninggalan sejarah | | |
| | | Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) | 150 Unit | |
| | | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK) | 100 Unit | |
| | | Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya | 15 Orang | |
| | | Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi | 15 Orang | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | 20% | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | 5% | |
| | | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) | 0,10% | |
| | | Persentase penduduk usia 10 | 1% | |

23. Urusan Perpustakaan

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| 1 | Literasi Masyarakat meningkat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 10 (Index) | |
| 2 | Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 60,05 (Nilai) | |

24. Urusan Kearsipan

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi | Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi | 50.000 arsip | |
| 2 | Nilai Budaya dan Kearifan lokal | Jumlah pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa | 100.000 Orang | |

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing | Produksi Perikanan Tangkap | 1.106,00 Ton | |
| | | Produksi Perikanan Budidaya | 1.508,98 Ton | |

26. Urusan Pariwisata

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional | Nilai Tambah Ekonomi Kreatif | 93.200.000.000 | |
| | | Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara | 17.300.000 - 18.600.000 | |
| | | Kontribusi PDB Pariwisata | 0,3% | |

27. Urusan Pertanian

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya produktifitas pertanian | Persentase peningkatan produktifitas tanaman pangan ( padi dan jagung) | 5% | |
| | | Persentase peningkatan produktifitas tanaman hortikultura ( cabai dan bawang merah) | 5% | |
| | | Persentase peningkatan produktifitas perkebunan | 3,28% | |
| 2 | Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman | Persentase luas areal pengendalian dan penangulangan bencana OPT | Tanaman pangan 95%, Hortikultura 90%, Perkebunan 80% | |

28. Urusan Perdagangan

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | 0 | |
| 2 | Terwujudnya iklim usaha yang kondusif | Tertib usaha | 55 - 75 % | |
| 3 | Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen | Persentase barang beredar yang diawasai yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 40% | |
| 4 | Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga,mutu, dan tempat | Persentase kinerja realisasipupuk | 50% | |
| 5 | Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | 50-75% | |
| 6 | Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen | Persentase penanganan pengaduan konsumen | 70% | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Terwujudnya kecukupan bahan untuk masyarakat | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | 3% | |
| 8 | Terwujudnya stabilitasi harga dan persediaan pasokan | Inflasi pangan bergejolak | 1% | |

29. Urusan Perindustrian

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tercapainya peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas | Persentase pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan non migas | 5% | |
| 2 | Meningkatnya Kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB | Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB | 28,65% | |
| 3 | Tercapainya pertumbuhan nilai ekspor produk industri pengolahan non migas | Nilai ekspor produk industri pengolahan non migas (USD Miliar) | 0 | |
| 4 | Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas | Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas | 3300 | |
| 5 | Terwujudnya pertumbuhan nilai investasi sektor industri pengolahan non migas | Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (Rp Trilyun) | 0,2 trilyun | |

30. Urusan Transmigrasi

| No. | Kinerja | Indikator Kabupaten | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi | Nilai rata- rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi | 70% | |

## BAB VII
## PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 merupakan tahun kelima perode RPJMD 2017-2022, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 merupakan bagian penting dalam rangka pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 dan RKPD Tahun 2022 ini merupakan bagian dari tahap awal penyusunan APBD Tahun 2022. Beberapa data dan analisis pada dokumen ini masih bersifat sementara dan akan dilengkapi serta disempurnakan seiring dengan berjalannya tahapan menuju tersusunnya RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita – cita masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Badan Perencanaan Kabupaten Tulang Bawang Barat berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2022 ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan KUA dan PPAS APBD 2022.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H.
NIP. 19780522 201001 1 009